



**M. YAMIN**  
BUPATI BARITO TIMUR

**ADI MULA NAKALELU**  
WAKIL BUPATI BARITO TIMUR

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2025  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

# RPJMD 2025-2029 KABUPATEN BARITO TIMUR





BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mempunyai peran penting dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan daerah secara bertahap guna mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan daerah serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih periode Tahun 2025-2029, diperlukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, Kepala Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

dan

BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Barito Timur.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025-2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025-2029.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan daerah yang berdampak signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
17. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama, guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah secara berkesinambungan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
  - a. menjabarkan Visi, Misi dan program prioritas pembangunan Daerah jangka menengah;
  - b. menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
  - c. sebagai acuan dalam penyusunan RKPD, Renstra-Perangkat Daerah, dan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - d. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
  - e. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
  - f. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
  - g. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
  - h. sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah.

## BAB II

### RPJMD

#### Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, Strategi, arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
- (3) Visi pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan Barito Timur Sejahtera, Elegan, Cigih, Amanah, dan Harmonis menuju Cumi Jari Janang Kalalawah.
- (4) Misi pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, meliputi
  - a. mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi Daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal;
  - b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), berintegritas serta layanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
  - c. meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan;
  - d. optimalisasi sumber daya Daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
  - e. membangun transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD meliputi:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
  - c. BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
  - d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH;
  - e. BAB V : PENUTUP;

- (2) Isi dan rincian penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebijakan perencanaan RPJMD; dan
  - pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebijakan perencanaan RPJMD;
  - pelaksanaan RPJMD; dan
  - hasil RPJMD.
- (4) Pengendalian dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV

#### PERUBAHAN RPJMD

##### Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
- hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - terjadi perubahan yang mendasar;
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, perubahan kebijakan nasional atau perubahan kebijakan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah,  
(5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 20 Agustus 2025



Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 20 Agustus 2025

~~PL~~ SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

MISNOHARTAKU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 2

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH:( 02, 48/2025 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memegang peranan strategis dan fundamental dalam mengarahkan dan memandu implementasi kebijakan pembangunan di tingkat daerah. RPJMD berfungsi sebagai pedoman bertahap untuk menentukan prioritas pembangunan yang akan dijalankan selama periode lima tahun. Hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila sebagai dasar negara dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, RPJMD adalah instrumen krusial dalam mewujudkan tujuan nasional di tingkat lokal.

Kabupaten Barito Timur telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode tahun 2025-2045. RPJPD ini merupakan visi jangka panjang pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD yang akan disusun harus sepenuhnya selaras dan merupakan penjabaran lebih rinci dari RPJPD tersebut. RPJMD akan mengoperasionalkan strategi dan arah kebijakan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD serta mempedomani RPJMN serta RPJMD Provinsi, sehingga memastikan kesinambungan dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menjamin bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan jangka panjang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah memiliki kewajiban legal untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya RPJMD sebagai landasan hukum dan operasional bagi pelaksanaan pembangunan daerah, serta memastikan adanya perencanaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Keterlambatan penetapan RPJMD dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dan berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diantaranya yaitu pentingnya RPJMD, keselarasan dengan RPJPD, RPJMN dan RPJMD Provinsi, serta kewajiban hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Perda ini akan menjadi dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Timur selama periode tersebut, serta menjamin akuntabilitas dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah. RPJMD yang diatur dalam Perda ini akan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 1**

**LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH TAHUN 2025-2029**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029**

## DAFTAR ISI

|                |   |       |
|----------------|---|-------|
| HALAMAN SAMPUL |   |       |
| DAFTAR ISI     | i   |       |
| DAFTAR TABEL   | ii  |       |
| DAFTAR GAMBAR  | iii   |       |
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN</b>  | I-1   |
| 1.1            | Latar Belakang  | I-1   |
| 1.2            | Dasar Hukum Penyusunan  | I-3   |
| 1.3            | Hubungan Antar Dokumen  | I-5   |
| 1.3.1          | Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Timur dengan RPJMN Tahun 2025-2029                            | I-7   |
| 1.3.2          | Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Timur dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 | I-9   |
| 1.3.3          | Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Timur dengan RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2045     | I-11  |
| 1.3.4          | Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Timur dengan RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034            | I-15  |
| 1.4            | Maksud dan Tujuan   | I-16  |
| 1.5            | Sistematika Dokumen   | I-16  |
| <b>BAB II</b>  | <b>GAMBARAN UMUM DAERAH</b>   | II-18 |
| 2.1            | Gambaran Umum Kondisi Daerah  | II-18 |
| 2.1.1          | Aspek Geografi dan Demografi  | II-18 |
|                | 1) Posisi dan Peran Strategis Daerah  | II-18 |
|                | 2) Potensi Sumber Daya Alam   | II-25 |
|                | 3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup  | II-32 |
|                | 4) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan   | II-32 |
|                | 5) Lingkungan Hidup Berkualitas   | II-35 |
|                | 6) Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim   | II-36 |
|                | 7) Demografi  | II-38 |
| 2.1.2          | Aspek Kesejahteraan Masyarakat  | II-43 |
|                | 1) Kesejahteraan Ekonomi  | II-43 |
|                | 2) Kesehatan untuk Semua  | II-47 |
|                | 3) Pendidikan Berkualitas dan Merata  | II-59 |
|                | 4) Perlindungan Sosial dan Adaptif  | II-63 |
|                | 5) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju   | II-63 |

|                |   |         |
|----------------|---|---------|
| 6)             | Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender,<br>dan Masyarakat Inklusif               | II-64   |
| 2.1.3          | Aspek Daya Saing Daerah   | II-65   |
| 1)             | Daya Saing Sumber Daya Manusia  | II-65   |
| 2)             | Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi   | II-65   |
| 3)             | Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru  | II-70   |
| 4)             | Tranformasi Digital   | II-71   |
| 5)             | Integrasi Ekonomi Domestik dan Global   | II-71   |
| 6)             | Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan<br>Ekonomi                      | II-72   |
| 7)             | Stabilitas Ekonomi Makro  | II-73   |
| 2.1.4          | Aspek Pelayanan Umum  | II-74   |
| 1)             | Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif                           | II-74   |
| 2)             | Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh,<br>dan Demokrasi Subtansial    | II-75   |
| 3)             | Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar                               | II-77   |
| 4)             | Kinerja setiap Urusan Pemerintahan Daerah   | II-77   |
| 2.2            | Gambaran Keuangan Daerah  | II-98   |
| 2.3            | Permasalahan dan Isu Strategis  | II-123  |
| <b>BAB III</b> | <b>VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN<br/>DAERAH</b>                   |         |
| 3.2            | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  | III-176 |
| 3.3            | Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas Daerah                                | III-190 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA<br/>PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b> |         |
| 4.1            | Program Perangkat Daerah  | VI-219  |
| 4.2            | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah   | VI-262  |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP</b>  |         |
| 5.1            | Kaidah Pelaksanaan  | V-296   |
| 5.2            | Skema Monitoring dan Evaluasi   | V-297   |

## DAFTAR TABEL

|            |   |       |
|------------|---|-------|
| Tabel 1.1  | Asta Cita Menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029  | I-7   |
| Tabel 1.2  | Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam dokumen RPJMN 2025-2029   | I-8   |
| Tabel 1.3  | Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029                            | I-8   |
| Tabel 1.4  | Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 | I-11  |
| Tabel 1.5  | Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2045     | I-15  |
| Tabel 2.1  | Kecamatan dan Ibu Kota Kecamatan Barito Timur Tahun 2025  | II-18 |
| Tabel 2.2  | Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2025  | II-19 |
| Tabel 2.3  | Ketinggian Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur  | II-20 |
| Tabel 2.4  | Statistik Klimatologi Kabupaten Barito Timur Tahun 2024   | II-23 |
| Tabel 2.5  | Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Barito Timur   | II-24 |
| Tabel 2.6  | Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur   | II-24 |
| Tabel 2.7  | Luas dan Produksi Tanaman Padi Sawah dan Padi Ladang di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024                               | II-26 |
| Tabel 2.8  | Luas dan Produksi Palawija di Kab Barito Timur Tahun 2024   | II-27 |
| Tabel 2.9  | Jenis dan Populasi Ternak di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024  | II-28 |
| Tabel 2.10 | Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024   | II-29 |
| Tabel 2.11 | Produksi Budidaya Ikan menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024   | II-30 |
| Tabel 2.12 | Daftar Produk Unggulan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024   | II-31 |
| Tabel 2.13 | Kemandirian Pangan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024  | II-32 |
| Tabel 2.14 | Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2024                                    | II-34 |
| Tabel 2.15 | Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024                         | II-34 |
| Tabel 2.16 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024  | II-35 |
| Tabel 2.17 | Perkembangan Parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024                   | II-35 |

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| Tabel 2.18 | Potensi Bencana Alam di Kabupaten Barito Timur   | II-37 |
| Tabel 2.19 | Kerentanan Bencana Alam di Kabupaten Barito Timur  | II-38 |
| Tabel 2.20 | Luas Wilayah, Persentase Penduduk Menurut Kecamatan, dan Penduduk Kabupaten Barito Timur Tahun 2024                  | II-39 |
| Tabel 2.21 | Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024   | II-40 |
| Tabel 2.22 | Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024                         | II-40 |
| Tabel 2.23 | Indikator Kependudukan Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024  | II-40 |
| Tabel 2.24 | Proyeksi Penduduk Barito Timur Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2029   | II-41 |
| Tabel 2.25 | Ringkasan Kondisi Demografi Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2045                           | II-41 |
| Tabel 2.26 | Ringkasan Kondisi Demografi Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029                           | II-42 |
| Tabel 2.27 | Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024  | II-44 |
| Tabel 2.28 | Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023-2024 | II-45 |
| Tabel 2.29 | Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024                             | II-47 |
| Tabel 2.30 | Target SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Barito Timur 2025-2029   | II-47 |
| Tabel 2.31 | Target UHH Kabupaten Barito Timur 2025-2029  | II-49 |
| Tabel 2.32 | Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024                                       | II-49 |
| Tabel 2.33 | Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024                                    | II-49 |
| Tabel 2.34 | Nama Puskesmas di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024  | II-50 |
| Tabel 2.35 | Status Kepesertaan JKN di Kabupaten Barito Timur   | II-50 |
| Tabel 2.36 | Capaian UHC Kabupaten Barito Timur   | II-51 |
| Tabel 2.37 | Fasilitas Layanan Kesehatan di Kabupaten Barito Timur  | II-52 |
| Tabel 2.38 | Ketersediaan Ambulance di Kabupaten Barito Timur   | II-56 |
| Tabel 2.39 | Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024  | II-59 |
| Tabel 2.40 | Jumlah Ibu Hamil dan Pelayanan Kesehatan terhadap pada Ibu Hamil   | II-59 |

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| Tabel 2.41 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024 (Orang)  | II-63 |
| Tabel 2.42 | Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024   | II-66 |
| Tabel 2.43 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (%) | II-67 |
| Tabel 2.44 | Rata-rata Pengeluaran Perkapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2024                            | II-68 |
| Tabel 2.45 | Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024                                      | II-68 |
| Tabel 2.46 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)       | II-69 |
| Tabel 2.47 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)  | II-70 |
| Tabel 2.48 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2022-2024 (%)          | II-78 |
| Tabel 2.49 | Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2024 (Km)   | II-80 |
| Tabel 2.50 | Perumahan Kumuh Kabupaten Barito Timur Tahun 2024  | II-80 |
| Tabel 2.51 | Capaian Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024  | II-80 |
| Tabel 2.52 | Komposisi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2023-2024 (Orang) | II-81 |
| Tabel 2.53 | Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2024  | II-81 |
| Tabel 2.54 | Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2024   | II-82 |
| Tabel 2.55 | Statistik Ketahanan Pangan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024   | II-82 |
| Tabel 2.56 | Capaian Urusan Pertanahan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024  | II-82 |
| Tabel 2.57 | Data BUMDes Per-Kecamatan di Kabupaten Barito Timur  | II-83 |
| Tabel 2.58 | Statistik Perhubungan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024  | II-91 |
| Tabel 2.59 | Persentase Penduduk Usia >5 Tahun Memiliki akses Internet Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (%)  | II-91 |
| Tabel 2.60 | Perkembangan Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024  | II-92 |

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| Tabel 2.61 | Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024  | II-92  |
| Tabel 2.62 | Statistik Perikanan Budi Daya Air Tawar di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2024                      | II-93  |
| Tabel 2.63 | Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024                    | II-93  |
| Tabel 2.64 | Statistik Perkebunan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024   | II-84  |
| Tabel 2.65 | Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi pada Industri Mikro dan Kecil Tahun 2024 | II-94  |
| Tabel 2.66 | Hasil Penilaian SAKIP Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2024   | II-96  |
| Tabel 2.67 | Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (%)                               | II-100 |
| Tabel 2.68 | Realisasi PAD Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (%)   | II-101 |
| Tabel 2.69 | Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (%)                                  | II-101 |
| Tabel 2.70 | Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (%)              | II-102 |
| Tabel 2.71 | Realisasi APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024  | II-104 |
| Tabel 2.72 | Neraca Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)                                     | II-106 |
| Tabel 2.73 | Rasio Lancar Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)                                      | II-110 |
| Tabel 2.74 | Rasio Hutang terhadap Ekuitas Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)                     | II-110 |
| Tabel 2.75 | Rasio Hutang Terhadap terhadap Total Aktiva Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)       | II-111 |
| Tabel 2.76 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024                             | II-112 |
| Tabel 2.77 | Analisis Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024                                | II-114 |
| Tabel 2.78 | SILPA Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Rupiah)  | II-115 |
| Tabel 2.79 | Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024                                      | II-115 |
| Tabel 2.80 | Proyeksi SILPA Kabupaten Barito Timur Tahun 2026-2030 (Rupiah)   | II-117 |
| Tabel 2.81 | Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2030                                     | II-118 |
| Tabel 2.82 | Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024            | II-121 |

|             |   |         |
|-------------|---|---------|
| Tabel 2.83  | Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2024 (Km)                                | II-125  |
| Tabel 2.84  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024                                    | II-126  |
| Tabel 2.85  | Perkembangan Parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024             | II-127  |
| Tabel 2.86  | Hasil Penilaian SAKIP Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2024  | II-127  |
| Tabel 2.87  | Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024   | II-128  |
| Tabel 2.88  | Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024                                    | II-129  |
| Tabel 2.89  | Asta Cita Misi Presiden dituangkan Menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029                               | II-133  |
| Tabel 2.90  | 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas dalam RPJMN 2025-2029  | II-135  |
| Tabel 2.91  | 8 (Delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) dalam RPJMN 2025-2029  | II-136  |
| Tabel 2.92  | Sasaran Utama Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045   | II-137  |
| Tabel 2.93  | Penjabaran Transformasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045                                    | II-137  |
| Tabel 2.94  | Periodesasi Target Pembangunan RPJPD  | II-150  |
| Tabel 2.95  | Rencana Struktur Ruang Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034   | II-154  |
| Tabel 2.96  | Rencana Pola Ruang Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034   | II-156  |
| Tabel 2.97  | Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034  | II-164  |
| Tabel 2.98  | Misi, Fokus, dan Arah Kebijakan   | II-167  |
| Tabel 2.99  | Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029  | II-171  |
| Tabel 2.100 | Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029  | II-171  |
| Tabel 2.101 | Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029   | II-172  |
| Tabel 2.102 | Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029  | II-172  |
| Tabel 2.103 | Kesimpulan Isu Strategis Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029  | II-175  |
| Tabel 3.1   | Keterkaitan RPJMD Kabupaten Barito Timur dengan Tahap I RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045                | III-181 |
| Tabel 3.2   | Keterkaitan antara Misi RPJMD Kabupaten Barito Timur dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 | III-182 |

|            |  |         |
|------------|--|---------|
| Tabel 3.3  | Keterkaitan antara RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, dan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029                   | III-183 |
| Tabel 3.4  | Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029  | III-185 |
| Tabel 3.5  | Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 | III-191 |
| Tabel 3.6  | Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029  | III-199 |
| Tabel 3.7  | Pembagian 3 (Tiga) Zona Kawasan Strategis di Provinsi Kalimantan Tengah  | III-201 |
| Tabel 3.8  | Indikator Pembangunan Makro Klaster Buntok   | III-202 |
| Tabel 3.9  | Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Perdagangan Karet di Kabupaten Barito Timur                       | III-203 |
| Tabel 3.10 | Program Prioritas RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029   | III-207 |
| Tabel 3.11 | Daftar Kegiatan Prioritas Utama di Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2030  | III-213 |
| Tabel 3.12 | 20 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029   | III-217 |
| Tabel 3.13 | Penetapan Indikator Kinerja 20 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2030                     | III-217 |
| Tabel 4.1  | Program Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2030  | IV-220  |
| Tabel 4.2  | Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2026   | IV-262  |
| Tabel 4.3  | Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2030   | IV-264  |
| Tabel 4.4  | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2030  | IV-266  |
| Tabel 5.1  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029   | V-297   |
| Tabel 5.2  | Forum Monitoring dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029   | V-298   |

## DAFTAR GAMBAR

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
| Gambar 1.1  | Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan   | I-6   |
| Gambar 2.1  | Peta Administrasi Kabupaten Barito Timur   | II-19 |
| Gambar 2.2  | Peta Topografi Wilayah Kabupaten Barito Timur  | II-20 |
| Gambar 2.3  | Peta Kemiringan Wilayah Kabupaten Barito Timur   | II-21 |
| Gambar 2.4  | Peta Tutupan Lahan Wilayah Kabupaten Barito Timur  | II-25 |
| Gambar 2.5  | Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024   | II-33 |
| Gambar 2.6  | Peta Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Barito Timur   | II-38 |
| Gambar 2.7  | Jumlah Penduduk di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Ribu Jiwa)  | II-39 |
| Gambar 2.8  | Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (%)   | II-43 |
| Gambar 2.9  | Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2024 (Rp)     | II-44 |
| Gambar 2.10 | Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Ribu Jiwa)   | II-45 |
| Gambar 2.11 | Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (%)   | II-45 |
| Gambar 2.12 | Perbandingan Indeks Gini Antara Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024                  | II-46 |
| Gambar 2.13 | Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 (%) | II-46 |
| Gambar 2.14 | Umur Harapan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024  | II-49 |
| Gambar 2.15 | Status Kepesertaan JKN-KIS Kabupaten Barito Timur  | II-51 |
| Gambar 2.16 | Capaian UHC Kabupaten Barito Timur   | II-51 |
| Gambar 2.17 | Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024   | II-52 |
| Gambar 2.18 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024  | II-62 |
| Gambar 2.19 | Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024 (%)  | II-66 |
| Gambar 2.20 | Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 (%) | II-67 |
| Gambar 2.21 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)                   | II-69 |

|             |  |         |
|-------------|--|---------|
| Gambar 2.22 | Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2024 (%)                 | II-78   |
| Gambar 2.23 | Rasio Guru-Sekolah di Kabupaten Barito Timur Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023                                      | II-79   |
| Gambar 2.24 | Rasio Murid-Guru Kabupaten Barito Timur Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023   | II-79   |
| Gambar 2.25 | Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Menggunakan KB di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 (%) | II-90   |
| Gambar 2.26 | Perkembangan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Rupiah)  | II-99   |
| Gambar 2.27 | Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024   | II-167  |
| Gambar 2.28 | Kata Kunci Rekomendasi Visi Kabupaten Barito Timur   | II-169  |
| Gambar 2.29 | Proporsi Ketercapaian Indikator TPB Kewenangan Kabupaten Barito Timur  | II-167  |
| Gambar 3.1  | Keterkaitan Antara Visi Dengan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029                 | III-181 |
| Gambar 3.2  | Tema Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029  | III-196 |
| Gambar 3.3  | Pengembangan Potensi pada Zona 3 (Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur)                   | III-202 |
| Gambar 3.4  | Peta Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Barito Timur  | III-205 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sendiri terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).

Meskipun terbagi berdasarkan jangka waktu, namun pada prinsipnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan yang koheren, yang mana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi acuan untuk dokumen lainnya. Kesatuan ini akan membuat target pembangunan Nasional, target pembangunan Provinsi dan target pembangunan Kabupaten/Kota dapat dicapai secara sinergis.

Secara keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun menggunakan beberapa pendekatan, baik pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik merupakan penjabaran dari agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, dan diskusi dengan para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang stakeholder terkait. Pelibatan stakeholder adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Terpilihnya **Bupati Kabupaten Barito Timur (M. Yamin) dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur (Adi Mula Nakalelo)** yang dilantik pada tanggal 10 Februari 2025 untuk masa bakti Tahun 2025-2030, dengan visi pembangunan "*Mewujudkan Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah dan Harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah*" (BARTIM SEGAH), akan menyelaraskan visi pembangunan Kepala Daerah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2045, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah. Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, akan menjamin keselarasan dan keterpaduan arah pembangunan melalui program-program pembangunan yang akan dilakukan.

Selain memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 juga disusun untuk menjawab isu-isu strategis yang muncul, serta sebagai perwujudan janji-janji politik Kepala Daerah. Selain itu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan instrumen untuk mengoptimalisasikan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, dengan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara lebih efektif dan efisien, dalam rangka menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029, meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1) Persiapan penyusunan RPJMD

Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim penyusun yang terdiri dari kelompok perumus dan kelompok pembahas, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber dan tim ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.

2) Penyusunan rancangan awal RPJMD

Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.

3) Penyusunan rancangan awal RPJMD

Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

4) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Kabupaten Barito Timur. Tujuan Musrenbang RPJMD untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Barito Timur menjadi rancangan akhir RPJMD Kabupaten Barito Timur.

5) Perumusan rancangan akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala OPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD.

6) Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD merupakan mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Barito Timur tahun 2025-2029.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

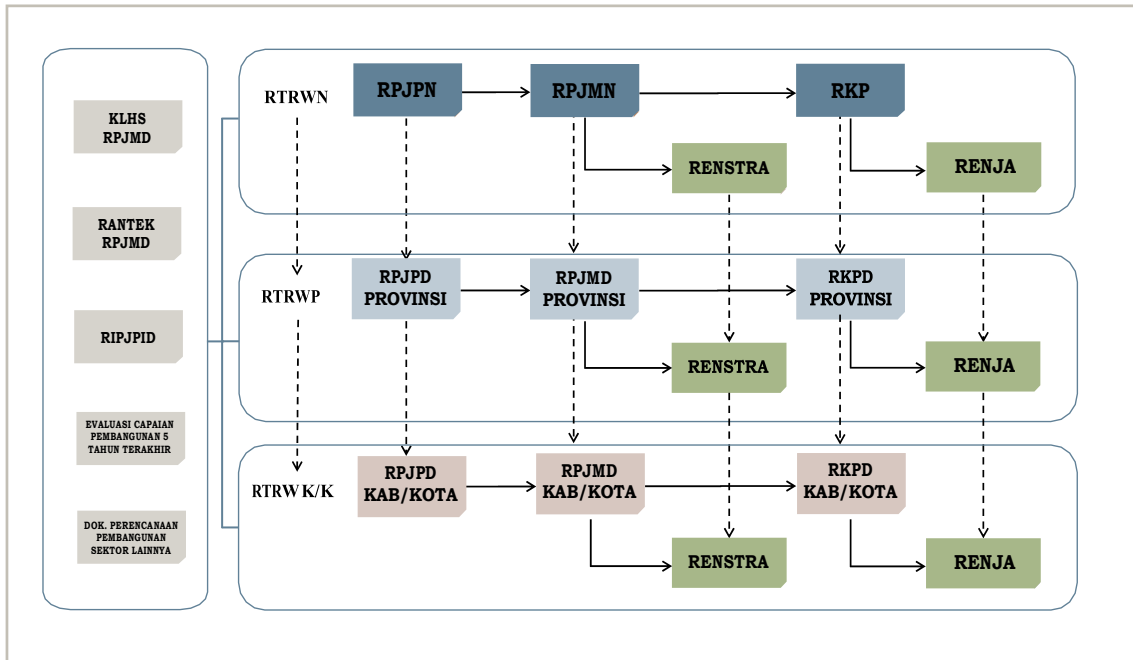
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 67);

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029, memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi. Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Oleh karena itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang bertujuan untuk mendukung harmonisasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan**



Sumber: Diolah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, 2025.

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pembangunan Kabupaten Barito Timur, dimana penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Timur dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, serta dengan memperhatikan RPJM Nasional serta memuat arah kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja, kebijakan umum dan program kewilayahan;
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 merupakan acuan bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 yang berisi rencana pembangunan lima tahunan merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode tahunan;
- 4) RTRW Kabupaten Barito Timur menjadi pedoman dalam rencana pemanfaatan ruang. Dalam hal ini antara RTRW dan RPJMD mempunyai kepentingan yang saling terkait, agar penyusunan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan daya dukung lingkungan dan pemanfaatan ruang. Dengan demikian, implementasi RPJMD didasarkan pada RTRW Kabupaten Barito Timur;
- 5) Dalam penyusunan rencana pembangunan yang terkait dengan proses penganggaran pada penyusunan RKPD harus melihat program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahapan perencanaan tahunan yang tercantum dalam matrik RPJMD Kabupaten Barito Timur;

- 6) Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN dengan memperhatikan capaian target nasional terhadap target daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan prioritas (ASTACITA) dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

### 1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Timur dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Hal penting didalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 adalah adanya keselarasan dengan dokumen RPJMN Tahun 2025-2029. Hal ini bertujuan agar terjadi sinkronisasi pembangunan antara nasional dengan daerah sekaligus memastikan bahwa arahan pembangunan yang dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan di Kabupaten Barito Utara sesuai dengan arahan Nasional sekaligus memperhatikan konteks pembangunan lokal. Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 telah disahkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Terdapat beberapa hal yang relevan kaitannya dengan pembangunan di Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum di dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 tersebut. Secara umum, pemerintah pusat mencanangkan adanya 8 prioritas nasional yang merupakan hasil pengejawantahan dari Asta Cita misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, yaitu:

**Tabel 1.1. Asta Cita Menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029**

| Asta Cita | Misi  |
|-----------|---|
| 1         | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).   |
| 2         | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.   |
| 3         | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. |
| 4         | Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.                          |
| 5         | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.  |
| 6         | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.   |
| 7         | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.  |
| 8         | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.   |

Sumber: Diolah dari RPJMN 2025-2029, 2025.

RPJMN Tahun 2025-2029 memberikan gambaran potensi perekonomian Kabupaten Barito Timur yang didorong melalui pengembangan superhub ekonomi Nusantara, Pembangunan IKN, pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), serta kebijakan hilirisasi. Secara lebih

rinci, RPJMN Tahun 2025-2029 kemudian memandatkan beberapa kawasan prioritas yang dibagi berdasarkan fungsinya. Kawasan-kawasan tersebut mencakup kawasan pertumbuhan untuk agro industri, kawasan komoditas unggulan untuk sentra perikanan, kawasan swasembada pangan, air, dan energi untuk Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), kawasan afirmasi untuk kawasan transmigrasi. Indikasi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 yang dimandatkan ke daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2. Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam dokumen RPJMN 2025-2029**

| No. | Proyek Strategis Nasional (PSN)   | Lokasi   |
|-----|---|--|
| 1   | Program Makan Bergizi Gratis (MBG)                                      | Nasional   |
| 2   | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas | Nasional   |
| 3   | Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul                          | Nasional   |
| 4   | Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota           | Nasional   |
| 5   | Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan <i>Food Estate</i>            | Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan |
| 6   | Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat                 | Nasional   |
| 7   | Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional                       | Nasional   |
| 8   | Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi                          | Nasional   |
| 9   | Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu                         | Nasional   |
| 10  | Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia   | Nasional   |
| 11  | Kawasan Industri Kumai Multi Energ                                      | Kalimantan Tengah                                  |
| 12  | Kawasan Industri Tabuk  | Kalimantan Tengah                                  |
| 13  | Kawasan Industri Rimau  | Kalimantan Tengah                                  |
| 14  | Pembangunan 3 Juta Rumah  | Nasional   |

Sumber: Diolah dari RPJMN 2025-2029, 2025.

**Tabel 1.3. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029**

| No. | RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029  | RPJMN Tahun 2025-2029  |
|-----|---|--|
| 1   | <b>Misi 1:</b> Mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. | <p><b>Misi 2:</b> Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.</p> <p><b>Misi 5:</b> Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.</p> <p><b>Misi 6:</b> Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.</p> |
| 2   | <b>Misi 2:</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>good and clean governance</i> ), berintegritas serta                       | <b>Misi 7:</b> Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.  |

| No. | RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029   | RPJMN Tahun 2025-2029   |
|-----|--|---|
|     | layanan publik yang berkualitas dan <i>responsive</i> terhadap kebutuhan masyarakat.   |   |
| 3   | <b>Misi 3:</b> Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. | <b>Misi 3:</b> Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.  |
| 4   | <b>Misi 4:</b> Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.    | <b>Misi 2:</b> Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.  |
| 5   | <b>Misi 5:</b> Membangun transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat.                             | <b>Misi 1:</b> Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).<br><b>Misi 4:</b> Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.<br><b>Misi 8:</b> Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. |

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2025.

### 1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Timur dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

Hal penting lainnya didalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 adalah adanya keselarasan dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029. Hal ini bertujuan agar terjadi sinkronisasi pembangunan antara Provinsi dengan Kabupaten sekaligus memastikan bahwa arahan pembangunan yang dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan di Kabupaten Barito Utara sesuai dengan arahan Nasional, Provinsi, dan sekaligus memperhatikan konteks pembangunan lokal.

Pembangunan di Kalimantan Tengah ditunjukkan untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah yang Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan digambarkan melalui lima sasaran utama yaitu: Peningkatan Pendapatan Per Kapita, Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang, Kepemimpinan Berintegritas, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, dan Penurunan Emisi GRK Menuju *Net Zero Emission*. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029, sebagai berikut: “*Mengangkat Harkat dan Martabat Masyarakat Dayak Khususnya dan Masyarakat Kalimantan Tengah Umumnya (Manggatang Utus), Dengan Spirit Kearifan Lokal dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat Untuk*

*Menyambut Indonesia Emas 2045*”. Dalam upaya mengoperasionalkan visi tersebut, maka dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Provinsi Kalimantan Tengah pada masa yang akan datang maka dirumuskan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal;
- 2) Pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui Pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadatn sumber daya alam lokal;
- 3) Membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan;
- 4) Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial;
- 5) Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan social masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan dan program untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

Untuk melaksanakan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, telah disusun program prioritas dari Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yaitu Program Prioritas HUMA BETANG yang terdiri dari : 1) Kalteng Bermartabat; 2) Betang Maju; 3) Betang Makmur; 4) Betang Cerdas; 5) Betang Sehat; dan 6) Betang Harmoni. Hal ini sejalan dengan program-program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur yang disusun didalam dokumen RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029. Hal ini adalah bentuk sinkronisasi setiap kebijakan pembangunan daerah, dengan adanya kesesuaian dan konsistensi antara kebijakan pembangunan Kabupaten dengan Provinsi selaku perpanjangan tangan dari Pemerintahan Pusat.

**Tabel 1.4. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029**

| No. | RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029   | RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029   |
|-----|--|--|
| 1   | <b>Misi 1:</b> Mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.  | <b>Misi 1:</b> Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal.  |
| 2   | <b>Misi 2:</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>good and clean governance</i> ), berintegritas serta layanan publik yang berkualitas dan <i>responsive</i> terhadap kebutuhan masyarakat. | <b>Misi 4:</b> Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial.<br><br><b>Misi 5:</b> Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan dan program untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. |
| 3   | <b>Misi 3:</b> Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur fisik,  | <b>Misi 3:</b> Membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan  |

| No. | RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029  | RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029   |
|-----|---|--|
|     | ekonomi, dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.  | konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan;  |
| 4   | <b>Misi 4:</b> Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. | <b>Misi 2:</b> Pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui Pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadatan sumber daya alam lokal.<br><br><b>Misi 5:</b> Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan dan program untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. |
| 5   | <b>Misi 5:</b> Membangun transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat.                          | <b>Misi 2:</b> Pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui Pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadatan sumber daya alam lokal.<br><br><b>Misi 5:</b> Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan dan program untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. |

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2025.

### 1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Timur dengan RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 juga memperhatikan keselarasan dengan dokumen RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2045. Hal ini bertujuan agar terjadi sinkronisasi pembangunan dan memastikan bahwa arahan pembangunan yang dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan di Kabupaten Barito Utara sesuai dengan arahan Nasional, Provinsi, dan sekaligus memperhatikan konteks pembangunan lokal.

Sebagaimana penjabaran dan perwujudan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2045, dilakukan melalui 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Barito Timur meliputi:

#### Misi 1: Meningkatkan Kualitas SDM yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing

Dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan religius diindikasikan dari aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli, yang merupakan tiga indikator dalam IPM. Namun dalam kaitan dengan misi Kabupaten Barito Timur bukan sekedar peningkatan IPM saja, tetapi juga menciptakan SDM handal dan unggul yang dicerminkan dari perilaku bermoral, beretika, berbudaya dan berperilaku baik yang harus menjadi karakter dan identitas mayoritas masyarakat Kabupaten Barito Timur. Hal ini, diharapkan menjadi pedoman dalam seluruh aktivitas kehidupan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama. Dengan adanya perilaku baik maka SDM yang handal tersebut akan memberikan manfaat bagi dirinya,

orang lain, (keluarga dan masyarakat) serta kehidupan sosial melalui berbagai kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap upaya pembangunan daerah.

#### Misi 2: Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing

Kabupaten Barito Timur memiliki potensi di bidang pertanian, pertambangan, dan pariwisata, dan bila seluruh potensi sumber daya yang ada dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan serta menumbuhkembangkan perekonomian yang memiliki daya saing dengan berbasis sumber daya lokal melalui lembaga ekonomi produktif (Koperasi, Bank Desa, dan BUMDES), pemanfaatan potensi lokal wilayah perdesaan, dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Misi keempat ini merupakan penjabaran dari visi mandiri yang memfokuskan pada pengembangan agribisnis, pariwisata, jasa, perdagangan, investasi daerah, pengurangan pengangguran penduduk, pengurangan kemiskinan dan penyediaan infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah. Dari fokus tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah yang berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan kompetitif dan komparatif dengan berbasis pada potensi local.

#### Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan adaptif

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang bersifat konstruktif antara tiga domain utama yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang memiliki karakteristik efisien, efektif, partisipatif berlandaskan hukum, adil demokratis, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan, akuntabel dan memiliki visi strategik. Misi kelima didasarkan atas kondisi objektif bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah kepada masyarakat belum optimal sehingga menyebabkan kurangnya peranserta masyarakat dalam pembangunan daerah. Dalam konteks saat ini, organisasi pemerintahan diharapkan beradaptasi dalam waktu singkat untuk menghadapi perubahan yang mungkin mengganggu jika tidak ditangani secara memadai. Namun banyak organisasi tidak mampu beradaptasi secara efektif dan cepat karena pengaturan kelembagaan dan pola pengambilan keputusan dan tata kelola yang sudah mapan. Tata kelola yang adaptif harus meningkatkan kapasitas organisasi untuk menghadapi dan beradaptasi terhadap perubahan, sekaligus melindungi organisasi dari ancaman stabilitas. Strategi tata kelola adaptif mencakup pemanfaatan kemampuan internal dan eksternal, desentralisasi kekuasaan pengambilan keputusan, dan upaya memberikan masukan bagi pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi dari bawah ke atas. Pada saat yang sama, strategi adaptif mungkin menantang stabilitas dan akuntabilitas, yang tetap penting bagi pemerintah.

#### Misi 4: Mewujudkan Pembangunan yang terbuka, tertib dan humanis

Untuk pelaksanaan pembangunan yang terarah dan dapat mencapai tujuan diperlukan suatu kondisi dan situasi yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan serta dapat dirasakan hasil pembangunan. Kondisi keterbukaan dan humanis akan mendorong kondusifitas masyarakat yang terjaga (tidak terjadi kerusuhan) adalah situasi dan kondisi yang diperlukan untuk dilaksanakannya pembangunan tersebut. Kondisi yang aman, tertib dan tenteram akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen dari seluruh stakeholders pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Dengan demikian, pembangunan diarahkan untuk memelihara keamanan dan ketenteraman masyarakat antara lain dengan mencegah tindak kejahatan, kerusuhan, mengurangi tindak kriminalitas, serta menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat. Nilai budaya lokal menjadi perekat dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat Kabupaten Barito Timur. Salah satu ciri masyarakat Indonesia adalah mempunyai rasa kegotong-royongan dan toleransi yang tinggi, sifat yang telah tertanam di masyarakat Indonesia sejak dahulu kala dan masih tertanam sampai sekarang. Sifat ini telah banyak memberikan nilai positif bagi pelaksanaan pembangunan.

Tetapi akibat dari tingginya arus globalisasi yang membawa dampak negatif antara lain sifat individualistik sehingga mengakibatkan menurunnya sifat kesetiakawanan dan kegotong-royongan yang telah ada serta tertanam di masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Barito Timur. Untuk itu salah satu tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Timur diarahkan pada upaya untuk memelihara dan mengembangkan kesetiakawanan sosial dan kegotongroyongan masyarakat. Budaya tertib dan disiplin merupakan persyaratan yang penting untuk dapat mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Masih banyaknya pelanggaran hukum dan peraturan kemasyarakatan adalah indikasi bahwa masih rendahnya rasa disiplin dan ketertiban di masyarakat. Keteladanan dari aparatur dan tokoh masyarakat adalah sesuatu yang perlu dikembangkan dalam penegakkan hukum dan aturan yang berlaku. Untuk waktu jangka panjang diharapkan rasa tertib dan budaya disiplin dapat melekat dan selalu dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Barito Timur. Selain itu, factor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang aman, tertib, tentram dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh stakeholders pembangunan. Hukum merupakan aturan yang mengatur segala aspek kemasyarakatan agar kehidupan manusia berjalan dengan baik dan tidak saling mengganggu hak individu, kelompok tertentu dan institusi. Misi ini diarahkan melalui penguatan instansi dan badan penegak hukum. Seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, dan serta instansi pengawasan pemerintah harus lebih difungsikan.

#### Misi 5: Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat di mana kegiatan pembangunan dilaksanakan sehingga lingkungan memerlukan perhatian terutama untuk pembangunan jangka panjang dimana dampak dan akibat pembangunan terakumulasi. Konsekuensi logis dari dilaksanakannya pembangunan

adalah penggunaan segala sumber daya termasuk sumber daya alam dan adanya dampak negatif dari pelaksanaan pembangunan. Tetapi pelaksanaan pembangunan tidak harus mengesampingkan dan mengorbankan kondisi lingkungan. Sehingga diharapkan dalam jangka panjang akan tetap terjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan keberlangsungan pembangunan dan masih dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menjaga dan memulihkan kondisi lingkungan yang bersih, bebas dari segala polusi, sampah dan limbah yang menurunkan kondisi, kualitas dan daya dukung lingkungan, melakukan mitigasi bencana alam yang mungkin terjadi, menjaga kondisi dan keasrian sumber daya alam yang sangat penting bagi masyarakat luas.

#### Misi 6: Menciptakan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan

Pembangunan wilayah merupakan pembangunan yang bersifat holistic (menyeluruh). Ada tiga aspek utama terkait pembangunan wilayah yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendorong tumbuh kembangnya perekonomian wilayah secara menyeluruh tetapi bukan merupakan satu-satunya keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pembangunan kesejahteraan sosial akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang semu, artinya ada kesenjangan di tengah masyarakat.

Misi pertama merupakan penjabaran dari visi adil yang memfokuskan pada pertumbuhan wilayah di mana masyarakat mempunyai kesamaan terhadap semua aksesibilitas yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan tidak hanya diprioritaskan pada wilayah yang secara geografis diuntungkan oleh kedekatannya dengan pusat pertumbuhan nasional (Kota Tamiang Layang) tetapi juga pada wilayah-wilayah tertinggal, kawasan-kawasan pembangunan yang strategis, pengembangan wilayah pinggiran.

Kesemuanya itu terungkap dalam motto daerah “Gumi Jari Janang Kalalawah” yang artinya: “Daerah Yang Subur Makmur Dan Sejahtera Untuk Selama-lamanya”. Hal ini sejalan dengan dengan visi "*Mewujudkan Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah*" (*BARTIM SEGAH*), dengan melaksanakan misi pembangunan Kabupaten Barito Timur, (Misi 1) Mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal; (Misi 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), berintegritas serta layanan publik yang berkualitas dan *responsive* terhadap kebutuhan masyarakat; (Misi 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan; (Misi 4) Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; (Misi 5) Membangun transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat.

**Tabel 1.5. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2045**

| No. | RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029   | RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2045   |
|-----|--|--|
| 1   | <b>Misi 1:</b> Mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.  | <b>Misi 2:</b> Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing   |
| 2   | <b>Misi 2:</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>good and clean governance</i> ), berintegritas serta layanan publik yang berkualitas dan <i>responsive</i> terhadap kebutuhan masyarakat. | <b>Misi 3:</b> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan adaptif.  |
| 3   | <b>Misi 3:</b> Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.   | <b>Misi 4:</b> Mewujudkan Pembangunan yang terbuka, tertib dan humanis.<br><b>Misi 6:</b> Menciptakan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan |
| 4   | <b>Misi 4:</b> Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.  | <b>Misi 4:</b> Mewujudkan Pembangunan yang terbuka, tertib dan humanis.<br><b>Misi 5:</b> Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan.  |
| 5   | <b>Misi 5:</b> Membangun transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat.   | <b>Misi 1:</b> Meningkatkan Kualitas SDM yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing.   |

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2025.

### 1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Timur dengan RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Timur sebagai suatu rencana penataan ruang wilayah yang dimaksudkan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan pembangunan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha serta swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program-program sektoral dan daerah. Untuk mencapai pola dan struktur ruang Kabupaten Barito Timur 2014-2034 diperlukan perwujudan RTRW Kabupaten Barito Timur yang diuraikan dalam program pembangunan wilayah dalam RTRW Kabupaten Barito Timur.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 ini juga memiliki acuan kepada dokumen RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034, sebagai gambaran yang lebih detail mengenai arahan penataan ruang pada wilayah Kabupaten Barito Timur. Dokumen RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034 juga telah memberikan gambaran yang detail mengenai peta distribusi sarana dan prasarana di seluruh wilayah yang berfungsi sebagai pondasi utama dalam proses pembangunan. Hal tersebut mencakup berbagai aspek dari segi jaringan jalan, jaringan transportasi, hingga jaringan-jaringan lainnya yang berkaitan dengan infrastruktur dasar di dalam pembangunan. Setiap jaringan tersebut perlu menjadi perhatian di dalam proses pembangunan yang dicanangkan nantinya di dalam RPJMD sehingga upaya pembangunan sinkron dan sesuai dengan peruntukkan kawasannya sesuai rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, maupun Dunia Usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Barito Timur secara berkesinambungan. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
- 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
- 3) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi lain yang berdekatan;
- 4) Memberikan pondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
- 5) Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati terpilih periode 2025-2029;
- 6) Sebagai tolak ukur untuk penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;
- 7) Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Barito Timur;
- 8) Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur.

#### **1.5 Sistematika Dokumen**

Sistematika dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan rumusan sebagai berikut:

**BAB I      PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029.

**BAB II     GAMBARAN UMUM DAERAH**

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Barito Timur sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJMD ini, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Selanjutnya menjelaskan tentang gambaran keuangan daerah dan serta permasalahan dan isu strategis daerah.

**BAB III    VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN  
                 DAERAH**

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah, serta menjelaskan dan menjabarkan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah.

**BAB IV    PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA  
                 PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Menjelaskan dan menjabarkan program perangkat daerah, indikator program, target, dan pagu indikatif program perangkat daerah, serta menjelaskan bagaimana kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

**BAB V     PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Gambaran umum kondisi Kabupaten Barito Timur terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut merupakan bentuk nyata dari kinerja pembangunan di Kabupaten Barito Timur oleh Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat. Berikut ini gambaran umum Kabupaten Barito Timur yang dilihat dari keempat aspek tersebut.

##### **2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi**

###### **1) Posisi dan Peran Strategis Daerah**

###### **Letak Geografis dan Batas Wilayah**

Kabupaten Barito Timur terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ibu Kota Kabupaten di Tamiang Layang, dengan luas wilayah Kabupaten Barito Timur mencapai sebesar 3.212,515 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 10 Kecamatan. Ditinjau dari letaknya Kabupaten Barito Timur memiliki lokasi strategis karena adanya pola pergerakan orang dan barang, sehingga menjadi Kota Transit, baik dari arah Kota Banjarmasin maupun Kota Palangka Raya. Sedangkan dilihat dari letak wilayah dalam kesatuan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Timur berada di paling timur yang berdekatan dengan Kota Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan letak dan posisi demikian sehingga arah perkembangan wilayahnya cenderung menuju ke Kota Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara administratif Kabupaten Barito Timur terdiri dari 10 kecamatan dan terbagi menjadi 3 tiga kelurahan, 100 desa termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dan tidak termasuk Desa Dambung sesuai dengan Berita Acara penyerahan/perlilhan operasional Pemerintahan Desa Dambung dai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Lampiran Naskah Berita Acara tanggal 21 November 1989. Secara administratif berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah);
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan);
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah), Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Provinsi Kalimantan Selatan);
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah).

**Tabel 2.1. Kecamatan dan Ibu Kota Kecamatan Barito Timur Tahun 2025**

| <b>No.</b> | <b>Kecamatan</b>          | <b>Ibu Kota Kecamatan</b> |
|------------|---------------------------|---------------------------|
| 1          | Kecamatan Benua Lima      | Taniran                   |
| 2          | Kecamatan Dusun Timur     | Tamiang Layang            |
| 3          | Kecamatan Paju Epat       | Telang                    |
| 4          | Kecamatan Awang           | Hayaping                  |
| 5          | Kecamatan Patangkep Tutui | Bentot                    |
| 6          | Kecamatan Dusun Tengah    | Ampah Kota                |

| No. | Kecamatan                | Ibu Kota Kecamatan |
|-----|--------------------------|--------------------|
| 7   | Kecamatan Raren Batuah   | Unsum              |
| 8   | Kecamatan Paku           | Tampa              |
| 9   | Kecamatan Karusen Janang | Dayu               |
| 10  | Kecamatan Pematang Karau | Bambulung          |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

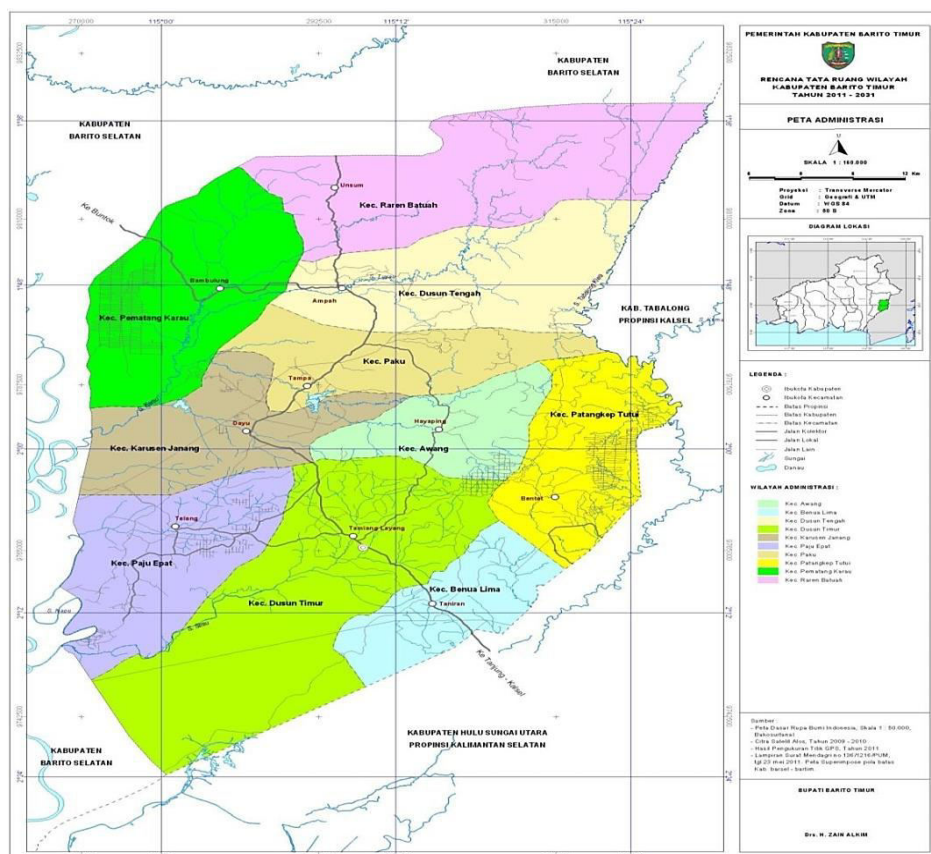
**Tabel 2.2. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2025**

| No.          | Kecamatan                 | Administrasi Pemerintahan |           |            |
|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------|------------|
|              |                           | Desa                      | Kelurahan | Jumlah     |
| 1            | Kecamatan Benua Lima      | 6                         | 1         | 7          |
| 2            | Kecamatan Dusun Timur     | 16                        | 1         | 17         |
| 3            | Kecamatan Paju Epat       | 9                         | 0         | 9          |
| 4            | Kecamatan Awang           | 11                        | 0         | 11         |
| 5            | Kecamatan Patangkep Tutui | 10                        | 0         | 10         |
| 6            | Kecamatan Dusun Tengah    | 7                         | 1         | 8          |
| 7            | Kecamatan Raren Batuah    | 9                         | 0         | 9          |
| 8            | Kecamatan Paku            | 12                        | 0         | 12         |
| 9            | Kecamatan Karusen Janang  | 7                         | 0         | 7          |
| 10           | Kecamatan Pematang Karau  | 13                        | 0         | 13         |
| <b>Total</b> |                           | <b>100</b>                | <b>3</b>  | <b>103</b> |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

Dari gambar 2.1 dibawah, Kabupaten Barito Timur terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ibu Kota Kabupaten di Tamiang Layang, secara geografis Kabupaten Barito Timur terletak di posisi geografis  $1^{\circ} 38' 38,1''$  Lintang Selatan -  $2^{\circ} 23' 34,2''$  Lintang Selatan dan  $114^{\circ} 56' 15''$  -  $115^{\circ} 26' 31,3''$  Bujur Timur. Kabupaten Barito Timur memiliki luas wilayah  $3.212,515$  km<sup>2</sup>.

**Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Barito Timur**



Sumber: Diolah dari Data RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034, 2025.

## Topografi

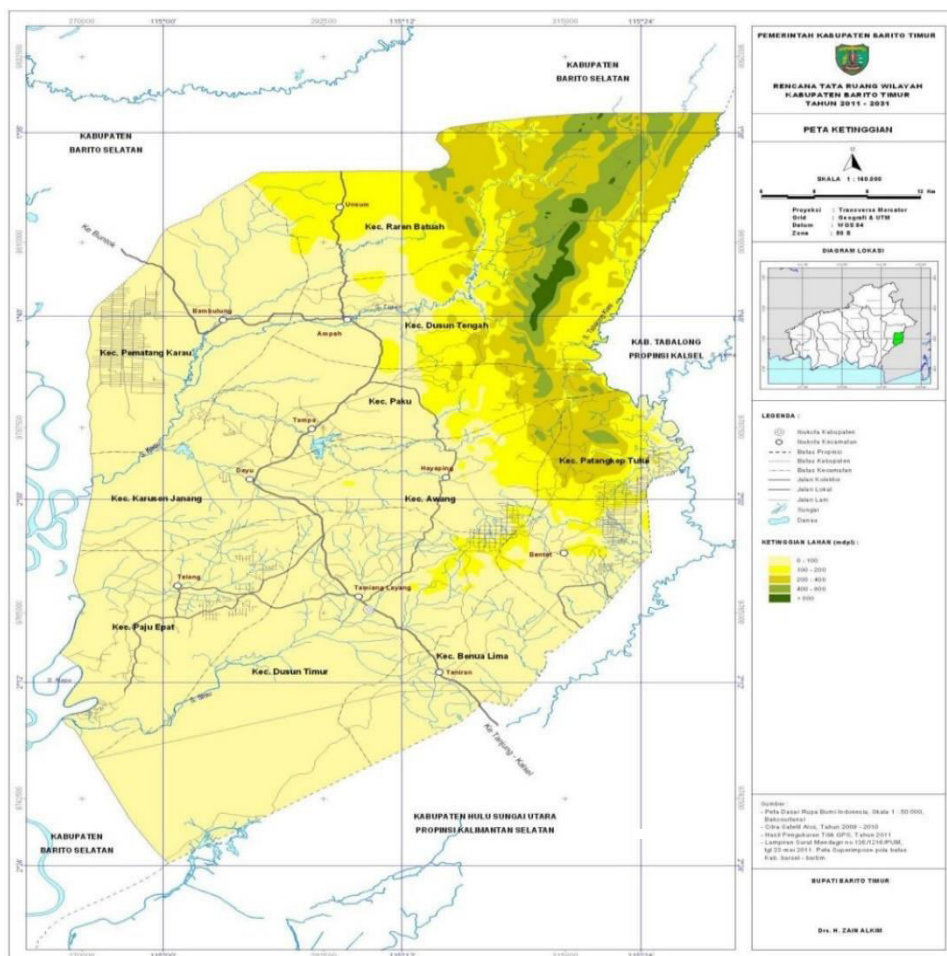
Dari tabel 2.3 dibawah diketahui bahwa wilayah Kabupaten Barito Timur berada pada ketinggian lahan 0-500m di atas permukaan laut. Ketinggian lahan tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Barito Timur merupakan daerah dataran rendah. Kecuali pada sebagian wilayah Kecamatan Awang dan Patangkep Tutui yang merupakan daerah perbukitan. Umumnya, daerah yang termasuk ke dalam dataran rendah memiliki relief yang relatif datar dan mudah dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk mendukung berbagai kegiatan. Lebih jauh mengenai peta topografi dan peta kemiringan di wilayah Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada gambar 2.2. dan 2.3 di bawah.

**Tabel 2.3. Ketinggian Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur**

| No. | Kecamatan                 | Ketinggian Lahan (Mdpl) |
|-----|---------------------------|-------------------------|
| 1.  | Kecamatan Benua Lima      | 30                      |
| 2.  | Kecamatan Dusun Timur     | 28                      |
| 3.  | Kecamatan Paju Epat       | 20                      |
| 4.  | Kecamatan Awang           | 60                      |
| 5.  | Kecamatan Patangkep Tutui | 60                      |
| 6.  | Kecamatan Dusun Tengah    | 26                      |
| 7.  | Kecamatan Raren Batuah    | 80                      |
| 8.  | Kecamatan Paku            | 15                      |
| 9.  | Kecamatan Karusen Janang  | 17                      |
| 10. | Kecamatan Pematang Karau  | 20                      |

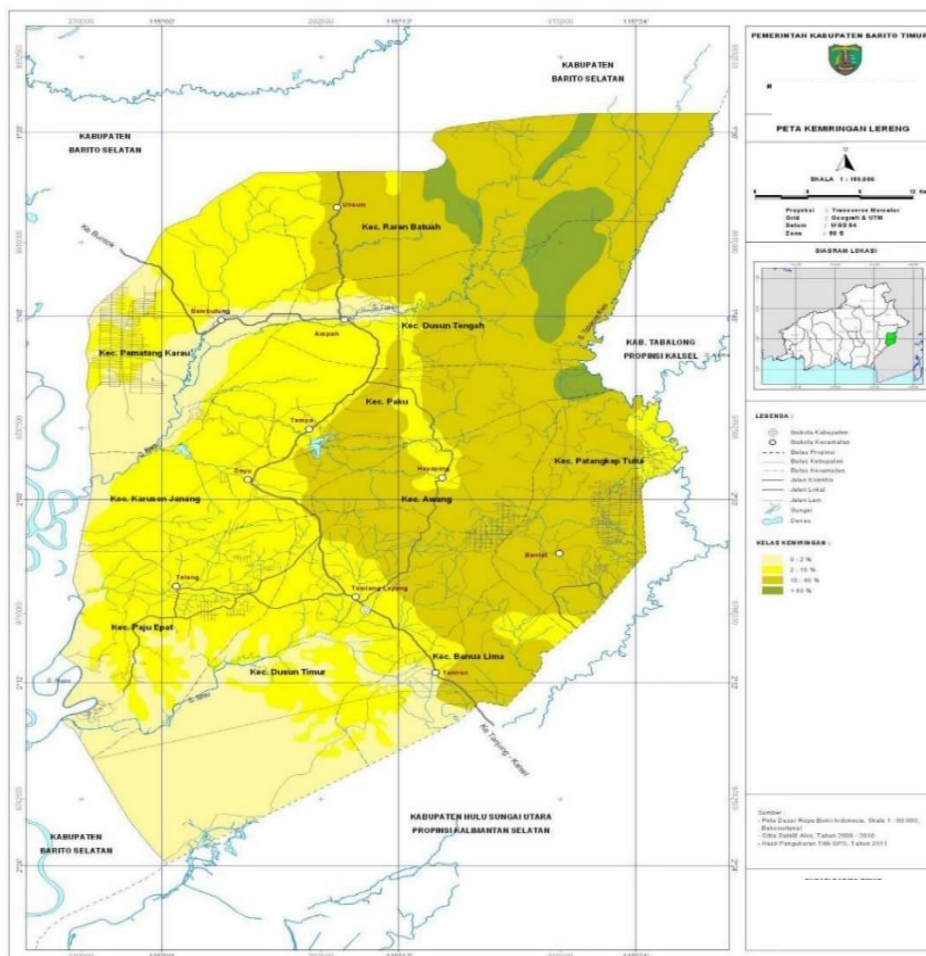
Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

**Gambar 2.2. Peta Topografi Wilayah Kabupaten Barito Timur**



Sumber: Diolah dari Data RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034, 2025.

**Gambar 2.3. Peta Kemiringan Wilayah Kabupaten Barito Timur**



Sumber: Diolah dari Data RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034, 2025.

**Hidrologi**

Selanjutnya Kondisi hidrologi di Kabupaten Barito Timur digambarkan dengan jumlah sungai yang cukup banyak, antara lain: Sungai Karau, Sungai Tuyau, Sungai Sirau, dan Sungai Tabalong Kiwa, dan beberapa sungai kecil serta anak-anak sungai lainnya. Sungai-sungai tersebut mengalir dari utara ke selatan dengan pola aliran sungai adalah dendritik, yaitu pola aliran yang berkembang bebas dalam segala arah dan mempunyai banyak cabang. Saat ini sungai-sungai tersebut dimanfaatkan sebagai sarana transportasi ke berbagai kawasan, sebagai sumber air bersih dan kebutuhan sehari-hari penduduk untuk mandi, cuci, untuk kegiatan pertanian maupun lainnya. Kabupaten Barito Timur memiliki 4 (empat) hulu sungai, yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu: (1) Hulu Sungai Karau terletak di Kecamatan Dusun Tengah di Desa Baruyan, Desa Unsum, Desa Lenggang dan Desa Batuah; (2) Hulu Sungai Paku terletak di Kecamatan Dusun Tengah Desa Kalamus dan Desa Tamiang; (3) Hulu Sungai Sirau terletak di Kecamatan Dusun Timur Desa Pulau Padang dan Desa Jaar dan (4) Hulu Sungai Dayu di Kecamatan Dusun Timur Desa Dayu. Dari ke empat hulu sungai tersebut mengalir dari arah utara ke selatan yang melalui wilayah Kabupaten Barito Timur yang merupakan saluran utama dalam sistem drainase sebagai saluran pembuangan akhir.

## **Geologi**

Secara geologis, susunan atau struktur bebatuan di Kabupaten Barito Timur dibentuk oleh formasi geologi sebagai berikut, *Qh/Qvt = Swam Deposit Land, Clay, Ralelygravel, Mut and Decayet Wagelation Brown*, yang terbentuk oleh batuan vulkanik tak terpisahkan, berupa aliran lahar, konglomerat dan endapan kalsium lainnya, bersusunan antara andesit sampai basalt. Berdasarkan informasi geologi, formasi geologi yang terbentuk di wilayah Kabupaten Barito Timur dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan) jenis formasi, yaitu: Batuan Vulkanik, Formasi Alluvium, Formasi Berai, Formasi Dahor, Formasi Mortalat, Formasi Tanjung, Formasi Warukin dan Granit Kapur.

## **Klimatologi**

Sebagai daerah yang memiliki iklim tropis seperti daerah di Indonesia lainnya, Kabupaten Barito Timur memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Barito tercatat berada di antara 26,93°C sampai 28,32°C sepanjang tahun 2024. Suhu 20,80°C menjadi suhu udara terendah dan terjadi pada bulan April, sedangkan 36,40°C merupakan suhu udara tertinggi yang terjadi pada bulan Agustus. Rata-rata tekanan udara pada tahun yang sama berkisar antara 1005,62-1008,99mba dengan nilai tekanan udara tertinggi berada di bulan Oktober. Adapun rata-rata kecepatan angin di Kabupaten Barito Timur berkisar antara 0,97-1,46m/detik.

**Tabel 2.4. Statistik Klimatologi Kabupaten Barito Timur Tahun 2024**

| <b>Bulan</b> | <b>Suhu Minimum</b> | <b>Suhu Maksimum</b> | <b>Suhu (Rata-Rata)</b> | <b>Kecepatan Angin (Rata-rata)</b> | <b>Tekanan Udara (Rata-Rata)</b> | <b>Penyinaran Matahari</b> | <b>Jumlah Curah Hujan</b> |
|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Januari      | 23,00               | 34,60                | 27,58                   | 1,15                               | 1007,44                          | 2,4                        | 460,60                    |
| Februari     | 22,60               | 36,00                | 27,96                   | 1,46                               | 1008,11                          | 4,2                        | 185,40                    |
| Maret        | 21,40               | 35,60                | 28,14                   | 1,43                               | 1007,19                          | 3,7                        | 77,80                     |
| April        | 20,80               | 36,30                | 28,32                   | 1,32                               | 1005,62                          | 5,1                        | 324,30                    |
| Mei          | 24,00               | 35,20                | 28,06                   | 1,26                               | 1005,80                          | 4,3                        | 261,10                    |
| Juni         | 23,30               | 34,30                | 27,48                   | 1,04                               | 1007,26                          | 2,4                        | 261,50                    |
| Juli         | 22,50               | 34,80                | 26,93                   | 1,09                               | 1007,85                          | 3,9                        | 83,10                     |
| Agustus      | 22,60               | 36,40                | 27,19                   | 1,06                               | 1008,92                          | 4,6                        | 245,70                    |
| September    | 21,80               | 35,60                | 27,99                   | 1,24                               | 1008,38                          | 6,3                        | 293,20                    |
| Oktober      | 22,20               | 35,20                | 27,82                   | 1,09                               | 1008,99                          | 4,0                        | 200,00                    |
| November     | 23,20               | 35,00                | 27,76                   | 1,27                               | 1007,78                          | 3,7                        | 254,80                    |
| Desember     | 22,00               | 35,00                | 27,23                   | 0,97                               | 1007,19                          | 1,6                        | 421,10                    |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

## Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Barito Timur terbagi menjadi beberapa jenis tutupan lahan. Penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Barito Timur adalah pertanian lahan kering dengan luas 152.508,422 Ha (41,34%). Kemudian diikuti oleh tutupan lahan hutan lahan kering primer dan hutan rawa sekunder. Masing-masing luasan adalah 58.171,591 Ha (15,77%) dan 54.159,182 Ha (14,68%). Penggunaan lahan Kabupaten Barito Timur secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5. Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Barito Timur**

| Tutupan Lahan             | Luas (Ha)          | %             |
|---------------------------|--------------------|---------------|
| Belukar Rawa              | 40.428,401         | 10,96         |
| Hutan Lahan Kering Primer | 58.171,591         | 15,77         |
| Hutan Rawa Primer         | 9.442,608          | 2,56          |
| Hutan Rawa Sekunder       | 54.159,182         | 14,68         |
| Perkebunan                | 39.074,675         | 10,59         |
| Permukiman                | 495,123            | 0,13          |
| Pertanian Lahan Kering    | 152.508,422        | 41,34         |
| Rawa                      | 4.366,437          | 1,18          |
| Semak/Belukar             | 6.466,714          | 1,75          |
| Tanah Terbuka             | 2.554,508          | 0,69          |
| Tubuh Air                 | 1.210,215          | 0,33          |
| <b>Total</b>              | <b>368.877,876</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: Diolah dari Data RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034, 2025.

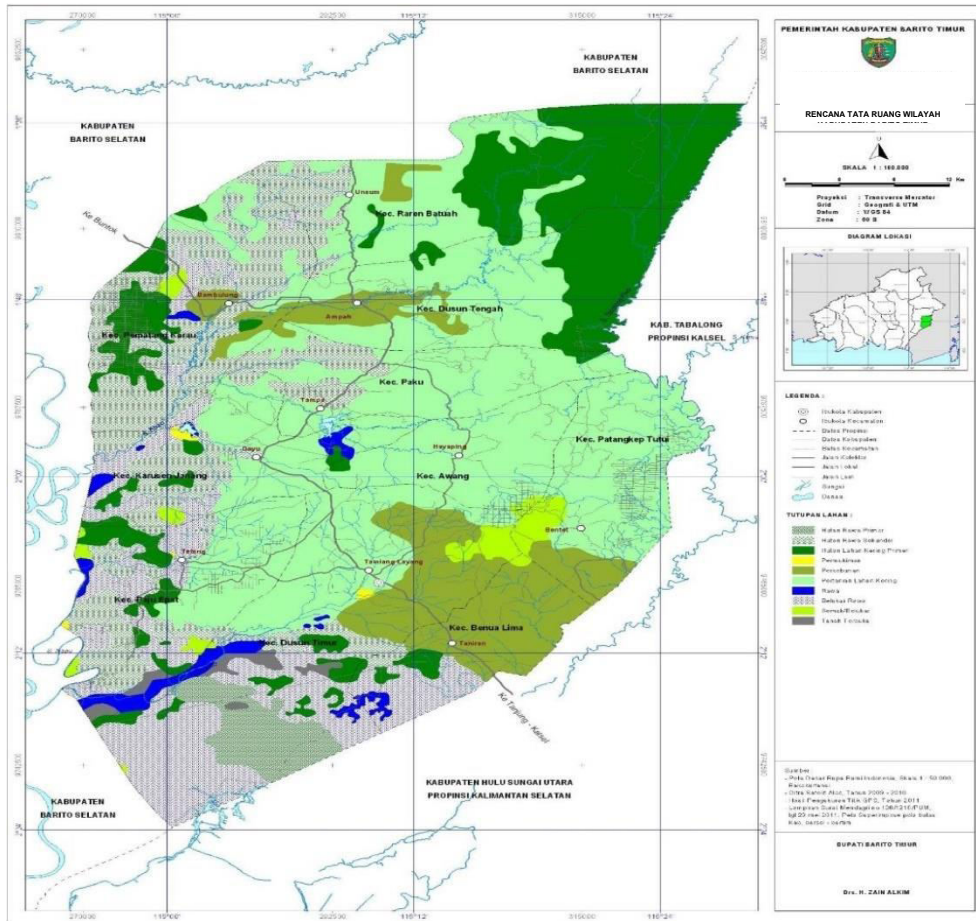
Penggunaan lahan Kabupaten Barito Timur masih berbeda dengan rencana pola ruang yang disusun dalam RTRW Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034. Pada rencana pola ruang, penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan lindung, kawasan budidaya, dan holding zone. Rencana pola ruang terbesar adalah peruntukkan perkebunan dengan luasan 23,44% dari total penggunaan wilayah, sedangkan rencana pola ruang terkecil adalah kawasan konservasi arboretum 0,06%.

**Tabel 2.6. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur**

| Rencana Pola Ruang                   | Luas (Ha)          | %             |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| Holding Zone Perkebunan              | 826,006            | 0,22          |
| Holding Zone Permukiman Perdesaan    | 383,464            | 0,10          |
| Holding Zone Permukiman Perkotaan    | 1.571,799          | 0,43          |
| Hutan Produksi Konversi (HPK)        | 32.394,018         | 8,77          |
| Hutan Produksi Terbatas (HPT)        | 39.695,154         | 10,74         |
| Hutan Produksi Tetap (HP)            | 65.586,190         | 17,75         |
| Kawasan Industri                     | 1.265,805          | 0,34          |
| Kawasan Konservasi Arboretum         | 235,642            | 0,06          |
| Kawasan Perkebunan Besar             | 60.043,917         | 16,25         |
| Kawasan Tanaman Pangan Berkelanjutan | 2.383,612          | 0,65          |
| Perkebunan                           | 86.619,845         | 23,44         |
| Permukiman Perdesaan                 | 29.525,366         | 7,99          |
| Permukiman Perkotaan                 | 24.021,235         | 6,50          |
| Pertanian Lahan Basah                | 14.678,934         | 3,97          |
| Pertanian Lahan Kering               | 4.354,398          | 1,18          |
| Resapan Air                          | 967,899            | 0,26          |
| Sempadan Danau                       | 505,384            | 0,14          |
| Sempadan Sungai                      | 3.680,140          | 1,00          |
| Transmigrasi                         | 734,662            | 0,20          |
| <b>Total</b>                         | <b>369.473,471</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: Diolah dari Data RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034, 2025.

**Gambar 2.4. Peta Tutupan Lahan Wilayah Kabupaten Barito Timur**



Sumber: Diolah dari Data RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034, 2025.

## 2) Potensi Sumber Daya Alam

### Potensi Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Barito Timur terdiri dari potensi pertambangan, potensi pariwisata, potensi hutan, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi peternakan, dan potensi perikanan. Adapun jenis pertambangan yang ada di Kabupaten Barito Timur berdasarkan data AMDAL Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 terdiri dari pertambangan batubara dengan luas kawasan 9.879 Ha tersebar di 9 (Sembilan) Kecamatan yaitu Kecamatan Dusun Tengah dan Raren Batuah seluas 1.000 Ha; Kecamatan Dusun Timur dan Paju Epat seluas 2.213 Ha; Kecamatan Karusen Janang, Paku, Awang seluas 1.000 Ha; Kecamatan Patangkep Tutui seluas 2.592 Ha. Bahan galian C seperti pasir kuarsa sebesar 8.447 Ha di Kecamatan Paju Epat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034 bahwa Kawasan lindung berupa kawasan arboretum di Kecamatan Pematang Karau dengan luas 235,75 Hektar. Kawasan hutan produksi tetap dengan luas 65.610,43 Hektar terdapat di Kecamatan Pematang Karau, Kecamatan Dusun Timur, Kecamatan Paju Epat dan Kecamatan Raren Batuah. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 39.697,01 Hektar terdapat di Kecamatan Dusun Tengah dan Kecamatan Raren Batuah. Kawasan hutan produksi yang dapat di konversi dengan luas 32.405,55

Hektar terdapat di Kecamatan Raren Batuah, Dusun Tengah, Dusun Timur, Paku, Pematang Karau, Karusen Janang, Awang, Patangkep Tutui, dan Paju Epat. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan di seluruh Kecamatan dengan luas 24.026,93 Hektar. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di seluruh Desa di Kabupaten Barito Timur dengan luas 29.530,82 Hektar.

### Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian dengan luas 168.119,15 Ha terdiri atas kawasan peruntukan tanaman pangan, hortikultura, dan kawasan peruntukan peternakan. Kawasan pertanian lahan basah dengan luas 14.678,934 Ha tersebar di seluruh Kecamatan. Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa Padi Sawah dan Padi Ladang dengan luas 6.583,57 Ha tersebar di Kecamatan Patangkep Tutui, Kecamatan Awang, Kecamatan Paku dan Kecamatan Dusun Tengah. Kawasan pertanian lahan kering berupa Jagung, Ubi Jalar, Ubi Kayu dengan luas 329,85 Ha tersebar di Kecamatan Dusun Tengah dan Kecamatan Raren Batuah. Potensi pertanian terdiri dari Padi Sawah dan Padi Ladang dengan luas panen 6.583,57 Ha dan total produksi 38.314,84 Ton, dengan total produktivitas 83,86 Kw/Ha.

**Tabel 2.7. Luas dan Produksi Tanaman Padi Sawah dan Padi Ladang di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024**

| No.          | Kecamatan       | Padi Sawah      |                  |                       | Padi Ladang     |                 |                       |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|              |                 | Luas (Ha)       | Produksi (Ton)   | Produktivitas (Kw/Ha) | Luas (Ha)       | Produksi (Ton)  | Produktivitas (Kw/Ha) |
| 1            | Benua Lima      | 315             | 1.203,30         | 38,20                 | 135,00          | 328,05          | 24,30                 |
| 2            | Dusun Timur     | 228             | 775,20           | 34,00                 | 232,00          | 612,48          | 26,40                 |
| 3            | Paju Epat       | 16              | 51,52            | 32,20                 | 3,00            | 5,76            | 19,20                 |
| 4            | Awang           | 220             | 1.126,40         | 51,20                 | 432,00          | 1.820,02        | 42,13                 |
| 5            | Patangkep Tutui | 211             | 886,20           | 42,00                 | 257,00          | 873,80          | 34,00                 |
| 6            | Dusun Tengah    | 2,278           | 13.212,40        | 58,00                 | 45,00           | 144,00          | 32,00                 |
| 7            | Raren Batuah    | 399             | 1.675,80         | 42,00                 | 34,00           | 109,48          | 32,20                 |
| 8            | Paku            | 1,398           | 6.215,51         | 44,46                 | 197,00          | 704,47          | 35,76                 |
| 9            | Karusen Janang  | 155             | 457,25           | 29,50                 | 25,00           | 70,00           | 28,00                 |
| 10           | Pematang Karau  | 1,57            | 8.038,40         | 51,20                 | 2,00            | 4,80            | 24,00                 |
| <b>Total</b> |                 | <b>5.221,57</b> | <b>33.641,98</b> | <b>49,55</b>          | <b>1.362,00</b> | <b>4.672,86</b> | <b>34,31</b>          |

Sumber: Diolah dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur, 2025.

Potensi Palawija di Kabupaten Barito Timur terdiri dari Jagung dengan luas panen sebesar 279,00 Ha dengan produksi Jagung sebesar 1.923,22 Ton, Ubi Kayu dengan luas panen sebesar 37,25 Ha dengan produksi Ubi Kayu sebesar 944,49 Ton, serta Ubi Jalar dengan luas panen sebesar 13,60 Ha dengan produksi Ubi Jalar sebesar 190,06 Ton. Lebih jauh dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.8. Luas dan Produksi Palawija di Kab. Barito Timur Tahun 2024**

| No.          | Kecamatan       | Jagung        |                 |                       | Ubi Kayu     |                |                       | Ubi Jalar    |                |                       |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|              |                 | Luas (Ha)     | Produksi (Ton)  | Produktivitas (Kw/Ha) | Luas (Ha)    | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Luas (Ha)    | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kw/Ha) |
| 1            | Benua Lima      | -             | -               | -                     | 4,00         | 98,28          | 245,70                | -            | -              | -                     |
| 2            | Dusun Timur     | 1,00          | 4,88            | 48,80                 | 4,00         | 96,24          | 240,60                | 0,50         | 7,12           | 142,30                |
| 3            | Paju Epat       | 5,00          | 27,15           | 54,30                 | 3,00         | 73,68          | 245,60                | -            | -              | -                     |
| 4            | Awang           | 8,00          | 36,64           | 45,80                 | -            | -              | -                     | -            | -              | -                     |
| 5            | Patangkep Tutui | -             | -               | -                     | 2,30         | 58,83          | 255,80                | 1,25         | 17,75          | 142,00                |
| 6            | Dusun Tengah    | 111,00        | 870,24          | 78,40                 | 2,00         | 52,02          | 260,10                | 3,00         | 43,38          | 144,60                |
| 7            | Raren Batuah    | 41,50         | 185,71          | 44,75                 | 4,55         | 116,66         | 256,40                | 2,75         | 39,27          | 142,80                |
| 8            | Paku            | 105,00        | 757,05          | 72,10                 | 11,00        | 286,11         | 260,10                | 2,00         | 28,10          | 140,50                |
| 9            | Karusen Janang  | -             | -               | -                     | 3,00         | 72,09          | 240,30                | 2,00         | 27,10          | 135,50                |
| 10           | Pematang Karau  | 7,50          | 41,55           | 55,40                 | 3,40         | 90,57          | 266,38                | 2,10         | 27,34          | 130,20                |
| <b>Total</b> |                 | <b>279,00</b> | <b>1.923,22</b> | <b>57,08</b>          | <b>37,25</b> | <b>944,49</b>  | <b>252,33</b>         | <b>13,60</b> | <b>190,06</b>  | <b>139,70</b>         |

Sumber: Diolah dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur, 2025.

## Peternakan

Potensi Peternakan yang telah ada di Kabupaten Barito Timur antara lain ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. Populasi ternak besar (Sapi dan Kerbau) pada tahun 2024 berjumlah 834 ekor yang didominasi jenis Sapi sebesar 534 ekor, sedangkan untuk ternak Kerbau sebanyak 300 ekor. Populasi ternak kecil (Kambing dan Babi) pada tahun yang sama berjumlah 3.577 ekor yang didominasi ternak Babi sebanyak 3.127 ekor, dan sisanya berupa ternak kambing sebanyak 450 ekor. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.9. Jenis dan Populasi Ternak di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024**

| No. | Kecamatan       | Sapi       | Kerbau     | Kambing    | Babi         | Unggas           |
|-----|-----------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 1   | Benua Lima      | 8          | -          | -          | 216          | 192.345          |
| 2   | Dusun Timur     | 167        | 96         | 32         | 707          | 841.087          |
| 3   | Paju Epat       | 63         | 204        | 34         | 397          | 15.437           |
| 4   | Awang           | -          | -          | -          | 464          | 18.604           |
| 5   | Patangkep Tutui | 2          | -          | -          | 100          | 295.550          |
| 6   | Dusun Tengah    | 17         | -          | 20         | 359          | 11.819           |
| 7   | Raren Batuah    | 72         | -          | 93         | 151          | 22.771           |
| 8   | Paku            | 54         | -          | 107        | 507          | 98.272           |
| 9   | Karusen Janang  | 64         | -          | 91         | 176          | 80.787           |
| 10  | Pematang Karau  | 87         | -          | 73         | 50           | 143.600          |
|     | <b>Total</b>    | <b>534</b> | <b>300</b> | <b>450</b> | <b>3.127</b> | <b>1.720.272</b> |

Sumber: Diolah dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur, 2025.

## Perkebunan

Kawasan potensi tanaman perkebunan di Kabupaten Barito Timur terdiri dari Kelapa, Kopi, Karet, Kelapa Sawit, dan Kakao. Komoditi tanaman perkebunan utama di Kabupaten Barito Timur adalah tanaman Karet dengan luas area mencapai sebesar 50.871,01 Ha dengan jumlah produksi sebesar 18.631,64 Ton. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.10. Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024**

| Kecamatan       | Karet            |                  | Kopi           |                | Kelapa         |                | Kakao          |                | Kelapa Sawit    |                |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                 | Luas Area (Ha)   | Produksi (Ton)   | Luas Area (Ha) | Produksi (Ton) | Luas Area (Ha) | Produksi (Ton) | Luas Area (Ha) | Produksi (Ton) | Luas Area (Ha)  | Produksi (Ton) |
| Benua Lima      | 4.538,30         | 1.109,30         | 18,00          | 0,33           | 9,40           | 1,31           | 7,70           | 0,87           | 151,25          | 30,20          |
| Dusun Timur     | 4.870,04         | 1.415,70         | 7,20           | 0,09           | 15,55          | 2,11           | 7,00           | 0,27           | 187,24          | 28,64          |
| Paju Epat       | 6.304,80         | 963,27           | 9,65           | 0,95           | 19,80          | 3,89           | 26,25          | 0,67           | 192,00          | 32,32          |
| Awang           | 7.184,00         | 1.405,82         | 6,00           | 0,17           | 10,00          | 0,75           | 29,02          | 3,31           | 14,00           | 12,23          |
| Patangkep Tutui | 6.420,41         | 3.781,49         | 3,72           | 1,14           | 15,60          | 2,81           | 50,00          | 3,65           | 25,50           | 19,73          |
| Dusun Tengah    | 6.219,00         | 2.676,56         | 4,57           | 0,05           | 32,40          | 17,30          | 2,50           | 0,17           | 130,30          | 54,44          |
| Raren Batuah    | 4.262,70         | 814,90           | 0,20           | 0,04           | 2,13           | 0,50           | 0,20           | 0,06           | 103,07          | 36,23          |
| Paku            | 2.555,84         | 881,50           | 1,00           | 0,25           | 9,30           | 2,46           | 251,70         | 13,74          | 231,55          | 52,96          |
| Karusen Janang  | 3.045,00         | 695,48           | 1,50           | 0,20           | 12,35          | 1,63           | 10,20          | 0,75           | 115,36          | 37,37          |
| Pematang Karau  | 5.470,92         | 4.887,63         | 16,80          | 2,17           | 13,00          | 4,75           | 30,70          | 4,01           | 213,00          | 57,42          |
| <b>Total</b>    | <b>50.871,01</b> | <b>18.631,64</b> | <b>68,64</b>   | <b>5,39</b>    | <b>139,53</b>  | <b>37,51</b>   | <b>415,27</b>  | <b>27,49</b>   | <b>1.363,27</b> | <b>361,54</b>  |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

## Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Barito Timur berasal dari hasil perikanan darat yang dibedakan menjadi perikanan umum dan budidaya. Tahun 2021 produksi mencapai 1.498.92 ton, secara keseluruhan produksinya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk jenis perikanan darat dari perairan umum total produksinya, dimana sebagian besar produksinya dihasilkan di Kecamatan Pematang Karau. Lebih jauh dapat dilihat pada tabel berikut.

### 2.11. Produksi Budidaya Ikan menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024

| No.          | Kecamatan       | Budidaya Air Tawar (Kg) |                | Jumlah           |
|--------------|-----------------|-------------------------|----------------|------------------|
|              |                 | Kolam                   | Keramba        |                  |
| 1            | Benua Lima      | 49.542                  | 16.250         | 65.792           |
| 2            | Dusun Timur     | 160.776                 | 0              | 160.776          |
| 3            | Paju Epat       | 84.126                  | 227.496        | 311.622          |
| 4            | Awang           | 42.064                  | 0              | 42.064           |
| 5            | Patangkep Tutui | 41.128                  | 19.500         | 60.628           |
| 6            | Dusun Tengah    | 188.818                 | 27.082         | 215.900          |
| 7            | Raren Batuah    | 130.864                 | 0              | 130.864          |
| 8            | Paku            | 98.148                  | 35.750         | 133.898          |
| 9            | Karusen Janang  | 65.433                  | 7.583          | 73.016           |
| 10           | Pematang Karau  | 107.496                 | 235.079        | 342.575          |
| <b>Total</b> |                 | <b>968.395</b>          | <b>568.740</b> | <b>1.537.135</b> |

Sumber: Diolah dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur, 2025.

## Kehutanan

Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 65.610,43 Ha terdapat di Kecamatan Dusun Tengah dan Kecamatan Raren Batuah. Kawasan hutan produksi Terbatas (HPT) sebesar 39.695,154 Ha dan Hutan Produksi Konversi sebesar (HPK) 32.394,018 Ha, semua tersebar di Kecamatan Raren Batuah, Dusun Tengah, Dusun Timur, Paku, Pematang Karau, Karusen Janang, Awang, Patangkep Tutui, dan Paju Epat.

## Pariwisata

Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Barito Timur terdiri dari wisata alam, wisata alam taman anggrek dan rencana penangkaran satwa di Murutuwu Kecamatan Paju Epat, wisata budaya, dan wisata alam buatan yang semuanya tersebar di wilayah Kabupaten Barito Timur.

## Pertambangan

Adapun jenis pertambangan yang ada di Kabupaten Barito Timur berdasarkan data AMDAL Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 terdiri dari pertambangan batubara dengan luas kawasan 9.879 Ha tersebar di 9 (Sembilan) Kecamatan yaitu Kecamatan Dusun Tengah dan Raren Batuah seluas 1.000 Ha; Kecamatan Dusun Timur dan Paju Epat seluas 2.213 Ha; Kecamatan Karusen Janang, Paku, Awang seluas 1.000 Ha; Kecamatan Patangkep Tutui seluas 2.592 Ha; Kecamatan Patangkep Tutui, Awang seluas 3.074 Ha. Bahan galian C seperti pasir kuarsa sebesar 8.447 Ha di Kecamatan Paju Epat. Kontribusi sektor pertambangan Kabupaten Barito Timur mampu menggerakkan perekonomian Kabupaten Barito Timur. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi

sebesar 46,62% pada perekonomian Kabupaten Barito Timur. Batu bara merupakan komoditas yang sangat dominan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sepanjang tahun 2018-2022, nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku kategori ini mengalami pertumbuhan yang positif meskipun sempat mengalami kontraksi di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan karena kegiatan produksi pertambangan dan penggalian batu bara yang bertambah, serta kenaikan harga batu bara di pasar dunia.

## Industri

Kawasan peruntukan industri dengan luas 1.266,33 Ha terdiri dari kawasan industri di Kecamatan Pematang Karau dan kawasan industri di Kecamatan Paju Epat. Kawasan transmigrasi dengan luas 735,02 Ha tersebar dimasing-masing kecamatan kawasan permukiman perdesaan.

### 2.12. Daftar Produk Unggulan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024

| No. | SOPD   | Produk Unggulan (2024)   |
|-----|--|--|
| 1   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cempedak Saing;</li> <li>2. Durian Lai;</li> <li>3. Varietas Lokal Siam Busu;</li> <li>4. Sawit;</li> <li>5. Kopi.</li> </ol>  |
| 2   | Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerbau Rawa;</li> <li>2. Babi Lokal Patai;</li> <li>3. Wadi Patin;</li> <li>4. Ikan Kering Lais, Sepat, Saluang, Patin dan Gabus;</li> <li>5. Wadi Papuyu;</li> <li>6. Ikan Asap Gabus / Baung;</li> <li>7. Kerupuk Ikan Gabus;</li> <li>8. Babi Pedaging.</li> </ol>  |
| 3   | Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Barito Timur               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batik Mawinei;</li> <li>2. Keripik.Pisang Manurun;</li> <li>3. Kopi Dasmaru;</li> <li>4. Kerajinan Ukir;</li> <li>5. Serbuk Jahe Merah;</li> <li>6. Batik Tulis Mawar Sharom;</li> <li>7. Anyam Rotan Ester;</li> <li>8. Kerajinan Mandau Raut Puri;</li> <li>9. Beras Bartim;</li> <li>10. Gula Merah.</li> </ol>   |
| 4   | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bata Merah;</li> <li>2. Kerajinan Kayu (Cobek dan Ulekan);</li> <li>3. Pandai Besi (Mandau).</li> </ol>  |
| 5   | Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Timur  | <ol style="list-style-type: none"> <li>22. Festival Jajaka;</li> <li>23. Festival Nariuk;</li> <li>24. Festival Hammock;</li> <li>25. Susur Sungai;</li> <li>26. Desa Wisata;</li> <li>27. Panorama Kerbau;</li> <li>28. Rawa;</li> <li>29. Ritual Abeh Dayu;</li> <li>30. Ritual Abeh Kaayat;</li> <li>31. Adat Ijambe;</li> <li>32. Festival Bahasa;</li> <li>33. Pangun Raun;</li> <li>34. Festivsl Sawung Diki.</li> </ol> |

Sumber: Diolah dari Data Produk Unggulan Daerah Barito Timur Tahun 2024, 2025.

### 3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029, dapat disimpulkan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain daya dukung dan daya tampung pangan terlampaui namun diketahui bahwa 5 kecamatan di Kabupaten Barito Timur memiliki nilai DDDT pangan yang positif yaitu Kecamatan Awang, Kecamatan Karusen Janang, Kecamatan Paku, Kecamatan Patangkep Tutul dan Kecamatan Reren Batuah. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri, bahkan memiliki potensi surplus. Kondisi ini mencerminkan kapasitas produksi pangan yang mencukupi, terutama beras sebagai kebutuhan pokok, di sebagian besar Kecamatan. Namun, terdapat lima kecamatan dengan nilai DDDT pangan negatif, yaitu Kecamatan Benua Lima, Kecamatan Dusun Tengah, Kecamatan Dusun Timur, Kecamatan Paju Epat dan Pematang Karau. Nilai negatif ini menandakan bahwa kebutuhan pangan di kecamatan tersebut tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh produksi pangan lokalnya. Penyebab utama dari kondisi ini adalah terbatasnya lahan pertanian produktif di wilayah perkotaan akibat tingginya tingkat urbanisasi dan alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, industri, atau infrastruktur. Berdasarkan hasil perhitungan analisa Daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Barito tahun 2023 dan tahun 2029, diketahui bahwa kondisi daya dukung dan daya tampung pangan surplus atau belum terlampaui disemua Kecamatan baik perhitungan tahun 2023 maupun di tahun 2029.

### 4) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

#### Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah alat ukur komposit yang digunakan untuk menilai dan memotret kondisi serta kapasitas suatu wilayah dalam mencapai ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat kerentanan pangan dan kemampuan suatu wilayah untuk menjamin ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan bagi seluruh penduduknya. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) mencapai angka 82. Adapun Kabupaten Barito Timur memiliki ketahanan pangan yang cukup baik dimana rasio pemenuhan beras sudah berada di atas standar kecukupan pangan. Namun yang perlu digaribawahi adalah terjadinya penurunan jumlah produksi sehingga hal tersebut patut menjadi perhatian bagi seluruh stakeholders dalam mempertahankan ketahanan pangan daerah.

**Tabel 2.13. Kemandirian Pangan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

| Indikator                      | Satuan | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rasio Pemenuhan Pangan (Beras) | Kg     | 97,5   | 93,5   | 105,5  | 110,3  | 114,6  |
| Jumlah Produksi Padi           | Ton    | 50.276 | 47.462 | 39.960 | 41.205 | 45.607 |
| Kerawanan Pangan               | %      | 19,05  | 37,14  | 37     | 34     | 31,9   |
| Skor Pola Pangan Harapan       | -      | 86,1   | 82,5   | 84,7   | 85,9   | 86,3   |
| Ketersediaan Pangan Utama      | %      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |

Sumber: Diolah dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025.

## Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

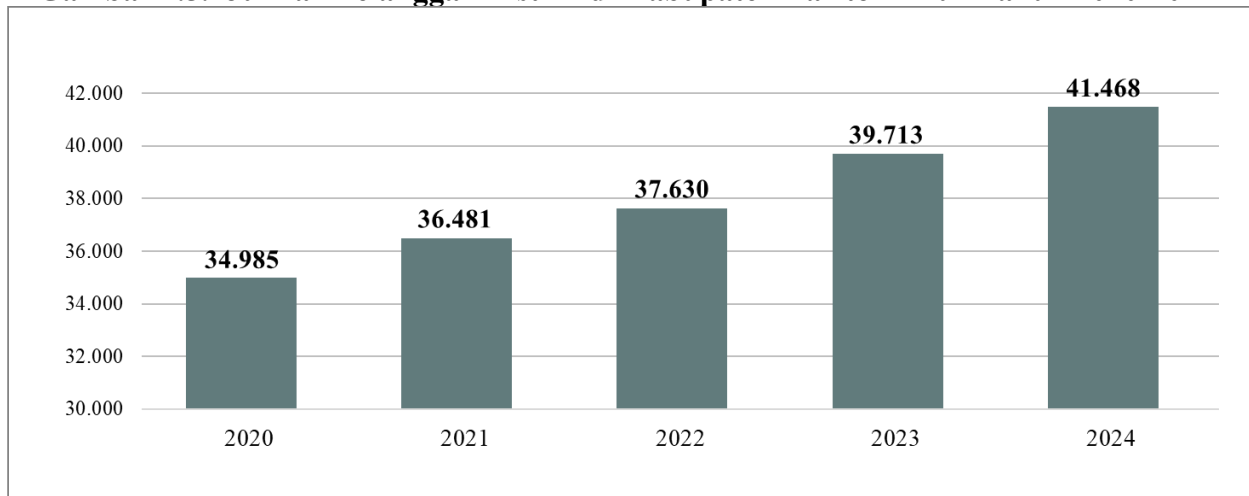
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan, atau yang secara internasional dikenal sebagai *Prevalence of Undernourishment (PoU)*, adalah salah satu indikator dalam mengukur kerawanan pangan dan kelaparan. Indikator ini merupakan persentase dari perkiraan proporsi penduduk yang asupan energi harian dari makanan tidak mencukupi untuk memenuhi tingkat energi minimum yang dibutuhkan agar kehidupan berjalan normal, aktif, dan sehat. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan mencapai angka 10.

## Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita adalah indikator yang mengukur rata-rata jumlah energi listrik yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam suatu wilayah (negara, provinsi, atau daerah) dalam periode waktu tertentu, biasanya setahun. Satuan yang umum digunakan adalah kilowatt-jam per kapita (kWh/kapita). Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, Konsumsi Listrik Per Kapita mencapai angka 99,03 (Kwh/kapita).

Daya listrik PLN yang terpasang di Kabupaten Barito Timur tahun 2022 sebesar 31.640 KW dengan jumlah produksi listrik 41,09 Juta KWh, serta produksi listrik terjual 40,66 Juta KWh. Produksi listrik yang tinggi dipengaruhi oleh banyaknya penduduk Kabupaten Barito Timur yang berimbas pada pemakaian akan kebutuhan listrik dalam kegiatan sehari-hari. Pada pertengahan tahun 2014 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dilaksanakan oleh PT. Rimau Electric sudah mulai aktif beroperasi.

**Gambar 2.5. Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**



Sumber: Diolah dari PLN dan BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

Berdasarkan data pada tahun 2024 jumlah pelanggan listrik yang dilayani oleh PLN mengalami peningkatan 1.935 pelanggan jika dibanding tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebanyak 41.468 pelanggan di tahun 2024, dimana pelanggan listrik terbanyak di Kabupaten Barito Timur berasal dari Kecamatan Dusun Timur.

**Tabel 2.14. Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2024**

| No.          | Kecamatan                 | 2023          | 2024          |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1            | Kecamatan Benua Lima      | 2.035         | 2.246         |
| 2            | Kecamatan Dusun Timur     | 12.352        | 12.671        |
| 3            | Kecamatan Paju Epat       | 2.270         | 2.408         |
| 4            | Kecamatan Awang           | 2.439         | 2.439         |
| 5            | Kecamatan Patangkep Tutui | 2.237         | 2.237         |
| 6            | Kecamatan Dusun Tengah    | 7.990         | 7.990         |
| 7            | Kecamatan Raren Batuah    | 2.438         | 2.438         |
| 8            | Kecamatan Paku            | 2.599         | 2.599         |
| 9            | Kecamatan Karusen Janang  | 1.126         | 1.126         |
| 10           | Kecamatan Pematang Karau  | 4.070         | 4.070         |
| <b>Total</b> |                           | <b>37.630</b> | <b>41.468</b> |

Sumber: Diolah dari PLN dan BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

Fokus infrastruktur ditunjukkan dengan tersedianya infrastruktur dasar yang memadai untuk menunjang peningkatan daya saing ekonomi focus infrastruktur ini terkait dengan luas wilayah yang produktif, sarana dan prasarana umum yang berdaya saing daerah, dan masih banyak lainnya. Salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah adalah fasilitas listrik, supaya dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Barito Timur secara layak selama 24 jam. Berdasarkan data PT PLN ULP Tamiang Layang pada tahun 2024 jumlah pelanggan listrik yang dilayani oleh PLN mengalami peningkatan dibanding tahun 2023, yaitu menjadi sebanyak 41.468 pelanggan. Pelanggan terbanyak berasal dari Kecamatan Dusun Timur.

### **Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum**

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum yang layak dan aman merupakan salah satu indikator fundamental bagi kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Hal ini juga menjadi bagian integral dari tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) Pengadaan dan distribusi air minum (air bersih) di Kabupaten Barito Timur dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Barito Timur. Sementara itu, jumlah pelanggan yang menggunakan air dari PDAM pada tahun 2024 adalah sebanyak 5.021 pelanggan, dengan pelanggan terbanyak berasal dari Kecamatan Dusun Timur. Jumlah air yang disalurkan di Kabupaten Barito Timur adalah sebanyak 551.812 m<sup>3</sup>. Nilai air yang disalurkan adalah Rp 4.974.890.940.

**Tabel 2.15. Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024**

| Kecamatan       | Pelanggan | Air Disalurkan | Nilai (Rp)    |
|-----------------|-----------|----------------|---------------|
| Benua Lima      | 320       | 29.607         | 260.463.500   |
| Dusun Timur     | 2.854     | 310.034        | 2.826.230.540 |
| Paju Epat       | -         | -              | -             |
| Awang           | 151       | 18.482         | 161.387.500   |
| Patangkep Tutui | 348       | 38.664         | 339.888.100   |
| Dusun Tengah    | 1.090     | 134.984        | 1.209.677.800 |
| Raren Batuah    | -         | -              | -             |
| Paku            | -         | -              | -             |
| Karusen Janang  | 219       | 17.209         | 151.977.700   |
| Pematang Karau  | 39        | 2.832          | 25.265.800    |

| Kecamatan    | Pelanggan | Air Disalurkan | Nilai (Rp)    |
|--------------|-----------|----------------|---------------|
| Barito Timur | 5.021     | 551.812        | 4.974.890.940 |

Sumber: Diolah dari PDAM dan BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

## 5) Lingkungan Hidup Berkualitas

### Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Lingkungan hidup berkualitas adalah lingkungan yang dapat mendukung kelangsungan hidup manusia dengan baik. Untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas, maka perlu dilakukan pelestarian baik lingkungan maupun kekayaan SDA yang saat ini dimiliki. Indeks Risiko terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Barito Timur diukur melalui daya dukung lingkungan yang diketahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Semakin tinggi indeks kualitas lingkungan hidup maka semakin terjaga kemampuan lingkungan sehingga daya dukungnya juga semakin meningkat.

**Tabel 2.16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

| No. | Tahun | IKLH  | Kriteria |
|-----|-------|-------|----------|
| 1   | 2020  | 62,80 | Sedang   |
| 2   | 2021  | 69,17 | Sedang   |
| 3   | 2022  | 72,25 | Baik     |
| 4   | 2023  | 66,59 | Sedang   |
| 5   | 2024  | 66,66 | Sedang   |

Sumber: Diolah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, 2025.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Barito Timur sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, namun sejak tahun 2021 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terus mengalami peningkatan. Hal ini lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat kualitas air dan udara yang baik. Pada tahun 2023 mengalami penurunan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Barito Timur mencapai 66,59 yang termasuk ke dalam kategori sedang. Pada tahun 2024 mencapai 66,66 yang termasuk ke dalam kategori sedang.

**Tabel 2.17. Perkembangan Parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

| No. | Parameter                     | Tahun |       |       |       |       |
|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                               | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1   | Indeks Kualitas Air           | 46,00 | 62,73 | 70,00 | 54,00 | 54,71 |
| 2   | Indeks Kualitas Udara         | 99,72 | 90,20 | 90,90 | 91,52 | 91,02 |
| 3   | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 47,71 | 41,32 | 41,61 | 42,12 | 42,14 |

Sumber: Diolah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, 2025.

Indeks kualitas air Kabupaten Barito Timur sejak 2020 terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi mencapai nilai 54,71. Indeks kualitas udara pada 5 (lima) tahun terakhir selalu menjadi indeks dengan nilai tertinggi dalam perhitungan IKLH. Pada tahun 2020 sempat mencapai nilai 99,72 namun pada tahun selanjutnya mengalami penurunan, hingga pada tahun 2024 berada pada 91,02. Berbeda dengan parameter lainnya, indeks kualitas tutupan lahan tidak banyak perubahan yang terjadi. Dalam 5

(lima) tahun terakhir, indeks kualitas tutupan lahan selalu termasuk dalam kategori kurang, dimana pada tahun 2024 berada pada 42,14.

### **Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**

Akses sanitasi layak dan aman adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan aman mencapai angka 91,74%.

### **Penanganan Persampahan**

Penanganan persampahan Kabupaten Barito Timur meliputi: pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifatnya; pengumpulan sampah ke tempat pengolahan residu; pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu ke TPA; pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 persentase penanganan sampah 23,26%.

## **6) Resiliensi Terhadap Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**

### **Penurunan Intensitas Emisi GRK**

Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah salah satu strategi utama dalam upaya mitigasi perubahan iklim global. Konsep ini berfokus pada efisiensi emisi, yaitu mengurangi jumlah emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer per satuan aktivitas ekonomi atau produksi tertentu. Saat ini penurunan emisi GRK Menuju *Net Zero Emission* Kabupaten Barito Timur berada pada 76% di tahun 2024.

### **Indeks Risiko Bencana**

Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Indeks risiko bencana berada pada angka 76.52 di tahun 2024. Selanjutnya berdasarkan RTRW Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034 kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Barito Timur meliputi kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan banjir.

1. Kawasan Rawan Tanah Longsor
  - a. Desa Baruyan dan Malintut di Kecamatan Raren Batuah;

- b. Desa Bahalang, Lalap, Jango, Tamiang, Kotam di Kecamatan Patangkep Tutui;
  - c. Desa Jatus, Sumber Garunggung, Muara Awang di Kecamatan Dusun Tengah;
  - d. Desa Bamban Kecamatan Banua Lima.
2. Kawasan Rawan Banjir
- a. Desa Wuram di Kecamatan Karusen Janang;
  - b. Desa Tampa di Kecamatan Paku;
  - c. Desa Nagaleah, Bambulung, Ketab, Muara Plantau, Tuyau dan Bararawa di Kecamatan Pematang Karau;
  - d. Desa Batuah, Desa Puri, Desa Lenggang, Desa Malintut, di Kecamatan Raren Batuah;
  - e. Desa Netampin dan Sumber Garunggung di Kecamatan Dusun Tengah;
  - f. Desa Magantis dan Haringen, Desa Jaar, Desa Matabu di Kecamatan Dusun Timur, dan Desa Kalinapu, Tampulangit, Telang Baru dan Juru Banu di Kecamatan Paju Epat.

Dalam dokumen kajian risiko bencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026, dilakukan pengkajian bahaya untuk mengetahui indeks bahaya dengan memperhatikan aspek probabilitas dan intensitas. Aspek probabilitas berkaitan dengan frekuensi kejadian bahaya sehingga data sejarah kejadian bencana dijadikan pertimbangan dalam penyusunan bahaya. Di sisi lain, aspek intensitas menunjukkan seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari bahaya tersebut. Potensi bahaya bencana alam di Kabupaten Timur adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.18. Potensi Bencana Alam di Kabupaten Barito Timur**

| No. | Ancaman Bencana           | Bahaya    |         |         |         |        | Kelas |
|-----|---------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|-------|
|     |                           | Luas (Ha) |         |         |         | Total  |       |
|     |                           | Rendah    | Sedang  | Tinggi  | Total   |        |       |
| 1   | Banjir                    | 4.009     | 71.664  | 88.486  | 164.158 | Tinggi |       |
| 2   | Banjir Bandang            | 1         | 28      | 65      | 94      | Tinggi |       |
| 3   | Cuaca Ekstrim             | 57.225    | 162.781 | 148.783 | 368.788 | Tinggi |       |
| 4   | Gempa bumi                | 383.400   | 0       | 0       | 383.400 | Rendah |       |
| 5   | Kebakaran Hutan dan Lahan | 19.298    | 232.566 | 116.564 | 368.428 | Tinggi |       |
| 6   | Kekeringan                | 135.783   | 247.617 | 0       | 383.400 | Sedang |       |
| 7   | Tanah longsor             | 6.313     | 38.276  | 0       | 44.590  | Sedang |       |

Sumber: Diolah dari Data Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026, 2025.

Setiap bencana memiliki luas dan kelas bahaya yang berbeda-beda. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kelas bahaya yang mendominasi di Kabupaten Barito Timur adalah tinggi, yakni pada ancaman bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, serta kebakaran hutan dan lahan. Diikuti oleh kelas bahaya sedang, yaitu kekeringan dan tanah longsor, sedangkan gempa bumi adalah satu-satunya ancaman bencana alam dengan kelas rendah.

Kerentanan (*vulnerability*) merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi bencana. Semakin “rentan” suatu kelompok masyarakat terhadap bencana, semakin besar kerugian yang dialami apabila terjadi bencana pada kelompok masyarakat tersebut. Analisis kerentanan dilakukan secara spasial dengan menggabungkan semua komponen penyusun kerentanan, yang masing-masing komponen kerentanan juga diperoleh dari hasil proses penggabungan dari beberapa parameter

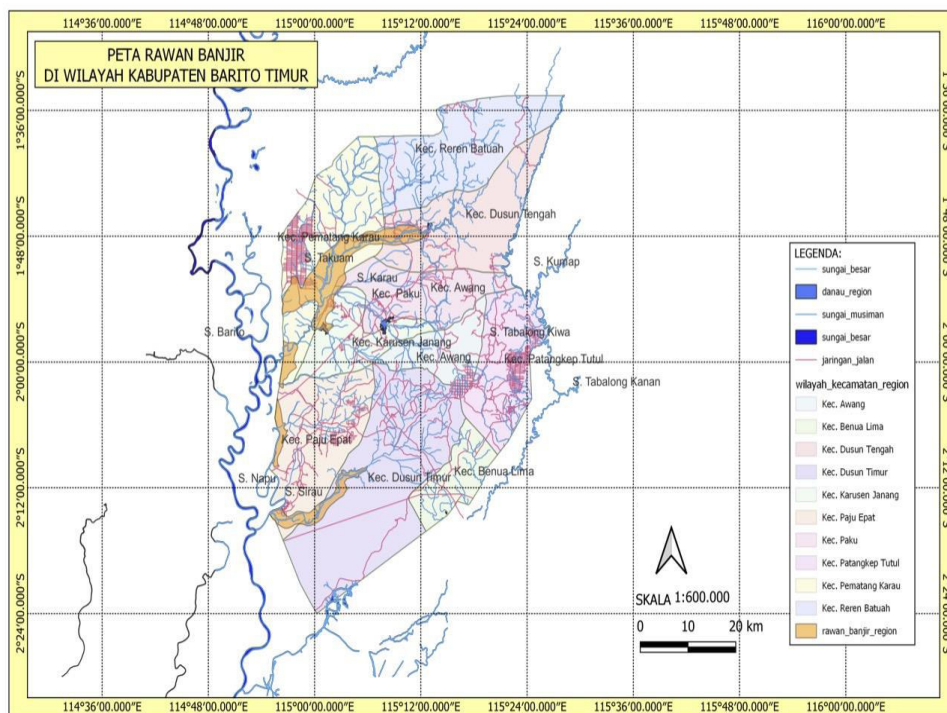
penyusun. Komponen penyusun kerentanan terdiri dari kerentanan sosial, kerentanan fisik, kerentanan ekonomi, dan kerentanan lingkungan.

**Tabel 2.19. Kerentanan Bencana Alam di Kabupaten Barito Timur**

| No. | Ancaman Bencana           | Kelas Penduduk Terpapar | Kelas Kerugian | Kelas Kerusakan Lingkungan | Kelas Kerentanan |
|-----|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| 1   | Banjir                    | Sedang                  | Tinggi         | Tinggi                     | Tinggi           |
| 2   | Banjir Bandang            | Rendah                  | Rendah         | Rendah                     | Rendah           |
| 3   | Cuaca Ekstrem             | Sedang                  | Tinggi         | -                          | Tinggi           |
| 4   | Gempa bumi                | Rendah                  | Rendah         | -                          | Rendah           |
| 5   | Kebakaran Hutan dan Lahan | -                       | Rendah         | Tinggi                     | Tinggi           |
| 6   | Kekeringan                | Sedang                  | Rendah         | Tinggi                     | Sedang           |
| 7   | Tanah longsor             | Sedang                  | Sedang         | Tinggi                     | Sedang           |

Sumber: Diolah dari Data Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026, 2025.

**Gambar 2.6. Peta Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Barito Timur**



Sumber: Diolah dari Data RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034, 2025.

## Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah sebuah instrumen komposit yang dikembangkan untuk mengukur kapasitas suatu wilayah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dirancang untuk menilai tingkat resiliensi atau kemampuan daerah untuk memitigasi risiko bencana, beradaptasi terhadap perubahan kondisi, meminimalkan dampak kerusakan, dan pulih secara sosial, ekonomi, serta lingkungan pascabencana. Adapun Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Kabupaten Barito Timur tahun 2024 sebesar 0,40.

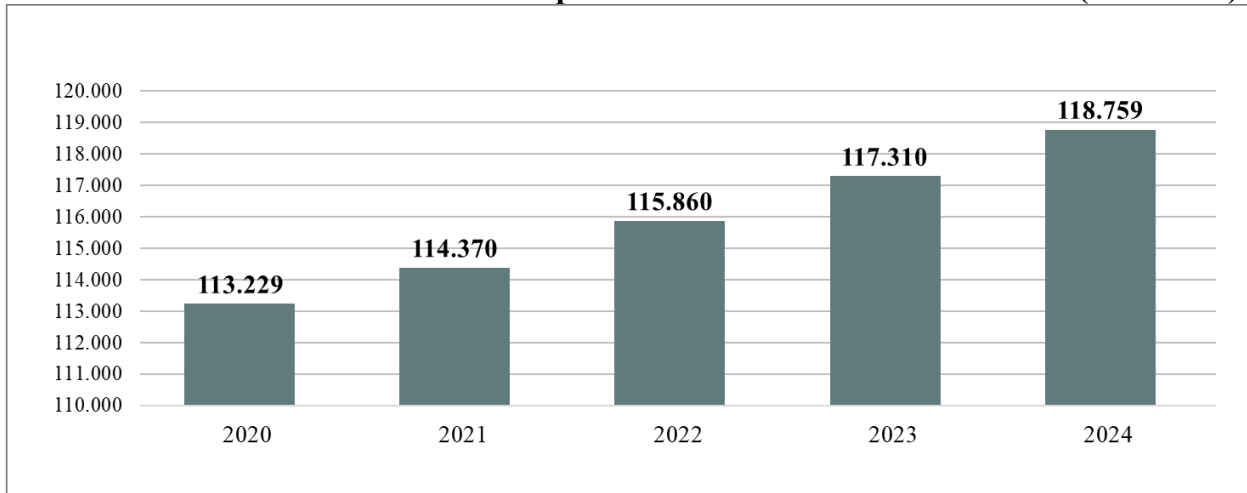
## 7) Demografi

### Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Barito Timur terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 jumlah penduduk 113.229 (Jiwa), sampai pada tahun 2024 meningkat menjadi 118.759

(Jiwa), bertambah 5.530 (Jiwa). Komposisi penduduk Kabupaten Barito Timur terdiri atas 60.711 penduduk Laki-Laki dan 58.048 penduduk Perempuan. Laki-Laki sebanyak 51,12% dan Perempuan 48,88% pada tahun 2024. Jumlah penduduk terbanyak berasal dari kelompok umur 20-24 tahun.

**Gambar 2.7. Jumlah Penduduk di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Ribu Jiwa)**



Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

### Rasio dan Kepadatan Penduduk

Dari data penduduk Kabupaten Kabupaten Barito Timur tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Kabupaten Barito Timur sebanyak 118.759 (Jiwa). Persebaran penduduk di Kabupaten Barito Timur masih belum merata. Hampir 50% penduduk terkonsentrasi di dua kecamatan yakni Dusun Timur dan Dusun Tengah, sedangkan sisanya tersebar di delapan kecamatan lain. Hal ini disebabkan oleh pusat pemerintahan yang berlokasi di Kecamatan Dusun Timur (Kelurahan Tamiang Layang), serta tersedianya berbagai sarana/fasilitas perekonomian di Kecamatan Dusun Tengah khususnya di Kelurahan Ampah Kota. Posisi geografis Kecamatan Dusun Tengah cukup strategis karena berada di jalur Palangka Raya-Banjarmasin-Muara Teweh. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Dusun Tengah menjadi Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni mencapai 67,00 Jiwa/Km<sup>2</sup> mengingat tingginya aktivitas ekonomi di Kecamatan tersebut. Sementara itu, Kecamatan Paju Epat yang memiliki luas wilayah terbesar kedua di Kabupaten Barito Timur memiliki jumlah penduduk terkecil sehingga kepadatan penduduk pun menempati posisi terendah, yakni hanya 10,51 Jiwa/Km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.20. Luas Wilayah, Persentase Penduduk Menurut Kecamatan, dan Penduduk Kabupaten Barito Timur Tahun 2024**

| No. | Kecamatan       | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) | Persentase Penduduk (%) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> ) |
|-----|-----------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1   | Benua Lima      | 3.212,515 Km <sup>2</sup>       | 5,49                    | 25,28                                      |
| 2   | Dusun Timur     |                                 | 26,00                   | 35,58                                      |
| 3   | Paju Epat       |                                 | 5,88                    | 10,51                                      |
| 4   | Awang           |                                 | 5,24                    | 30,64                                      |
| 5   | Patangkep Tutul |                                 | 5,95                    | 27,71                                      |
| 6   | Dusun Tengah    |                                 | 20,93                   | 67,00                                      |
| 7   | Raren Batuah    |                                 | 7,16                    | 45,69                                      |
| 8   | Paku            |                                 | 7,61                    | 33,21                                      |

| No.          | Kecamatan      | Luas Wilayah (Km2) | Presentase Penduduk (%) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) |
|--------------|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 9            | Karusen Janang |                    | 4,83                    | 32,22                         |
| 10           | Pematang Karau |                    | 10,92                   | 22,39                         |
| <b>Total</b> |                |                    | <b>100,00</b>           | <b>30,98</b>                  |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

**Tabel 2.21. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024**

| No           | Kecamatan       | Penduduk (Jiwa) | Rasio Jenis Kelamin |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|              |                 | Jumlah Penduduk |                     |
| 1            | Benua Lima      | 6.523           | 108                 |
| 2            | Dusun Timur     | 30.877          | 102                 |
| 3            | Paju Epat       | 6.981           | 119                 |
| 4            | Awang           | 6.220           | 105                 |
| 5            | Patangkep Tutul | 7.066           | 106                 |
| 6            | Dusun Tengah    | 24.858          | 102                 |
| 7            | Raren Batuah    | 8.499           | 103                 |
| 8            | Paku            | 9.034           | 106                 |
| 9            | Karusen Janang  | 5.736           | 106                 |
| 10           | Pematang Karau  | 12.965          | 105                 |
| <b>Total</b> |                 | <b>118.759</b>  | <b>105</b>          |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

Dari tabel diatas, diketahui bahwa Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Dusun Timur dengan penduduk sebanyak 30.877 (Jiwa). Adapun rasio jenis kelamin di Kabupaten Barito Timur adalah 105, artinya terdapat 105 penduduk Laki-Laki per 100 penduduk Perempuan.

**Tabel 2.22. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024**

| Kelompok Umur | Jenis Kelamin |               |                |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
|               | Laki-Laki     | Perempuan     | Jumlah         |
| 0-4           | 5.128         | 4.943         | 10.071         |
| 5-9           | 4.209         | 3.974         | 8.183          |
| 10-14         | 4.486         | 4.334         | 8.820          |
| 15-19         | 5.023         | 4.634         | 9.657          |
| 20-24         | 5.303         | 4.921         | 10.224         |
| 25-29         | 5.092         | 4.894         | 9.986          |
| 30-34         | 4.723         | 4.519         | 9.242          |
| 35-39         | 4.621         | 4.574         | 9.195          |
| 40-44         | 4.665         | 4.426         | 9.091          |
| 45-49         | 4.396         | 4.221         | 8.617          |
| 50-54         | 3.908         | 3.741         | 7.649          |
| 55-59         | 3.205         | 2.931         | 6.136          |
| 60-64         | 2.394         | 2.202         | 4.596          |
| 65-69         | 1.636         | 1.581         | 3.217          |
| 70-74         | 1.050         | 1.049         | 2.099          |
| 75+           | 872           | 1.104         | 1.976          |
| <b>Total</b>  | <b>60.711</b> | <b>58.048</b> | <b>118.759</b> |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

**Tabel 2.23. Indikator Kependudukan Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

| Uraian          | 2020    | 2021    | 2022    | 2023   | 2024    |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Penduduk (Jiwa) | 113.229 | 114.243 | 115.406 | 117.31 | 118.759 |
| Laki-Laki       | 58.112  | 58.596  | 59.155  | 60,030 | 60.711  |
| Perempuan       | 55.117  | 55.647  | 56.251  | 57,280 | 58.048  |

| Uraian                                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jumlah Rumah Tangga (Juta)                 | 37.307 | 37.922 | 38.246 | 38.746 | 38.746 |
| Rata-Rata ART (Jiwa/Ruta)                  | 3,04   | 3,01   | 3,02   | 3,02   | 3,02   |
| Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> ) | 29,53  | 29,80  | 30,10  | 30,60  | 30,98  |
| Sex Ratio (%)                              | 105%   | 105%   | 105%   | 105%   | 105%   |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

### Proyeksi Kependudukan Kabupaten Barito Timur 2025-2045

Untuk suatu perencanaan pembangunan di segala bidang, maka diperlukan informasi mengenai keadaan penduduk seperti jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan usunan penduduk menurut umur. Informasi yang tersedia tidak hanya menyangkut keadaan pada saat perencanaan disusun, tetapi juga informasi masa lalu dan masa kini yang sudah tersedia dari hasil sensus dan survei-survei. Sedangkan untuk masa yang akan datang, informasi tersebut perlu dibuat suatu proyeksi yaitu perkiraan jumlah penduduk dan komposisinya di masa mendatang. Proyeksi penduduk yang dimaksud bukan merupakan ramalan jumlah penduduk tetapi suatu penghitungan ilmiah yang didasarkan komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk dimasa yang akan datang. Komponen-komponen tersebut akan menentukan besaran jumlah penduduk dan struktur penduduk. Dapat dikatakan proyeksi penduduk adalah penghitungan jumlah penduduk (menurut komposisi umur dan jenis kelamin) di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

**Tabel 2.24. Proyeksi Penduduk Barito Timur Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2029**

| Umur         | 2020          | 2025          | 2030          | 2035          | 2040          | 2045          |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0-4          | 8,55          | 10,07         | 10,13         | 9,89          | 10,26         | 10,69         |
| 5-9          | 8,69          | 8,56          | 10,08         | 10,14         | 10,43         | 9,86          |
| 10-14        | 9,61          | 8,63          | 8,49          | 10,01         | 11,53         | 10,01         |
| 15-19        | 10,14         | 9,47          | 8,5           | 8,36          | 12,17         | 12,68         |
| 20-24        | 9,91          | 10,18         | 9,51          | 8,53          | 11,89         | 12,39         |
| 25-29        | 9,17          | 10,18         | 10,46         | 9,77          | 11,00         | 11,46         |
| 30-34        | 9,17          | 9,35          | 10,39         | 10,66         | 11,00         | 11,46         |
| 35-39        | 9,17          | 9,19          | 9,38          | 10,42         | 11,00         | 11,46         |
| 40-44        | 8,87          | 9,12          | 9,14          | 9,32          | 10,64         | 11,09         |
| 45-49        | 8,08          | 8,70          | 8,95          | 8,97          | 9,70          | 10,10         |
| 50-54        | 6,66          | 7,85          | 8,46          | 8,71          | 7,99          | 8,33          |
| 55-59        | 5,15          | 6,39          | 7,54          | 8,15          | 6,18          | 6,44          |
| 60-64        | 3,76          | 4,83          | 6,00          | 7,11          | 4,51          | 4,70          |
| 65-69        | 2,66          | 3,83          | 4,36          | 5,45          | 3,19          | 3,33          |
| 70-74        | 1,61          | 2,22          | 2,85          | 3,70          | 1,93          | 3,01          |
| 75+          | 1,68          | 2,08          | 2,8           | 3,75          | 2,02          | 2,10          |
| <b>Total</b> | <b>112,88</b> | <b>120,65</b> | <b>127,04</b> | <b>132,94</b> | <b>135,46</b> | <b>139,09</b> |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

**Tabel 2.25. Ringkasan Kondisi Demografi Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2045**

| Penduduk                                   | 2020          | 2025          | 2030          | 2035          | 2040          | 2045          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Laki-Laki (Ribun Jiwa)                     | 57,94         | 61,39         | 64,51         | 67,11         | 70,11         | 73,05         |
| Perempuan (Ribun Jiwa)                     | 54,94         | 58,82         | 62,52         | 65,83         | 65,35         | 66,04         |
| <b>Total (Ribun Jiwa)</b>                  | <b>112,88</b> | <b>120,20</b> | <b>127,03</b> | <b>132,94</b> | <b>135,46</b> | <b>139,09</b> |
| Rasio Jenis Kelamin (%)                    | 105,46        | 104,37        | 103,18        | 101,94        | 107,29        | 110,61        |
| Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> ) | 29,44         | 31,35         | 33,13         | 34,67         | 35,33         | 36,28         |

| <b>Penduduk</b>               | <b>2020</b> | <b>2025</b> | <b>2030</b> | <b>2035</b> | <b>2040</b> | <b>2045</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Komposisi Penduduk (%)</b> |             |             |             |             |             |             |
| 0-14 Tahun                    | 26,85       | 27,25       | 28,70       | 30,03       | 31,02       | 33,22       |
| 15-64 Tahun                   | 80,08       | 85,26       | 88,32       | 90,01       | 92,12       | 95,08       |
| 65+ Tahun                     | 5,95        | 7,69        | 10,01       | 12,89       | 14,1        | 17,55       |
| Angka Ketergantungan (%)      | 40,96       | 40,98       | 43,83       | 47,68       | 48,98       | 49,01       |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

Jumlah penduduk Kabupaten Barito Timur pada tahun 2020 adalah sebesar 112,88 (Ribu Jiwa). Jumlah penduduk tersebut diperkirakan akan terus bertambah. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk berbasis aritmatik pada tabel di atas diperkirakan jumlah penduduk di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2045 mencapai angka 139,09 (Ribu Jiwa).

Berdasarkan tabel diatas terkait ringkasan kondisi demografi hasil proyeksi penduduk Kabupaten Barito Timur tahun 2020-2045, menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Barito Timur pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 139,09 (Ribu Jiwa) terdiri atas 73,05 (Ribu Jiwa) penduduk laki-laki dan 66,04 (Ribu Jiwa) perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Barito Timur terus meningkat akibat dari terus bertambahnya angka kelahiran dan migrasi masuk serta terbatasnya ruang wilayah. Pada tahun 2045, diproyeksikan kepadatan penduduk Kabupaten Barito Timur adalah sebesar 36,28 (Jiwa/Km<sup>2</sup>). Jumlah penduduk Kabupaten Barito Timur pada tahun 2020 adalah sebesar 112,88 (Ribu Jiwa). Jumlah penduduk diperkirakan bertambah sebanyak 26,21 (Ribu Jiwa), sehingga menjadi sebanyak 139,09 (Ribu Jiwa) pada tahun 2045.

**Tabel 2.26. Ringkasan Kondisi Demografi Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029**

| <b>Penduduk</b>                            | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   | <b>2028</b>   | <b>2029</b>   |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Laki-Laki (Ribu Jiwa)                      | 61,49         | 61,64         | 64,79         | 67,94         | 71,09         |
| Perempuan (Ribu Jiwa)                      | 59,12         | 59,23         | 62,13         | 65,03         | 67,93         |
| <b>Total (Ribu Jiwa)</b>                   | <b>120,65</b> | <b>127,04</b> | <b>132,94</b> | <b>135,46</b> | <b>139,09</b> |
| Rasio Jenis Kelamin (%)                    | 104,37        | 104,42        | 109,52        | 114,62        | 119,72        |
| Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> ) | 31,35         | 31,42         | 33,02         | 34,62         | 36,22         |
| <b>Komposisi Penduduk (%)</b>              |               |               |               |               |               |
| 0-14 Tahun                                 | 27,25         | 27,31         | 28,91         | 30,51         | 32,11         |
| 15-64 Tahun                                | 85,26         | 85,41         | 89,65         | 93,89         | 98,13         |
| 65+ Tahun                                  | 7,69          | 7,81          | 8,35          | 8,89          | 9,43          |
| Angka Ketergantungan (%)                   | 40,98         | 41,06         | 43,23         | 45,4          | 47,57         |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

Berdasarkan tabel diatas terkait ringkasan kondisi demografi hasil proyeksi penduduk Kabupaten Barito Timur tahun 2025-2029, maka jumlah penduduk Barito Timur pada tahun 2029 diperkirakan mencapai 145,21 (Ribu Jiwa) terdiri atas 74,09 (Ribu Jiwa) penduduk laki-laki dan 70,72 (Ribu Jiwa) perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Barito Timur terus meningkat akibat dari bertambahnya angka kelahiran dan migrasi masuk serta terbatasnya ruang wilayah. Pada tahun 2029, diproyeksikan kepadatan penduduk Kabupaten Barito Timur adalah sebesar 37,75 (Jiwa/Km<sup>2</sup>). Jumlah penduduk Kabupaten Barito Timur pada tahun 2025 adalah sebesar 120,6 ribu jiwa. Jumlah penduduk diperkirakan bertambah sebanyak 24,56 (Ribu Jiwa), sehingga menjadi sebanyak 145,21 (Ribu Jiwa) pada tahun 2029.

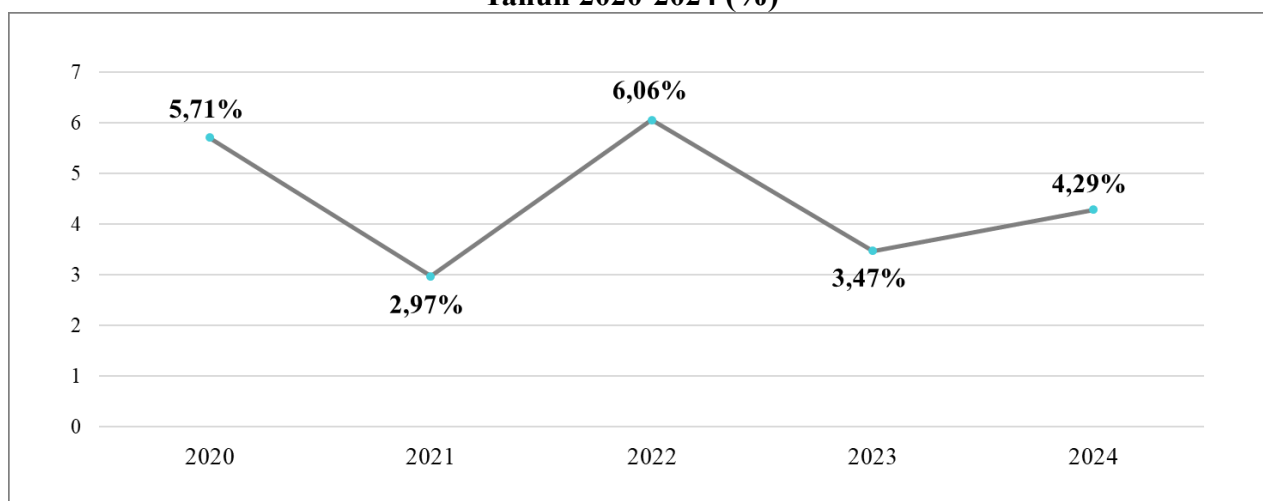
Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Barito Timur pada tahun 2025 adalah 40,98% dan diproyeksikan meningkat menjadi 49,66% pada tahun 2029. Hal ini berarti pada tahun 2029 diprediksi setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 50 penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan mengimplikasikan beban yang semakin berat terhadap penduduk usia produktif karena semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Kondisi tersebut menjadi catatan khusus terhadap arah pembangunan agar penduduk usia produktif mampu memanfaatkan momentum peluang berkontribusi pada pembangunan dan tingginya penduduk usia non produktif dapat diakomodir oleh program-program pembangunan. Pada tahun 2045, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Barito Timur sebesar 119,7 (Ribu Jiwa), artinya, terdapat sekitar 119-120 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin semakin meningkat pada periode 2025-2029 yang menunjukkan bahwa penambahan jumlah penduduk perempuan masih di bawah penambahan jumlah penduduk laki-laki.

## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 1) Kesejahteraan Ekonomi

Laju pertumbuhan PDRB per kapita mengalami trend yang fluktuatif sepanjang tahun 2020-2024. Besarnya nilai PDRB per kapita ini masih belum dapat menggambarkan tingkat penyebaran pendapatan masyarakat di setiap srata ekonomi, karena belum dikurangi dengan pendapatan yang keluar-masuk di Kabupaten Barito Timur.

**Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (%)**



Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

Selanjutnya tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat sangat bergantung pada potensi sumber sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB Kabupaten Barito Timur menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2024 sebesar 10.914,98 (Miliar)

meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 9,86 (Miliar). PDRB Kabupaten Barito Timur Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2024 sebesar 6.108,02 (Miliar), meningkat sebesar 4,29% dibandingkan tahun 2023.

**Tabel 2.27. Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

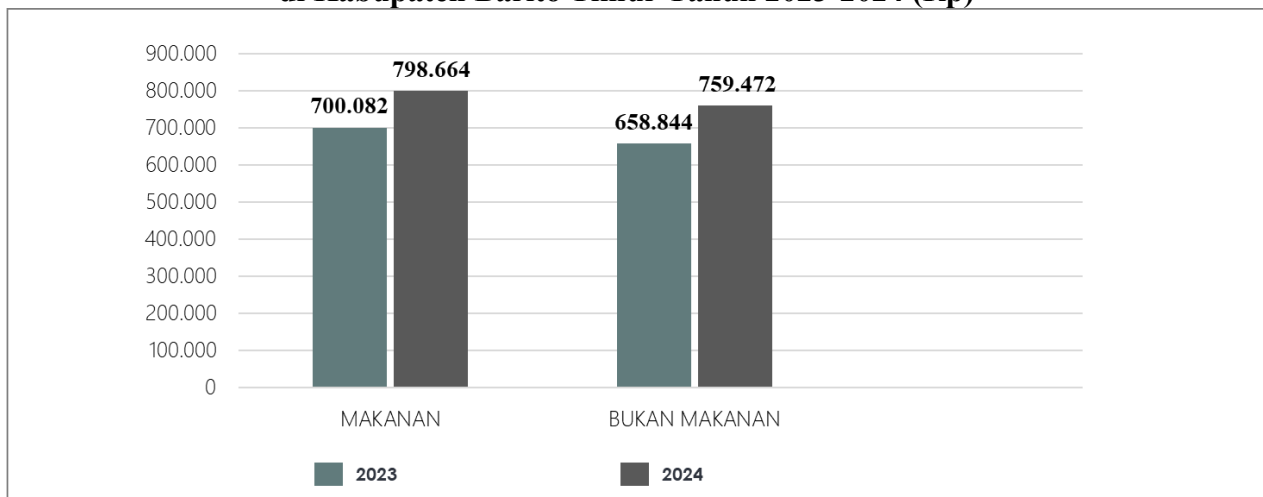
| Nilai PDRB (Miliar Rupiah)   | 2020     | 2021     | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| (1)                          | (2)      | (3)      | (4)       | (5)       | (6)       |
| ADHB                         | 7.548,50 | 7.949,95 | 10.948,06 | 10.905,12 | 10.914,98 |
| ADHK 2010                    | 5.182,50 | 5.336,34 | 5.659,98  | 5.856,57  | 6.108,02  |
| Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,71     | 2,97     | 6,06      | 3,47      | 4,29      |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

### Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran Rumah Tangga merupakan salah satu indikator untuk mengetahui gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi presentase pengeluaran untuk makan berarti semakin rendah tingkat kesejahtraannya, demikian juga sebaliknya. Rata-rata pengeluaran makanan Kabupaten Barito Timur tahun 2023 sebesar Rp 700,082, tahun 2024 sebesar Rp 798,664. Rata-rata pengeluaran bukan makanan Kabupaten Barito Timur tahun 2023 sebesar Rp 658,884, tahun 2024 sebesar Rp 759,472.

**Gambar 2.9. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2024 (Rp)**

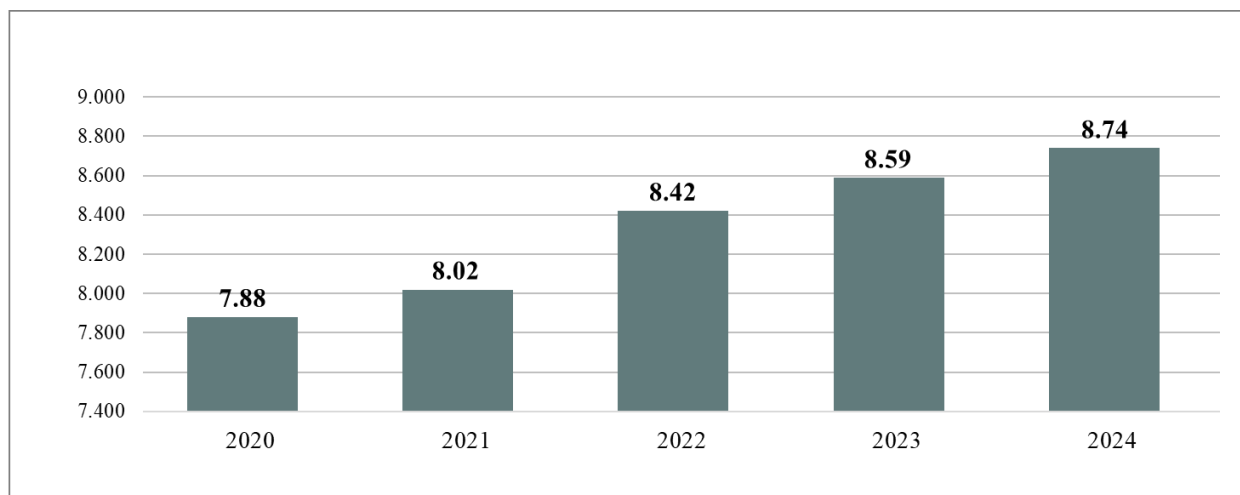


Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

### Tingkat Kemiskinan

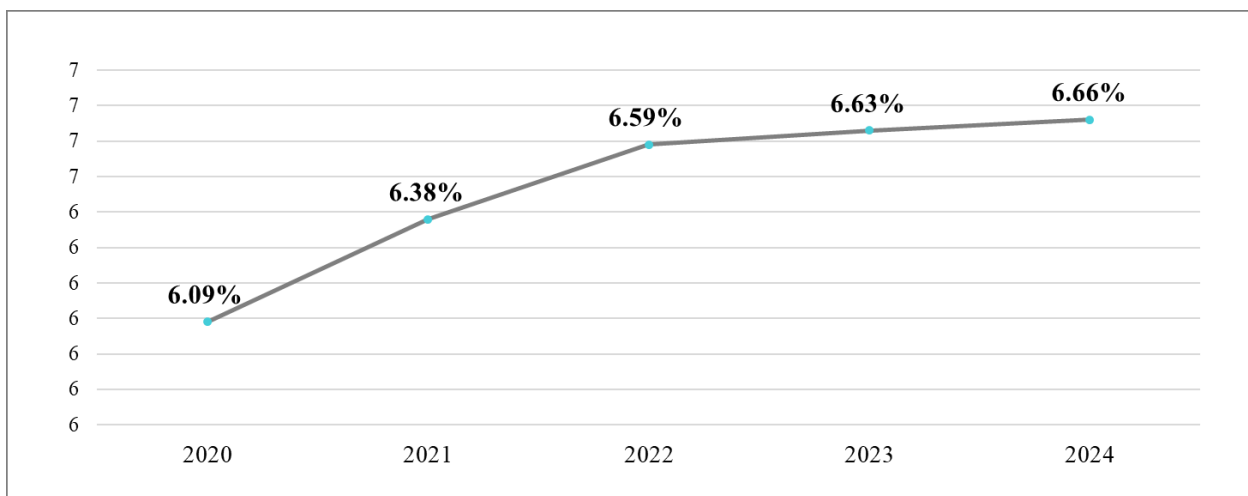
Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir terlihat menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2020-2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Timur cenderung meningkat baik dari persentase maupun dari jumlah penduduk miskin secara keseluruhan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebesar 7.88 (Ribu Jiwa) atau sebesar 6,09%, sementara pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Timur di tahun 2024 adalah 8.74 (Ribu Jiwa). Banyaknya penduduk miskin ini dipengaruhi oleh besarnya garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, menjadi faktor pendorong semakin bertambahnya jumlah dan persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Barito Timur tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 6,66% dari tahun sebelumnya.

**Gambar 2.10. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Ribu Jiwa)**



Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

**Gambar 2.11. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (%)**



Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

**Tabel 2.28. Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023-2024**

| Kabupaten/ Kota     | Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) |                | Presentase Penduduk Miskin (%) |             |
|---------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|
|                     | 2023                               | 2024           | 2023                           | 2024        |
| (1)                 | (2)                                | (3)            | (4)                            | (5)         |
| Kotawaringin Barat  | 513.949                            | 536.747        | 4,18                           | 4,11        |
| Kotawaringin Timur  | 547.170                            | 572.827        | 5,69                           | 5,66        |
| Kapuas              | 485.958                            | 508.022        | 5,21                           | 5,25        |
| Barito Selatan      | 512.492                            | 542.075        | 4,72                           | 4,83        |
| Barito Utara        | 563.393                            | 590.832        | 5,80                           | 5,35        |
| Sukamara            | 648.534                            | 676.781        | 3,96                           | 4,14        |
| Lamandau            | 634.710                            | 673.768        | 3,12                           | 3,25        |
| Seruyan             | 608.186                            | 642.281        | 7,12                           | 7,08        |
| Katingan            | 589.596                            | 615.575        | 4,99                           | 5,26        |
| Pulang Pisau        | 507.058                            | 542.349        | 4,58                           | 4,56        |
| Gunung Mas          | 526.341                            | 562.332        | 5,47                           | 5,68        |
| <b>Barito Timur</b> | <b>623.053</b>                     | <b>663.119</b> | <b>6,63</b>                    | <b>6,66</b> |
| Murung Raya         | 607.053                            | 646.759        | 6,44                           | 6,58        |
| Palangka Raya       | 530.223                            | 555.618        | 3,44                           | 3,52        |
| Kalimantan Tengah   | 596.184                            | 641.524        | 5,11                           | 5,17        |

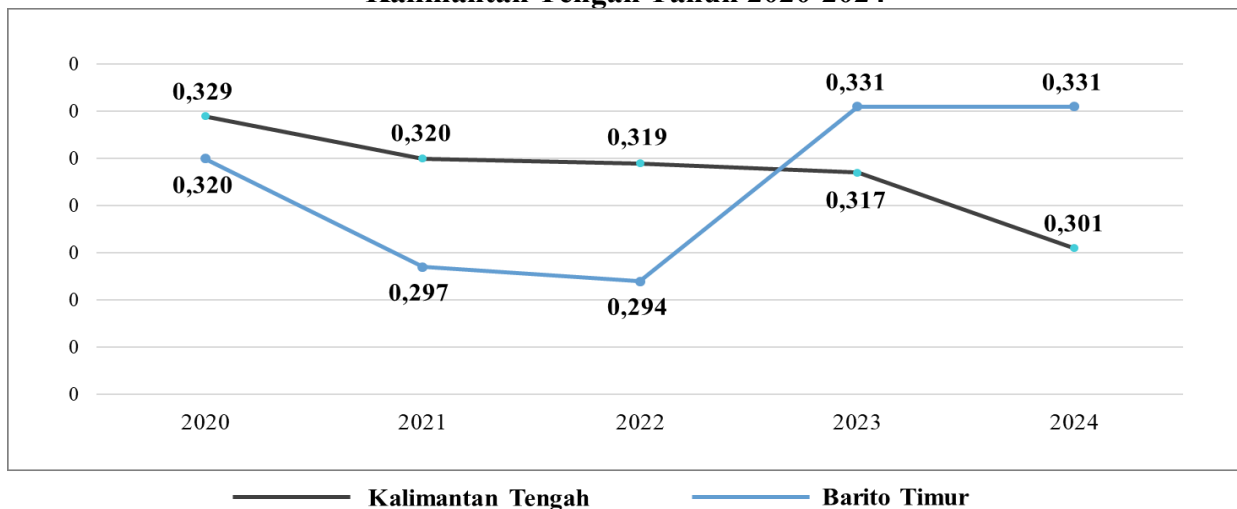
Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025.

Dari tabel 2.20 diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah sebagian mengalami penurunan pada tahun 2024, antara lain Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Barito Utara, Seruyan, Pulang Pisau. Adapun persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah yang mengalami peningkatan pada tahun 2024, antara lain Kapuas, Barito Selatan, Sukamara, Lamandau, Katingan, Gunung Mas, Barito Timur, Murung Raya, dan Palangka Raya. Sementara, Garis Kemiskinan (GK) di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2023-2024.

### Indeks Gini

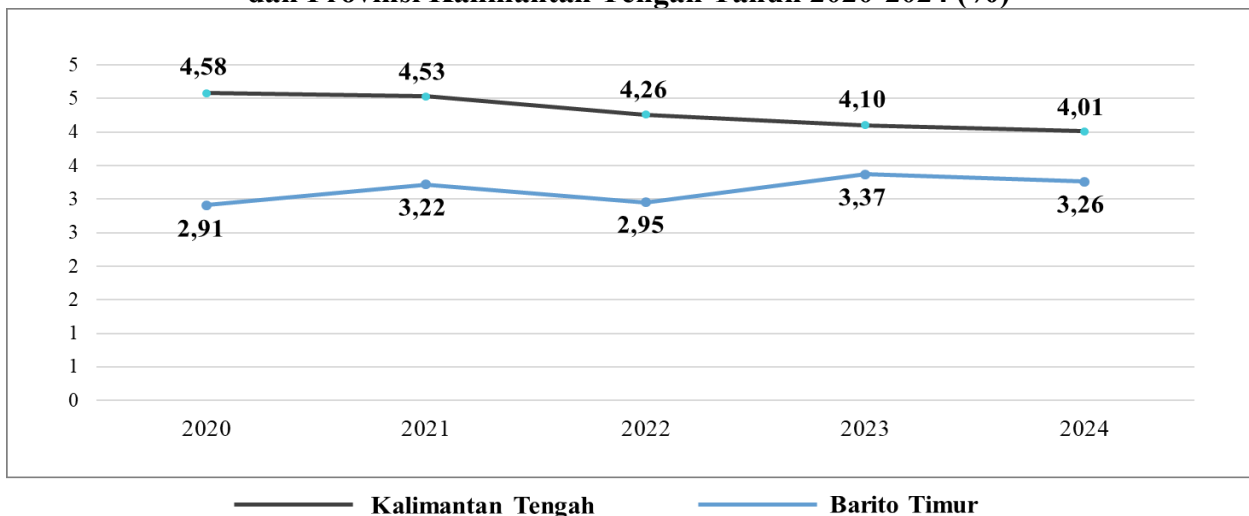
Gini Ratio dalam periode 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 angka Gini Ratio masih cenderung tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan pemerataan pengeluaran di Kabupaten Barito Timur. Akan tetapi menurun pada tahun 2021 dan 2022. Adapun Gini Ratio di Kabupaten Barito Timur tahun 2024 sebesar 0,331.

**Gambar 2.12. Perbandingan Indeks Gini Antara Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024**



Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

**Gambar 2.13. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 (%)**



Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan, dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dengan memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

**Tabel 2.29. Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024**

| Kabupaten/Kota      | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (1)                 | (2)          | (3)          | (4)          | (5)          | (6)          |
| Kotawaringin Barat  | 73,95        | 74,15        | 74,39        | 74,92        | 75,35        |
| Kotawaringin Timur  | 73,18        | 73,25        | 73,45        | 73,99        | 74,47        |
| Kapuas              | 71,18        | 71,34        | 71,72        | 72,40        | 72,98        |
| Barito Selatan      | 72,73        | 73,05        | 73,45        | 74,01        | 74,76        |
| Barito Utara        | 71,44        | 71,64        | 72,16        | 72,71        | 73,17        |
| Sukamara            | 69,04        | 69,28        | 69,86        | 70,35        | 70,83        |
| Lamandau            | 72,21        | 72,28        | 72,81        | 73,44        | 73,95        |
| Seruyan             | 69,22        | 69,31        | 69,81        | 70,24        | 70,66        |
| Katingan            | 72,45        | 72,66        | 73,43        | 73,90        | 74,37        |
| Pulang Pisau        | 70,57        | 70,65        | 71,05        | 71,62        | 72,36        |
| Gunung Mas          | 72,00        | 72,22        | 72,50        | 73,18        | 73,88        |
| <b>Barito Timur</b> | <b>73,09</b> | <b>73,17</b> | <b>73,69</b> | <b>74,21</b> | <b>74,81</b> |
| Murung Raya         | 69,54        | 69,67        | 70,13        | 70,91        | 71,58        |
| Palangka Raya       | 81,17        | 81,22        | 81,47        | 81,95        | 82,53        |
| Kalimantan Tengah   | 72,62        | 72,81        | 73,17        | 73,73        | 74,28        |

Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025.

## 2) Kesehatan untuk Semua

Dalam periode 2025-2029 data capaian dan target 5 tahun untuk SPM Bidang Kesehatan sebagai berikut :

**Tabel 2.30. Target SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Barito Timur 2025-2029**

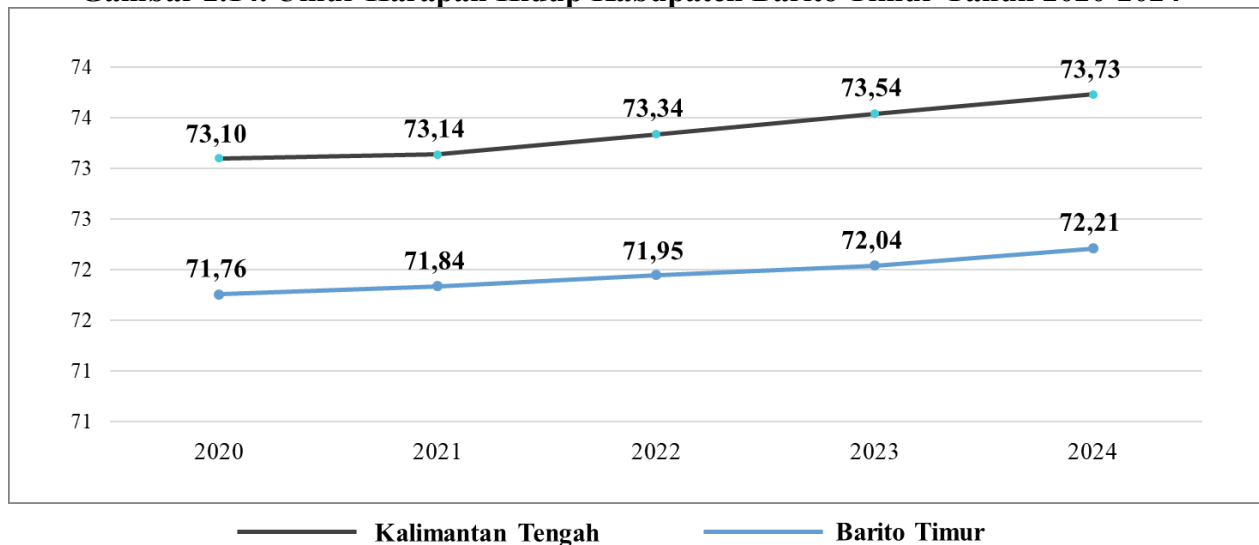
| 12 SPM BIDANG KESEHATAN                                    | SATUAN | CAPAIAN 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|--------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                  | Persen | 77,01%       | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin               | Persen | 77,58 %      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir            | Persen | 81,36%       | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                     | Persen | 88,90%       | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persen | 80,74 %      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        | Persen | 71,81 %      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| 12 SPM BIDANG KESEHATAN  | SATUAN | CAPAIAN 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|--------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                   | Persen | 75,50%       | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               | Persen | 97,78%       | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Persen | 105,46%      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Persen | 115,66%      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Persen | 120,56%      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persen | 77,31%       | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

### Usia Harapan Hidup (UHH)

Dalam periode tahun 2020-2024, dapat diketahui bahwa Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat Kabupaten Barito Timur masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Barito Timur pada tahun 2020 (71,76 tahun), tahun 2021 (71,84 tahun), tahun 2022 (71,95 tahun), tahun 2023 (72,04 tahun), dan pada tahun 2024 (72,21 tahun). Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 (73,10 tahun), tahun 2021 (73,14 tahun), tahun 2022 (73,34 tahun), tahun 2023 (73,54 tahun), dan pada tahun 2024 (73,73 tahun). Namun demikian, besarnya Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Barito Timur terus mengalami peningkatan. Besarnya Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten tahun 2024 adalah (72,21 tahun), Sementara itu, Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 sebesar (73 tahun). Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun, kondisi ini perlu diwaspadai karena memungkinkan terjadinya peningkatan penduduk usia lanjut. Dengan meningkatnya penduduk berusia lanjut, semakin besar pula beban ketergantungan bagi penduduk usia produktif. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

**Gambar 2.14. Umur Harapan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**



Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

**Tabel 2.31. Target UHH Kabupaten Barito Timur 2025-2029**

| Usia Harapan Hidup (UHH / AHH)  | Satuan | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030 |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Berdasarkan, hasil evaluasi PJ Bupati<br>Angka Awal 2024 : 72,04                      | Tahun  | 72,20 | 72,45 | 72,75 | 72,90 | 80    | 80,5 |
| Berdasarkan, data rilis BPS Provinsi<br>Kalimantan Tengah.<br>Angka Awal 2024 : 69,02 | Tahun  | 69,53 | 69,8  | 69,9  | 70    | 70,25 | 70,5 |

### Sarana dan Prasarana Kesehatan

Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Barito Timur terus diupayakan pembangunan dan perbaikan kualitasnya. Pada tahun 2024, sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Barito Timur terdiri atas 1 Rumah Sakit, 8 Poliklinik, 25 Apotek, 11 Puskesmas, dan 65 Puskesmas Pembantu yang lokasinya tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.32. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024**

| Kecamatan       | Rumah Sakit | Poliklinik | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | Apotek    |
|-----------------|-------------|------------|-----------|--------------------|-----------|
| Benua Lima      | -           | -          | 1         | 4                  | 1         |
| Dusun Timur     | 1           | 5          | 2         | 10                 | 11        |
| Paju Epat       | -           | 1          | 1         | 9                  | -         |
| Awang           | -           | -          | 1         | 6                  | -         |
| Patangkep Tutui | -           | 1          | 1         | 4                  | 1         |
| Dusun Tengah    | -           | 1          | 1         | 5                  | 11        |
| Raren Batuah    | -           | -          | 1         | 8                  | -         |
| Paku            | -           | -          | 1         | 8                  | 1         |
| Karusen Janang  | -           | -          | 1         | 3                  | -         |
| Pematang Karau  | -           | -          | 1         | 8                  | -         |
| <b>Jumlah</b>   | <b>1</b>    | <b>8</b>   | <b>11</b> | <b>65</b>          | <b>25</b> |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

**Tabel 2.33. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024**

| No | Nama Faskes / Puskesmas | Pustu | Polindes/Poskesdes |
|----|-------------------------|-------|--------------------|
| 1  | Tamiang Layang          | 6     | 9                  |
| 2  | Edison Jaar             | 3     | 7                  |

| No | Nama Faskes / Puskesmas | Pustu     | Polindes/Poskesdes |
|----|-------------------------|-----------|--------------------|
| 3  | Pasar Panas             | 4         | 6                  |
| 4  | Hayaping                | 6         | 7                  |
| 5  | Bentot                  | 4         | 10                 |
| 6  | Telang Siong            | 9         | 11                 |
| 7  | Dayu                    | 3         | 6                  |
| 8  | Tampa                   | 8         | 10                 |
| 9  | Ampah                   | 5         | 7                  |
| 10 | Unsum                   | 7         | 5                  |
| 11 | Bambulung               | 8         | 13                 |
|    | <b>Jumlah</b>           | <b>63</b> | <b>91</b>          |

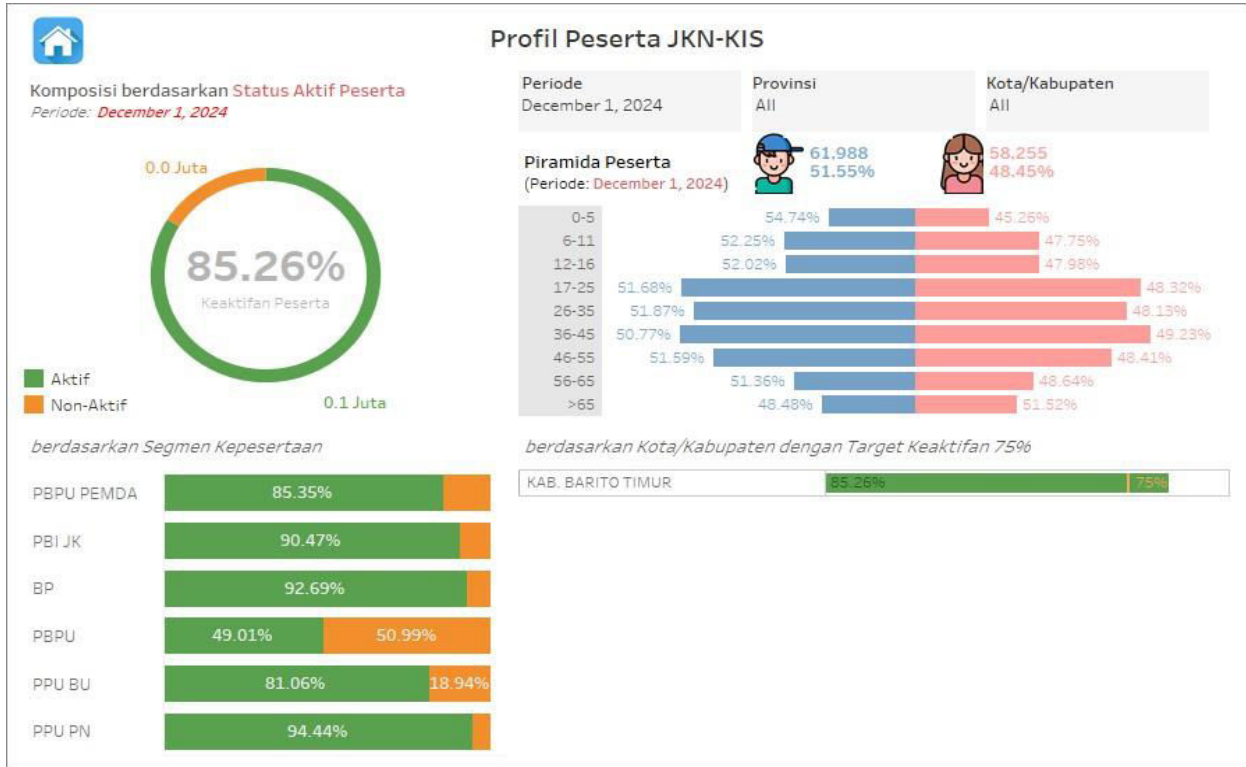
**Tabel 2.34. Nama Puskesmas di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024**

| No | Nama Puskesmas | Alamat  | Kecamatan       | Kemampuan Pelayanan | Karakteristik wilayah kerja |
|----|----------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| 1  | Pasar Panas    | jl.Ahmad Yani no.117 kelurahan taniran kec.Benua Lima 73661 | Benua Lima      | Non Rawat Inap      | Pedesaan                    |
| 2  | Tamiang Layang | Jl. A. Yani Km. 05 RT. 23 No. 92. Kelurahan Tamiang Layang  | Dusun Timur     | Non Rawat Inap      | Perkotaan                   |
| 3  | Edison Jaar    | Desa Jaar, Kecamatan Dusun Timur                            | Dusun Timur     | Non Rawat Inap      | Pedesaan                    |
| 4  | Telang Siong   | Jl. Telang Siong Km. 15, Kecamatan Paju Epat                | Paju Epat       | Non Rawat Inap      | Terpencil                   |
| 5  | Dayu           | Desa Dayu, Kecamatan Karusen Janang                         | Karusen Janang  | Non Rawat Inap      | Terpencil                   |
| 6  | Hayaping       | Jl. Pembangunan, RT. 01. Hayaping, Kecamatan Awang          | Awang           | Non Rawat Inap      | Terpencil                   |
| 7  | Bentot         | Jl. Manunggal No. 04. Kecamatan Patangkep Tutui             | Patangkep Tutui | Non Rawat Inap      | Terpencil                   |
| 8  | Ampah          | Jl. Veteran No. 04. Kecamatan Dusun Tengah                  | Dusun Tengah    | Rawat Inap          | Perkotaan                   |
| 9  | Tampa          | Desa Tampa. Kecamatan Paku                                  | Paku            | Non Rawat Inap      | Terpencil                   |
| 10 | Unsum          | Desa Unsum. Kecamatan Raren Batuah                          | Raren Batuah    | Non Rawat Inap      | Terpencil                   |
| 11 | Bambulung      | Jl. Bambulung Tuyau. Kecamatan Pematang Karau               | Pematang Karau  | Non Rawat Inap      | Terpencil                   |

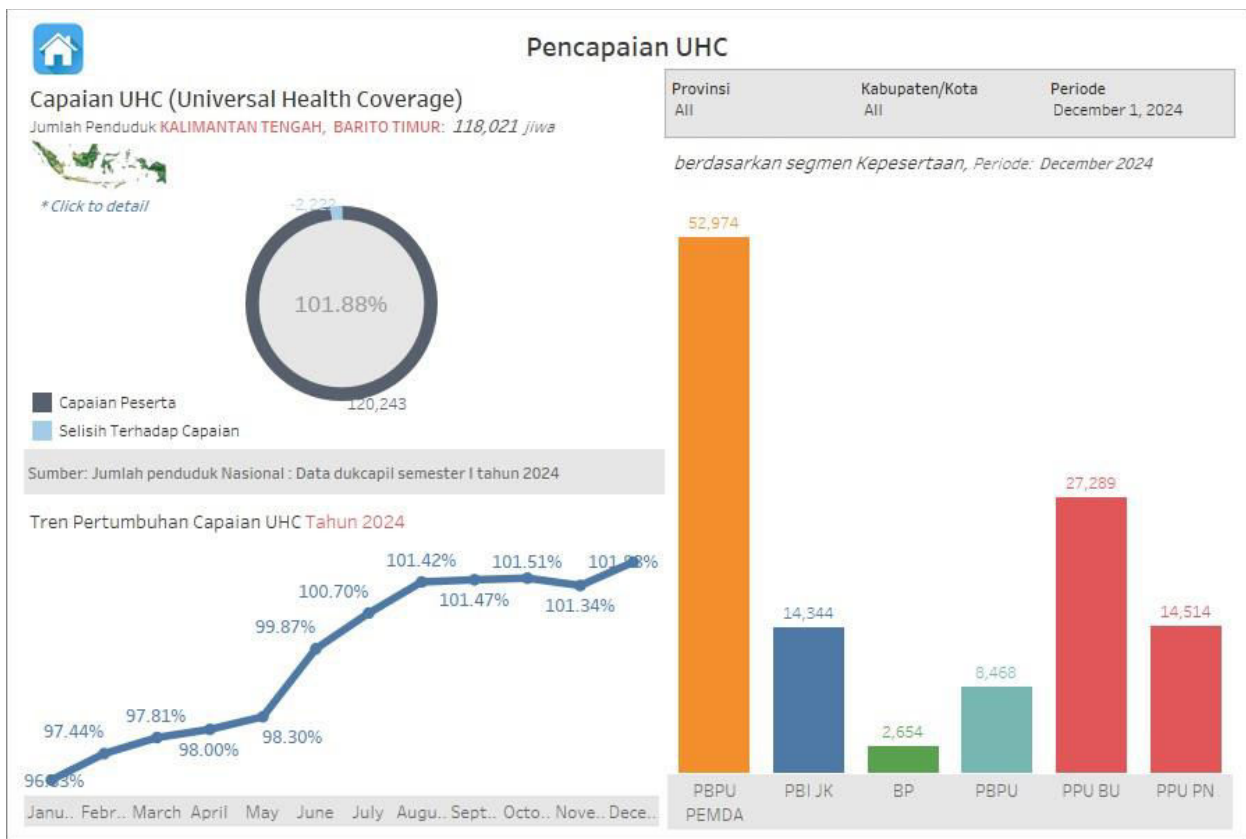
**Tabel 2.35. Status Kepesertaan JKN di Kabupaten Barito Timur**

| Segmen Kepesertaan | Status Kepesertaan | Jumlah Peserta |
|--------------------|--------------------|----------------|
| PBPU PEMDA         | Non-Aktif          | 7.759          |
|                    | Aktif              | 45.215         |
| PBI JK             | Non-Aktif          | 1.367          |
|                    | Aktif              | 512.977        |
| BP                 | Non-Aktif          | 194            |
|                    | Aktif              | 2.460          |
| PBPU               | Non-Aktif          | 4.318          |
|                    | Aktif              | 4.150          |
| PPU BU             | Non-Aktif          | 5.169          |
|                    | Aktif              | 22.120         |
| PPU PN             | Non-Aktif          | 807            |
|                    | Aktif              | 13.707         |

**Gambar 2.15. Status Kepesertaan JKN-KIS Kabupaten Barito Timur**



**Gambar 2.16. Capaian UHC Kabupaten Barito Timur**

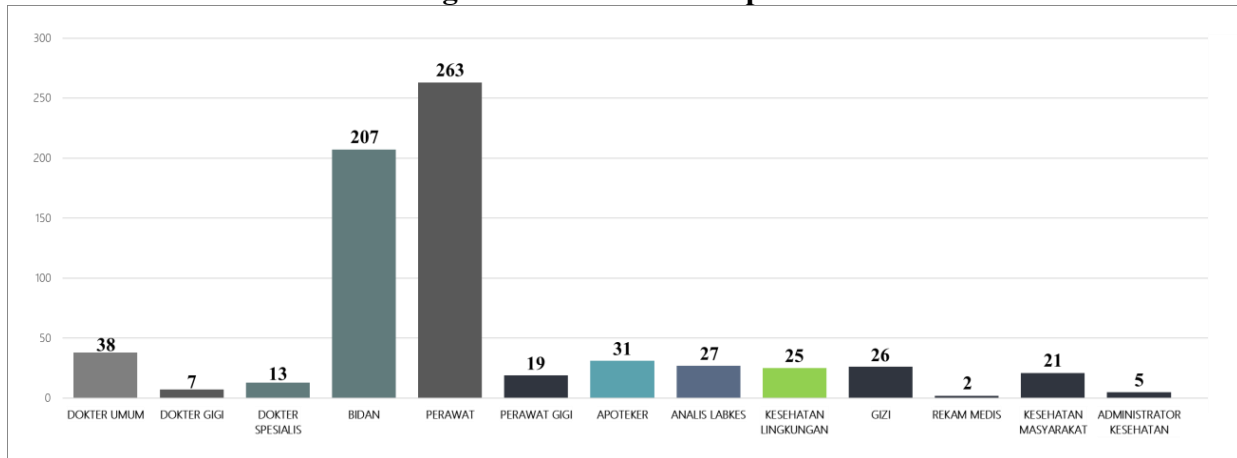


**Tabel 2.36. Capaian UHC Kabupaten Barito Timur**

| Segmen   | Periode Perhitungan | PBPU PEMDA | PBI JK | BP   | PBPU | PPU BU | PPU PN |
|----------|---------------------|------------|--------|------|------|--------|--------|
| PBI APBN | December 2024       |            | 14344  |      |      |        |        |
| PBI APBD | December 2024       | 52974      |        |      |      |        |        |
| PPU      | December 2024       |            |        |      |      | 27289  | 14514  |
| PBPU     | December 2024       |            |        |      | 8468 |        |        |
| BP       | December 2024       |            |        | 2654 |      |        |        |

Selain sarana, tenaga kesehatan tentunya diperlukan dalam pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Barito Timur. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga analisis, dan administrator. Jumlah tenaga kesehatan terbanyak adalah tenaga keperawatan yang berjumlah 263 orang dan diikuti oleh tenaga kebidanan yang berjumlah 207 orang. Secara keseluruhan, jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Barito Timur masih belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada.

**Gambar 2.17. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024**



Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

**Tabel 2.37. Fasilitas Layanan Kesehatan di Kabupaten Barito Timur**

| NO. | NAMA FASYANKES         | PERAWAT | BIDAN | WILAYAH PKM        | KECAMATAN                        |
|-----|------------------------|---------|-------|--------------------|----------------------------------|
| 1   | PUSTU JAWETEN          | 1       | 0     | PKM Tamiang Layang | Kecamatan Dusun Timur<br>14 desa |
| 2   | PUSTU SARAPAT          | 1       | 0     | PKM Tamiang Layang |                                  |
| 3   | PUSTU PULAU PATAI      | 1       | 1     | PKM Tamiang Layang |                                  |
| 4   | PUSTU KARANG LANGIT    | 2       | 0     | PKM Tamiang Layang |                                  |
| 5   | PUSTU MAGANTIS         | 2       | 0     | PKM Tamiang Layang |                                  |
| 6   | PUSTU DIDI             | 1       | 0     | PKM Tamiang Layang |                                  |
| 8   | POLINDES DIDI          | 0       | 1     | PKM Tamiang Layang |                                  |
| 9   | POLINDES MAGANTIS      | 0       | 1     | PKM Tamiang Layang |                                  |
| 10  | POLINDES HARARA        | 0       | 1     | PKM Tamiang Layang |                                  |
| 11  | POLINDES SARAPAT       | 0       | 2     | PKM Tamiang Layang |                                  |
| 12  | POLINDES KARANG LANGIT | 0       | 2     | PKM Tamiang Layang |                                  |
| 13  | POLINDES HARINGEN      | 0       | 2     | PKM Tamiang Layang |                                  |
| 14  | POSKESDES DORONG       |         | 2     | PKM Tamiang Layang |                                  |
| 15  | POSKESDES SUMUR        | 1       | 1     | PKM Tamiang Layang |                                  |
| 16  | POSKESDES JAWETEN      | 0       | 2     | PKM Tamiang Layang |                                  |
| 17  | PUSTU GUMPA            | 1       | 0     | PKM Edison Jaar    |                                  |

| NO. | NAMA FASYANKES             | PERAWAT | BIDAN | WILAYAH PKM      | KECAMATAN                          |
|-----|----------------------------|---------|-------|------------------|------------------------------------|
| 18  | PUSTU MARAGUT              | 1       | 0     | PKM Edison Jaar  | Kecamatan<br>Dusun Timur<br>8 desa |
| 19  | PUSTU MATARAH              | 1       | 0     | PKM Edison Jaar  |                                    |
| 20  | POLINDES GUMPA             | 0       | 1     | PKM Edison Jaar  |                                    |
| 21  | POLINDES MARAGUT           | 0       | 1     | PKM Edison Jaar  |                                    |
| 22  | POLINDES MARANGGA          | 0       | 1     | PKM Edison Jaar  |                                    |
| 23  | POLINDES MATABU            | 0       | 1     | PKM Edison Jaar  |                                    |
| 24  | POLINDES MATARAH           | 0       | 1     | PKM Edison Jaar  |                                    |
| 25  | POSKESDES JAAR             | 1       | 1     | PKM Edison Jaar  |                                    |
| 26  | POSKESDES<br>MANGKARAP     | 1       | 0     | PKM Edison Jaar  | Kecamatan<br>Benua Lima<br>9 desa  |
| 27  | PUSTU BAMBAN               | 1       | 0     | PKM Pasar Panas  |                                    |
| 28  | PUSTU TEWAH PUPUH          | 1       | 0     | PKM Pasar Panas  |                                    |
| 29  | PUSTU BAGOK                | 1       | 0     | PKM Pasar Panas  |                                    |
| 30  | PUSTU GUDANG SENG          | 1       | 0     | PKM Pasar Panas  |                                    |
| 31  | POLINDES BAMBAN            | 0       | 1     | PKM Pasar Panas  |                                    |
| 32  | POLINDES TEWAH<br>PUPUH    | 0       | 1     | PKM Pasar Panas  |                                    |
| 33  | POLINDES BAGOK             | 0       | 1     | PKM Pasar Panas  |                                    |
| 34  | POLINDES GUDANG<br>SENG    | 0       | 1     | PKM Pasar Panas  |                                    |
| 35  | POLINDES KANDRIS           | 0       | 1     | PKM Pasar Panas  |                                    |
| 36  | POLINDES BANYU<br>LANDAS   | 0       | 1     | PKM Pasar Panas  | Kecamatan<br>Awang<br>10 desa      |
| 37  | PUSTU JANAH JARI           | 1       | 0     | PKM Hayaping     |                                    |
| 38  | PUSTU BANGKIRAYEN          | 1       | 0     | PKM Hayaping     |                                    |
| 39  | PUSTU TANGKAN              | 1       | 0     | PKM Hayaping     |                                    |
| 40  | PUSTU AMPAR BATU           | 1       | 0     | PKM Hayaping     |                                    |
| 41  | PUSTU DANAU                | 1       | 0     | PKM Hayaping     |                                    |
| 42  | PUSTU JANAH<br>MANSIWUI    | 1       | 0     | PKM Hayaping     |                                    |
| 43  | POLINDES<br>BANGKIRAYEN    | 0       | 1     | PKM Hayaping     |                                    |
| 44  | POLINDES APAR BATU         | 0       | 1     | PKM Hayaping     |                                    |
| 45  | POLINDES DANAU             | 0       | 1     | PKM Hayaping     |                                    |
| 46  | POLINDES JANAH JARI        | 0       | 1     | PKM Hayaping     |                                    |
| 47  | POLINDES TANGKAN           | 0       | 1     | PKM Hayaping     |                                    |
| 48  | POLINDES AMPARI            | 0       | 1     | PKM Hayaping     |                                    |
| 49  | POSKESDES PIANGGU          | 0       | 1     | PKM Hayaping     | Kecamatan<br>Patangkep Tutui       |
| 50  | PUSTU KAMBITIN             | 1       | 0     | PKM Bentot       |                                    |
| 51  | PUSTU AMPARI BURA          | 2       | 0     | PKM Bentot       |                                    |
| 52  | PUSTU PULAU PADANG         | 1       | 0     | PKM Bentot       |                                    |
| 53  | PUSTU LALAP                | 1       | 0     | PKM Bentot       |                                    |
| 54  | POSKESDES MAWANI           | 0       | 1     | PKM Bentot       |                                    |
| 55  | POSKESDES BENTOT           | 0       | 1     | PKM Bentot       |                                    |
| 56  | POSKESDES PULAU<br>PADANG  | 0       | 1     | PKM Bentot       |                                    |
| 57  | POSKESDES KAMBITIN         | 0       | 1     | PKM Bentot       |                                    |
| 58  | POSKESDES AMPARI<br>BURA   | 0       | 1     | PKM Bentot       |                                    |
| 59  | POSKESDES KOTAM            | 0       | 1     | PKM Bentot       |                                    |
| 60  | POSKESDES JANGO            | 0       | 1     | PKM Bentot       |                                    |
| 61  | POSKESDES LALAP            | 0       | 1     | PKM Bentot       |                                    |
| 62  | POSKESDES BETANG<br>NALONG | 0       | 1     | PKM Bentot       |                                    |
| 63  | POSKESDES RAMANIA          | 0       | 1     | PKM Bentot       | Kecamatan Paju<br>Epat             |
| 64  | PUSTU TELANG BARU          | 1       | 0     | PKM Telang Siong |                                    |
| 65  | PUSTU MURUTUWU             | 1       | 0     | PKM Telang Siong |                                    |
| 66  | PUSTU BALAWA               | 1       | 0     | PKM Telang Siong |                                    |
| 67  | PUSTU JURU BANU            | 1       | 0     | PKM Telang Siong |                                    |

| NO. | NAMA FASYANKES                | PERAWAT | BIDAN | WILAYAH PKM      | KECAMATAN                   |
|-----|-------------------------------|---------|-------|------------------|-----------------------------|
| 68  | PUSTU TAMPU LANGIT            | 1       | 0     | PKM Telang Siong | Kecamatan<br>Karusen Janang |
| 69  | PUSTU TRANS SIONG             | 1       | 0     | PKM Telang Siong |                             |
| 70  | PUSTU KALINAPU                | 1       | 0     | PKM Telang Siong |                             |
| 71  | PUSTU TELANG                  | 1       | 0     | PKM Telang Siong |                             |
| 72  | PUSTU HEPUNG<br>WEWAI         | 1       | 0     | PKM Telang Siong |                             |
| 73  | POLINDES JURU BANU            | 0       | 1     | PKM Telang Siong |                             |
| 74  | POLINDES KALINAPU             | 0       | 1     | PKM Telang Siong |                             |
| 75  | POLINDES BALAWA               | 0       | 1     | PKM Telang Siong |                             |
| 76  | POLINDES TRANS<br>SIONG       | 0       | 1     | PKM Telang Siong |                             |
| 77  | POLINDES TAMPU<br>LANGIT      | 0       | 1     | PKM Telang Siong |                             |
| 78  | POSKESDES HEPUNG<br>WEWAI     | 0       | 1     | PKM Telang Siong |                             |
| 79  | POLINDES MURUTUWU             | 0       | 1     | PKM Telang Siong |                             |
| 80  | POLINDES SIONG                | 0       | 1     | PKM Telang Siong |                             |
| 81  | POSKESDES MAIPE               | 0       | 1     | PKM Telang Siong |                             |
| 82  | POLINDES TELANG               | 0       | 1     | PKM Telang Siong |                             |
| 83  | POSKESDES TELANG<br>BARU      | 0       | 2     | PKM Telang Siong |                             |
| 84  | PUSTU WURAN                   | 1       | 0     | PKM Dayu         |                             |
| 85  | PUSTU SIMPANG<br>NANENG       | 1       | 1     | PKM Dayu         |                             |
| 86  | PUSTU LAGAN                   | 0       | 0     | PKM Dayu         |                             |
| 87  | POLINDES WURAN                | 0       | 1     | PKM Dayu         |                             |
| 88  | POLINDES IPUMEA               | 1       | 1     | PKM Dayu         |                             |
| 89  | POSKESDES PUTUT<br>TAWULUH    | 1       | 1     | PKM Dayu         |                             |
| 90  | POSKESDES LAGAN               | 1       | 1     | PKM Dayu         |                             |
| 91  | POSKESDES DAYU                | 0       | 1     | PKM Dayu         |                             |
| 92  | POSKESDES KANDRIS             | 1       | 1     | PKM Dayu         |                             |
| 93  | PUSTU PATUNG                  | 1       | 0     | PKM Tampa        | Kecamatan<br>Paku           |
| 94  | PUSTU GANDRUNG                | 0       | 0     | PKM Tampa        |                             |
| 95  | PUSTU TAMPA                   | 1       | 0     | PKM Tampa        |                             |
| 96  | PUSTU RUNGGU RAYA             | 1       | 0     | PKM Tampa        |                             |
| 97  | PUSTU BANTAI NAPU             | 1       | 0     | PKM Tampa        |                             |
| 98  | PUSTU PANGKAN                 | 1       | 1     | PKM Tampa        |                             |
| 99  | PUSTU KALAMUS                 | 1       | 0     | PKM Tampa        |                             |
| 100 | PUSTU TARINSING               | 1       | 0     | PKM Tampa        |                             |
| 101 | POLINDES KALAMUS              | 0       | 1     | PKM Tampa        |                             |
| 102 | POLINDES SIMPANG<br>BINGKUANG | 0       | 1     | PKM Tampa        |                             |
| 103 | POLINDES RUNGGU<br>RAYA       | 0       | 1     | PKM Tampa        |                             |
| 104 | POSKESDES PATUNG              | 0       | 1     | PKM Tampa        |                             |
| 105 | POSKESDES PAKU<br>BETO        | 1       | 1     | PKM Tampa        |                             |
| 106 | POSKESDES LUAU<br>JAWUK       | 1       | 0     | PKM Tampa        |                             |
| 107 | POSKESDES<br>GANDRUNG         | 0       | 1     | PKM Tampa        |                             |
| 108 | POSKESDES<br>TANGELANDA       | 1       | 1     | PKM Tampa        |                             |
| 109 | POSKESDES<br>TARINSING        | 0       | 1     | PKM Tampa        |                             |
| 110 | POSKESDES KUPANG<br>BARU      | 1       | 1     | PKM Tampa        |                             |

| NO. | NAMA FASYANKES              | PERAWAT | BIDAN | WILAYAH PKM   | KECAMATAN                |
|-----|-----------------------------|---------|-------|---------------|--------------------------|
| 111 | PUSTU MUARA AWANG           | 1       | 0     | PKM Ampah     | Kecamatan Dusun Tengah   |
| 112 | PUSTU WAKATITIR             | 1       | 0     | PKM Ampah     |                          |
| 113 | PUSTU NETAMPIN              | 1       | 0     | PKM Ampah     |                          |
| 114 | PUSTU SAING                 | 0       | 1     | PKM Ampah     |                          |
| 115 | POSKESDES DAMBUNG           | 0       | 1     | PKM Ampah     |                          |
| 116 | POSKESDES PUTAI             | 0       | 1     | PKM Ampah     |                          |
| 117 | POSKESDES NETAMPIN          | 0       | 1     | PKM Ampah     |                          |
| 118 | POSKESDES RODOK             | 0       | 1     | PKM Ampah     |                          |
| 119 | POSKESDES SUMBER GARUNGGUNG | 0       | 1     | PKM Ampah     |                          |
| 120 | POSKESDES MUARA AWANG       | 0       | 1     | PKM Ampah     |                          |
| 121 | POSKESDES AMPAH II          | 0       | 1     | PKM Ampah     |                          |
| 122 | PUSTU LENGANG               | 1       | 0     | PKM Unsum     |                          |
| 123 | PUSTU TANGKUM               | 1       | 1     | PKM Unsum     |                          |
| 124 | PUSTU SIBUNG                | 1       | 0     | PKM Unsum     |                          |
| 125 | PUSTU BATUAH                | 1       | 1     | PKM Unsum     |                          |
| 126 | PUSTU MALINTUT              | 1       | 1     | PKM Unsum     |                          |
| 127 | PUSTU TURAN AMIS            | 1       | 0     | PKM Unsum     |                          |
| 128 | PUSTU BARUYAN               | 1       | 0     | PKM Unsum     |                          |
| 129 | PUSTU SIMPANG 4 BATUAH      | 1       | 0     | PKM Unsum     |                          |
| 130 | POSKESDES TURAN AMIS        | 0       | 1     | PKM Unsum     |                          |
| 131 | POSKESDES BARUYAN           | 0       | 1     | PKM Unsum     |                          |
| 132 | POSKESDES SIBUNG            | 0       | 1     | PKM Unsum     |                          |
| 133 | POSKESDES LENGANG           | 0       | 1     | PKM Unsum     |                          |
| 134 | PUSTU SUMBEREJO             | 1       | 0     | PKM Bambulung | Kecamatan Pematang Karau |
| 135 | PUSTU BAMBULUNG             | 0       | 0     | PKM Bambulung |                          |
| 136 | PUSTU TUYAU                 | 1       | 0     | PKM Bambulung |                          |
| 137 | PUSTU MUARA PLANTAU         | 1       | 0     | PKM Bambulung |                          |
| 138 | PUSTU KETAB                 | 1       | 0     | PKM Bambulung |                          |
| 139 | PUSTU LAMPEONG              | 0       | 0     | PKM Bambulung |                          |
| 140 | PUSTU MURU DUYUNG           | 1       | 0     | PKM Bambulung |                          |
| 141 | PUSTU LEBO                  | 1       | 0     | PKM Bambulung |                          |
| 142 | POLINDES SUMBEREJO          | 0       | 1     | PKM Bambulung |                          |
| 143 | POLINDES MUARA PLANTAU      | 0       | 1     | PKM Bambulung |                          |
| 144 | POLINDES LEBO               | 0       | 1     | PKM Bambulung |                          |
| 145 | POLINDES KETAB              | 0       | 1     | PKM Bambulung |                          |
| 146 | POLINDES KUPANG BERSIH      | 0       | 1     | PKM Bambulung |                          |
| 147 | POLINDES NAGALEAH           | 0       | 1     | PKM Bambulung |                          |
| 148 | POSKESDES TUYAU             | 0       | 1     | PKM Bambulung |                          |
| 149 | POSKESDES LAMPEONG          | 0       | 1     | PKM Bambulung |                          |
| 150 | DESA TUMPUNG ULUNG          | 0       | 1     | PKM Bambulung |                          |
| 151 | DESA MURU DUYUNG            | 0       | 1     | PKM Bambulung |                          |
| 152 | DESA BARARAWA               | 0       | 1     | PKM Bambulung |                          |
| 153 | DESA BAMBULUNG              | 0       | 1     | PKM Bambulung |                          |
| 154 | DUSUN BAMBULUNG BARU        | 0       | 1     | PKM Bambulung |                          |

**Tabel 2.38. Ketersediaan Ambulance di Kabupaten Barito Timur**

| NO | DESA              | KRITERIA DESA |           |                  | KETERSEDIAAN AMBULANCE |              |                     |                |
|----|-------------------|---------------|-----------|------------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------|
|    |                   | BIASA         | TERPENCIL | SANGAT TERPENCIL | UNIT                   | KONDISI      | STATUS OPEPRASIONAL | JENIS          |
| 1  | Sumur             | √             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | Darat          |
| 2  | Harara            | √             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | Darat          |
| 3  | Jaweten           | √             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | Darat          |
| 4  | Haringen          | √             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | Darat          |
| 5  | Pulau Patai       | √             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | Darat          |
| 6  | Magantis          | √             |           |                  | 1                      | Rusak Ringan | Operasional         | Darat          |
| 7  | Didi              | √             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | Darat          |
| 8  | Dorong            | √             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | Darat          |
| 9  | Karang Lagit      | √             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | Darat          |
| 10 | Sarapat           | √             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | Darat          |
| 11 | SAING             | √             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | Darat          |
| 12 | RODOK             | √             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | Darat          |
| 13 | AMPAH DUA         | √             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | Darat          |
| 14 | PUTAI             | √             |           |                  | 1                      | Baik         | Operasional         | Darat          |
| 15 | AMPAH KOTA        | √             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | Darat          |
| 16 | NETAMPIN          |               | √         |                  | Belum Punya            | -            | -                   | Darat          |
| 17 | SUMBER GARUNGGUNG |               | √         |                  | Belum Punya            | -            | -                   | Darat          |
| 18 | MUARA AWANG       |               | √         |                  | Belum Punya            | -            | -                   | Darat & Sungai |
| 19 | BENTOT            | V             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT          |
| 20 | KAMBITIN          | V             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT          |
| 21 | PULAU PADANG      | V             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT          |
| 22 | RAMANIA           | V             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT          |
| 23 | BETANG NALONG     |               | V         |                  | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT          |
| 24 | LALAP             |               | V         |                  | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT          |
| 25 | AMPARI BURA       |               |           | V                | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT          |
| 26 | KOTAM             |               |           | V                | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT          |
| 27 | JANGO             |               |           | V                | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT          |
| 28 | MAWANI            |               |           | V                | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT          |
| 29 | JAAR              | V             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | -              |
| 30 | MATABU            | V             |           |                  | 1                      | BAIK         | OPERASIONAL         | DARAT          |
| 31 | MANGKARAP         | V             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | -              |
| 32 | Dusun MARANGGA    | V             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | -              |
| 33 | GUMPA             | V             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | -              |
| 34 | MATARAH           | V             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | -              |
| 35 | MARAGUT           | V             |           |                  | 1                      | BAIK         | OPERASIONAL         | DARAT          |
| 36 | TAMPA             | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT          |
| 37 | KUPANG BARU       | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT          |
| 38 | LUAU JAWUK        | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT          |
| 39 | RUNGGU RAYA       | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT          |
| 40 | BANTAI NAPU       | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT          |

| NO | DESA                | KRITERIA DESA |           |                  | KETERSEDIAAN AMBULANCE |              |                     |       |
|----|---------------------|---------------|-----------|------------------|------------------------|--------------|---------------------|-------|
|    |                     | BIASA         | TERPENCIL | SANGAT TERPENCIL | UNIT                   | KONDISI      | STATUS OPEPRASIONAL | JENIS |
| 41 | TARINSING           | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT |
| 42 | SIMPANG BINGKUANG   | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT |
| 43 | PATUNG              | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT |
| 44 | PANGKAN             | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT |
| 45 | PAKU BETO           | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT |
| 46 | GANDRUNG            |               | V         |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT |
| 47 | KALAMUS             | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT |
| 48 | DUSUN TANGELANDA    |               |           | V                | Belum Punya            |              |                     | DARAT |
| 49 | KELURAHAN TANIRAN   | V             |           |                  | Belum Punya            | -            |                     | DARAT |
| 50 | TEWAH PUPUH         | V             |           |                  | Belum Punya            | -            |                     | DARAT |
| 51 | BAMBAN              | V             |           |                  | Belum Punya            | -            |                     | DARAT |
| 52 | KANDRIS             | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT |
| 53 | BANYU LANDAS        | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT |
| 54 | BAGOK               | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT |
| 55 | GUDANG SENG         | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT |
| 56 | DESA DAYU           | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT |
| 57 | DESA SIMPANG NANENG | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT |
| 58 | DESA KANDRIS        | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT |
| 59 | DESA LAGAN          | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT |
| 60 | DESA IPU MEA        | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT |
| 61 | DESA WURAN          | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT |
| 62 | DESA PUTUT TAWULUH  |               | V         |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT |
| 63 | MUARA PLANTAU       |               | ✓         |                  | 1                      | RUSAK RINGAN | OPERASIONAL         | DARAT |
| 64 | MUARA PLANTAU       |               | ✓         |                  | Belum Punya            | -            | -                   | AIR   |
| 65 | LAMPEONG            | ✓             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT |
| 66 | BAMBULUNG           | ✓             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT |
| 67 | KETAB               | ✓             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT |
| 68 | NAGALEAH            | ✓             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT |
| 69 | BARARAWA            | ✓             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT |
| 70 | TUMPUNG ULUNG       | ✓             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT |
| 71 | LEBO                | ✓             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT |
| 72 | TUYAU               | ✓             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT |
| 73 | KUPANG BERSIH       | ✓             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT |
| 74 | SUMBER REJO         | ✓             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT |
| 75 | MURU DUYUNG         | ✓             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT |
| 76 | PINANG TUNGGAL      | ✓             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | DARAT |
| 77 | HAYAPING            | ✓             |           |                  | Belum Punya            |              | -                   | Darat |
| 78 | WUNGKUR NANAKAN     | ✓             |           |                  | Belum Punya            |              | -                   | Darat |
| 79 | TANGKAN             | ✓             |           |                  | Belum Punya            |              | -                   | Darat |
| 80 | AMPARI              | ✓             |           |                  | Belum Punya            |              | -                   | Darat |

| NO  | DESA               | KRITERIA DESA |           |                  | KETERSEDIAAN AMBULANCE |              |                     |               |
|-----|--------------------|---------------|-----------|------------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------|
|     |                    | BIASA         | TERPENCIL | SANGAT TERPENCIL | UNIT                   | KONDISI      | STATUS OPEPRASIONAL | JENIS         |
| 81  | PIANGGU            | √             |           |                  | Belum Punya            |              | -                   | Darat         |
| 82  | APAR BATU          |               | √         |                  | Belum Punya            |              | -                   | Darat         |
| 83  | BIWAN              | √             |           |                  | Belum Punya            |              | -                   | Darat         |
| 84  | DANAU              | √             |           |                  | Belum Punya            |              | -                   | Darat         |
| 85  | JANAH MANSIWUI     |               | √         |                  | Belum Punya            |              | -                   | Darat         |
| 86  | JANAH JARI         |               | √         |                  | Belum Punya            |              | -                   | Darat         |
| 87  | BANGKIRAYEN        | √             |           |                  | Belum Punya            |              | -                   | Darat         |
| 88  | Desa Unsum         | V             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | Darat         |
| 89  | Desa Baruyan       | V             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | Darat         |
| 90  | Desa Turan Amis    |               | V         |                  | Belum Punya            | -            | -                   | Darat         |
| 91  | Desa Malintut      |               | V         |                  | Belum Punya            | -            | -                   | Darat         |
| 92  | Desa Batuah        |               | V         |                  | Belum Punya            | -            | -                   | Darat         |
| 93  | Desa Tangkum       |               | V         |                  | Belum Punya            | -            | -                   | Darat         |
| 94  | Desa Sibung        |               | V         |                  | Belum Punya            | -            | -                   | Darat         |
| 95  | Desa Puri          | V             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | Darat         |
| 96  | Desa Lenggang      | V             |           |                  | Belum Punya            | -            | -                   | Darat         |
| 97  | JURUBANU           |               | V         |                  | 1                      | RUSAK RINGAN | OPERASIONAL         | DARAT         |
| 98  | TELANG BARU        |               | V         |                  | 1                      | RUSAK RINGAN | OPERASIONAL         | DARAT         |
| 99  | Murutuwu           | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT         |
| 100 | TELANG             | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT         |
| 101 | Maipe              | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT         |
| 102 | Tampu Langit       | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT         |
| 103 | Kalinapu           |               | V         |                  | Belum Punya            |              |                     | Air dan Darat |
| 104 | Balawa             | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT         |
| 105 | Siong              | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT         |
| 106 | Dusun Hepung Wewai | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT         |
| 107 | Trans Siong        | V             |           |                  | Belum Punya            |              |                     | DARAT         |

### Jumlah Kematian Ibu dan Bayi

Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate*) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka kematian Ibu di Kabupaten Barito Timur terlihat pada tahun 2024 (3 Kasus Kematian) dimana pada sebelumnya tahun 2023 terdapat (2 Kasus Kematian) Ibu per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian bayi atau *Infant Mortality Rate (IMR)* adalah jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup.

Angka ini merupakan indikator yang sensitif terhadap ketersediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama pelayanan perinatal. Disamping itu Angka Kematian Bayi juga berhubungan dengan pendapatan keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga. Angka kematian bayi di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 sebanyak (21 kasus kematian) bayi per

1.000 kelahiran hidup, dimana pada sebelumnya tahun 2023 sebanyak (10 kasus kematian) bayi per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan angka kematian bayi sebesar 50% pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 2.39. Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

| Indikator                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Penemuan Kasus                    |      |      |      |      |      |
| Angka Kematian Bayi per 1.000 KH  | 8,1  | 3,8  | 9,9  | 5,6  | 12   |
| Barito Timur                      | 15   | 7    | 16   | 10   | 21   |
| Penemuan Kasus                    |      |      |      |      |      |
| Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH | 218  | 276  | 305  | 112  | 182  |
| Barito Timur                      | 4    | 5    | 0    | 2    | 3    |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

**Tabel 2.40. Jumlah Ibu Hamil dan Pelayanan Kesehatan terhadap pada Ibu Hamil**

| No    | Puskesmas      | Realisasi Tahun 2024 | Target | Persen  |
|-------|----------------|----------------------|--------|---------|
| 1     | Bambulung      | 163                  | 226    | 72,10%  |
| 2     | Ampah          | 399                  | 498    | 80,12%  |
| 3     | Unsum          | 155                  | 164    | 94,51%  |
| 4     | Tampa          | 111                  | 156    | 71,15%  |
| 5     | Dayu           | 74                   | 96     | 77,08%  |
| 6     | Telang Siong   | 119                  | 119    | 100,00% |
| 7     | Pasar Panas    | 50                   | 127    | 39,37%  |
| 8     | Tamiang Layang | 350                  | 362    | 96,69%  |
| 9     | Edison Jaar    | 123                  | 191    | 64,40%  |
| 10    | Hayaping       | 67                   | 146    | 45,89%  |
| 11    | Bentot         | 84                   | 116    | 72,41%  |
| TOTAL |                | 1.695                | 2.201  | 77,01%  |

### Prevelensi Stunting

Stunting merupakan masalah gizi yang disebabkan oleh multifaktorial dan bersifat antar generasi. Secara umum, permasalahan stunting di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2023 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 15,05%. Nilai prevalensi stunting menjadi perhatian pemerintah, karena permasalahan gizi dapat menyebabkan terhambatnya tumbuh kembang anak. SKI 2023 (21,7) dan SSGI 2024 (21,7). Persentase Stunting di Kabupaten Barito Timur sudah lebih rendah dari rata-rata persentase sebesar 21,7% (target nasional) di tahun 2024.

### 3) Pendidikan Berkualitas yang Merata

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan merupakan tolok ukur kinerja pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022. Indikator SPM pendidikan yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meliputi capaian kompetensi literasi dan numerasi, angka partisipasi sekolah, akreditasi satuan pendidikan, kualifikasi guru PAUD, serta iklim satuan pendidikan yang meliputi inklusivitas, keamanan, dan kebinekaan.

Analisis capaian ini didasarkan pada data tahun 2024 yang bersumber dari Rapor Pendidikan Daerah Kabupaten Barito Timur. Data ini mencerminkan kondisi riil penyelenggaraan pendidikan di daerah sekaligus menjadi dasar perencanaan program dan kegiatan pada periode RPJMD berikutnya.

1. Skor Kemampuan Literasi SD capaian sebesar 57,96 % dari target 2024 sebesar 54,59 % Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya peningkatan penguatan pembelajaran membaca dan memahami teks di jenjang sekolah dasar.
2. Skor Kemampuan Literasi SMP mencapai 69,16 % dari target 2024 sebesar 68,55% Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya peningkatan penguatan pembelajaran membaca dan memahami teks di jenjang sekolah dasar.
3. Skor Kemampuan Numerasi SD sebesar 51,56% dari target 2024 sebesar 39,83% capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya peningkatan pembelajaran numerasi di jenjang sekolah dasar, khususnya pada aspek penalaran matematis dan penerapan konsep
4. Skor Kemampuan Numerasi SMP mencapai 61,33% dari target sebesar 57,25% Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya peningkatan kemampuan numerasi SMP
5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun sebesar 84,53% dari target sebesar 100%, menunjukkan partisipasi PAUD belum sesuai dengan target 100 % yang ditetapkan oleh Kemendikbud.
6. APS usia 7–15 tahun mencapai 98,02% dari target 100%, walaupun target belum tercapai namun angka ini menunjukkan bahwa angka ini hampir mencapai 100 persen.
7. APS usia 7–18 tahun pada program kesetaraan sebesar 22,64%, masih jauh dari target 2024 sebesar 100%, yang berarti layanan pendidikan nonformal perlu diperluas untuk menjangkau remaja putus sekolah.
8. Proporsi satuan PAUD terakreditasi minimal B mencapai 57,71% dari target 59,26% menunjukkan bahwa masih ada lembaga PAUD yang perlu didorong untuk meningkatkan mutu dan mengajukan akreditasi.
9. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 sebesar 65,92%, dari target 58,33% menunjukkan ketersediaan pendidik berkualifikasi masih kurang di jenjang PAUD.
10. Iklim Inklusivitas SD mendapatkan skor 60,68% dari target 81,05% menunjukkan perlunya peningkatan penerimaan terhadap keberagaman peserta didik.
11. Iklim Inklusivitas SMP mencapai skor sebesar 58,81% dari target sebesar 80,96% menandakan perlunya program penguatan inklusivitas di sekolah menengah pertama.
12. Iklim Keamanan SD mencapai skor 78,94% dari target 2024 sebesar 86,72% Target ini belum tercapai, yang menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang sepenuhnya aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan atau perundungan.
13. Iklim Keamanan SMP sebesar 71,53% dari target 2024 sebesar 85,93% Target ini belum tercapai, yang menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang sepenuhnya aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan atau perundungan.

14. Iklim Kebinekaan SD memperoleh skor 72,84% dari target 2024 sebesar 92,74 Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan kerja sama di sekolah dasar masih memerlukan penguatan yang signifikan.
15. Iklim Kebinekaan SMP sebesar 72,63% dari target 2024 sebesar 73,63, Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan kerja sama di sekolah dasar masih memerlukan penguatan yang signifikan

Secara keseluruhan, capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan Kabupaten Barito Timur menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun belum seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kondisi ini mencerminkan adanya kesungguhan dan komitmen Dinas Pendidikan dalam mendorong perbaikan capaian melalui perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, serta sub kegiatan yang terarah dan berbasis data.

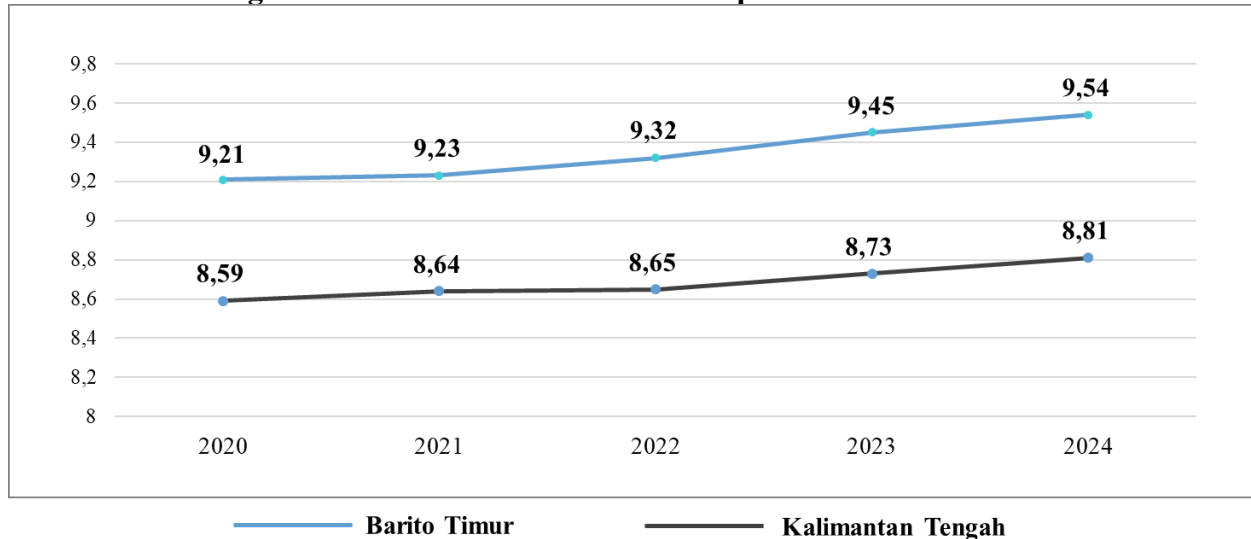
Upaya tersebut diharapkan dapat terus mempersempit kesenjangan antara capaian aktual dan target, sehingga pada periode perencanaan berikutnya seluruh indikator SPM dapat terpenuhi sesuai standar yang telah ditetapkan. Strategi yang akan dilakukan meliputi penguatan mutu pembelajaran literasi dan numerasi, peningkatan angka partisipasi PAUD dan kesetaraan, percepatan akreditasi satuan pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, serta penguatan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan berwawasan kebinekaan. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan pelayanan pendidikan di Kabupaten Barito Timur dapat semakin merata, bermutu, dan berdaya saing.

### **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**

Sepanjang tahun 2020-2024, rata-rata lama sekolah Kabupaten Barito Timur terus mengalami trend peningkatan. Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah Kabupaten Barito Timur mencapai 9,54 tahun, meningkat 0,13 poin dibanding tahun sebelumnya. Besarnya nilai rata-rata lama sekolah Kabupaten Barito Timur ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah yang hanya sebesar 8,81 pada tahun 2024.

Dalam periode tahun 2020-2024, rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas Kabupaten Barito Timur terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah Barito Timur telah mencapai 9,54 tahun atau setara dengan SMP kelas 3. Angka ini meningkat 0,09 poin dibanding tahun sebelumnya. Besarnya nilai rata-rata lama sekolah Kabupaten Barito Timur ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 8,81 pada tahun 2024.

**Gambar 2.18. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**



Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

### **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 mencapai angka 12,88.

### **Angka Melek Huruf**

Kemampuan menulis dan membaca. Pengertian literasi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Literasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, angka melek huruf mencapai 99,36.

### **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mencapai angka 56,46.

### **Indeks Literasi Digital**

Indeks Literasi Digital adalah sebuah alat ukur komposit yang dirancang untuk menilai tingkat kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Indeks ini merefleksikan sejauh mana individu atau kelompok masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etika yang diperlukan untuk

berpartisipasi penuh dalam ekosistem digital yang terus berkembang. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, Indeks Literasi Digital mencapai angka 60.

### Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Berdasarkan pendidikan, jumlah PNS terbanyak adalah S1 sebanyak 2.083 orang, Diploma sebanyak 400 orang, SMA sebanyak 413 orang, SMP sebanyak 23 orang, SD sebanyak 12 orang. Sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.41. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024 (Orang)**

| No.          | Uraian                   | Jumlah       |
|--------------|--------------------------|--------------|
| 1            | Sekolah Dasar            | 7            |
| 2            | Sekolah Menengah Pertama | 22           |
| 3            | Sekolah Menengah Atas    | 385          |
| 4            | Diploma I/II             | 73           |
| 5            | Diploma III              | 382          |
| 6            | Diploma IV/ S1           | 2.012        |
| 7            | S2                       | 332          |
| <b>Total</b> |                          | <b>3.213</b> |

Sumber: Diolah dari BKPSDM Kabupaten Barito Timur, 2025.

## 4) Perlindungan Sosial yang Adaptif

### Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi seluruh pekerja, baik formal maupun informal, sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan produktivitas kerja dan memiliki jaminan di hari tua atau saat menghadapi risiko kerja. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mencapai angka 70%.

## 5) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

### Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai dan memotret kondisi hubungan antarumat beragama di suatu wilayah (negara, provinsi, atau kabupaten/kota). Indeks ini memberikan gambaran tentang tingkat harmoni, toleransi, dan kerja sama antar kelompok agama, yang menjadi salah satu pilar penting bagi stabilitas sosial dan pembangunan nasional. Indeks kerukunan umat beragama merupakan instrumen utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 indeks kerukunan umat beragama mencapai angka 84,80.

### Pembangunan Kebudayaan dan Seni

Kabupaten Barito Timur memiliki aset kebudayaan yang dapat dikembangkan menjadi festival budaya yang rutin dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten

Barito Timur. Festival budaya tersebut antara lain adalah Festival Jari Janang Kalalawah (JAJAKA), Festival Lagu Daerah Nansarunai, dan Festival Pembangunan BARTIM EXPO. Kebudayaan di Kabupaten Barito Timur perlu dilestarikan sebagai penghormatan bagi leluhur. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur membangun gedung kesenian sebagai sarana dan wadah untuk mengekspresikan karya seni di Kabupaten Barito Timur.

## **6) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**

### **Indeks Perlindungan Anak**

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah menghitung capaian pembangunan perlindungan anak, IPA disusun berdasarkan komitmen Kovensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus anak. Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 dengan angka 85.

### **Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) atau yang dikenal juga dengan iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: (1) iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40; (2) iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70. (3) iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Pengukuran Indeks Pembangunan Keluarga pada tahun 2023 yaitu mencapai 70%, atau berada pada angka 52,80, hal ini menunjukkan bahwa iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) di Kabupaten Barito Timur (Berkembang).

### **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Barito Timur tahun 2024 mencapai 0,250 poin, data tersebut masih dibawah rata-rata nasional sebesar 0,447 poin.

### **Indeks Pembangunan Gender**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah salah satu indikator penting dalam mengukur capaian pembangunan manusia yang mempertimbangkan dimensi gender. IPG dirancang untuk melihat kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak antara nilai IPG dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) idealnya, atau semakin

mendekati 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Indeks Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 dengan angka 89,49.

### **Indeks Pembangunan Pemuda**

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen penting yang digunakan untuk mengukur dan memberikan gambaran mengenai kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah. IPP menjadi tolok ukur yang komprehensif untuk mengevaluasi kondisi pemuda dan merefleksikan capaian dari berbagai upaya pembangunan kepemudaan yang telah dilakukan. Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 dengan angka 51,00.

### **2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah**

#### **1) Daya Saing Sumber Daya Manusia**

##### **Angka Ketergantungan**

Angka ketergantungan atau beban ketergantungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 angka ketergantungan mencapai 44,67%.

#### **2) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**

##### **Rasio PDRB Industri Pengolahan**

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar rasio terhadap total PDRB suatu wilayah (provinsi atau kabupaten/kota). Sektor industri pengolahan, atau manufaktur, merupakan salah satu sektor ekonomi paling vital yang seringkali menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi, terutama dalam fase industrialisasi. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan mencapai 2,21%.

##### **Rasio PDRB Akomodasi, Makan dan Minum**

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Akomodasi, Makan dan Minum adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar kontribusi sektor penyediaan akomodasi (hotel, penginapan, dll.) dan makanan minuman (restoran, kafe, dll.) terhadap total PDRB suatu wilayah. Sektor ini seringkali menjadi cerminan dari geliat aktivitas ekonomi lokal yang terkait dengan konsumsi masyarakat. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Akomodasi, Makan dan Minum mencapai 2,21%.

##### **Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif**

Proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kreatif adalah indikator yang mengukur seberapa besar kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap total PDRB suatu wilayah. Indikator ini sangat penting untuk memahami struktur ekonomi daerah dan melihat sejauh mana sektor kreatif telah berkembang dan berperan dalam pembangunan ekonomi. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, Proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kreatif mencapai 1,00%.

### Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah indikator penting yang mengukur seberapa besar proporsi penduduk usia produktif (biasanya 15-64 tahun) yang terlibat dalam aktivitas wirausaha di suatu wilayah atau negara. Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat dinamika ekonomi, inovasi, dan kemandirian masyarakat. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, rasio kewirausahaan mencapai 3,50%.

### Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

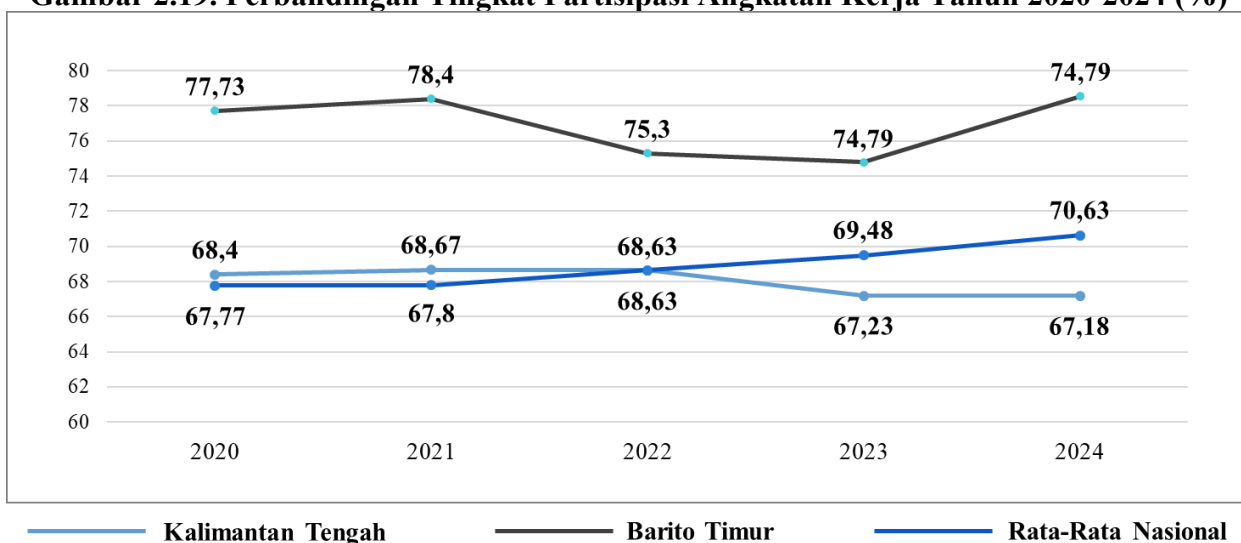
TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, TPAK mencapai angka 78,53%.

**Tabel 2.42. Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

| Uraian                                  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas (Jiwa) | 94.972 | 96.510 | 98.420 | 90.589 | 91.904 |
| Angkatan Kerja (Jiwa)                   | 73.826 | 75.665 | 74.110 | 67.648 | 72.168 |
| 1. Bekerja                              | 71.678 | 73.230 | 71.932 | 65.467 | 69.818 |
| 2. Pengangguran                         | 2.148  | 2.435  | 2.187  | 2.281  | 2.350  |
| Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)             | 21.146 | 20.845 | 24.310 | 22.481 | 19,736 |
| TPAK (%)                                | 77,73  | 78,40  | 75,30  | 74,79  | 78,53  |
| TPT (%)                                 | 2,91   | 3,22   | 2,95   | 3,37   | 3,26   |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

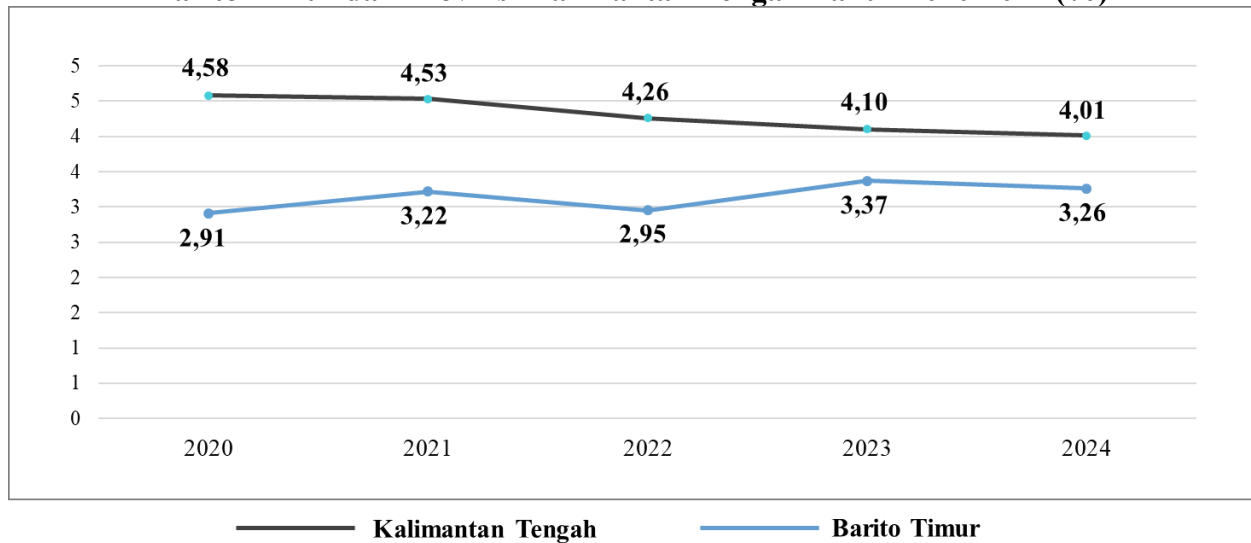
**Gambar 2.19. Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024 (%)**



Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

Kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2020-2024 di Kabupaten Barito Timur jika dibandingkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi dan Nasional, menunjukkan persentase penurunan. Hal ini dapat dilihat melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) tahun 2020-2024 di Kabupaten Barito Timur dibawah ini.

**Gambar 2.20. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 (%)**



Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

**Tabel 2.43. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (%)**

| TPAK/ TPT                                 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 77,73 | 78,40 | 75,30 | 74,79 | 78,53 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)        | 2,91  | 3,22  | 2,95  | 3,37  | 3,26  |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Barito Timur mencapai 77,73% pada tahun 2020, dan menjadi 78,53% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pasokan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Barito Timur. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Barito Timur berada pada 2,91% pada tahun 2020, dan cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 3,26%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan angka pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Barito Timur.

### Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai dan memotret tingkat kemampuan inovasi pemerintah daerah. IID menjadi salah satu tolok ukur penting dalam evaluasi kinerja daerah dan pendorong terciptanya ekosistem inovasi yang kondusif. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, Indeks Inovasi Daerah (IID) mencapai angka 3,63.

## Pengeluaran Perkapita/Bulan Masyarakat

Berdasarkan data yang ada, rata-rata pengeluaran perkapita per bulan masyarakat Kabupaten Barito Timur untuk makanan dan bukan makanan tahun 2024 sebesar Rp 1.558.135, dengan rincian untuk makanan sebesar Rp 798.664 (51,26%) dan untuk bukan makanan sebesar Rp 759.472 (48,74%). Jika dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kalimantan Tengah selama tahun 2024 Rp 1.590.691. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan paling rendah adalah Kabupaten Kapuas yaitu sebesar Rp 1.179.167, sedangkan paling tinggi adalah Kabupaten Lamandau Rp 2.076.508.

**Tabel 2.44. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2024**

| Jenis Pengeluaran     | Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan |           |            |        |
|-----------------------|---|-----------|------------|--------|
|                       | Nominal                                 |           | Persentase |        |
|                       | 2023                                    | 2024      | 2023       | 2024   |
| Makanan               | 700.082                                 | 798.664   | 51,71      | 51,26  |
| Non Makanan           | 658.844                                 | 759.472   | 48,29      | 48,74  |
| Makanan + Non Makanan | 1.358.927                               | 1.558.135 | 100,00     | 100,00 |

Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025.

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Barito Timur tahun 2024 terdiri atas Rp 1.558.135. untuk konsumsi makanan dan Rp 798.664 dan untuk konsumsi bukan makanan Rp 759.472. Persentase rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk makanan sebesar 51,26% lebih tinggi dibandingkan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk bukan makanan sebesar 48,74%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, besaran rata-rata pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan, adapun bukan makanan mengalami peningkatan.

## PDRB Per Kapita Kabupaten Barito Timur

Pada tabel dibawah menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2024 sebesar 10.914,98 (Miliar) meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 10.905,12 (Miliar). Dari PDRB ADHB dapat dilihat besarnya masing-masing Lapangan Usaha dalam menyumbang perekonomian Kabupaten Barito Timur. Lapangan Usaha yang berkontribusi tinggi dalam perekonomian Barito Timur antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian 4.159,23 (Miliar) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.793,74 (Miliar), dan Konstruksi 873,48 (Miliar). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2024 sebesar 6.108,02 (Miliar), meningkat 4,29% dibandingkan tahun sebelumnya.

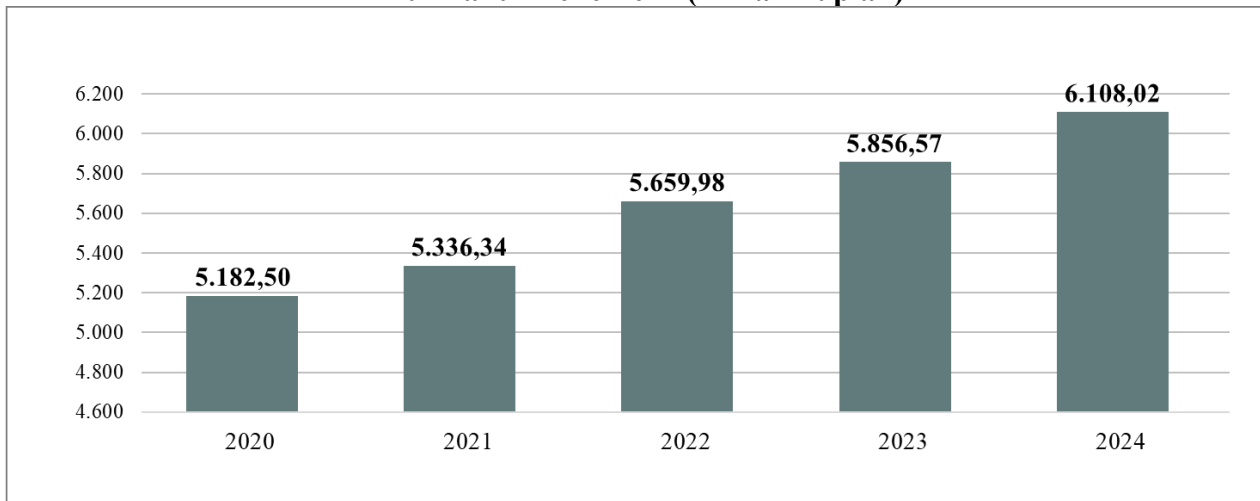
**Tabel 2.45. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

| Nilai PDRB (Miliar Rupiah)   | 2020     | 2021     | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| (1)                          | (2)      | (3)      | (4)       | (5)       | (6)       |
| ADHB                         | 7.548,50 | 7.949,95 | 10.948,06 | 10.905,12 | 10.914,98 |
| ADHK 2010                    | 5.182,50 | 5.336,34 | 5.659,98  | 5.856,57  | 6.108,02  |
| Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,71     | 2,97     | 6,06      | 3,47      | 4,29      |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

Indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas harga dasar berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

**Gambar 2.21. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)**



Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

**Tabel 2.46. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)**

| Lapangan Usaha  | 2020            | 2021            | 2022             | 2023             | 2024             |
|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                             | 1.403,96        | 1.499,22        | 1.580,40         | 1.689,54         | 1.793,74         |
| Pertambangan dan Penggalian                                     | 1.973,49        | 2.481,25        | 5.104,71         | 4.583,16         | 4.159,23         |
| Industri Pengolahan   | 578,68          | 628,23          | 673,76           | 705,98           | 735,79           |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 2,23            | 2,19            | 2,28             | 2,44             | 2,59             |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang        | 5,11            | 5,44            | 5,70             | 6,04             | 6,55             |
| Konstruksi  | 617,33          | 688,51          | 754,27           | 838,95           | 873,48           |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 595,96          | 604,48          | 649,46           | 709,27           | 757,48           |
| Transportasi dan Pergudangan                                    | 413,99          | 433,19          | 469,58           | 534,85           | 594,56           |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 109,62          | 112,14          | 121,04           | 128,79           | 140,95           |
| Informasi dan Komunikasi  | 97,86           | 107,27          | 115,31           | 124,82           | 129,41           |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 114,46          | 128,83          | 138,55           | 151,40           | 161,15           |
| Real Estate   | 184,21          | 195,43          | 210,43           | 221,88           | 233,09           |
| Jasa Perusahaan   | 6,88            | 7,22            | 7,58             | 8,30             | 8,98             |
| Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 370,11          | 377,52          | 397,32           | 432,26           | 549,87           |
| Jasa Pendidikan   | 428,66          | 448,48          | 470,81           | 502,82           | 549,87           |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 152,73          | 181,70          | 194,13           | 209,17           | 225,56           |
| Jasa Lainnya  | 48,29           | 48,83           | 52,74            | 55,47            | 57,73            |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto</b>                           | <b>7.103,69</b> | <b>7.949,95</b> | <b>10.948,06</b> | <b>10.905,12</b> | <b>10.914,98</b> |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

**Tabel 2.47. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)**

| Lapangan Usaha  | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                             | 1.038,37        | 1.059,84        | 1.079,43        | 1.103,99        | 1.093,01        |
| Pertambangan dan Penggalian                                     | 2.013,22        | 2.068,04        | 2.268,32        | 2.312,42        | 2.485,42        |
| Industri Pengolahan   | 333,69          | 339,07          | 348,71          | 361,44          | 360,13          |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 1,33            | 1,29            | 1,34            | 1,42            | 1,49            |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang        | 2,52            | 2,39            | 2,47            | 2,57            | 2,69            |
| Konstruksi  | 338,15          | 363,86          | 386,12          | 421,13          | 433,28          |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor          | 336,91          | 339,76          | 357,47          | 379,76          | 394,03          |
| Transportasi dan Pergudangan                                    | 237,51          | 244,56          | 256,88          | 271,36          | 286,88          |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 60,62           | 61,34           | 63,86           | 66,81           | 71,02           |
| Informasi dan Komunikasi  | 75,88           | 80,05           | 84,98           | 89,92           | 93,45           |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 76,08           | 84,05           | 88,04           | 93,35           | 97,14           |
| Real Estate   | 99,76           | 104,48          | 108,56          | 111,18          | 114,54          |
| Jasa Perusahaan   | 3,82            | 3,94            | 4,05            | 4,26            | 4,49            |
| Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 195,21          | 198,12          | 207,65          | 219,79          | 235,94          |
| Jasa Pendidikan   | 256,83          | 265,11          | 276,46          | 286,40          | 298,71          |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 86,04           | 93,82           | 97,84           | 101,93          | 106,42          |
| Jasa Lainnya  | 26,56           | 26,65           | 27,81           | 28,83           | 29,36           |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto</b>                           | <b>5.182,50</b> | <b>5.336,34</b> | <b>5.659,98</b> | <b>5.865,57</b> | <b>6.108,02</b> |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

\* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

### 3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

#### Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau (IEH), atau *Green Economy Index* (GEI), adalah suatu alat ukur komposit yang dirancang untuk menilai sejauh mana suatu wilayah telah mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan dan inklusivitas sosial ke dalam pertumbuhan ekonominya. Indeks ini merupakan refleksi dari upaya suatu daerah untuk bertransformasi menuju model ekonomi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan berkeadilan sosial, tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, Indeks Ekonomi Hijau (IEH) mencapai angka 40.00.

#### Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru (IEB) adalah sebuah kerangka kerja dan alat ukur komposit yang dirancang untuk menilai sejauh mana suatu wilayah telah mengembangkan dan mengelola sumber daya kelautannya secara berkelanjutan, inovatif, dan inklusif. IEB merupakan indikator penting untuk memotret kinerja ekonomi kelautan yang selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

## **Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer**

Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer adalah indikator kunci yang mengukur seberapa besar kontribusi sumber energi bersih dan berkelanjutan terhadap total konsumsi energi primer suatu wilayah. Indikator ini sangat penting karena menunjukkan komitmen dan kemajuan dalam transisi energi dari bahan bakar fosil menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

## **4) Transformasi Digital**

### **Indeks Pembangunan Teknologi Informasi**

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi (IP-TI), sering juga disebut *ICT Development Index* (IDI) secara internasional, adalah sebuah instrumen komposit yang dirancang untuk mengukur tingkat perkembangan dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di suatu wilayah (negara, provinsi, atau daerah). IP-TI memberikan gambaran menyeluruh tentang aksesibilitas, penggunaan, dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, serta infrastruktur yang mendukungnya.

### **Presentase Desa yang Terlayani Internet**

Jumlah desa terlayani internet merupakan data yang menampilkan cakupan desa per kecamatan mana saja yang sudah terlayani layanan internet baik itu layanan internet melalui penyedia layanan internet, seperti Indihome, Icon+, dan sejenisnya. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, persentase Desa yang Terlayani Internet 59%.

### **Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Seluler**

Jaringan seluler adalah jejaring telekomunikasi yang mana tautan dari pengirim ke penerima (dan sebaliknya) bersifat nirkabel. Jejaringan ini tersebar di beberapa daerah yang disebut sel (cell). Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, persentase Desa yang Terlayani Jaringan Seluler mencapai 90%.

## **5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**

### **Pembentukan Modal Tetap Bruto**

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), atau yang secara umum lebih dikenal sebagai investasi fisik, adalah salah satu komponen kunci dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu negara atau daerah. PMTB merepresentasikan pengeluaran untuk barang-barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak ditujukan untuk konsumsi akhir. Ini adalah indikator penting dari investasi riil dalam perekonomian.

## **Ekspor Barang dan Jasa**

Ekspor barang dan jasa adalah total nilai barang dan jasa yang dijual oleh produsen dalam negeri (suatu negara atau wilayah) kepada pembeli di luar negeri. Ini merupakan salah satu komponen kunci dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu perekonomian, yang dihitung dari sisi pendekatan pengeluaran. Ekspor menunjukkan seberapa besar produk dan layanan domestik diminati di pasar internasional.

## **6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**

### **Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan**

Indeks Infrastruktur adalah alat ukur komposit yang menilai ketersediaan, kualitas, dan cakupan infrastruktur di suatu wilayah (negara, provinsi, atau daerah). Infrastruktur merujuk pada fasilitas dasar dan sistem yang diperlukan untuk berfungsinya suatu masyarakat atau ekonomi, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, pasokan listrik, air bersih, sanitasi, telekomunikasi, dan lain-lain. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, Persentase Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur berada pada angka 60,00.

### **Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak**

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak adalah indikator fundamental yang mengukur proporsi rumah tangga yang menempati tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan tertentu, baik dari sisi fisik bangunan, akses terhadap fasilitas dasar, maupun lingkungan tempat tinggalnya. Ini merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak berada pada persentase 99,51%.

### **Sarana Prasarana Dasar**

Kebutuhan sarana dan prasarana dasar digunakan dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Barito Timur yang merata dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, proyeksi sarana dan prasarana juga digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Barito Timur menjadi lebih baik. Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan melihat proyeksi jumlah penduduk dan kriteria cakupan pelayanan berdasarkan Standar Nasional Indonesia.

Guna memenuhi kebutuhan dasar berupa kesehatan terdapat sarana dasar kesehatan berupa posyandu, rumah bersalin, puskesmas, puskesmas pembantu, dan apotek/rumah obat. Kabupaten Barito Timur perlu diberikan catatan bahwa harus sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia pada beberapa kebutuhan sarana kesehatan hingga tahun 2029, seperti pada sarana posyandu, puskesmas utama, puskesmas pembantu. Oleh karenanya untuk sarana-sarana tersebut Kabupaten Barito Timur perlu peninjauan ulang terkait efektifitas dan efisiensi serta melakukan peningkatan

kualitas pelayanan pada masing-masing sarana fasilitas kesehatan. Selain sarana kebutuhan dasar dalam bidang kesehatan, terdapat sarana kebutuhan dasar yang tidak kalah pentingnya yakni sarana kesehatan dasar berupa pemenuhan kebutuhan pendidikan. Beberapa sarana dasar terkait kebutuhan pendidikan diantaranya adalah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah.

### **Kondisi Jalan**

Kondisi suatu ruas jalan dapat dilihat berdasarkan nilai IRI (*International Roughness Index*). IRI merupakan besaran nilai ketidakrataan permukaan jalan, yang diperoleh dari panjang kumulatif turun naiknya permukaan persatuan panjang. Secara matematis, IRI adalah perbandingan antara kumulatif panjang jalan rusak/berlubang (dalam satuan m) terhadap panjang jalan total (dalam satuan km). Sehingga semakin besar nilai IRI (dalam satuan m/km), maka semakin buruk keadaan permukaannya. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 panjang kondisi jalan dalam keadaan baik sebesar 168,41 Km.

Salah satu program prioritas kabupaten adalah pengelolaan jalan eks Pertamina untuk membantu kelancaran mobilitas angkutan dan distribusi barang serta peningkatan PAD yang diakomodir pada Program Penyelenggaraan Jalan.

### **Persentase Desa Mandiri**

Persentase Desa Mandiri adalah sebuah indikator yang mengukur proporsi jumlah desa yang telah mencapai status Desa Mandiri dari total seluruh desa yang ada di suatu wilayah. Indikator ini merupakan cerminan dari keberhasilan program pembangunan dan pemberdayaan desa, serta menunjukkan tingkat kemandirian desa dalam mengelola potensi dan mengatasi tantangannya sendiri. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, Persentase Desa Mandiri berada pada persentase 5,00%.

## **7) Stabilitas Ekonomi Makro**

### **Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator keuangan daerah yang mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah dalam periode tertentu (biasanya satu tahun). Rasio ini merupakan persentase yang menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan dari sektor pajak lokal relatif terhadap aktivitas ekonomi daerah tersebut. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berada pada persentase 0,20%.

## **Tingkat Inflasi**

Tingkat inflasi adalah ukuran persentase kenaikan harga umum barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Ini menunjukkan seberapa cepat daya beli mata uang menurun. Ketika inflasi tinggi, uang yang dimiliki saat ini akan membeli lebih sedikit barang dan jasa di masa depan dibandingkan dengan hari ini.

## **Perbankan dan Investasi**

Pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2022 mencapai 4,07%. Pada tahun sebelumnya, terdapat lonjakan karena pemanfaatan jasa keuangan Kantor Bank yang tersedia di Kabupaten Barito Timur tahun 2022 terdiri dari kantor BNI sejumlah 1 unit, kantor BRI sejumlah 4 unit, kantor BPD sejumlah 1 unit, dan kantor Bank Mandiri sejumlah 2 unit. Setiap kantor bank memiliki fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk masyarakat melakukan transaksi keuangan. Posisi pinjam rupiah yang diberikan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada akhir bulan Desember 2022 sebesar 2,87 (Triliun). Berdasarkan jenis penggunaan, pinjaman yang digunakan sebagai modal kerja sebesar 607,58 (Miliar) (21,18%), pinjaman untuk investasi sebesar 1.584,09 (Miliar) (55,21%), dan pinjaman untuk konsumsi sebesar 677,59 (Miliar) (23,62%).

### **2.1.4 Aspek Pelayanan Umum**

#### **1) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**

##### **Indeks Reformasi Hukum**

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah sebuah alat ukur komposit yang dirancang untuk menilai sejauh mana suatu negara atau daerah telah melakukan perbaikan sistem hukum dan perundang-undangan, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan akses terhadap keadilan. IRH mencerminkan komitmen suatu pemerintah dalam menciptakan lingkungan hukum yang adil, transparan, dan dapat diandalkan, yang merupakan fondasi penting bagi stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia.

##### **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah alat ukur komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan (maturity level) pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. SPBE sendiri merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE (masyarakat, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, dan pihak lainnya) secara terintegrasi, efisien, dan transparan. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai persentase 3.10%.

### **Indeks Pelayanan Publik**

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur komposit yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. IPP merupakan cerminan dari komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima, transparan, cepat, dan akuntabel. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, Indeks Pelayanan Publik (IPP) mencapai angka 78,00.

### **Indeks Reformasi Birokrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi yang menggambarkan tingkat upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Berdasarkan data Barito Timur pada tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi mencapai angka 68,00.

### **Indeks Integritas Nasional**

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah alat ukur komposit yang menilai sejauh mana sebuah sistem telah berhasil mencegah, mendeteksi, dan menindak praktik korupsi, serta menciptakan lingkungan yang transparan, akuntabel, dan beretika dalam pemerintahan dan sektor publik. IIN mencerminkan kondisi integritas institusional dan budaya anti-korupsi suatu bangsa. Berdasarkan data Barito Timur pada tahun 2024, Persentase Percepatan Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi mencapai angka 75,00.

## **2) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial**

### **Persentase Penegakan Perda**

Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda) adalah sebuah indikator yang mengukur tingkat kepatuhan atau implementasi efektif dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ini merefleksikan seberapa baik pemerintah daerah, melalui aparat penegak Perda (utama Satuan Polisi Pamong Praja/Satpol PP), mampu memastikan bahwa masyarakat dan entitas lain mematuhi aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan di daerah tersebut. Instrumen yang akan mengukur seberapa patuh daerah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, dalam setiap tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah harus terdokumentasikan, hal ini akan mendorong daerah melaksanakan tertib administrasi dalam pembentukan Peraturan Daerah. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 mencapai angka 86,00%.

### **Persentase Capaian Aksi HAM**

Persentase Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah indikator yang mengukur tingkat keberhasilan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam melaksanakan

rencana aksi atau program yang bertujuan untuk memajukan, melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Indikator ini merefleksikan komitmen dan upaya konkret pemerintah dalam menjalankan kewajiban HAM-nya sesuai dengan konstitusi dan instrumen HAM internasional. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, Persentase Capaian Aksi HAM mencapai persentase 49,7%.

### **Indeks Demokrasi Indonesia**

Indeks Demokrasi adalah sebuah alat ukur komposit yang dirancang untuk menilai tingkat dan kualitas praktik demokrasi di suatu negara atau wilayah. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi politik, hak-hak sipil, kebebasan berekspresi, dan supremasi hukum diwujudkan dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan suatu indikator terkait perkembangan demokrasi di Indonesia. Data Indeks Demokrasi Indonesia ini disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia beserta Instansi Pemerintah terkait. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 mencapai angka 70%.

### **Indeks Rasa Aman**

Indeks Rasa Aman (IRA) adalah alat ukur komposit yang menilai tingkat persepsi keamanan dan kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat di suatu wilayah (negara, provinsi, atau daerah). Rasa aman adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yang tidak hanya terbatas pada kebebasan dari ancaman fisik, tetapi juga mencakup keamanan psikologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, IRA mencerminkan sejauh mana masyarakat merasa terlindungi dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, Indeks Rasa Aman (IRA) mencapai persentase 81,72%.

### **Indeks Ketentraman dan Ketertiban**

Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) adalah sebuah alat ukur komposit yang dirancang untuk menilai tingkat kondisi keamanan, ketertiban umum, dan kenyamanan masyarakat di suatu wilayah (negara, provinsi, atau daerah). Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah, bersama aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat, berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas dari gangguan, dan memberikan rasa aman bagi warganya.

Rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas dan bekerja. Semakin rendah tingkat kejahatan di suatu wilayah menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut. Tingginya persentase korban tindak kejahatan mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Selama tahun 2024, persentase penduduk yang menjadi korban

kejahatan menurun apabila dibandingkan tahun 2023, dari 0,25% menjadi 0,16%. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, Indeks Ketentraman dan Ketertiban mencapai persentase 86.00.

### **3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan**

#### **Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)**

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah instrumen pengukuran komprehensif yang menilai tingkat produktivitas, kemajuan, dan kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain, baik di tingkat domestik maupun internasional. IDSD merefleksikan keberhasilan daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya, mengoptimalkan ekosistem inovasi, dan menciptakan kesejahteraan yang tinggi serta berkelanjutan.

Selain itu Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024, Indeks Daya Saing Daerah mencapai angka 3,45.

### **4) Kinerja setiap urusan Pemerintahan Daerah**

#### **Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib**

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah kabupaten dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan konkuren pemerintahan wajib di bagi ke dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintah wajib yang termasuk ke dalam pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman; ketertiban umum; dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Sementara itu, urusan pemerintahan wajib yang tidak termasuk ke dalam pelayanan dasar terdiri dari tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi; usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kerasipan.

#### **Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Kondisi daerah untuk bidang urusan pemerintahan wajib daerah yang termasuk ke dalam pelayanan dasar yaitu bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman; ketertiban umum; dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

## Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut dapat menjadi modal bagi pembangunan daerah. Pemerintah sebagai pelayanan masyarakat diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memadai. Capaian dibidang pendidikan terkaiterat dengan ketersediaan fasilitas Pendidikan seperti jumlah sekolah, rasio guru-murid, serta sarana prasarana lainnya. Adapun gambaran umum kondisi daerah terkait urusan pendidikan dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator kinerja sebagai berikut:

### Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dinyatakan sebagai proporsi dari semua penduduk pada suatu kelompok umur tertentu yang masih bersekolah di berbagai jenjang pendidikan terhadap jumlah semua penduduk dalam kelompok umur yang sesuai. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi nilai APS, menunjukkan semakin terbukanya peluang dalam mengakses pendidikan secara umum. Namun demikian, bukan berarti dengan meningkatnya APS, meningkat pula pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

**Tabel 2.48. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2022-2024 (%)**

| Kelompok Umur (Tahun) | 2022  |       |       | 2023  |       |       | 2024  |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                       | L     | P     | L +P  | L     | P     | L +P  | L     | P     | L +P  |
| (1)                   | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  |
| 5-6                   | 19,43 | 24,41 | 21,85 | N/A   | N/A   | N/A   | N/A   | N/A   | N/A   |
| 7-12                  | 99,52 | 98,85 | 99,20 | 98,62 | 97,24 | 97,98 | 98,1  | 100   | 99,03 |
| 13-15                 | 94,11 | 95,16 | 94,61 | 91,65 | 97,37 | 94,50 | 93,3  | 98,29 | 95,96 |
| 16-18                 | 63,93 | 68,91 | 66,32 | 77,61 | 64,80 | 71,63 | 78,31 | 70,4  | 74,94 |
| 19-24                 | N/A   | N/A   | N/A   | 13,38 | 16,65 | 14,97 | 21,47 | 9,39  | 15,16 |

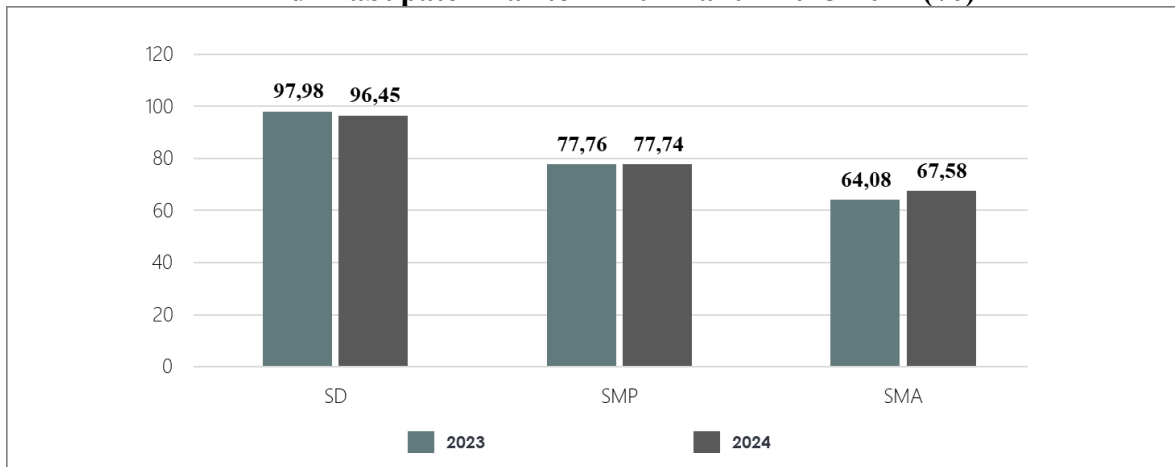
Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk Kabupaten Barito Timur tertinggi berada pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,20%. Kemudian diikuti kelompok umur 13-15 tahun (95,96%), dan 16-18 tahun (74,94%). Berdasarkan jenis kelamin, nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2024 pada kelompok umur 7-12 tahun untuk penduduk Laki-Laki sebesar 98,1% sementara Perempuan 100%; pada kelompok umur 13-15 tahun, nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk Laki-Laki sebesar 93,3% sementara Perempuan sebesar 98,29%; dan pada kelompok umur 16-18 tahun, nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk Laki-Laki sebesar 78,31% sementara Perempuan sebesar 70,4%.

### Angka Partisipasi Murni (APM)

Berdasarkan jenjang pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2024 yang tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan SD yaitu sebesar 96,45%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2024 yang terendah terdapat pada jenjang pendidikan SMA yaitu sebesar 67,58%.

**Gambar 2.22. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2024 (%)**

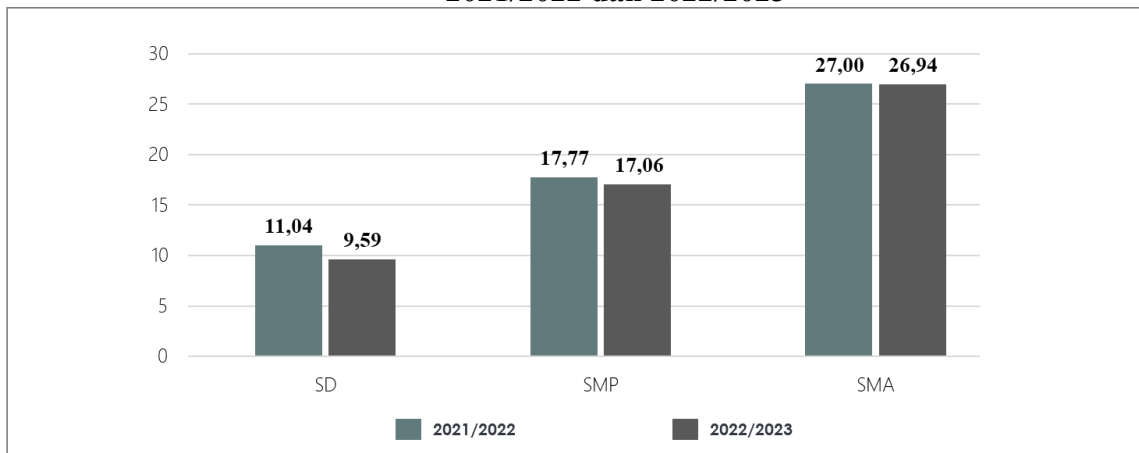


Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

### Rasio Murid-Guru dan Rasio Guru-Sekolah

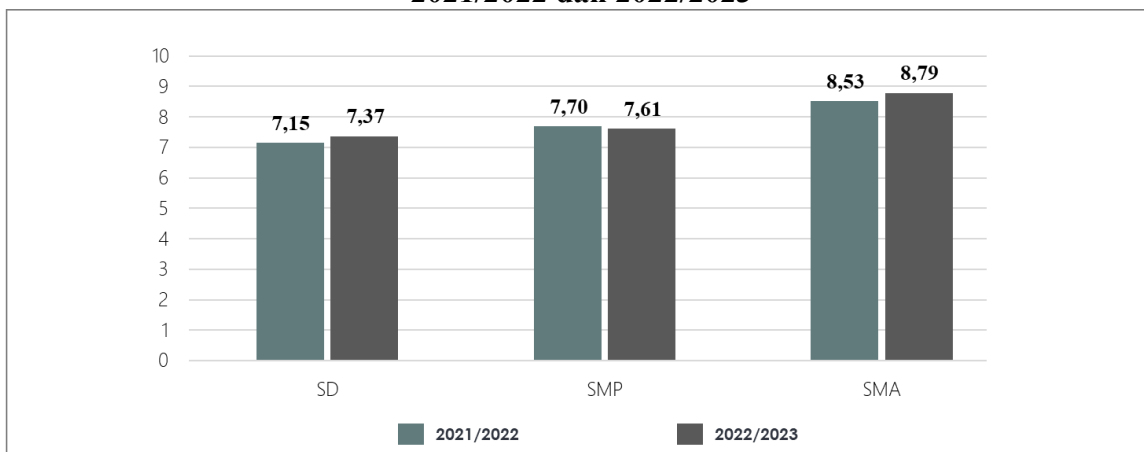
Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, termasuk jumlah siswa, maka pembangunan infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh guna meningkatkan sarana dan kualitas pendidikan. Selain itu, penambahan dan pendistribusian tenaga pendidik hingga ke daerah-daerah pelosok terus diupayakan pemerintah dari tahun ke tahun demi mencapai kondisi pendidikan yang ideal sesuai yang dibutuhkan.

**Gambar 2.23. Rasio Guru-Sekolah di Kabupaten Barito Timur Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023**



Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

**Gambar 2.24. Rasio Murid-Guru Kabupaten Barito Timur Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023**



Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

## Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Di Kabupaten Barito Timur panjang jalan sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai 727,66 Km, bahwa panjang jalan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan klasifikasi jalan menunjukkan 108,94 km merupakan jalan negara, 66,02 km merupakan jalan Provinsi, dan 813,19 km merupakan jalan Kabupaten. Berikut merupakan panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Barito Timur sampai dengan tahun 2024.

**Tabel 2.49. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2024 (Km)**

| Kondisi Jalan | Tahun         |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Baik          | 73,00         | 100,34        | 153,59        | 168,41        |
| Sedang        | 461,54        | 198,83        | 173,76        | 120,56        |
| Rusak         | 46,15         | 12,79         | 38,67         | 23,15         |
| Rusak Berat   | 232,50        | 501,23        | 447,18        | 415,54        |
| <b>Jumlah</b> | <b>813,19</b> | <b>813,19</b> | <b>813,19</b> | <b>727,66</b> |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

**Tabel 2.50. Perumahan Kumuh Kabupaten Barito Timur Tahun 2024**

| No.           | Kecamatan                | Lokasi  | Luas Kawasan (Ha) | Jumlah Penduduk |
|---------------|--------------------------|---|-------------------|-----------------|
| 1             | Kecamatan Dusun Tengah   | Ampah Kota, permukiman tepian sungai dan padat penduduk     | 31,53             | 5.252           |
| 2             | Kecamatan Pematang Karau | Permukiman tepian sungai dan padat penduduk                 | 7,80              | 1.244           |
| 3             | Kecamatan Dusun Timur    | Tamiang Layang, permukiman tepian sungai dan padat penduduk | 6,53              | 900             |
| <b>Jumlah</b> |                          |   | <b>46,08</b>      | <b>7.396</b>    |

Sumber: Diolah dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Dusun Tengah merupakan Kecamatan dengan luas kawasan perumahan kumuh terbesar dibandingkan Kecamatan Pematang Karau dan Kecamatan Dusun Timur. Kecamatan Dusun Tengah dengan luas kawasan 31,53 (Ha) dan jumlah penduduk sebesar 5.252 (Jiwa), berada di Ampah Kota, permukiman tepian sungai dan padat penduduk. Kecamatan Dusun Timur dengan luas kawasan 6,53 (Ha) dan jumlah penduduk sebanyak 900 (Jiwa) berada di Tamiang Layang, permukiman tepian sungai dan padat penduduk. Kecamatan Pematang Karau dengan luas kawasan 7,80 (Ha) dan jumlah penduduk sebesar 1.244 (Jiwa) berada di permukiman ditepian sungai dan padat penduduk. Selanjutnya capaian kinerja bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2020-2024, diukur dengan beberapa indikator sebagai pada tabel berikut.

**Tabel 2.51. Capaian Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024**

| Indikator  | Satuan Ukuran | Realisasi |       |       |       |       |
|--|---------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|  |               | 2020      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Persentase rumah tinggal bersanitasi                               | %             | 96,75     | 80,20 | 86,05 | 87,20 | 88,19 |
| Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (di Kota) | Rasio         | 28,00     | 30,80 | 65    | 68,55 | 76,92 |
| Rasio rumah layak huni   | %             | 96,50     | 80,69 | 86,32 | 88,17 | 90,80 |
| Rasio permukiman layak huni  | %             | 78,6      | 80,57 | 87    | 99,12 | 99,91 |

Sumber: Diolah dari Dinas Pekerjaan Umum, 2025.

Kondisi daerah untuk bidang urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak termasuk ke dalam pelayanan dasar yaitu bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi; usaha kecil; dan menengah, serta penanaman modal.

## Tenaga Kerja

**Tabel 2.52. Komposisi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2023-2024 (Orang)**

| Status Pekerjaan Utama                | 2023          |              |              | 2024          |               |               |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                       | L             | P            | L+P          | L             | P             | L+P           |
| Berusaha Sendiri                      | 9.695         | 7.674        | 17.369       | 7.565         | 6.495         | 14.060        |
| Berusaha Dibantu Pekerja Tak di Bayar | 6.207         | 1.626        | 7.833        | 7.001         | 4.133         | 11.134        |
| Berusaha Dibantu Pekerjaan Tetap      | 444           | 210          | 645          | 1.539         | 502           | 2.041         |
| Buruh/ Karyawan                       | 18.450        | 9.263        | 27.713       | 18.501        | 10.207        | 28.708        |
| Pekerja Bebas                         | 1.869         | 492          | 2.361        | 1.828         | 846           | 2.674         |
| Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar       | 1.869         | 492          | 2.361        | 3.253         | 7.948         | 11.201        |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>38.479</b> | <b>7.723</b> | <b>9.537</b> | <b>39.687</b> | <b>30.131</b> | <b>69.818</b> |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

Tabel di atas menunjukkan terjadi peningkatan pada tenaga kerja dari Tahun 2023 ke 2024 menunjukkan adanya intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah mepeningkatan

## Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Barito Timur dari tahun 2022-2024 menunjukkan angka penurunan, dimana pada tahun 2022 terdapat sebanyak 9 kasus, tahun 2023 sebanyak 2 kasus, dan tahun 2024 sebanyak 1 kasus tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Barito Timur, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.53. Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2024**

| No. | Uraian        | Tahun    |          |          |          |
|-----|---------------|----------|----------|----------|----------|
|     |               | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| 1   | Fisik         | 4        | 5        | 1        | -        |
| 2   | Psikis        | -        | 3        | -        | -        |
| 3   | Seksual       | 3        | 1        | -        | 1        |
| 4   | Penelantaran  | 1        | -        | -        | -        |
| 5   | Trafficking   | -        | -        | -        | -        |
| 6   | Eksplorasi    | -        | -        | -        | -        |
| 7   | Dan Lain-Lain | -        | -        | 1        | -        |
|     | <b>Jumlah</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>2</b> | <b>1</b> |

Sumber: Diolah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025.

Tindak kekerasan terhadap anak dari tahun 2021-2024 menunjukkan fluktuasi pada kasus kekerasan fisik, dimana pada tahun 2022 sebanyak 1 kasus, tahun 2023 sebanyak 4 kasus, dan tahun 2024 sebanyak 2 kasus, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.54. Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2024**

| No.           | Uraian        | Tahun     |           |          |          |
|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|----------|
|               |               | 2021      | 2022      | 2023     | 2024     |
| 1             | Fisik         | 8         | 1         | 4        | -        |
| 2             | Psikis        | 1         | 1         | -        | -        |
| 3             | Seksual       | 8         | 9         | 2        | 2        |
| 4             | Penelantaran  | -         | 2         | -        | -        |
| 5             | Trafficking   | -         | -         | -        | -        |
| 6             | Eksplorasi    | 1         | -         | -        | -        |
| 7             | Dan Lain-Lain | 1         | -         | 2        | -        |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>19</b> | <b>13</b> | <b>8</b> | <b>2</b> |

Sumber: Diolah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025.

### Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Kabupaten Barito Timur memiliki ketahanan pangan yang cukup baik dimana rasio pemenuhan beras sudah berada di atas standar kecukupan pangan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah terjadinya penurunan jumlah produksi sehingga hal tersebut patut menjadi perhatian bagi seluruh stakeholders dalam mempertahankan ketahanan pangan daerah.

**Tabel 2.55. Statistik Ketahanan Pangan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

| Indikator                      | Satuan | 2020      | 2021      | 2022      | 2023   | 2024   |
|--------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Rasio Pemenuhan Pangan (Beras) | Kg     | 97,5      | 93,5      | 105,5     | 110,3  | 114,6  |
| Jumlah Produksi Padi           | Ton    | 50.276,00 | 47.462,00 | 39.960,00 | 41.205 | 45.607 |
| Kerawanan Pangan               | %      | 19,05     | 37,14     | 37        | 34     | 31,9   |
| Skor Pola Pangan Harapan       | -      | 86,1      | 82,5      | 84,7      | 85,9   | 86,3   |
| Ketersediaan Pangan Utama      | %      | 100       | 100       | 100       | 100    | 100    |

Sumber: Diolah dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025.

### Pertanahan

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Barito Timur terkait urusan pertanahan dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.56. Capaian Urusan Pertanahan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Daerah                 | Satuan | 2020      | 2021     | 2022      | 2023       | 2024       |
|--|--------|-----------|----------|-----------|------------|------------|
| Luas Lahan Bersertifikat                 | Ha     | 17.670,21 | 1.027,10 | 14.112,22 | 12.763.736 | 11.761.907 |
| Jumlah Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan | Lembar | 1.895     | 9.000    | 4.250     | 2.157      | 1.231      |

Sumber: Diolah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Timur, 2025.

## Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Barito Timur terkait urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut: Penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil Pendaftaran penduduk dalam catatan sipil menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Tertib administrasi kependudukan ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Nikah Non-Muslim. Rasio penduduk yang memiliki KTP, KK, dan Akte Kelahiran terus meningkat dari tahun 2019-2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri atau administrasi kependudukan semakin meningkat.

## Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan dalam pencapaian perekonomian masyarakat desa, maka dapat dilihat dengan adanya BUMDes yang disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.57. Data BUMDes Per-Kecamatan di Kabupaten Barito Timur**

| No. | Kecamatan      | Desa           | Nama BUMDes   | Jenis Usaha   |
|-----|----------------|----------------|---|---|
| 1   | Pematang Karau | Ketab          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketab Mandiri</li> <li>• Bintang Barito Ketab</li> </ul> | Keramba ikan  |
|     |                | Kupang Bersih  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kupang Indah</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdagangan</li> <li>• Pembibitan dan Budidaya</li> <li>• Peternakan</li> <li>• Pembibitan dan Pembudidayaan</li> <li>• Rael Estat</li> <li>• Aktivitas Parkir</li> <li>• Angkutan Bermotor</li> <li>• Reparasi dan Perawatan</li> </ul> |
|     |                | Muara Plantau  | Hapakat Bersama   | Moulding  |
|     |                | Bambulung      | Karya Bersama   | Wisata Desa dan Musik Elektron  |
|     |                | Bararawa       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambun Jaya</li> <li>• Takuam Jaya</li> </ul>            | Perdagangan   |
|     |                | Pinang Tunggal | Pinang Sejahtera  | Perdagangan   |
|     |                | Muru Duyung    | Nansarunai  | Perdagangan   |
|     |                | Lebo           | Sabuahan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdagangan</li> <li>• Penyedia Jasa</li> <li>• Penggalian Batu</li> </ul>   |
|     |                | Tuyau          | Tuyau Jaya  | Perdagangan   |
|     |                | Lampeong       | Karya Bersama   | Perdagangan   |
|     |                | Nagaleah       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maju Bersama</li> <li>• Berkah Bersama</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jual saprodi pertanian</li> <li>Internet desa</li> </ul>   |
|     |                | Tumpung Ulung  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaya Bersama</li> <li>• Dayung Bersama</li> </ul>        | Pom Mini  |
|     |                | Sumber Rejo    | Sumber Rejo Sejahtera   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ternak Sapi</li> <li>Jual saprodi pertanian</li> </ul>   |
| 2   | Dusun Tengah   | Rodok          | Rodok Karya Mandiri   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bumdesmart</li> <li>• Brilink</li> </ul>   |
|     |                | Saing          | Niwung Harapan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet desa</li> <li>• Sewa Gedung Olahraga</li> </ul>   |
|     |                | Sumber Garungg | Garunggung Mandiri  | Toko Obat/Bahan pertanian   |

| No. | Kecamatan    | Desa              | Nama BUMDes   | Jenis Usaha   |
|-----|--------------|-------------------|---|---|
|     |              | ung               |   | Internet desa   |
|     |              | Netampin          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tetei Pamelum</li> <li>• Maju Bersama</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan bibit padi</li> <li>• Jasa Internet</li> <li>• Penambang Batubara</li> <li>• Pengelolaan Pariwisata Desa</li> <li>• Perdagangan</li> </ul>   |
|     |              | Muara Awang       | Awang Berjaya   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan air bersih</li> <li>• Jual beli karet</li> <li>• Jasa Internet</li> <li>• Penambangan Batubara</li> <li>• Pengelolaan Pariwisata</li> <li>• Pengelolaan Sumber Daya Hutan</li> </ul>   |
|     |              | Ampah II          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tunas Harapan</li> <li>- Maju Bersama</li> </ul> | Bidang Jasa Wifi  |
|     |              | Putai             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Putai Lestari</li> <li>• Putai Jaya</li> </ul>   |   |
|     |              | Sumber Garunggung | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garunggung Mandiri</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa Internet</li> <li>• Penambangan Batubara</li> <li>• Pengelolaan Pariwisata Desa</li> <li>• Perdagangan</li> <li>• Pengelolaan sumber daya Hutan</li> </ul>  |
| 3   | Raren Batuah | Unsum             | Mirapakat   | Jual gas LPG 3Kg  |
|     |              | Baruyan           | Tetei Pamelum   | Jual beli Getah Karet   |
|     |              | Batuah            | Batuah Maju Bersama   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar desa</li> <li>• Sarang Burung Walet</li> <li>• Kebun Karet Desa</li> <li>• Jual Gas LPG 3KG</li> <li>• Jual Pulsa Listrik</li> <li>• Perdagagn Material Bangunan</li> <li>• Perdagangan Suku Cadang Motor</li> <li>• Perdagangan Pupuk dan Hama</li> <li>• Pembibitan dan Budidaya Kambing</li> <li>• Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong</li> <li>• Peternakan Babi</li> <li>• Pembibitan dan Budidaya Lainnya</li> <li>• Real Estat</li> <li>• Aktivitas Parkir</li> <li>• Angkutan Bermotor untuk Barang Umum</li> <li>• Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor</li> </ul> |
|     |              | Puri              | Puri Jaya   | Jual Sembako  |

| No. | Kecamatan | Desa        | Nama BUMDes                           | Jenis Usaha   |
|-----|-----------|-------------|---------------------------------------|---|
|     |           | Lenggang    | Jaya Lestari                          | Kios Desa<br>Jual Sembako<br>• Penampung karet<br>• Jual Gas LPG 3Kg  |
|     |           | Sibung      | Sibung Maju Berkarya                  | Jual Pulsa<br>Beli karet  |
|     |           | Malintut    | • UT. Jaya Malintut<br>• Rantai Bakir | Jual Beli Karet   |
|     |           | Turan Amis  | Karya Bersama                         | Desa Wisata<br>Internet desa  |
|     |           | Tangkum     | Mekar Sari                            | • Penyewaan perontok padi<br>• Penyewaan Handtracktor<br>• Penampung Karet<br>• Perdagangan Eceran Gas Elpiji<br>• Perdagangan eceran Material Bangunan<br>• Industri Penggilingan Padi<br>• Industri air Kemasan<br>• Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan |
|     |           | 4           | Paku                                  | Luau Jawuk  |
|     |           | Patung      | Arial Munge                           | • Ikan kolam terpal<br>• Simpan Pinjam  |
|     |           | Runggu Raya | Karya Bersama                         | Pengadaan barang dan jasa telekomunikasi dan kelistrikan  |
|     |           | Kalamus     | Kalamus Berjaya                       | • Usaha umum, outlet pembayaran rekening listrik<br>• Aktivitas Penunjang Treatment Air<br>• Industri air Minum Isi Ulang<br>• Pertanian Sayuran, Buah dan aneka Umbi<br>• Perdagangan Eceran Gas LPG   |

| No. | Kecamatan      | Desa           | Nama BUMDes   | Jenis Usaha  |
|-----|----------------|----------------|---|--|
|     |                |                |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas Penyewaan Usaha tanpa hak opsi alat peserta</li> <li>• Aktivitas Penyewaan Usaha tanpa Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pebgolahan</li> <li>• Pendidikan Kerajinan dan Industri</li> </ul> |
|     |                | Tampa          | Paku Sejahtera  | Jual beli gabah, air mineral, desa wisata, Toko Desa   |
|     |                | Paku Beto      | Paku Makmur   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jual alat Pertanian</li> <li>• Jual Beras Merah</li> </ul>  |
|     |                | Bantai Napu    | Harapan Kahai   | Jual gas LPG 3 kg, Token, Pulsa  |
|     |                | Tarinating     | Bauntung Mupakat  | Penjualan BBM  |
|     |                |                |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana air bersih</li> <li>• Sewa Barang Inventaris Desa</li> </ul>   |
|     |                | Gandrung       | - Mira lalati<br>- Pealelum Tumpuk  | - Jual beli sembako  |
|     |                |                |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bebek Organik</li> <li>• Jual paket Internet</li> <li>• Kios / Pasar Desa</li> <li>• Agen Bank</li> </ul>   |
|     |                | Kupang Baru    | Mara'al Nakayaan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jual beli ayam petelur</li> <li>• Simpan Pinjam</li> </ul>  |
|     |                | Pangkan        | Subur Makmur  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdagangan Eceran pakan Ternak</li> <li>• Angkutan sawit</li> </ul>  |
| 5   | Karusen Janang | Ipu Mea        | Martang Janggut   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa Angkutan</li> <li>• Peternakan ayam</li> </ul>   |
|     |                | Wuran          | Wulan membangun   |  |
|     |                | Lagan          | Lestari   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jual pulsa dan jasa transfer</li> <li>• Simpan Pinjam</li> <li>• Bni Link</li> <li>• Peternakan</li> </ul>  |
|     |                | Simpang nanang | Karusen Jaya  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peternakan</li> <li>• Agen Bank</li> <li>• Usaha Bidang Jasa</li> <li>• Perbenkelan</li> </ul>  |
|     |                | Dayu           | Karya Bersama   | Bengkel Motor  |
|     |                | Putut Tawuluh  | Berjuang Sasameh  |  |
|     |                | Simpang Taneng | Karusen Jaya  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelola Sarana Air Bersih Desa</li> <li>• Wifi Desa</li> <li>• Bri Link</li> <li>• Penyewaan tenda Kursi</li> </ul>   |
|     |                | Kandris        | Haut Mukai  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agen Gas LPG</li> <li>• Jasa Angkutan</li> <li>• Perbengkelan</li> </ul>  |
| 6   | Paju Epat      | Siong          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maju Bersama</li> <li>• Banyu Mareh</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Air bersih yang bisa dikonsumsi</li> <li>• Sapordi pertanian</li> </ul>   |
|     |                | Murutawu       | Murutawu Sejahtera  | Penjualan gas LPG  |

| No. | Kecamatan   | Desa          | Nama BUMDes   | Jenis Usaha   |
|-----|-------------|---------------|---|---|
|     |             | Malpe         | Karya Bersama   | Pengolahan air minum  |
|     |             | Tampulangit   | Uriya Mandiri   | Perdagangan   |
|     |             | Kalinapu      | Mulia   | Perikanan   |
|     |             | Juru Banu     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Rejeki</li> <li>• Hayak Tamara</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abon Ikan Haruan</li> <li>• Penjualan Gasa LPG</li> </ul>  |
|     |             | Telang Baru   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Usaha</li> <li>• Maju Bersama</li> </ul>  | Perdagangan   |
|     |             | Telang        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakat Rama</li> <li>• Mira Pakat</li> </ul>      | Pasar desa  |
| 7   | Dusun Timur | Magantis      | Tunas Harapan   | Perikanan   |
|     |             | Karang langit | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karuntu Jaya</li> <li>• Putut Bartim</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Pasar Desa</li> <li>• Penyewa tenda Kursi</li> <li>• Penitipan Hasil usaha Masyarakat</li> </ul>   |
|     |             | Harigen       | Sameh Ampun   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerajinan Anyaman</li> <li>• Kios/ Market</li> <li>• Pemasaran Ikan Air Tawaar</li> <li>• Jasa Pembayaran</li> <li>• Jasa Penunjang Pertanian</li> <li>• Pembibitan dan Budidaya Lebah</li> </ul>  |
|     |             | Harara        | Totei Pamehun   | Bidang Jasa   |
|     |             | Sarapat       | Sarapat Mandiri   | Perdagangan   |
|     |             | Pulau Patai   | Amuan Sasameh   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan air bersih, parkir pasar desa, perdagangan</li> <li>• Penjungang Treatment Air</li> <li>• Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras</li> <li>• Aktifitas Wisata Air</li> <li>• Budidaya Ayam Ras Petelur</li> <li>• Penyewaan Udaha tanpa opsi alat pesta</li> <li>• Minimarket</li> </ul> |
|     |             | Dorong        | Usaha Dagang Bersama  | Jual Beli karet dna percetakan  |
|     |             | Didi          | Daya Pakat  | Multiguna   |
|     |             | Mangkarap     | Kalungkung Jari Mangkarap   | Perdagangan   |
|     |             | Matabu        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maburai</li> <li>- MitrS Mandiri</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toko ATK dan Foto Copy</li> <li>• Pertanian kacang</li> <li>• Pertanian Sayur</li> <li>• Pertanian Buah</li> <li>• Pertanian anggur</li> <li>• Pembibita Sapi dan kambing Potong</li> <li>• Peternakan Ayam Ras Petelur</li> </ul>   |
|     |             | Maragut       | Sumber Rejeki   | • Home industri (batako),   |

| No. | Kecamatan  | Desa     | Nama BUMDes  | Jenis Usaha   |
|-----|------------|----------|--|---|
|     |            |          |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdagangan dan Jasa Penyewaan</li> <li>• Aktivitas Penunjang treatment Air</li> <li>• Industri Air minum Isi Ulang</li> <li>• Pertanian sayur, Buah dan Aneka Umbi</li> <li>• Perdagangan Gas Elpiji</li> <li>• Penyewaan Usaha tanpa Hak opsi alat Pesta</li> <li>• Penyewaan Angkutan</li> </ul>  |
|     |            | Matarah  | Itung Janji  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdagangan dan Penyewaan tenda kursi</li> <li>• Peternakan ayam pedaging</li> </ul>   |
|     |            | Sumur    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumur Berjaya</li> <li>• Sumur Ranu Welums</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ternak Ayam petelor</li> <li>• Penyewaan tenda Kursi</li> <li>• Budidaya Ayam Petelur dan Pedagang</li> <li>• Industri Barang dari Semen dan Kapur</li> <li>• Pertanian buah-buahan tropis</li> <li>• Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian dan Peralatan</li> <li>• Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor</li> </ul> |
|     |            | Jaweten  | Barkat Sasameh   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdagangan dan Jasa</li> <li>• Penyewaan</li> <li>• Budidaya Ayam ras Petelur dan Pedaging</li> <li>• Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya</li> </ul>  |
|     |            | Jaar     | Matandring Jaya  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjualan Saprodi Pertanian</li> <li>• Penjualan Beras Lokal</li> </ul>  |
|     |            | Gumpa    | Pakat Katuluh  | -   |
|     |            | Magantis | Tunas Harapan  | -   |
| 8   | Benua Lima | Bagok    | Mira Putut   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdagangan dan Penyewaan tenda</li> </ul>   |

| No. | Kecamatan       | Desa          | Nama BUMDes                             | Jenis Usaha  |
|-----|-----------------|---------------|---|--|
|     |                 |               |   | kursi<br>• Retribusi Pasar<br>• Penyewaan Tenda<br>• Layanan BRILINK<br>• Penyewaan alsintan<br>• Air Minum Isi Ulang  |
|     |                 | Gudang seng   | Harapan Bersama                         | • Penggilingan Padi<br>• Penyewaan laot Pesta<br>• Kios/Warung Desa<br>• Simpan Pinjam<br>• Bengkel Las<br>• Penggilingan Padi   |
|     |                 | Banyu Landas  | Bauntang                                | Simpan pinjam, perdagangan, jasa pembayaran listrik, pertambangan dan jasa konstruksi<br>• Penyewaan tenda<br>• Penyewaan alat angkut Roda Tiga<br>• Peternakan ayam Kampung Super |
|     |                 | Kandris       | • Harapan Jaya<br>• Maju Bersama        | • Jasa dan perdagangan<br>• Menjahit   |
|     |                 | Bamban        | Pangarawah                              | • Perdagangan, peternakan<br>• Retribusi Pasar<br>• Penyewaan Tenda dan Kursi<br>• Layanan BRILINK   |
|     |                 | Tewah Pupuh   | Tewah Jari                              | • Jasa pencucian motor, perdagangan dan peternakan<br>• Parkir Retribusi Pasar<br>• Penyewaan Tenda, Kursi dan Lampu<br>• Layanan ambulande Desa<br>• Peternakan ayam Petelur      |
| 9   | Patangkep Tutul | Lalap         | Mitra Harapan Jaya                      | Simpan pinjam dan isi ulang air minum  |
|     |                 | Ampari Bura   | Harapan Bersama                         | Jual beli karet, isi ulang air minum, sembako  |
|     |                 | Kambitin      | Beringin Jaya                           | Perbengkelan<br>Simpan pinjam  |
|     |                 | Jango         | Jango Sejahtera                         | • Jual beli karet<br>• Jual Pulsa  |
|     |                 | Kotam         | Kotam Membangun                         | Simpan pinjam, perdagangan, air isi ulang  |
|     |                 | Mawani        | • Mawani Maju Bersama<br>• Jaya Mandiri | Simpan pinjam dan jual beli karet  |
|     |                 | Betang Nalong | Karya Sasameh                           | Jual beli Gabah  |
|     |                 | Pulau Padang  | • Barakat Sabar<br>• Sameh Sanang       | Perdagangan dan POM mini minyak  |

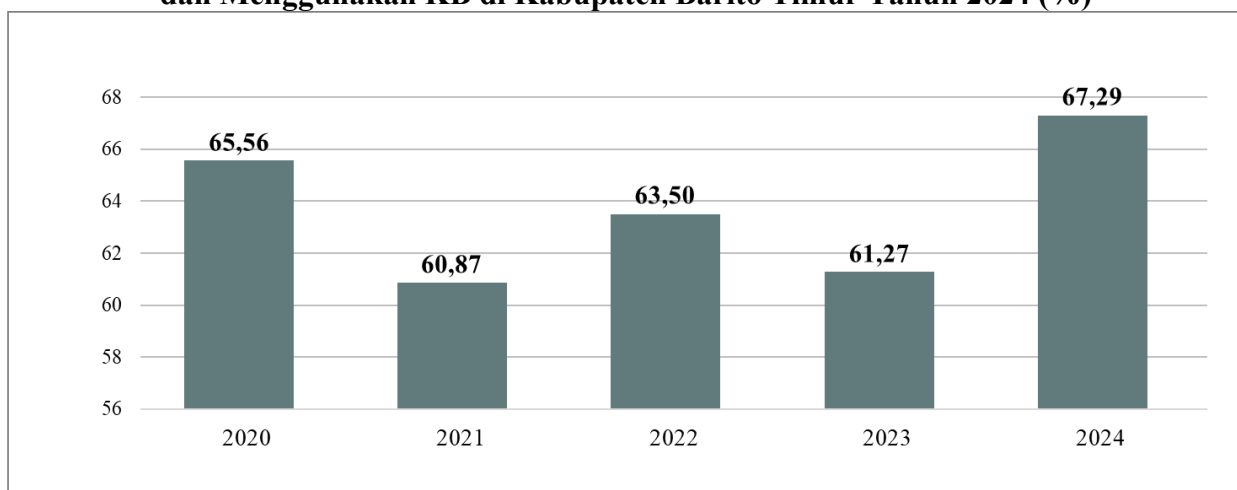
| No.     | Kecamatan    | Desa            | Nama BUMDes                             | Jenis Usaha                         |
|---------|--------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| 10      | Awang        | Ramania         | • Maju Bersama<br>• Gawi Baumbai        | Perdagangan dan isi ulang air minum |
|         |              | Bentot          | • Mutiara                               |                                     |
|         |              | Danau           | Unru Nyingkai                           | Jasa sewa tenda kursi               |
|         |              | Biwan           | • Biwan Bersama<br>• Ranu Welum         | Penggilingan Padi                   |
|         |              | Ampari          | • Tetei Pakat<br>• Kabahumen            | Perbengkelan                        |
|         |              | Plunggu         | Lekang Watu                             | Penggilingan Padi                   |
|         |              | Apar Batu       | • Apar Batu Jaya<br>• Rambung Mankuiwik | Peternakan dan perdagangan          |
|         |              | Tangkan         | Hamen Maju                              | Perdagangan dan Jasa Penyewaan      |
|         |              | Janah Jari      | • Rirung Munge<br>• Pakat Rama          | Perdagangan                         |
|         |              | Bangkirayan     | Gunung Sion                             | Perdagangan                         |
|         |              | Wungkur Nanakan | • Tunas Harapan<br>• Mekar Jaya         | Jasa dan perdagangan                |
|         |              | Hayaping        | Jarau Matudi                            | Peternakan dan perdagangan          |
|         |              | Janah Manisiuwi | Kalana Aheng                            |                                     |
| Piunggu | Lekang Waktu |                 |   |                                     |

Sumber: Diolah dari DPMD Kabupaten Barito Timur, 2025.

### Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu sehingga kesejahteraan keluarga meningkat. Program KB dilakukan dengan penggunaan berbagai macam alat kontrasepsi. Manfaat kesehatan dari penggunaan alat kontrasepsi meliputi kemampuan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga mengurangi risiko aborsi, potensi komplikasi kehamilan, dan risiko kematian ibu.

**Gambar 2.25. Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Menggunakan KB di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 (%)**



Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

Program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bias dikendalikan lebih baik lagi. Pada tahun 2024, persentase wanita berumur 15-49 tahun di Barito Timur yang

berstatus kawin dan menggunakan KB mencapai 67,29% atau sebesar 15.546 (Jiwa). Adapun metode yang digunakan antara lain Suntik (6.855), Pil (5.966), Kondom (224), IUD (371), Implan (1.818), Vasektomi (6), Tubektomi (235), dan Mal (7).

### Urusan Perhubungan

Perkembangan kendaraan bermotor di Kabupaten Barito Timur memiliki dampak berbanding terbalik dengan arus penumpang angkutan umum. Peningkatan pada jumlah kendaraan bermotor yang diiringi dengan penurunan jumlah arus penumpang angkutan umum, khususnya sampai dengan tahun 2024. Infrastruktur perhubungan di Kabupaten Barito Timur dimana jumlah Pelabuhan Sungai 1 Unit, Dermaga 2 Unit, dan Terminal 3 Unit. Sampai dengan tahun 2024, panjang jalan umum sebesar 813,19 Km.

**Tabel 2.58. Statistik Perhubungan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

| Indikator   | Satuan       | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|---|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jumlah Kendaraan Bermotor                         | Unit         | 47.787 | 50.322 | 53.125 | 56.910 | 60.592 |
| Jumlah Uji kir Angkutan Umum                      | Kali         | 1.460  | 142    | 1.072  | 823    | 957    |
| Jumlah Pelabuhan Sungai, Dermaga dan Terminal Bus | 1. Pelabuhan | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
|   | 2. Dermaga   | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
|   | 3. Terminal  | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| Panjang Jalan Kabupaten                           | Km           | 813,19 | 813,19 | 813,19 | 813,19 | 813,19 |
| Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum         | Ribu         | 543    | 1.776  | 1.590  | 1.079  | 841    |

Sumber: Diolah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Timur, 2025.

### Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti trend gaya hidup modern. Semakin terjangkau harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan.

**Tabel 2.59. Persentase Penduduk Usia >5 Tahun Memiliki akses Internet Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (%)**

| Jenis Kelamin         | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (1)                   | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   |
| Laki - laki           | 50,15 | 60,64 | 69,02 | 69,01 | 71,36 |
| Perempuan             | 43,89 | 53,25 | 61,17 | 66,39 | 64,56 |
| Laki-laki + Perempuan | 47,10 | 56,99 | 65,19 | 67,72 | 67,96 |

Sumber: Diolah dari Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Barito Timur, 2025.

### Kepemudaan dan Olah Raga

Perkembangan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Barito Timur sejak 2020-2024, dimana pada tahun 2024 Jumlah Klub Olah Raga (47,00), Jumlah Gedung Olah Raga (2,00),

Jumlah Organisasi Olahraga (3,00), Jumlah Organisasi Pemuda (25,00), Jumlah Kegiatan Kepemudaan (2,00), dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.60. Perkembangan Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

| No. | Capaian Pembangunan        | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-----|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | Jumlah Klub Olah Raga      | 48,00 | 46,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 2   | Jumlah Gedung Olah Raga    | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 2,00  |
| 3   | Jumlah Organisasi Olahraga | 3,00  | 3,00  | 5,00  | 5,00  | 3,00  |
| 4   | Jumlah Organisasi Pemuda   | 9,00  | 9,00  | 9,00  | 9,00  | 25,00 |
| 5   | Jumlah Kegiatan Kepemudaan | 2,00  | 3,00  | 2,00  | 2,00  | 2,00  |

Sumber: Diolah dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barito Timur, 2025.

### Penanaman Modal

Investasi baik asing, domestik maupun pemerintah, memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Barito Timur. Pertumbuhan investasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu iklim investasi yang kondusif, kemudahan dan kejelasan prosedur serta kondisi makro ekonomi daerah tersebut. Jumlah investasi swasta nasional, PMA-PMDN di Kabupaten Barito Timur berdasarkan bidang usaha seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2.61. Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024**

| Bidang Usaha   | PMDN      | PMA      | Jumlah    |
|--|-----------|----------|-----------|
| Perkebunan Tanaman Kelapa Sawit                                      | 4         | 4        | 8         |
| Perkebunan Tanaman Karet   | -         | -        | -         |
| Jasa Angkutan Pertambangan Batu Bara                                 | -         | -        | -         |
| Pertambangan Batu Bara   | 14        | 1        | 15        |
| Industri Prduk dari Batu Bara  |           | 1        | 1         |
| Pertambangan Batu Baara, Pengadaan Barang dan Jasa, Jasa Konstruksi  | 2         |          | 2         |
| Pedagang Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU                        | -         | -        | -         |
| Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk YBDI   | 2         |          | 2         |
| Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus/Jasa Angkutan Bahan Bakar Cair | 2         |          | 2         |
| <b>Total</b>   | <b>24</b> | <b>6</b> | <b>30</b> |

Sumber: Diolah dari DPMPSTP Kabupaten Barito Timur, 2025.

### Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang termasuk ke dalam urusan pilihan pemerintah di lingkup kabupaten antara lain kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

### Perikanan

Pada subkategori perikanan, produksi budidaya ikan air tawar Kabupaten Barito Timur tahun 2023 mencapai 1.544.305 kg yang terdiri atas 818.482 kg budidaya ikan di media kolam dan 725,823 kg menggunakan keramba. Sementara itu, jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) di Kabupaten Barito Timur ada sebanyak 1.031 rumah tangga dengan total luas pemeliharaan sebesar 378.144 Ha.

**Tabel 2.62. Statistik Perikanan Budi Daya Air Tawar di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2024**

| Uraian  | Jumlah RTP |       | Luas (Ha) |         | Target Produksi (Kg) |         | Realisasi Produksi (Kg) |         |
|---------|------------|-------|-----------|---------|----------------------|---------|-------------------------|---------|
|         | 2023       | 2024  | 2023      | 2024    | 2023                 | 2024    | 2023                    | 2024    |
| Kolam   | 1.031      | 1.036 | 378.144   | 378.204 | 866.395              | 884.075 | 818.482                 | 968.395 |
| Keramba | 597        | 525   | 137.229   | 137.013 | 773.309              | 698.845 | 725.823                 | 568.740 |
| Sawah   | 0          | 0     | 0         | 0       | -                    | 0       | -                       | 0       |

Sumber: Diolah dari Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur, 2025.

## Hotel dan Pariwisata

Untuk mewujudkan Kabupaten Barito Timur sebagai destinasi wisata, keberadaan hotel atau penginapan serta akomodasi makan minum merupakan faktor penunjang yang sangat penting. Hotel atau penginapan yang ada di Barito Timur tahun 2024 berjumlah 15 Unit dengan rincian 8 Unit berlokasi di Kecamatan Dusun Timur dan 7 Unit di Kecamatan Dusun Tengah.

Perkembangan sektor pariwisata perlu menjadi salah satu prioritas pembangunan Barito Timur. Beberapa objek wisata memiliki potensi untuk dikenal masyarakat umum, tetapi pengelolannya belum optimal. Objek wisata alam yang berpotensi di Barito Timur antara lain Bendungan Karau di Dusun Tengah, Bendungan Tampa di Paku, Taman Anggrek Alam di Paju Epat, Goa Liang Saragih di Awang, dan Bukit Jodoh di Patangkep Tutui. Sedangkan, objek wisata budaya yang ada di Barito Timur antara lain Museum Lewu Hante di Benua Lima, Makam Putri Mayang di Dusun Timur, Balai Keramat Abeh di Karusen Janang, dan Makam Suta Unu di Paju Epat.

**Tabel 2.63. Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

| No. | Indikator            | Satuan | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|-----|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1   | Wisatawan Domestik   | Orang  | 15.300 | 26.216 | 26.432 | 16.423 | 32.974 |
| 2   | Wisatwan Mancanegara | Orang  | 10     | 7      | 4      | 72     | 23     |

Sumber: Diolah dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barito Timur, 2025.

## Pertanian

Pertanian adalah sektor yang berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Barito Timur. Karet dan kelapa sawit merupakan dua komoditas unggulan perkebunan dengan produksi tertinggi dibandingkan komoditas lainnya di Kabupaten Barito Timur. Pada tahun 2024 produksi Karet berdasarkan data Perkebunan Rakyat (PR) Perkebunan Besar Swasta (PBS) sebesar 18.631,40 Ton dengan luas area 53.812,10 Ha. Sementara produksi Kelapa Sawit hasil Perkebunan Rakyat (PR) sebesar 361,54 Ton dengan luas area 1.383,61 Ha.

**Tabel 2.64. Statistik Perkebunan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

| Uraian                | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Kelapa (PR)</b>    |        |        |        |        |        |
| Luas Area (Ha)        | 163,06 | 164,29 | 169,34 | 165,00 | 166,00 |
| Produksi (Ton)        | 19,28  | 44,10  | 43,63  | 20,44  | 37,51  |
| <b>Kopi (PR)</b>      |        |        |        |        |        |
| Luas Area (Ha)        | 73,74  | 75,25  | 75,25  | 74,85  | 84,60  |
| Produksi (Ton)        | 6,60   | 4,85   | 4,86   | 2,19   | 5,39   |
| <b>Karet (PBS+PR)</b> |        |        |        |        |        |

| Uraian                   | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Luas Area (Ha)           | 55.272,85 | 54.333,19 | 54.415,89 | 53.771,10 | 53.812,10 |
| Produksi (Ton)           | 13.593,17 | 23.201,98 | 19.331,35 | 8.878,00  | 18.631,40 |
| <b>Kelapa Sawit (PR)</b> |           |           |           |           |           |
| Luas Area (Ha)           | 500,75    | 501,09    | 519,64    | 588,29    | 1.383,61  |
| Produksi (Ton)           | 236,26    | 420,56    | 326,36    | 186,60    | 361,54    |
| <b>Kakao (PR)</b>        |           |           |           |           |           |
| Luas Area (Ha)           | 224,01    | 224,26    | 442,86    | 449,27    | 460,28    |
| Produksi (Ton)           | 14,91     | 23,54     | 22,95     | 11,34     | 27,49     |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

PR = Perkebunan Rakyat

PBS = Perkebunan Besar Swasta

## Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu Nilai Tambah Bruto (NTB) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Kabupaten Barito Timur (Miliar Rupiah), pada tahun 2018-2022 kategori yang berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Barito Timur. Pada tahun 2022, perdagangan besar dan eceran menyumbang sebesar 5,91% terhadap perekonomian Kabupaten Barito Timur. Nilai tambah perdagangan besar dan eceran mencapai 646,72 (Miliar Rupiah). Laju pertumbuhan menunjukkan arah yang positif selama beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan potensi sector perdagangan besar dan eceran Barito Timur yang dapat berkembang di periode mendatang.

Laju pertumbuhan positif kategori ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah pedagang maupun sarana perdagangan yang ada. Banyaknya sarana perdagangan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Barito Timur tahun 2021 terdiri atas 82 unit toko, 3 unit kios, dan 8 unit rumah makan. Pusat perdagangan Kabupaten Barito Timur berlokasi di Kelurahan Tamiang Layang dan Ampah Kota.

## Perindustrian

Keberadaan industri di suatu daerah diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kategori industri pengolahan di Kabupaten Barito Timur hanya mencakup subkategori industri pengolahan non migas. Berdasarkan Nilai Tambah Bruto (NTB) yang terbentuk, besarnya NTB kategori ini terus mengalami laju Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi pada Industri Mikro dan Kecil, tahun 2020 pertumbuhan yang positif. Tahun 2022, kategori industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 6,15% terhadap perekonomian daerah dengan tingkat pertumbuhan riil sebesar 2,84%. Pada tahun 2024, jumlah perusahaan industri mikro dan kecil yang terdaftar sebanyak 966 Unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.895 orang.

**Tabel 2.65. Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi pada Industri Mikro dan Kecil Tahun 2024**

| No. | Uraian            | Jumlah |
|-----|-------------------|--------|
| 1   | Jumlah Perusahaan | 966    |
| 2   | Tenaga Kerja      | 1.895  |

Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025.

## **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 mencapai angka 71,00%.

## **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Berdasarkan data Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 mencapai angka 80,61%.

## **Pemerintahan Umum**

Terjadinya perubahan yang fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat menuntut adanya restrukturisasi organisasi dan penataan pegawai. Secara kuantitatif penataan pegawai telah mulai dilakukan, namun dalam hal penempatannya masih dijumpai ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan pejabat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang harus diemban. Namun demikian kondisi ini diharapkan akan diantisipasi pada evaluasi struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Pada aspek sumber daya manusia aparat pemerintah, profesionalisme dan manajemen kepegawaian masih merupakan masalah besar dalam membenahan sistem birokrasi daerah pada era desentralisasi ini. Hal yang pertama dan utama yang dapat dilakukan dalam melakukan reformasi birokrasi di Kabupaten Barito Timur adalah penataan dengan mewujudkan jumlah/komposisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan baik dari sisi internal (kelembagaan) maupun eksternal instansi pemerintah. Kebutuhan tentu harus bersumber dari kebutuhan daerah untuk melayani masyarakat di daerah.

Selanjutnya mewujudkan pemerintahan yang bersih, perlu optimalisasi fungsi pengawasan dan perangkat hukum yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baru. Fungsi pengawasan

dilakukan dalam upaya menjadi pendorong menuju penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang profesional, transparan dan akuntabel. Fungsi pengawasan ini selain dilakukan oleh lembaga pemerintahan (termasuk DPRD) juga dilakukan oleh lembaga-lembaga non-pemerintahan sebagai salah satu bentuk kontrol sosial (*social control*) melalui media yang tersedia.

Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 adalah sebanyak 4.003 orang. Berdasarkan jenis kelamin, diketahui persentase jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan adalah sebesar 38,47%, sedangkan Laki-Laki sebesar 61,53%. Sementara itu, menurut tingkat pendidikan, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tingkat SMA ke bawah sebesar 10,62%, pada tingkat D-I, D-II, D-III sebesar 14,74%, pada tingkat D-IV, S-I sebesar 65,90%, dan pada tingkat S-2 sebesar 8,74%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penilaian SAKIP Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.66. Hasil Penilaian SAKIP Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2024**

| No.                                  | Komponen Yang Dinilai                   | Bobot      | Nilai        |              |
|--------------------------------------|---|------------|--------------|--------------|
|                                      |   |            | 2023         | 2024         |
| 1                                    | Perencanaan Kinerja                     | 30         | 20.29        | 21,25        |
| 2                                    | Pengukuran Kinerja                      | 30         | 15.80        | 16.31        |
| 3                                    | Pelaporan Kinerja                       | 12         | 10.04        | 10.58        |
| 4                                    | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25         | 11.84        | 12.67        |
| <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>          |   | <b>100</b> | <b>51.47</b> | <b>60.81</b> |
| <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b> |   |            | <b>CC</b>    | <b>B</b>     |

Sumber: Diolah dari Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, 2025.

### Capaian Kinerja Pelayanan Standar Minimal

Pemerintah Kabupaten Barito Timur memiliki kewajiban untuk menyediakan Pelayanan Standar Minimal (SPM) kepada masyarakatnya. SPM ini mencakup berbagai jenis pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Secara umum, terdapat enam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi dalam SPM, yaitu:

- 1) Bidang Pendidikan;
- 2) Bidang Kesehatan;
- 3) Bidang Pekerjaan Umum;
- 4) Bidang Perumahan Rakyat;
- 5) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
- 6) Bidang Sosial.

Untuk mengetahui capaian kinerja SPM di Kabupaten Barito Timur, perlu dilihat laporan kinerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurus pelayanan dasar tersebut. Beberapa informasi yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

### 1. Bidang Kesehatan

Kabupaten Barito Timur memiliki komitmen untuk memenuhi SPM bidang kesehatan. Berdasarkan data yang ada, beberapa indikator capaian dan tantangan di bidang kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, dimana Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terlihat dari Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Barito Timur yang mencapai 73 tahun pada tahun 2024, menunjukkan perbaikan dalam layanan kesehatan. Indikator SPM Bidang Kesehatan: Terdapat 12 variabel SPM yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah di bidang kesehatan, antara lain: (1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; (2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; (3) Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir; (4) Pelayanan Kesehatan Balita; (5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar; (6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif; (7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut; (8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; (9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus; (10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat; (11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB); (12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Tantangan: Beberapa puskesmas mungkin masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD) atau *Standard Operating Procedure* (SOP) yang belum jelas, yang dapat memengaruhi capaian SPM. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus mengatasi kendala ini untuk memastikan terpenuhinya pelayanan minimal bidang kesehatan. Regulasi: Telah diterbitkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur, yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

### 2. Bidang Sosial

Kabupaten Barito Timur memiliki komitmen untuk memenuhi SPM bidang sosial, dengan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup target capaian SPM bidang sosial. Beberapa indikatornya antara lain: (1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Diberdayakan: Target capaian 70%; (2) Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti: Target capaian 60%; (3) Persentase Fakir Miskin yang Mendapat Bantuan: Target capaian 70%; (4) Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota: Target capaian 100%.

### 3. Bidang Pendidikan

Kabupaten Barito Timur memiliki komitmen untuk memenuhi SPM bidang pendidikan. Berdasarkan data capaian 15 indikator sampai dengan tahun 2024 adalah: (1) Kemampuan Literasi

SD (57.96); (2) Kemampuan Literasi SMP (69.16); (3) Kemampuan Numerasi SD (51.56); (4) Kemampuan Numerasi SMP (61.33); (5) Angka Partisipasi Sekolah 5-6 (84.53); (6) Angka Partisipasi Sekolah 7-15 (98.02); (7) Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Kesetaraan (22.64); (8) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (57.71); (9) Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (65.92); (10) Iklim Inklusivitas SD (60.68); (11) Iklim Inklusivitas SMP (58.81); (12) Iklim Keamanan SD (78.94); (13) Iklim Keamanan SMP (71.53); (14) Iklim Kebhinekaan SD (72.84); (15) Iklim Kebhinekaan SMP (72.63).

#### 4. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Barito Timur juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik secara umum melalui reformasi birokrasi. Hal ini terlihat dari adanya indikator kinerja utama Sekretariat Daerah yang mencakup: Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Timur, Peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan, dan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/108/HUK/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan juga menjadi salah satu upaya peningkatan pelayanan publik. Secara keseluruhan, komitmen pemerintah daerah dan kerja sama lintas sektor menjadi kunci untuk mencapai target SPM yang berkualitas.

## 2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Penyusunan gambaran keuangan daerah dimaksudkan untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dibutuhkan analisis realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu juga dilakukan analisis terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Kapasitas keuangan daerah harus diketahui, agar daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan, sehingga belanja pembangunan dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien.

### Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Analisis kinerja keuangan dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari

pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

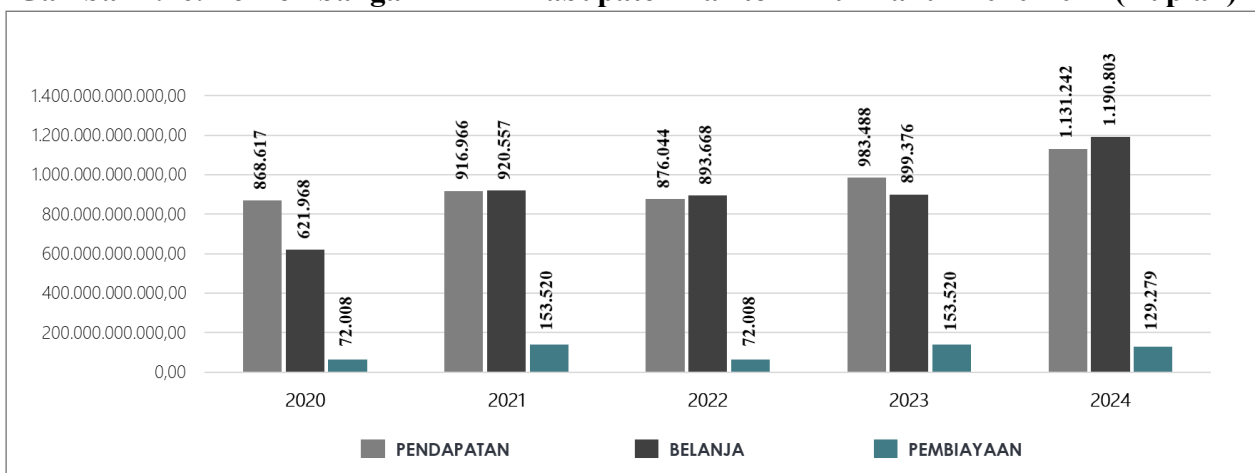
Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

### Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja (belanja langsung dan tidak langsung); serta pembiayaan daerah. Neraca daerah menggambarkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana tersedia.

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa perkembangan pendapatan maupun belanja Kabupaten Barito Timur dari tahun 2020-2024 mengalami trend fluktuaktif. Pendapatan Kabupaten Barito Timur pada tahun 2020 sebesar Rp 868.617 (Miliar) dan menjadi Rp 916.966 (Miliar) pada tahun 2021. Selanjutnya pendapatan pada tahun 2022 menjadi Rp 876.044 (Miliar), tahun 2023 menjadi Rp 983.488 (Miliar), tahun 2024 menjadi Rp 1.131.242 (Triliun). Sedangkan untuk belanja pada tahun 2024 sebesar Rp 1.190.803 (Triliun). Adapun pembiayaan (netto) pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp 129.279 (Miliar).

**Gambar 2.26. Perkembangan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Rupiah)**



Sumber: Diolah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, 2025.

### Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Barito Timur pada tahun anggaran 2020 sampai dengan 2024 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,37% selama periode 2020-2024. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata 6,02%, namun tidak merata di semua komponen. Pajak daerah mengalami penurunan rata-rata 14,73%. Retribusi daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 2,44%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami

pertumbuhan rata-rata 9,57%. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah mengalami pertumbuhan rata-rata 30,15%. Pendapatan transfer mengalami pertumbuhan rata-rata 3,74%.

Dana Perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata 25,29%. Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan rata-rata 2,06%. Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami pertumbuhan rata-rata 4,98%. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat lainnya mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Timur mengalami pertumbuhan selama periode 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil meningkatkan pendapatannya dari berbagai sumber. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu penurunan pajak daerah dan pendapatan transfer dari pemerintah daerah lainnya yang mengalami kenaikan rata-rata pada kisaran 45% dalam periode 2020-2024.

Untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah secara lebih jelas, maka dapat dilihat melalui capaian Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) yang merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Selanjutnya tabel di bawah menunjukkan derajat otonomi fiskal daerah Kabupaten Barito Timur selama periode 2020-2024. Derajat otonomi fiskal daerah secara keseluruhan mengalami perubahan dari 7,05% pada tahun 2020 menjadi 7,08% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan Kabupaten Barito Timur mengalami kondisi fluktuatif selama periode 2020-2024. Kondisi ini perlu menjadi perhatian untuk lebih fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam meningkatkan kemandirian daerah.

**Tabel 2.67. Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (%)**

| Tahun            | PAD                | Total Pendapatan     | Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%) |
|------------------|--------------------|----------------------|--|
| 2020             | 61.662.077.727,74  | 875.044.211.584,30   | 7,05                                     |
| 2021             | 98.462.918.758,55  | 962.031.902.771,10   | 10,23                                    |
| 2022             | 83.647.710.760,45  | 966.036.183.873,74   | 8,66                                     |
| 2023             | 60.175.907.942,03  | 983.488.989.615,03   | 6,12                                     |
| 2024             | 44.009.987.058,02  | 1.131.242.812.399,02 | 3,99                                     |
| <b>Rata-Rata</b> | 347.958.602.246,79 | 4.917.844.100.243,19 | 7,08                                     |

Sumber: Diolah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, 2025.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dari tabel 2.59 menunjukkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Timur selama periode 2020-2024, bahwa pada tahun 2020 realisasi mencapai Rp 61.662.077.727,74, meningkat 6,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 realisasi mencapai Rp 98.462.918.758,55, meningkat 59,68% dari tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022

realisasi mencapai Rp 83.647.710.760,45, menunjukkan penurunan 15,05% dari tahun 2021. Penurunan masih terjadi pada tahun 2023 dimana realisasi mencapai Rp 60.175.907.942,03 atau menurun 6,12% dibandingkan tahun 2022.

Penurunan kembali masih terjadi pada tahun 2024 dimana realisasi mencapai Rp 44.009.987.058,02 atau menurun 3,99% dibandingkan tahun 2023. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Timur selama periode 2020-2024 adalah 7,08%. Secara keseluruhan, realisasi menunjukkan trend fluktuatif pada periode tersebut. dimana pertumbuhan signifikan di tahun 2021 dan penurunan di tahun 2022, 2023, dan 2024.

**Tabel 2.68. Realisasi PAD Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (%)**

| Tahun            | PAD                       | Pertumbuhan (%) |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| 2020             | 61.662.077.727,74         | 6,27            |
| 2021             | 98.462.918.758,55         | 59,68           |
| 2022             | 83.647.710.760,45         | -15,05          |
| 2023             | 60.175.907.942,03         | -6,19           |
| 2024             | 44.009.987.058,02         | -26,87          |
| <b>Rata-Rata</b> | <b>347.958.602.246,79</b> | <b>690,64</b>   |

Sumber: Diolah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, 2025.

### Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab. Dana Perimbangan merupakan pendapatan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; (2) Dana Alokasi Umum dan (3) Dana Alokasi Khusus.

**Tabel 2.69. Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (%)**

| Tahun            | PAD                         | Pertumbuhan (%) |
|------------------|-----------------------------|-----------------|
| 2020             | 646,417,218,652.00          | -7,78           |
| 2021             | 711,889,337,129.00          | 10,13           |
| 2022             | 752.445.141.065,00          | 5,70            |
| 2023             | 784.533.230.628,00          | 4,26            |
| 2024             | 947.416.657.509,00          | 20,77           |
| <b>Rata-Rata</b> | <b>3.842.701.584.983,00</b> | <b>305,59</b>   |

Sumber: Diolah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, 2025.

Pada tahun 2020 realisasi Dana Perimbangan turun 7,78% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya pada 2021 realisasi Dana Perimbangan naik menjadi 10,13% dari tahun 2020. Tahun 2022 realisasi Dana Perimbangan kembali naik 5,70% dari tahun 2021. Pada tahun 2023 realisasi Dana Perimbangan naik 4,26% dari tahun 2022. Kemudian pada tahun 2024 realisasi Dana Perimbangan naik 20,77% dari tahun 2023. Rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan selama periode 2020-2024 adalah 305,59%.

Realisasi Dana Perimbangan menunjukkan trend fluktuasi selama periode 2020-2024. Penurunan di tahun 2020 diikuti dengan kenaikan di tahun-tahun berikutnya. Peningkatan Dana

Perimbangan pada tahun 2021-2023 kemungkinan besar disebabkan oleh pemulihan ekonomi nasional dan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah perlu terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Perimbangan untuk mendukung pembangunan daerah.

### Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Sumber penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; (3) Bantuan Keuangan dari Propinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya; (4) Dana Transfer Pusat; (5) Dana Insentif Daerah (DID); dan (6) Lain-lain Penerimaan. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Barito Timur menunjukkan trend fluktuatif selama periode 2020-2024. Tahun 2020 mengalami kenaikan 8,58% menjadi Rp107.617.184.910,00. Namun, tahun 2021 mengalami penurunan drastis sebesar 83,34% menjadi Rp17.923.647.458,00. Penurunan ini berlanjut di tahun 2022 dengan persentase 87,72% menjadi Rp2.201.025.027,00. Tahun 2024 dengan persentase 3,08% menjadi Rp25.000.000,00. Rata-rata pertumbuhan selama periode 2020-2024 adalah 7,49%.

**Tabel 2.70. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (%)**

| Tahun            | PAD                      | Pertumbuhan (%) |
|------------------|--------------------------|-----------------|
| 2020             | 107,617,184,910.00       | 8,58            |
| 2021             | 17,923,647,458.00        | -83,34          |
| 2022             | 2.201.025.027,00         | -87,72          |
| 2023             | 25.000.000,00            | -98,86          |
| 2024             | 29.756.643.940,32        | 3,08            |
| <b>Rata-Rata</b> | <b>31.982.668.967,32</b> | <b>7,49</b>     |

Sumber: Diolah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, 2025.

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Barito Timur mengalami penurunan signifikan selama periode 2020-2024. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah Pandemi Covid-19 yang berdampak pada ekonomi dan aktivitas masyarakat. Diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan diversifikasi sumber pendapatan dan peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan.

### Belanja Daerah

Kinerja Pelaksanaan APBD juga dapat dilihat sisi realisasi belanja Pemerintah Daerah, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Realisasi belanja daerah Kabupaten Barito Timur menunjukkan trend fluktuatif selama periode 2020-2024. Tahun 2020 mengalami penurunan 14,08% menjadi Rp 621.986.310.597,73. Namun, tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 48,01% menjadi Rp 920.557.700.398,83. Tahun 2022 kembali mengalami penurunan 2,29% menjadi Rp 893.668.713.769,09. Tahun 2023 mengalami kenaikan tipis sebesar 0,64% menjadi Rp 899.376.038.633,41. Rata-rata pertumbuhan selama periode 2020-2024 adalah 7,91%. Kemudian pada tahun mengalami kenaikan menjadi Rp 1.190.803.181.733,25. Realisasi

belanja daerah Kabupaten Barito Timur menunjukkan trend fluktuatif selama periode 2020-2024. Kenaikan dan penurunan realisasi kemungkinan besar disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyesuaian gaji pokok ASN, pengangkatan ASN baru, pembayaran gaji ke-13 dan ke-14, dan efisiensi belanja pegawai akibat Pandemi Covid-19.

### **Pembiayaan**

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi belanja barang dan jasa Kabupaten Barito Timur menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan meningkat selama periode 2020-2024. Kenaikan realisasi pada tahun 2021-2023 disebabkan oleh normalisasi kegiatan belanja barang dan jasa setelah Pandemi Covid-19 dan peningkatan kebutuhan belanja barang dan jasa untuk mendukung pembangunan daerah.

**Tabel 2.71. Realisasi APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

| No.                        | Uraian   | Realisasi                 |                           |                           |                           |                             |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                            |  | 2020                      | 2021                      | 2022                      | 2023                      | 2024                        |
| 1                          | <b>PENDAPATAN</b>  | <b>875.044.211.584,30</b> | <b>962.031.902.771,10</b> | <b>966.036.183.873,74</b> | <b>983.488.989.615,03</b> | <b>1.202.580.455.498,20</b> |
|                            | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                            | <b>61.662.077.727,74</b>  | <b>98.462.918.758,55</b>  | <b>83.647.710.760,45</b>  | <b>60.175.907.942,03</b>  | <b>66.122.247.660,20</b>    |
|                            | Pajak Daerah   | 19.155.610.211,18         | 11.328.830.326,40         | 11.593.759.007,25         | 18.347.176.559,04         | 15.873.842.166,00           |
|                            | Retribusi Daerah   | 2.111.242.928,00          | 2.174.988.530,00          | 2.545.019.804,00          | 2.766.598.933,00          | 3.340.701.652,00            |
|                            | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan        | 7.738.215.980,00          | 11.499.947.418,00         | 14.158.036.468,00         | 27.049.142,65             | 4.333.141.058,83            |
|                            | Lain-Lain PAD yang sah                                   | 32.657.008.608,56         | 73.459.152.484,15         | 55.350.895.481,20         | 39.035.083.307,34         | 42.574.562.783,37           |
|                            | <b>Pendapatan Transfer</b>                               | <b>705.764.948.946,56</b> | <b>845.645.336.554,55</b> | <b>880.187.448.086,29</b> | <b>923.288.081.673,00</b> | <b>1.129.977.513.281,00</b> |
|                            | <b>Dana Perimbangan</b>                                  | <b>681.883.699.652,00</b> | <b>711.889.337.129,00</b> | <b>752.445.141.065,00</b> | <b>784.533.230.628,00</b> | <b>990.451.486.099,00</b>   |
|                            | Dana Bagi Hasil Pajak/<br>Bagi Hasil Bukan Pajak         | 705.764.948.946,56        | 121.986.404.644,00        | 194.252.890.381,00        | 191.068.698.189,00        | 357.320.326.002,00          |
|                            | Dana Alokasi Umum  | 478.975.191.000,00        | 437.087.627.000,00        | 436.257.086.999,00        | 457.131.088.950,00        | 489.386.842.111,00          |
|                            | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik                          | 49.601.152.010,00         | 82.437.021.644,00         | 52.354.260.414,00         | 52.417.638.397,00         | 63.547.299.982,00           |
|                            | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik                      | 68.994.551.932,00         | 70.378.283.841,00         | 69.580.903.271,00         | 83.915.805.092,00         | 80.159.059.804,00           |
|                            | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya             | 27.750.000.000,00         | 105.530.375.400,00        | 78.780.783.000,00         | 77.935.147.800,00         | 93.651.208.000,00           |
|                            | Pendapatan Transfer Antar Daerah Daerah                  | 23.881.249.294,56         | 28.225.624.025,55         | 48.961.524.021,29         | 60.819.703.245,00         | 45.874.819.182,00           |
|                            | Lain-Lain Pendapatan Yang Sah                            | 107.617.184.910,00        | 107.923.647.458,00        | 2.201.025.027,00          | 2.500.000.000,00          | 6.480.694.557,00            |
|                            | 2  | <b>BELANJA DAERAH</b>     | <b>621.968.310.597,73</b> | <b>920.557.700.398,83</b> | <b>893.668.713.769,09</b> | <b>899.376.038.633,41</b>   |
| <b>Belanja Operasi</b>     |  | <b>540.725.663.182,53</b> | <b>614.006.974.595,02</b> | <b>633.502.030.342,09</b> | <b>695.482.303.674,04</b> | <b>827.216.744.123,45</b>   |
| Belanja Pegawai            |  | 313.247.508.753,04        | 338.389.678.381,62        | 347.439.505.593,09        | 351.104.087.669,76        | 418.171.714.126,00          |
| Belanja Barang dan Jasa    |  | 209.117.249.430,49        | 212.814.960.292,71        | 228.529.659.212,00        | 290.601.816.469,18        | 350.536.267.036,89          |
| Belanja Subsidi            |  | 599.999.999,00            | 599.999.999,55            | 600.000.000,00            | 600.000.000,00            | 600.000.000,00              |
| Belanja Hibah              |  | 17.232.460.000,00         | 51.112.614.751,14         | 47.657.860.937,00         | 50.754.619.535,10         | 56.720.372.960,56           |
| Belanja Bantuan Sosial     |  | 528.400.000,00            | 11.149.721.170,00         | 9.275.004.600,00          | 2.421.780.000,00          | 1.188.390.000,00            |
| <b>Belanja Modal</b>       |  | <b>72.132.551.485,74</b>  | <b>122.377.243.903,81</b> | <b>103.449.098.767,00</b> | <b>201.360.547.759,37</b> | <b>196.612.827.033,80</b>   |
| <b>Belanja Tak Terduga</b> |  | <b>9.110.095.929,46</b>   | <b>25.108.799.846,00</b>  | <b>9.540.962.083,00</b>   | <b>2.533.187.200,00</b>   | <b>1.404.472.148,00</b>     |
| 3                          | <b>PEMBIAYAAN</b>  |                           |                           |                           |                           |                             |
|                            | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                             | <b>72.008.639.887,68</b>  | <b>153.520.374.562,25</b> | <b>72.008.639.887,68</b>  | <b>153.520.374.562,25</b> | <b>154.279.407.493,79</b>   |
|                            | Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) | 70.454.548.465,68         | 153.520.374.562,25        | 70.454.548.465,68         | 153.520.374.562,25        | 154.279.407.493,79          |
|                            | Pencairan Dana Cadangan                                  |                           |                           |                           |                           |                             |

| No. | Uraian  | Realisasi                |                           |                          |                           |                           |
|-----|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|     |   | 2020                     | 2021                      | 2022                     | 2023                      | 2024                      |
|     | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan |                          |                           |                          |                           |                           |
|     | Penerimaan pinjaman daerah                      |                          |                           |                          |                           |                           |
|     | Penerimaan kembali pemberian pinjaman           | 1.554.091.422,00         |                           | 1.554.091.422,00         |                           | 1.554.091.422,00          |
|     | Penerimaan piutang daerah                       |                          |                           |                          |                           |                           |
|     | Koreksi Silva                                   |                          |                           |                          |                           |                           |
|     | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                   | <b>10.000.000.000,00</b> | <b>15.000.000.000,00</b>  | <b>10.000.000.000,00</b> | <b>15.000.000.000,00</b>  | <b>25.000.000.000,00</b>  |
|     | Pembentukan dana cadangan                       |                          |                           |                          |                           |                           |
|     | Penyertaan modal (Investasi) daerah             |                          |                           |                          |                           |                           |
|     | Pembayaran pokok utang                          |                          |                           |                          |                           |                           |
|     | Pemberian pinjaman daerah                       |                          |                           |                          |                           |                           |
|     | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>   | <b>62.008.639.887,68</b> | <b>138.520.374.562,25</b> | <b>62.008.639.887,68</b> | <b>138.520.374.562,25</b> | <b>129.279.407.493,79</b> |

Sumber: Diolah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, 2025.

## Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Barito Timur serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Selanjutnya terdapat analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Gambaran neraca Kabupaten Barito Timur dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.72. Neraca Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)**

| No.                               | Uraian                         | Tahun                     |                           |                           |                           |                           |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                   |                                | 2020                      | 2021                      | 2022                      | 2023                      | 2024                      |
| 1                                 | <b>ASET</b>                    |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                   | <b>ASET LANCAR</b>             |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                   | Kas                            |                           |                           |                           |                           |                           |
|                                   | Kas di Kas daerah              | 152.813.852.018,69        | 142.996.573.894,18        | 210.654.411.612,83        | 130.879.164.943,04        | 67.760.574.155,47         |
|                                   | Kas di Bendahara Pengeluaran   | 0,00                      |                           | 52.910.500,00             | 7.820,00                  | 25.783.271,00             |
|                                   | Kas di Bendahara Penerimaan    | 80.742.984,40             |                           | 0,00                      | 13.879.140,82             | 15.419.660.373,46         |
|                                   | Kas di BLUD                    | 415.675.065,96            | 36.904.430.888,40         | 30.573.109.149,40         | 22.345.698.167,97         | 10.626.989.353,50         |
|                                   | Kas di Bendahara FKTP          | 268.289.764,22            | 88.495.822,96             | 114.513,96                | 1.004.369.608,80          | 320.629.410,80            |
|                                   | Kas di Bendahara BOS           |                           | 52.465.134,00             | 14.750.701,00             | 44.551.858,00             | 7.527.894.309,00          |
|                                   | Kas Lainnya                    |                           |                           | 83.524.558,00             | 0,00                      |                           |
|                                   | Piutang Pendapatan             | 21.593.474.966,65         |                           |                           |                           |                           |
|                                   | Piutang Pajak Daerah           | 6.202.861.581,00          | 6.899.944.232,00          | 7.768.903.499,00          | 9.157.482.968,00          | 9.157.482.968,00          |
|                                   | Piutang Retribusi Daerah       | 974.320.755,00            | 1.277.911.145,00          | 1.523.481.445,00          | 1.762.637.957,00          | 1.762.637.957,00          |
|                                   | Piutang lain lain PAD yang sah | 3.968.627.350,00          | 23.262.127.961,00         | 1.287.827.156,94          | 1.479.031.137,00          | 98.440.251,00             |
|                                   | Piutang Transfer Antar Daerah  | 10.447.665.280,65         | 14.381.422.764,45         | 11.946.081.966,00         | 7.326.455.552,00          |                           |
|                                   | Piutang Lainnya                | 559.876.471,97            | 559.876.471,97            | 580.876.471,97            | 50.266.728,00             | 50.266.728,00             |
|                                   | Penyisihan Piutang             | 2.586.575.294,83          | 3.704.978.095,06          | 4.732.575.637,24          | 7.202.260.040,91          | 7202260040,91             |
|                                   | Beban Dibayar Dimuka           | 58.456.154,16             | 105.888.116,69            | 149.420.913,29            | 131.832.665,99            | 43.648.066,67             |
|                                   | Persediaan                     | 26.797.929.965,09         | 23.470.345.552,20         | 17.909.254.922,54         | 19.072.380.101,17         | 9.106.152.767,17          |
|                                   | <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>      | <b>200.001.722.096,31</b> | <b>246.294.503.887,79</b> | <b>277.812.091.772,69</b> | <b>186.065.498.606,88</b> | <b>115.418.059.953,16</b> |
| <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>   | 50.100.000.000,00              | 65.100.000.000,00         |                           |                           | 111.950.000.000,00        |                           |
| Investasi Jangka Panjang Permanen | 0,00                           | 65.100.000.000,00         |                           |                           | 111.950.000.000,00        |                           |
| Penyertaan Modal                  | 50.100.000.000,00              | 65.100.000.000,00         | 76.175.000.000,00         | 86.950.000.000,00         | 111.950.000.000,00        |                           |

| No. | Uraian                                   | Tahun                       |                             |                             |                             |                             |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|     |  | 2020                        | 2021                        | 2022                        | 2023                        | 2024                        |
|     | Pemerintah Daerah                        |                             |                             |                             |                             |                             |
|     | Investasi Permanen Lainnya               |                             |                             |                             |                             |                             |
|     | Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen | 50.100.000.000,00           | 65.100.000.000,00           |                             |                             | 111.950.000.000,00          |
|     | <b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>   | <b>50.100.000.000,00</b>    | <b>65.100.000.000,00</b>    | <b>76.175.000.000,00</b>    | <b>86.950.000.000,00</b>    |                             |
|     | <b>ASET TETAP</b>                        |                             |                             |                             |                             |                             |
|     | Tanah                                    | 249.363.604.603,45          | 237.237.328.311,00          | 239.970.121.099,00          | 238.166.115.999,00          | 239.094.764.699,00          |
|     | Peralatan dan mesin                      | 299.810.552.099,13          | 326.206.652.261,52          | 348.110.546.785,52          | 366.422.958.835,72          | 403.516.057.587,72          |
|     | Gedung dan bangunan                      | 486.609.563.899,96          | 530.445.598.225,95          | 564.911.913.612,28          | 612.277.542.968,28          | 658.831.698.665,49          |
|     | Jalan, irigasi, dan Jaringan             | 740.199.104.521,58          | 798.275.656.922,51          | 864.851.885.978,51          | 1.001.460.820.384,85        | 1.119.674.291.029,44        |
|     | Aset tetap lainnya                       | 21.753.966.277,45           | 23.212.170.164,46           | 24.163.472.206,46           | 25.499.766.412,46           | 25.570.066.412,47           |
|     | Konstruksi dalam pengerjaan              | 4.012.411.730,00            | 8.596.666.930,00            | 4.770.691.278,00            | 27.684.195.982,05           | 27.684.195.982,05           |
|     | Akumulasi Penyusutan                     | 718.402.787.833,12          | 832.373.937.661,16          | 961.880.622.808,98          | 1.085.185.294.019,44        | 1.084.956.702.248,51        |
|     | <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                 | <b>1.083.346.415.298,45</b> | <b>1.091.600.135.154,28</b> | <b>1.084.898.008.150,79</b> | <b>1.186.326.106.562,92</b> | <b>1.389.414.372.127,66</b> |
|     | <b>ASET LAINNYA</b>                      |                             |                             |                             |                             |                             |
|     | Tagihan Jangka Panjang                   | 3.081.626.682,67            | 2.975.047.272,64            | 2.571.186.833,55            | 2.149.164.689,67            | 2.149.164.689,67            |
|     | Aset Tidak Berwujud                      | 115.833.000,00              | 1.252.188.000,00            | 1.448.236.200,00            | 1.546.236.200,00            | 1.546.236.200,00            |
|     | Aset Lain-lain                           | 49.744.440.965,00           | 49.526.932.558,00           | 83.046.116.300,79           | 238.351.994.846,79          | 67.368.347.846,79           |
|     | Akumulasi Aset Tidak Berwujud            |                             | 1.240.191.000,00            | 1.244.190.000,00            | 1.287.398.640,00            | 1.287.398.640,00            |
|     | <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>               | <b>52.941.900.647,67</b>    | <b>52.513.976.830,64</b>    | <b>65.475.905.223,50</b>    | <b>222.948.575.420,62</b>   | <b>222.948.575.420,62</b>   |
|     | <b>JUMLAH ASET</b>                       | <b>1.386.390.038.042,43</b> | <b>1.455.508.615.872,71</b> | <b>1.504.361.005.146,98</b> | <b>1.682.290.180.590,42</b> | <b>1.682.290.180.590,42</b> |
| 2   | <b>KEWAJIBAN</b>                         |                             |                             |                             |                             |                             |
|     | <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>           |                             |                             |                             |                             |                             |
|     | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)     | 47.440.468,02               | 47.388.805,02               | 135.422.062,02              | 51.905.324,02               | 51.897.504,02               |
|     | Utang Bunga                              |                             |                             |                             |                             |                             |
|     | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang       |                             |                             |                             |                             |                             |
|     | Pendapatan Diterima Dimuka               | 191.005.419,00              | 241.675.437,50              | 252.598.500,00              | 201.410.795,00              | 201.410.795,00              |
|     | Utang Beban                              | 4.597.834.455,00            | 25.005.054.915,50           | 1.950.438.171,00            | 4.278.664.731,00            | 43.648.066,67               |
|     | Utang Jangka Pendek Lainnya              | 4.183.014.496,00            | 1.649.393.546,00            | 1.099.229.432,00            | 18.084.546,00               | 18.084.546,00               |
|     | <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>    | <b>9.019.294.838,02</b>     | <b>26.943.512.704,02</b>    | <b>3.437.688.165,02</b>     | <b>4.550.065.396,02</b>     | <b>4.020.570.802,02</b>     |
|     | <b>KEWAJIBAN JANGKA</b>                  |                             |                             |                             |                             |                             |

| No.      | Uraian                                  | Tahun                       |                             |                             |                             |                             |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|          |   | 2020                        | 2021                        | 2022                        | 2023                        | 2024                        |
|          | <b>PANJANG</b>                          |                             |                             |                             |                             |                             |
|          | Utang Dalam Negeri                      |                             |                             |                             |                             |                             |
|          | Utang Jangka Panjang                    | 148.830.036,84              | 148.830.036,84              | 148.830.036,84              | 137.118.477,84              |                             |
|          | Lainnya                                 |                             |                             |                             |                             |                             |
|          | JUMLAH KEWAJIBAN<br>JANGKA PANJANG      | 148.830.036,84              | 148.830.036,84              | 148.830.036,84              | 137.118.477,84              | 137.118.477,84              |
|          | <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                 | <b>9.168.124.874,86</b>     | <b>27.092.342.740,86</b>    | <b>3.586.518.201,86</b>     | <b>4.687.183.873,86</b>     | <b>4.157.689.279,86</b>     |
| <b>3</b> | <b>EKUITAS</b>                          | <b>1.377.221.913.167,57</b> | <b>1.428.416.273.131,85</b> | <b>1.500.774.486.945,12</b> | <b>1.677.602.996.716,56</b> | <b>1.664.361.079.451,96</b> |
|          | <b>JUMLAH KEWAJIBAN<br/>DAN EKUITAS</b> | <b>1.386.390.038.042,43</b> | <b>1.455.508.615.872,71</b> | <b>1.504.361.005.146,98</b> | <b>1.682.290.180.590,42</b> | <b>1.668.518.768.731,82</b> |

Sumber: Diolah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, 2025.

## **Aset**

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari: (1) aset lancar; (2) investasi jangka panjang; (3) aset tetap; (4) dana cadangan; dan (5) aset lainnya. Jumlah aset dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif. Tercatat nilai aset Kabupaten Barito Timur pada tahun 2020 sebesar Rp 1.386.390.038.042,43 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp 1.455.508.615.872,71 pada tahun 2021, kemudian kembali meningkat menjadi Rp 1.504.361.005.146,98 di tahun 2022, di tahun 2023 kembali meningkat menjadi Rp 1.682.290.180.590,42.

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar Kabupaten Barito Timur mengalami peningkatan dari Tahun 2020-2024. Nilai aset lancar pada tahun 2020 sebesar Rp.200.001.722.096,31 dan meningkat menjadi Rp.246.294.503.887,79 pada tahun 2021. Kemudian kembali meningkat di tahun 2022 menjadi Rp.277.812.091.772,69, namun menurun pada tahun 2023 menjadi Rp.186.065.498.606,88.

Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang untuk Kabupaten Barito Timur sebesar Rp 50.100.000.000,00 pada tahun 2020, untuk tahun 2021 meningkat menjadi Rp 65.100.000.000,00, dan untuk tahun 2022 naik lagi menjadi Rp 76.175.000.000,00 dan pada tahun 2023 naik kembali menjadi Rp 86.950.000.000,00. Investasi jangka panjang ini didominasi oleh investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah.

## **Kewajiban**

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengalami perubahan sejak tahun 2020-2024 dimana nilai kewajiban pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 9.168.124.874,86. Nilai kewajiban pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp 27.092.342.740,86 dan di tahun 2022 nilai kewajiban turun signifikan menjadi Rp 3.586.518.201,86. Adapun pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp 4.157.689.279,86.

## **Ekuitas Dana**

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan

semakin bagus kondisi keuangan suatu daerah. Nilai ekuitas dana Kabupaten Barito Timur meningkat dimana pada tahun 2020 sebesar Rp 1.377.221.913.167,57 kemudian menjadi Rp 1.664.361.079.451,96 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber daya keuangan daerah Kabupaten Barito Timur juga semakin baik.

### Rasio Likuiditas

**Tabel 2.73. Rasio Lancar Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)**

| Uraian           | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Aset Lancar      | 200.001.722.096,31 | 246.294.503.887,79 | 277.812.091.772,69 | 186.065.498.606,88 | 115.418.059.953,16 |
| Kewajiban Lancar | 9.019.294.838,02   | 26.943.512.704,02  | 3.437.688.165,02   | 4.550.065.396,02   | 4.157.689.279,86   |
| Rasio            | <b>22,17</b>       | <b>9,14</b>        | <b>80,81</b>       | <b>40,89</b>       | <b>27,76</b>       |

Sumber: Diolah dari Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, 2025.

Rasio Likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Ada beberapa macam rasio likuiditas, namun yang lazim dipakai, termasuk untuk melihat neraca Kabupaten Barito Timur adalah rasio lancar. Neraca pada pemerintah daerah sedikit ada perbedaan dengan neraca pada perusahaan, untuk itu dilakukan penyesuaian pada aktiva lancar. Dengan rasio lancar sebagaimana ditunjukkan dalam tabel diatas maka pada tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan Kabupaten Barito Timur memiliki kemampuan pengembalian hutang lancar mencapai rata-rata mencapai 27,76 terhadap aset lancarnya.

### Rasio Solvabilitas

Rasio ini disebut juga rasio leverage (daya ungkit) yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana aktiva entitas dibiayai oleh hutang sehingga menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio leverage adalah sebagai berikut.

#### **Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)**

Merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Dengan rasio hutang terhadap ekuitas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah maka dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan Kabupaten Barito Timur memiliki kemampuan modal untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

**Tabel 2.74. Rasio Hutang terhadap Ekuitas Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)**

| Uraian    | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kewajiban | 9.168.124.874,86     | 27.092.342.740,86    | 3.586.518.201,86     | 4.687.183.873,86     | 4.157.689.279,86     |
| Ekuitas   | 1.377.221.913.167,57 | 1.428.416.273.131,85 | 1.500.774.486.945,12 | 1.677.602.996.716,56 | 1.664.361.079.451,96 |
| Rasio     | <b>0,007</b>         | <b>0,019</b>         | <b>0,002</b>         | <b>0,003</b>         | <b>0,002</b>         |

Sumber: Diolah dari Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, 2025.

### **Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)**

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang.

**Tabel 2.75. Rasio Hutang Terhadap terhadap Total Aktiva Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)**

| Uraian    | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024             |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Kewajiban | 9.168.124.874,86     | 27.092.342.740,86    | 3.586.518.201,86     | 4.687.183.873,86     | 4.157.689.279,86 |
| Aktiva    | 1.386.390.038.042,43 | 1.455.508.615.872,71 | 1.682.290.180.590,42 | 1.504.361.005.146,98 |                  |
| Rasio     | 0,007                | 0,019                | 0,002                | 0,003                |                  |

Sumber: Diolah dari Badan Pengeloalan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, 2025.

### **Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada Tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada Tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD dan atau Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam Tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah

Di setiap organisasi seperti halnya organisasi Perangkat Daerah (PD) yang berada dalam suatu wilayah administrasi merupakan satuan entitas akuntansi. Hal tersebut berarti bahwa Perangkat Daerah (PD) tersebut bertanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan secara administratif harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah (PD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing PD. Dari segi pengawasan terhadap rangkaian pengelolaan keuangan daerah, pada periode Tahun 2020-2024 disusun laporan keuangan sebagai entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap PD dan dikoordinir oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mengemban fungsi sebagai SKPKD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca, hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh PD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Badan Keuangan Daerah sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Barito Timur. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh Badan Keuangan Daerah.

**Tabel 2.76. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

| Tahun | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tengah |
|-------|--|
| 2020  | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)   |
| 2021  | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)   |
| 2022  | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)   |
| 2023  | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)   |
| 2024  | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)   |

Sumber: Diolah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, 2025.

Pengelolaan keuangan daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dimana kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Pengelola Belanja Daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan SAP walaupun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya mengikuti SAP. Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Kabupaten Barito Timur dapat dikatakan telah mencapai target dengan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari positifnya hasil opini audit BPK Kabupaten Barito Timur pada tabel dibawah ini.

## Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi realisasi belanja daerah Tahun 2020-2024 Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada sebagaimana pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.77. Analisis Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

| No. | Uraian                | 2020               |              | 2021               |              | 2022               |              | 2023               |              | 2024               |              |
|-----|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
|     |                       | Jumlah (Rp)        | Proporsi (%) | Jumlah (Rp)        | Proporsi (%) | Jumlah (Rp)        | Proporsi (%) | Jumlah (Rp)        | Proporsi (%) | Jumlah (Rp)        | Proporsi (%) |
| 1   | Belanja Operasi       | 540.725.663.182,53 | 69,01        | 614.066.974.595,02 | 66,71        | 633.502.030.342,09 | 70,89        | 695.482.303.674,04 | 77,33        | 827.216.744.123,45 | 69,47        |
| 2   | Belanja Modal         | 72.132.551.485,74  | 9,21         | 122.377.243.903,81 | 13,29        | 103.449.098.767,00 | 11,58        | 201.360.547.759,37 | 22,39        | 196.612.827.033,80 | 16,52        |
| 3   | Belanja Tidak Terduga | 9.110.095.929,46   | 1,16         | 25.108.799.846,00  | 2,73         | 9.540.962.083      | 1,07         | 2.533.187.200,00   | 0,28         | 1.404.472.148,00   | 0,12         |
| 4   | Belanja Transfer      | 161.553.421.509,00 | 20,62        | 159.004.682.054,00 | 17,27        | 147.176.622.577,00 | 16,47        | 160.345.590.527,00 | 17,83        | 165.569.138.428,00 | 13,91        |

Sumber: Diolah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, 2025.

## Analisis Pembiayaan

Pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tercermin dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) per Tahunnya. SILPA per Tahun diharapkan menurun baik secara nominal maupun persentasenya. Tingginya SILPA menjadi catatan penting terhadap perekonomian makro Kabupaten Barito Timur dimana hal tersebut menggambarkan belanja pemerintah kurang diberdayakan sehingga tidak optimal dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan SILPA per tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.78. SILPA Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024 (Rupiah)**

| Tahun | SILPA (Rp)         |
|-------|--------------------|
| 2020  | 153.531.119.365,25 |
| 2021  | 179.994.576.934,52 |
| 2022  | 241.287.047.039,17 |
| 2023  | 154.279.407.493,79 |
| 2024  | 154.279.407.493,79 |

Sumber: Diolah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, 2025.

## Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Jika tingkat kemandirian suatu daerah “rendah sekali” (0-25 %), dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian “rendah” (>25-50 %), campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori “sedang” (>50-75 %), menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori “tinggi” (>75%), bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

**Tabel 2.79. Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

| Tahun | Total PAD (Rp)    | Total Pendapatan (Rp) | Rasio (%) | Kategori      |
|-------|-------------------|-----------------------|-----------|---------------|
| 2020  | 61.662.077.727,74 | 916.966.064.448,69    | 6,33%     | Rendah Sekali |
| 2021  | 98.462.918.758,55 | 875.044.211.584,30    | 7,05%     | Rendah Sekali |

| Tahun | Total PAD (Rp)    | Total Pendapatan (Rp) | Rasio (%) | Kategori      |
|-------|-------------------|-----------------------|-----------|---------------|
| 2022  | 83.647.710.760,45 | 962.031.902.771,10    | 10,23%    | Rendah Sekali |
| 2023  | 60.175.907.942,03 | 966.036.183.873,74    | 8,66%     | Rendah Sekali |
| 2024  | 44.009.987.058,02 | 1.086.942.684.691,00  | 4,05%     | Rendah Sekali |

Sumber: Diolah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, 2025.

Dengan rasio kemandirian keuangan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari Tahun 2020 sampai dengan 2024, rasio kemandirian daerah Kabupaten Barito Timur berada dalam kategori rendah sekali (0-25%).

### **Kerangka Pendanaan**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun 2026. Pendanaan program kegiatan yang diakomodir sangat penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya, dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode Tahun 2025-2029.

### **Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan**

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Proyeksi pendapatan daerah menggunakan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan kurun waktu 2025-2029, dengan menggunakan Tahun dasar 2023 dan mempertimbangkan bahwa pendapatan transfer jumlah penerimaan serta alokasinya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat serta beberapa komponen pendapatan lainnya yang tidak bisa diproyeksikan dengan menggunakan nilai pertumbuhan pendapatan masa lalu, maka dapat dikalkulasikan proyeksi pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Proyeksi di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Timur diharapkan mengalami pertumbuhan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan yang positif selama periode 2025-2029. Pertumbuhan ini perlu didorong oleh fokus pemerintah daerah pada peningkatan PAD dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Peningkatan proyeksi target PAD secara signifikan diarahkan pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Guna merealisasikan PAD dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain: revitalisasi BUMD/Perusda dan ekstensifikasi usaha dalam berbagai sektor, seperti pemungutan pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan, pertambangan galian C, jasa konstruksi dan bidang usaha lainnya melalui penyertaan saham sesuai ketentuan yang berlaku.

## Proyeksi Silpa

Proyeksi SiLPA Tahun 2026-2030 menggunakan data SiLPA kurun waktu 2019-2023, dimana diketahui nilai SiLPA cukup besar dengan tingkat pertumbuhan SiLPA 33,29% namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 10% dari total APBD, maka diperoleh proyeksi SiLPA sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 2.80. Proyeksi SILPA Kabupaten Barito Timur Tahun 2026-2030 (Rupiah)**

| Tahun | SILPA (Rp)         |
|-------|--------------------|
| 2026  | 178.996.092.435,50 |
| 2027  | 14.423.338.274,00  |
| 2028  | 127.565.753.553,50 |
| 2029  | 114.708.168.833,00 |
| 2030  | 114.708.168.833,00 |

Sumber: Diolah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, 2025.

## Proyeksi Belanja

Belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan pegawai termasuk gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta anggota DPRD), bunga, subsidi, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota, serta belanja tidak terduga.

**Tabel 2.81. Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2030**

| No. | Uraian  | Baseline<br>2024          | Proyeksi Tahun            |                             |                           |                           |                             |                             |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|     |   |                           | 2025                      | 2026                        | 2027                      | 2028                      | 2029                        | 2030                        |
| 1   | <b>PENDAPATAN</b>                                 | 1.248.072.538.511,70      | 1.248.072.538.511,70      | 1.367.590.955.761,17        | 1.499.556.326.790,26      | 1.643.662.930.734,71      | 1.801.908.134.109           | 1.801.908.134.109           |
|     | <b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>               | 91.309.029.467,25         | 91.309.029.467,25         | 95.874.480.940,61           | 100.668.204.987,64        | 105.701.615.237,03        | 110.986.695.998,88          | 110.986.695.998,88          |
|     | Pajak Daerah                                      | 32.122.650.000,00         | 32.122.650.000,00         | 33.728.782.500,00           | 35.415.221.625,00         | 37.185.982.706,25         | 39.045.281.841,56           | 39.045.281.841,56           |
|     | Retribusi Daerah                                  | 5.394.506.082,00          | 5.394.506.082,00          | 5.664.231.386,10            | 5.947.442.955,41          | 6.244.815.103,18          | 6.557.055.858,33            | 6.557.055.858,33            |
|     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.797.400.364,00          | 5.797.400.364,00          | 6.087.270.382,20            | 6.391.633.901,31          | 6.711.215.596,38          | 7.046.776.376,19            | 7.046.776.376,19            |
|     | Lain-lain PAD yang Sah                            | 47.994.473.021,25         | 47.994.473.021,25         | 50.394.196.672,31           | 52.913.906.505,93         | 55.559.601.831,22         | 58.337.581.922,79           | 58.337.581.922,79           |
|     | <b>Pendapatan Transfer</b>                        | 1.147.118.358.000,00      | 1.147.118.358.000,00      | 1.261.830.195.000,00        | 1.388.013.214.000,00      | 1.526.814.535.000,00      | 1.679.495.988.100,00        | 1.679.495.988.100,00        |
|     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 1.086.016.159.000,00      | 1.086.016.159.000,00      | 1.194.617.776.000,00        | 1.314.079.553.000,00      | 1.445.487.508.000,00      | 1.590.036.258.100,00        | 1.590.036.258.100,00        |
|     | Pendapatan Transfer Antar Daera                   | 61.102.199.000,00         | 61.102.199.000,00         | 67.212.419.000,00           | 73.933.661.000,00         | 81.327.027.000,00         | 89.459.730.000,00           | 89.459.730.000,00           |
|     | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>       | <b>9.645.151.044,45</b>   | <b>9.645.151.044,45</b>   | <b>9.886.279.820,56</b>     | <b>10.874.907.802,62</b>  | <b>11.146.780.497,68</b>  | <b>11.425.450.010,12</b>    | <b>11.425.450.010,12</b>    |
| 2   | <b>BELANJA</b>                                    | <b>1.317.413.770.394</b>  | <b>1.413.863.574.442</b>  | <b>1.549.548.533.226</b>    | <b>1.772.763.965.362</b>  | <b>1.919.051.013.348</b>  | <b>1.913.703.057.402</b>    | <b>1.855.567.944.905,92</b> |
|     | <b>Belanja Operasional</b>                        | <b>928.775.734.994,01</b> | <b>929.386.082.084,24</b> | <b>1.022.324.690.292,66</b> | <b>926.115.288.771,52</b> | <b>989.704.593.682,31</b> | <b>1.008.789.876.057,90</b> | <b>1.013.473.852.317,42</b> |
|     | Belanja Pegawai                                   | 448.653.455.086,01        | 424.159.072.333           | 464.864.559.968             | 531.829.189.609           | 575.715.304.004           | 574.110.917.221             | 556.670.383.471,78          |
|     | Belanja Barang dan Jasa                           | 408.917.705.733,00        | 360.341.905.085,03        | 396.376.095.593,53          | 336.756.627.177,52        | 353.594.458.536,40        | 371.274.181.463,22          | 389.837.890.536,38          |
|     | Belanja Bunga                                     | 0                         | 1.660.610.152,37          | 1.826.671.167,60            | 0                         | 0                         | 0                           | 0                           |

| No. | Uraian                                     | Baseline<br>2024          | Proyeksi Tahun            |                           |                           |                           |                           |                           |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|     |  |                           | 2025                      | 2026                      | 2027                      | 2028                      | 2029                      | 2030                      |
|     | Belanja Subsidi                            | 600.000.000,00            | 726.000.000,00            | 798.600.000,00            | 661.500.000,00            | 694.575.000,00            | 729.303.750,00            | 765.768.937,50            |
|     | Belanja Hibah                              | 66.423.374.175,00         | 39.072.611.555,89         | 42.979.872.711,48         | 55.402.039.350,95         | 58.172.141.318,49         | 61.080.748.384,42         | 64.134.785.803,64         |
|     | Belanja Bantuan Sosial                     | 4.181.200.000,00          | 27.606.755.000,00         | 30.367.430.500,00         | 1.783.845.000,00          | 1.873.037.250,00          | 1.966.689.112,50          | 2.065.023.568,13          |
|     | <b>Belanja Modal</b>                       | <b>217.448.641.827,00</b> | <b>426.044.160.482,49</b> | <b>468.648.576.530,74</b> | <b>282.077.655.293,48</b> | <b>296.181.538.058,15</b> | <b>310.990.614.961,06</b> | <b>326.540.145.709,11</b> |
|     | Belanja Modal Tanah                        | 1.000.000.000             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 37.678.840.742,00         | 31.953.928.707,64         | 35.149.321.578,40         | 45.443.801.739,24         | 47.715.991.826,20         | 50.101.791.417,51         | 52.606.880.988,39         |
|     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 47.381.133.338,99         | 81.375.323.468,45         | 89.512.855.815,30         | 102.120.141.022,63        | 107.226.148.073,76        | 112.587.455.477,45        | 118.216.828.251,32        |
|     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 131.318.167.747,00        | 125.894.194.000,30        | 138.483.613.400,33        | 131.874.549.630,23        | 138.468.277.111,74        | 145.391.690.967,33        | 152.661.275.515,70        |
|     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 70.500.000,00             | 67.881.000,00             | 74.669.100,00             | 2.341.487.901,38          | 2.458.562.296,44          | 2.581.490.411,27          | 2.710.564.931,83          |
|     | <b>Belanja Tak Terduga</b>                 | <b>4.540.565.754,00</b>   | <b>61.203.221.436,61</b>  | <b>67.323.543.580,27</b>  | <b>3.886.900.849,13</b>   | <b>4.081.245.891,58</b>   | <b>4.285.308.186,16</b>   | <b>4.499.573.595,47</b>   |
|     | Belanja Tak Terduga                        | 4.540.565.754,00          | 61.203.221.436,61         | 67.323.543.580,27         | 3.886.900.849,13          | 4.081.245.891,58          | 4.285.308.186,16          | 4.499.573.595,47          |
|     | <b>Belanja Transfer</b>                    | <b>166.648.827.818,00</b> | <b>207.870.541.535,80</b> | <b>228.657.595.689,38</b> | <b>185.521.091.493,15</b> | <b>194.797.146.067,81</b> | <b>204.537.003.371,20</b> | <b>214.763.853.539,76</b> |
|     | Belanja Bagi Hasil                         | 5.074.986.644,00          | 5.030.041.113,88          | 5.533.045.225,27          | 3.307.500.000,00          | 3.472.875.000,00          | 3.646.518.750,00          | 3.828.844.687,50          |
|     | Belanja Bantuan Keuangan                   | 161.573.841.174,00        | 172.259.154.278,20        | 189.485.069.706,02        | 182.213.591.493,15        | 191.324.271.067,81        | 200.890.484.621,20        | 210.935.008.852,26        |
| 3   | <b>PEMBIAYAAN</b>                          | <b>62.008.639.887,68</b>  | <b>138.520.374.562,25</b> | <b>62.008.639.887,68</b>  | <b>138.520.374.562,25</b> | <b>129.279.407.493,79</b> | <b>129.279.407.493,79</b> | <b>129.279.407.493,79</b> |
|     | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>               | <b>72.008.639.887,68</b>  | <b>153.520.374.562,25</b> | <b>72.008.639.887,68</b>  | <b>153.520.374.562,25</b> | <b>154.279.407.493,79</b> | <b>154.279.407.493,79</b> | <b>481.913.910.398,62</b> |
|     | Sisa lebih perhitungan                     | 70.454.548.465,68         | 153.520.374.562,25        | 70.454.548.465,68         | 153.520.374.562,25        | 154.279.407.493,79        | 154.279.407.493,79        | 478.805.727.554,62        |

| No. | Uraian  | Baseline<br>2024         | Proyeksi Tahun            |                          |                           |                           |                           |                           |
|-----|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|     |   |                          | 2025                      | 2026                     | 2027                      | 2028                      | 2029                      | 2030                      |
|     | anggaran Tahun sebelumnya (SILPA)               |                          |                           |                          |                           |                           |                           |                           |
|     | Pencairan Dana Cadangan                         |                          |                           |                          |                           |                           |                           |                           |
|     | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan |                          |                           |                          |                           |                           |                           |                           |
|     | Penerimaan pinjaman daerah                      |                          |                           |                          |                           |                           |                           |                           |
|     | Penerimaan kembali pemberian pinjaman           | 1.554.091.422,00         |                           | 1.554.091.422,00         |                           | 1.554.091.422,00          |                           | 1.554.091.422,00          |
|     | Penerimaan piutang daerah                       |                          |                           |                          |                           |                           |                           |                           |
|     | Koreksi Silva                                   |                          |                           |                          |                           |                           |                           |                           |
|     | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                   | <b>10.000.000.000,00</b> | <b>15.000.000.000,00</b>  | <b>10.000.000.000,00</b> | <b>15.000.000.000,00</b>  | <b>25.000.000.000,00</b>  | <b>55.000.000.000,00</b>  | <b>55.000.000.000,00</b>  |
|     | Pembentukan dana cadangan                       |                          |                           |                          |                           |                           |                           |                           |
|     | Penyertaan modal (Investasi) daerah             |                          |                           |                          |                           |                           |                           |                           |
|     | Pembayaran pokok utang                          |                          |                           |                          |                           |                           |                           |                           |
|     | Pemberian pinjaman daerah                       |                          |                           |                          |                           |                           |                           |                           |
|     | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                         | <b>62.008.639.887,68</b> | <b>138.520.374.562,25</b> | <b>62.008.639.887,68</b> | <b>138.520.374.562,25</b> | <b>129.279.407.493,79</b> | <b>129.279.407.493,79</b> | <b>129.279.407.493,79</b> |

Sumber: Diolah dari Proyeksi/Target Struktur APBD Kabupaten Barito Timur, 2025.

## Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan. Proporsi penggunaan anggaran yang memenuhi aturan adalah persentase untuk layanan publik harus lebih besar daripada belanja aparatur ataupun kebutuhan Pemerintah itu sendiri.

**Tabel 2.82. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

| No.        | Uraian                     | 2020                        |                           |               | 2021                        |                           |               |
|------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
|            |                            | Anggaran                    | Realisasi                 | (%)           | Anggaran                    | Realisasi                 | (%)           |
| <b>5.</b>  | <b>BELANJA DAERAH</b>      | <b>745.502.352.232,96</b>   | <b>621.968.310.597,73</b> | <b>19,86</b>  | <b>1.041.625.545.101,63</b> | <b>920.557.700.398,83</b> | <b>13,15</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Belanja Operasi</b>     | <b>616.982.986.342,76</b>   | <b>540.725.663.182,53</b> | <b>14,10</b>  | <b>690.087.045.102,63</b>   | <b>614.006.974.595,02</b> | <b>12,39</b>  |
| 5.1.1      | Belanja Pegawai            | 349.273.101.828,00          | 313.247.508.753,04        | 11,50         | 353.894.080.081,83          | 338.389.678.381,62        | 4,58          |
| 5.1.2      | Belanja Barang dan Jasa    | 236.853.758.543,84          | 209.117.249.430,49        | 13,26         | 248.683.271.607,36          | 212.814.960.292,71        | 16,85         |
| 5.1.3      | Belanja Subsidi            | 600.000.000,00              | 599.999.999,00            | 99,99         | 600.000.000,00              | 599.999.999,55            | 99,99         |
| 5.1.4      | Belanja Hibah              | 21.202.564.112,00           | 17.232.460.000,00         | 23,04         | 53.089.102.319,00           | 51.112.614.751,14         | 3,87          |
| 5.1.5      | Belanja Bantuan Sosial     | 9.053.561.858,92            | 528.400.000,00            | 16,3          | 33.820.591.094,44           | 11.149.721.170,00         | 203,33        |
| <b>5.2</b> | <b>Belanja Modal</b>       | <b>79.181.378.955,00</b>    | <b>72.132.551.485,74</b>  | <b>9,77</b>   | <b>134.361.450.899,00</b>   | <b>122.377.243.903,81</b> | <b>9,74</b>   |
| <b>5.3</b> | <b>Belanja Tak Terduga</b> | <b>49.337.986.935,20</b>    | <b>9.110.095.929,46</b>   | <b>441,57</b> | <b>25.108.799.846,00</b>    | <b>25.108.799.846,00</b>  | <b>100</b>    |
| No.        | Uraian                     | 2022                        |                           |               | 2023                        |                           |               |
|            |                            | Anggaran                    | Realisasi                 | (%)           | Anggaran                    | Realisasi                 | (%)           |
| <b>5.</b>  | <b>BELANJA DAERAH</b>      | <b>1.061.060.612.393,00</b> | <b>893.668.713.769,09</b> | <b>18,73</b>  | <b>1.032.430.900.341,0</b>  | <b>899.376.038.633,41</b> | <b>14,79</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Belanja Operasi</b>     | <b>720.151.290.305,43</b>   | <b>633.502.030.342,09</b> | <b>13,68</b>  | <b>793.117.097.656,00</b>   | <b>695.482.303.674,04</b> | <b>14,04</b>  |
| 5.1.1      | Belanja Pegawai            | 389.977.757.227,00          | 347.439.505.593,09        | 12,24         | 405.736.333.308,00          | 351.104.087.669,76        | 15,56         |
| 5.1.2      | Belanja Barang dan Jasa    | 260.035.045.519,00          | 228.529.659.212,00        | 13,79         | 324.145.224.309,00          | 290.601.816.469,18        | 11,54         |
| 5.1.3      | Belanja Subsidi            | 600.000.000,00              | 600.000.000,00            | 100           | 600.000.000,00              | 600.000.000,00            | 100           |
| 5.1.4      | Belanja Hibah              | 51.858.561.083,93           | 47.657.860.937,00         | 8,81          | 57.917.790.039,00           | 50.754.619.535,10         | 14,11         |
| 5.1.5      | Belanja Bantuan Sosial     | 17.679.926.475,00           | 9.275.004.600,00          | 90,62         | 4.717.750.000,00            | 2.421.780.000,00          | 94,81         |
| <b>5.2</b> | <b>Belanja Modal</b>       | <b>128.026.474.589,57</b>   | <b>103.449.098.767,00</b> | <b>23,76</b>  | <b>229.313.802.685,00</b>   | <b>201.360.547.759,37</b> | <b>13,88</b>  |
| <b>5.3</b> | <b>Belanja Tak Terduga</b> | <b>50.000.000.000,00</b>    | <b>9.540.962.083,00</b>   | <b>424,06</b> | <b>10.000.000.000,00</b>    | <b>2.533.187.200,00</b>   | <b>294,76</b> |

| No.        | Uraian                     | 2024                        |  |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|
|            |                            | Anggaran                    |  |  |
| <b>5.</b>  | <b>BELANJA DAERAH</b>      | <b>1.317.413.770.394,00</b> |  |  |
| <b>5.1</b> | <b>Belanja Operasi</b>     | <b>928.775.734.994,01</b>   |  |  |
| 5.1.1      | Belanja Pegawai            | 448.653.455.086,01          |  |  |
| 5.1.2      | Belanja Barang dan Jasa    | 408.917.705.733,00          |  |  |
| 5.1.3      | Belanja Subsidi            | 600.000.000,00              |  |  |
| 5.1.4      | Belanja Hibah              | 66.423.374.175,00           |  |  |
| 5.1.5      | Belanja Bantuan Sosial     | 4.181.200.000,00            |  |  |
| <b>5.2</b> | <b>Belanja Modal</b>       | <b>217.448.641.827,99</b>   |  |  |
| <b>5.3</b> | <b>Belanja Tak Terduga</b> | <b>4.540.565.754,00</b>     |  |  |

Sumber: Diolah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, 2025.

### **2.3 Permasalahan dan Isu Strategis**

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta isu strategis serta visi dan misi pembangunan jangka menengah yang telah dirumuskan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan langkah untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah yang didukung dengan arah kebijakan. Pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagai dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah perlu diketahui isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan pembangunan yang secara eksisting terjadi. Analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting, sehingga, penyajian analisis ini akan menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Isu-isu strategis dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, hal tersebut dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis ini juga dapat digali berdasarkan berbagai analisis terhadap sesuatu persoalan atau dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada proses penyusunan rencana itu dibuat.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama masa waktu pelaksanaan tahun 2024-2026, diidentifikasi dengan baik, pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

#### **Permasalahan Pembangunan Daerah**

Proses pembangunan akan sangat bergantung dengan apa yang dimiliki daerah tersebut sebagai modal dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Namun pada perjalanannya pembangunan daerah juga kerap kali harus menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai target-target pembangunan. Permasalahan tersebut baik yang telah dan tengah berlangsung, ataupun permasalahan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang. Permasalahan umum pembangunan di Kabupaten Barito Timur tersebar di berbagai bidang pemerintahan. Permasalahan pembangunan daerah merupakan realitas kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang telah direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan harus dilihat dari aspek makro serta aspek yang muncul dan terbatas pada internal Kabupaten Barito Timur walaupun secara langsung dan tidak langsung, permasalahan tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Karena setiap daerah merupakan wilayah yang terbuka dan sangat bergantung dengan wilayah yang lebih luas dan menjadi induknya. Pembahasan permasalahan pembangunan dalam dokumen ini dimulai dari permasalahan makro yang berkaitan dengan kondisi nasional, regional serta sektoral yang secara langsung saling berkaitan dan dilanjutkan dengan permasalahan menurut urusan pemerintahan permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Selain itu, permasalahan pembangunan bisa dilihat dari hasil pengendalian dan evaluasi hasil kinerja pembangunan periode lalu untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan.

Tema pembangunan Tahun 2025-2029 adalah ***“Pembangunan di berbagai bidang yang didukung oleh penyediaan infrastruktur dan suprastruktur”***. fokus permasalahan ke dalam permasalahan pokok Kabupaten Barito Timur sebagai berikut:

**a) Permasalahan Perekonomian Daerah: *Belum optimalnya Daya Saing Sektor Ekonomi Unggulan***

Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian dan turunannya merupakan sektor yang diunggulkan sebagai sektor yang berkontribusi lebih dalam pendapatan asli daerah. Namun dalam perkembangannya, sektor pertanian dan turunannya sedang dalam tahap menjadi sektor yang paling diunggulkan dibandingkan dengan pertambangan. Hal ini dikarenakan sektor pertambangan secara langsung sudah merusak ekosistem yang ada di Barito Timur.

Sektor pertanian dan turunannya yang menjadi unggulan ini belum berkembang secara maksimal. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya sektor pertanian adalah belum maksimalnya integrasi kegiatan ekonomi yang produktif, kreatif dan inovatif, artinya bahwa kegiatan ekonomi saat ini masih dalam tahap meningkatkan produktivitasnya belum mengarah pada pengembangan agribisnis dengan terobosan yang inovatif. Pergerakan aktifitas perekonomian daerah Kabupaten Barito Timur belum maksimal dikarenakan belum berkembangnya industri pengolahan untuk nilai tambah produk pertanian. Hal ini dikarenakan bahwa dengan meningkatkan nilai tambah akan meningkatkan pendapatan secara signifikan, tidak hanya pendapatan daerah tetapi juga pendapatan masyarakat dapat meningkat.

Sebagai daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kaya, perekonomian Kabupaten Barito Timur bisa dikembangkan dengan baik. Sektor ekonomi yang unggul mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan memiliki prospek ekonomi potensial untuk dikembangkan di masa yang akan datang, walaupun di saat ini belum mempunyai tingkat daya saing yang baik.

**b) Permasalahan Infrastruktur Wilayah: *Belum optimalnya infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi***

Infrastruktur tidak hanya mampu melayani kebutuhan kegiatan perekonomian, namun juga mampu merangsang kegiatan perekonomian baru di suatu wilayah. Infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah ditunjukkan dengan tersedianya aksesibilitas wilayah yang memadai berupa jalan dan jembatan yang mampu diakses dan dilalui dengan nyaman oleh tiap pengguna jalan. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat pembangunan infrastruktur juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan daerah.

**Tabel 2.83. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2024 (Km)**

| Kondisi Jalan | Tahun         |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Baik          | 73,00         | 100,34        | 153,59        | 168,41        |
| Sedang        | 461,54        | 198,83        | 173,76        | 120,56        |
| Rusak         | 46,15         | 12,79         | 38,67         | 23,15         |
| Rusak Berat   | 232,50        | 501,23        | 447,18        | 415,54        |
| <b>Jumlah</b> | <b>813,19</b> | <b>813,19</b> | <b>813,19</b> | <b>727,66</b> |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

Kondisi jalan di Kabupaten Barito Timur dalam kondisi rusak dan rusak berat harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Barito Timur. Hal ini diharapkan agar setiap wilayah di Kabupaten Barito Timur semakin mudah dijangkau, sehingga dapat meningkatkan pergerakan orang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong perekonomian daerah. Selain itu, kondisi jalan yang baik juga bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan terkadang terkendala oleh masih lemahnya pengawasan dan pengendalian pembangunan. Hal ini harus mampu diawasi dan dikendalikan penuh oleh Pemerintah, agar pembangunan tetap berjalan dengan semestinya. Pembangunan infrastruktur dasar pada daerah terpencil atau daerah terjauh dari pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur perlu menjadi prioritas sehingga yang diharapkan pembangunan dapat adil dan merata.

**c) Permasalahan Sumber Daya Manusia: *Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia***

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan dinamika di masyarakat. Daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan kualitas masyarakat Kabupaten Barito Timur berperan di berbagai sektor pembangunan daerah, yang tentunya menginginkan agar setiap saat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti memenuhi persyaratan kompetensi untuk didayagunakan dalam usaha merealisasikan visi dan mencapai tujuan jangka menengah dan jangka pendek. Dari fokus permasalahan Sumber Daya Manusia terdapat permasalahan pokok yaitu kualitas Sumber Daya Manusia Barito Timur belum optimal.

Kehidupan manusia yang berkualitas dapat diartikan manusia yang memiliki cara hidup, cara berpikir, kemampuan, iman dan watak tertentu yang menunjukkan keunggulan diri dan dapat berguna bagi orang lain. Dengan kehidupan yang berkualitas diharapkan masyarakat Kabupaten Barito Timur memiliki kualitas yang tidak hanya ditunjukkan dengan kualitas pendidikan tetapi juga diimbangi dengan perilaku (*attitude*) yang baik. Sehingga tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik namun juga mampu mengembangkan budaya yang mampu memberikan terobosan- terobosan yang inovatif dan kreatif.

Dengan melihat posisi dan kondisi kualitas sumber daya manusia Kabupaten Barito Timur sudah cukup baik, namun bukan berarti hal ini tidak menjadi suatu permasalahan. Hal ini harus dipertahankan dan terus dikembangkan dengan inovasi yang akan meningkatkan kualitas daya saing manusia yang mampu bersaing.

**d) Permasalahan Sumber Daya Alam: *Belum optimalnya pengendalian dan pelestarian lingkungan***

Kabupaten Barito Timur merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar dan banyak diminati oleh para investor. Sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Barito Timur sebagian besar adalah usaha/kegiatan yang bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan, yakni batubara, pasir kuarsa, tanah merah dan andesit. Sayangnya, potensi besar ini masih diikuti dengan dampak negatif terhadap kondisi sosial dan lingkungan, seperti kebisingan, debu, jalan rusak, pencemaran air sungai, kerusakan kebun karet masyarakat akibat lumpur, banjir, reklamasi lahan bekas tambang, dan konflik sosial.

Selain kegiatan penambangan, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam juga terkait dengan luas lahan kritis yang terdapat di Kabupaten Barito Timur. Lahan kritis di Kabupaten Barito Timur terjadi di dalam dan di luar kawasan hutan.

**Tabel 2.84. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

| No. | Tahun | IKLH  | Kriteria |
|-----|-------|-------|----------|
| 1   | 2020  | 62,80 | Sedang   |
| 2   | 2021  | 69,17 | Sedang   |
| 3   | 2022  | 72,25 | Baik     |
| 4   | 2023  | 66,59 | Sedang   |
| 5   | 2024  | 66,66 | Sedang   |

Sumber: Diolah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, 2025.

IKLH yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKLH juga berisi tentang Indeks Respons Kinerja Daerah (IRKD), yang memuat informasi tentang pelaksanaan program Kali Bersih, Langit Biru, Indonesia Hijau dan Gambut Lestari. IKLH merupakan instrumen untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Barito Timur sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, namun sejak tahun 2021 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

terus mengalami peningkatan. Hal ini lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat kualitas air dan udara yang baik. Pada tahun 2023 mengalami penurunan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Barito Timur mencapai 66,59 yang termasuk ke dalam kategori sedang. Pada tahun 2024 mencapai 66,66 yang termasuk ke dalam kategori sedang.

**Tabel 2.85. Perkembangan Parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

| No. | Parameter                     | Tahun |       |       |       |       |
|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                               | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1   | Indeks Kualitas Air           | 46,00 | 62,73 | 70,00 | 54,00 | 54,71 |
| 2   | Indeks Kualitas Udara         | 99,72 | 90,20 | 90,90 | 91,52 | 91,02 |
| 3   | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 47,71 | 41,32 | 41,61 | 42,12 | 42,14 |

Sumber: Diolah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, 2025.

Indeks kualitas air Kabupaten Barito Timur sejak 2020 terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 mencapai nilai 70,00. Indeks kualitas udara pada 5 (lima) tahun terakhir selalu menjadi indeks dengan nilai tertinggi dalam perhitungan IKLH. Pada tahun 2020 sempat mencapai nilai 99,72 namun pada tahun selanjutnya mengalami penurunan. Berbeda dengan parameter lainnya, indeks kualitas tutupan lahan tidak banyak perubahan yang terjadi. Dalam lima tahun terakhir, indeks kualitas tutupan lahan selalu termasuk dalam kategori kurang.

**e) Permasalahan Birokrasi dan Pelayanan Publik: *Belum optimalnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik***

Birokrasi dibuat untuk mencapai tujuan bersama suatu pemerintahan. Tata kelola pemerintahan secara inovatif dan efisien merupakan tata kelola yang baik dalam proses perencanaan dan implementasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi sumber daya bagi pelaksanaan kebijakan, mempercepat timbulnya dampak kebijakan, memperluas inovasi kebijakan, dan akan meningkatkan efektivitas dampak kebijakan. Dari fokus permasalahan birokrasi terdapat permasalahan pokok yaitu masih rendahnya kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah yang berorientasi pada hasil merupakan salah satu bagian dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi mencakup lima hal pokok yaitu penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan, serta kualitas pelayanan.

**Tabel 2.86. Hasil Penilaian SAKIP Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2024**

| No.                                  | Komponen Yang Dinilai                   | Bobot      | Nilai        |              |
|--------------------------------------|---|------------|--------------|--------------|
|                                      |   |            | 2023         | 2024         |
| 1                                    | Perencanaan Kinerja                     | 30         | 20.29        | 21,25        |
| 2                                    | Pengukuran Kinerja                      | 30         | 15.80        | 16.31        |
| 3                                    | Pelaporan Kinerja                       | 12         | 10.04        | 10.58        |
| 4                                    | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25         | 11.84        | 12.67        |
| <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>          |   | <b>100</b> | <b>51.47</b> | <b>60.81</b> |
| <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b> |   |            | <b>CC</b>    | <b>B</b>     |

Sumber: Diolah dari Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, 2025.

Selain itu, kualitas tata kelola pemerintah harus didukung oleh sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidangnya serta penguatan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Dengan demikian, reformasi birokrasi akan merealisasikan berbagai inovasi manajemen dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan. Bentuk tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya inisiasi bersama dan implementasi pada strategi yang dibuat antar pihak, dapat menciptakan efektifitas implementasi strategi yang dapat menghadapi tuntutan perubahan yang ada sehingga harus terus membuat terobosan yang inovatif dan meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik.

**f) Permasalahan Kesehatan: *Belum optimalnya akses pelayanan kesehatan serta masih kurangnya tenaga kesehatan***

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu wilayah, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup. Permasalahan kesehatan yang diukur dengan tiga indikator yang merupakan gambaran dari keadaan derajat kesehatan masyarakat, yakni: (1) angka harapan hidup; (2) angka kematian ibu; (3) angka kematian bayi. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup atau life expectancy rate merupakan suatu ukuran yang menyatakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

**Tabel 2.87. Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020-2024**

| Indikator                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Penemuan Kasus                    |      |      |      |      |      |
| Angka Kematian Bayi per 1.000 KH  | 8,1  | 3,8  | 9,9  | 5,6  | 12   |
| Barito Timur                      | 15   | 7    | 16   | 10   | 21   |
| Penemuan Kasus                    |      |      |      |      |      |
| Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH | 218  | 276  | 305  | 112  | 182  |
| Barito Timur                      | 4    | 5    | 0    | 2    | 3    |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

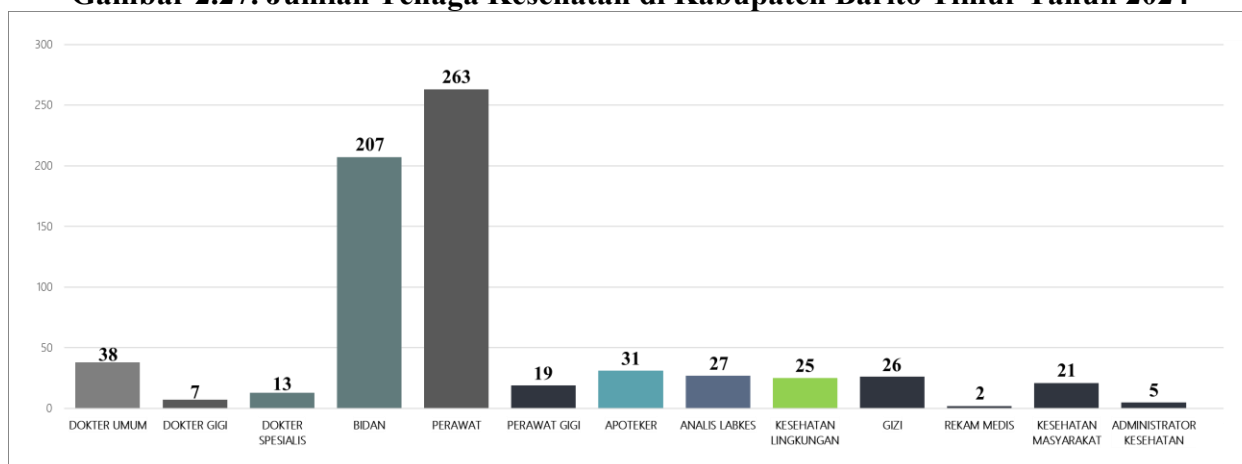
Angka pada tabel diatas merupakan indikator yang sensitif terhadap ketersediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan kesehatan. Disamping itu Angka Kematian Bayi juga berhubungan dengan pendapatan keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga.

**Tabel 2.88. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024**

| Kecamatan       | Rumah Sakit | Poliklinik | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | Apotek    |
|-----------------|-------------|------------|-----------|--------------------|-----------|
| Benua Lima      | -           | -          | 1         | 4                  | 1         |
| Dusun Timur     | 1           | 5          | 2         | 10                 | 11        |
| Paju Epat       | -           | 1          | 1         | 9                  | -         |
| Awang           | -           | -          | 1         | 6                  | -         |
| Patangkep Tutui | -           | 1          | 1         | 4                  | 1         |
| Dusun Tengah    |             | 1          | 1         | 5                  | 11        |
| Raren Batuah    | -           | -          | 1         | 8                  | -         |
| Paku            | -           | -          | 1         | 8                  | 1         |
| Karusen Janang  | -           | -          | 1         | 3                  | -         |
| Pematang Karau  | -           | -          | 1         | 8                  | -         |
| <b>Jumlah</b>   | <b>1</b>    | <b>8</b>   | <b>11</b> | <b>65</b>          | <b>25</b> |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

**Gambar 2.27. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024**



Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Barito Timur, 2025.

Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Barito Timur terus diupayakan baik pembangunan dan perbaikan kualitasnya. Pada tahun 2024, sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Barito Timur terdiri atas 1 Rumah Sakit, 8 Poliklinik, 25 Apotek, 11 Puskesmas, dan 65 Puskesmas Pembantu yang lokasinya tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Timur.

Selain sarana, tenaga kesehatan tentunya diperlukan dalam pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Barito Timur. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga analisis, dan administrator. Jumlah tenaga kesehatan terbanyak adalah tenaga keperawatan yang berjumlah 263 orang dan diikuti oleh tenaga kebidanan yang berjumlah 207 orang. Secara keseluruhan, jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Barito Timur masih belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada.

### Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur berasal dari permasalahan pembangunan yang diprioritaskan untuk diselesaikan maupun dari dunia internasional, nasional maupun regional. Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran

tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti.

Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut, dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan.

### ***Sustainable Development Goals (SDG's)***

Konsep Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan kelanjutan dari konsep Millenium Development Goals (MDG's). SDGs adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs. SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDG's berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan mampu menjawab ketertinggalan pembangunan Negara-negara diseluruh dunia, baik Negara maju dan Negara berkembang.

Tujuan dan sasaran dalam SDG's sebagai berikut:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
- 2) Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan;
- 3) Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan;
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- 8) Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;

- 9) Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi;
- 10) Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan di antara negara-negara;
- 11) Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumberdaya samudera dan kepesisiran untuk pembangunan yang berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses pengurangan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
- 16) Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Secara garis besar, 17 (tujuh belas) tujuan SDGs di atas dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan *governance*. Pilar pembangunan manusia menjadi isu penting pemerintah daerah, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Upaya pencapaian SDGs di pilar ekonomi yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, mendorong investasi, mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan industri dengan komoditas unggulan, memastikan ketahanan pangan. Sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Dari sisi infrastruktur akan mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni serta pengurangan kawasan kumuh. Membangun infrastruktur pada kawasan strategis dan pusat pertumbuhan.

Upaya pencapaian SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati; mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Sedangkan tujuan dalam bidang *governance*, upaya mencapai tujuan SDGs antara lain memastikan masyarakat dalam kondisi yang aman, tertib dan tenteram, dan membangun organisasi/tata kelola pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel.

### ***ASEAN Free Trade Area (AFTA)***

ASEAN Free Trade Area (AFTA) menjadi tantangan besar bagi daerah. Terbukanya pasar bebas ASEAN, maka aliran perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN tak ada lagi hambatannya. Dengan adanya AFTA ini antara lain peningkatan perdagangan internasional, terbukanya peluang kerja lebih banyak, meningkatkan kompetisi antar pengusaha, terbukanya peluang pengusaha local untuk go international meningkatkan nilai ekspor, dapat meningkatkan devisa dari sektor pariwisata, tidak adanya bea cukai sehingga banyaknya produk dari Negara-negara tetangga masuk dan itu merupakan keuntungan bagi konsumen, serta kompetisi antar pengusaha, tentu ini akan menghadirkan peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Timur.

### **Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah masyarakat yang masuk dalam kawasan bebas AFTA, atau negara-negara yang masuk dalam AFTA. Jadi kawasan ekonomi suatu negara yang termasuk dalam MEA ini akan menjadi lebih luas, adanya perekonomian yang menglobal diantara para negara-negara ASEAN. Dengan adanya MEA maka menjadi kesempatan yang baik bagi Kabupaten Barito Timur untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk daerah serta kualitas sumber daya manusia.

### **Transformasi Digital/ Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

Pada era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (user) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga memiliki persaingan yang sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun juga mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

### **Telaah Kebijakan & Isu-Isu Strategis**

#### **Telaah RPJMN 2025-2029**

RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden dan Wakil Presiden dan disusun berdasarkan RPJP Nasional 2025-2045. RPJMN 2025-2029 memuat strategi

Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, Program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, Kewilayahan dan Lintas Kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Menjadi panduan strategis dalam mencapai target pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045, disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden dan Wakil Presiden.

Visi di dalam RPJMN 2025-2029 mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, yaitu **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra puteri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui **8 (Delapan) Misi** yang dituangkan dalam **Asta Cita** sebagai berikut:

**Tabel 2.89. Asta Cita Misi Presiden dituangkan Menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029**

| <b>Asta Cita</b> | <b>Misi</b>   |
|------------------|---|
| 1                | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).   |
| 2                | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.   |
| 3                | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. |
| 4                | Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.                          |
| 5                | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.  |
| 6                | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.   |
| 7                | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.  |
| 8                | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.   |

Sumber: Diolah dari RPJMN 2025-2029, 2025.

### **Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis, menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif.

**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**

Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sementara itu, pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan kemandirian dan kedaulatan negara dalam swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru melalui berbagai program dan rencana, termasuk peta jalannya (*road map*).

**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi**

Pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan, bukan hanya memperkuat jaringan dan mobilitas, tetapi juga menawarkan peluang pekerjaan, mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain, seperti pariwisata dan ekonomi kreatif, serta untuk meningkatkan total aset sektor keuangan terhadap PDB nasional.

**Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas**

Pembangunan manusia seutuhnya membuka peluang dan memperluas kesempatan setiap individu pada seluruh siklus hidup secara inklusif. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri**

Hilirisasi dan industrialisasi menjadi upaya dalam memaksimalkan sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing dalam negeri, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi domestik melalui integrasi ekonomi domestik dan global.

**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan**

Dalam mengawal keberhasilan pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan maka perlu memastikan perlindungan sosial adaptif yang

mengintegrasikan program kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi dari tingkat desa. Bersama dengan pembangunan perdesaan, untuk menjaga satu sistem fungsi kewilayahan yang utuh, pembangunan perkotaan juga dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan desa-kota.

**Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan**

Reformasi politik, hukum, dan birokrasi penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggungjawab serta untuk mencegah dan memberantas korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Selain itu, dibutuhkan upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan untuk mendukung kemajuan bangsa.

**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur**

Sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, diperlukan penguatan toleransi antarumat beragama dengan menghargai perbedaan serta menjamin kebebasan beragama, melestarikan dan memanfaatkan lingkungan dengan mempertimbangkan mitigasi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana, serta pelestarian nilai dan warisan budaya untuk memperkuat karakter dan jatidiri bangsa.

**Tabel 2.90. 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas dalam RPJMN 2025-2029**

| No. | Program Prioritas  |
|-----|--|
| 1   | Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.   |
| 2   | Penyempurnaan sistem penerimaan negara.  |
| 3   | Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.   |
| 4   | Pencegahan dan pemberantasan korupsi.  |
| 5   | Pemberantasan kemiskinan.  |
| 6   | Pencegahan dan pemberantasan narkoba.  |
| 7   | Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.   |
| 8   | Penguatan Pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.   |
| 9   | Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.  |
| 10  | Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.  |
| 11  | Menjamin pelestarian lingkungan hidup.   |
| 12  | Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.  |
| 13  | Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.  |
| 14  | Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya.              |
| 15  | Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritime untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. |
| 16  | Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.   |
| 17  | Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.   |

Sumber: Diolah dari RPJMN 2025-2029, 2025.

**Tabel 2.91. 8 (Delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) dalam RPJMN 2025-2029**

| No. | Program Hasil Terbaik Cepat ( <i>Quick Wins</i> )  |
|-----|--|
| 1   | Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.   |
| 2   | Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di Kabupaten.  |
| 3   | Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.   |
| 4   | Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.  |
| 5   | Melanjutkan dan menambahkan kartu-kartu kesejahteraan social serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.   |
| 6   | Menaikan gaji ASN (terutama Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh) TNI/POLRI, dan pejabat negara.  |
| 7   | Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). |
| 8   | Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestic Bruto (PDB) ke 23%.   |

Sumber: Diolah dari RPJMN 2025-2029, 2025.

### Telaah RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045

Sesuai RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045, visi pembangunan jangka panjang daerah adalah “*Kalimantan Tengah Tangguh 2045: Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan*”. Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2045 dirumuskan setelah mengkaji kondisi umum daerah, menganalisis potensi dan permasalahan yang ada, menilai isu-isu strategis, dan memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan (*stakeholders*). Visi tersebut merupakan pengejawantahan sebuah proses dalam merangkai dan mewujudkan rajutan mimpi masyarakat Kalimantan Tengah di masa mendatang. Provinsi Tangguh diambil dari filosofi masyarakat yang tangguh dan tidak pantang menyerah sebagaimana disebut oleh Suku Dayak yakni “*Menteng Ureh Mamot*”.

Visi RPJPD adalah pandangan jangka panjang selama 20 tahun mengenai pembangunan daerah yang didasarkan pada kepentingan daerah. Visi RPJPD menggambarkan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang diharapkan oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat terwujud. Visi ini menjelaskan arah atau kondisi ideal yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi saat ini, dengan mempertimbangkan menganalisis tren periode sebelumnya, sehingga dapat ditentukan target masa depan yang diinginkan. Visi bukan sekadar impian atau serangkaian harapan, melainkan suatu komitmen dan usaha untuk merencanakan dan mengelola perubahan demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan penyelarasan tersebut Kalimantan Tengah visi *Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan* digambarkan melalui lima sasaran utama visi: (1) Peningkatan Pendapatan Per Kapita, (2) Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang, (3) Kepemimpinan Berintegritas, (4) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, dan (5) Penurunan Emisi GRK Menuju *Net Zero Emission*.

**Tabel 2.92. Sasaran Utama Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045**

| No. | Sasaran Visi   | Baseline 2025 | Sasaran 2045 |
|-----|--|---------------|--------------|
| 1   | <b>Peningkatan Pendapatan Per Kapita</b>               |               |              |
|     | PDRB per Kapita (RP Juta)                              | 82,71         | 629,75       |
|     | Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)                   | 27,78         | 40,58        |
|     | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)                | 15,76         | 26,75        |
|     | Pertumbuhan Ekonomi                                    | 5,6           | 6,64         |
| 2   | <b>Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang</b>    |               |              |
|     | Tingkat Kemiskinan (%)                                 | 4,61          | 0,58         |
|     | Rasio Gini (Indeks)                                    | 0,315         | 0,249        |
|     | Kontribusi PDRB Provinsi (%)                           | 1,02          | 1,47         |
| 3   | <b>Kepemimpinan Berintegritas</b>                      |               |              |
|     | Rata-Rata Wilayah Monitoring Centre for Prevention (%) | 84            | 95           |
| 4   | <b>Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia</b>      |               |              |
|     | Indeks Modal Manusia                                   | 0,54          | 0,70         |
| 5   | <b>Penurunan Emisi GRK Menuju Net Zero Emission</b>    |               |              |
|     | Penurunan intensitas emisi GRK (%)                     | 76            | 100          |
|     | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                       | 76,34         | 82,65        |

Sumber: Diolah dari RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045, 2025.

Sasaran Visi tersebut menjadi representasi dari poin-poin yang tersusun dalam Visi Kalteng Tangguh Tahun 2045 sebagai berikut:

- 1) Maju direpresentasikan pada poin sasaran visi 1 Peningkatan Pendapatan Per Kapita;
- 2) Bermartabat direpresentasikan pada poin sasaran visi 2 dan 4 yakni Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang serta Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
- 3) Berkah direpresentasikan pada poin sasaran visi 3 Kepemimpinan Berintegritas;
- 4) Berkelanjutan direpresentasikan pada poin sasaran visi 5: Penurunan Emisi GRK Menuju *Net Zero Emission*.

Selanjutnya misi RPJPD Kalimantan Tengah disusun dalam kerangka rumah adat “Huma Betang”. Filosofi Huma Betang yang memiliki makna mengedepankan musyawarah dan mufakat, kesetaraan sesama manusia, kebersamaan, kekeluargaan/persaudaraan menjadi pertimbangan menyusun kerangka mengingat makna yang terkandung itulah yang menjadi prasyarat dan modal penting menuju pembangunan yang berkelanjutan. Harapannya RPJPD Kalimantan Tengah ini dapat menjadi rumah besar yang menaungi tujuan-tujuan pembangunan yang disepakati bersama oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Sebagaimana filosofi rumah betang bagian kerangka ini dibagi menjadi tiga bagian yakni atap, badan rumah, dan pilar rumah. Ketiga bagian ini menjadi faktor yang saling mendukung dan menjamin rumah tetap berdiri dan melayani penghuninya.

**Tabel 2.93. Penjabaran Transformasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045**

| No. | RPJPN 2025-2045        |                     | RPJPD 2025-2045   |
|-----|------------------------|---------------------|---|
|     | Kelompok Agenda/Misi   | Agenda/Misi         | Misi  |
| (1) | (2)                    | (3)                 | (4)   |
| 1   | Transformasi Indonesia | Transformasi Sosial | Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif. |

| No. | RPJPN 2025-2045                    |  | RPJPD 2025-2045  |
|-----|------------------------------------|--|--|
|     | Kelompok Agenda/Misi               | Agenda/Misi  | Misi   |
| 2   |                                    | Transformasi Ekonomi                                       | Mewujudkan transformasi ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan dan berdaya saing global.        |
| 3   |                                    | Transformasi Tata Kelola                                   | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan.  |
| 4   | Landasan Transformasi              | Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia     | Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah.                     |
| 5   |                                    | Ketahanan sosial budaya dan ekologi                        | Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.  |
| 6   | Kerangka Implementasi Transformasi | Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan        | Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan.  |
| 7   |                                    | Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan | Mewujudkan penyediaan infrastruktur melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan. |
| 8   |                                    | Kesinambungan pembangunan                                  | Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antar periode.   |

Sumber: Diolah dari RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045, 2025.

Bagian atas merupakan visi RPJPD, bagian badan rumah merupakan misi RPJPD yang ditopang 3 pilar transformasi pembangunan yakni aspek ekonomi, sosial, dan tata kelola serta 1 pilar ketahanan yakni penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Hal ini didukung pula oleh pilar Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia. Terdapat 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan. Secara lebih mendetail, penjabaran transformasi pembangunan dijelaskan pada tabel berikut.

Adapun penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut: **(1) Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif** untuk membangun manusia Kalimantan Tengah yang dapat menjadi insan bermartabat, berkarakter dan siap menghadapi perubahan zaman di era disrupsi dan uncertainty di era kekinian **(2) Mewujudkan transformasi ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan dan berdaya saing global** untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru, hijau, dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi, tenaga kerja, serta BUMD), transformasi digital, integrasi ekonomi global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi **(3) Mewujudkan reformasi transformasi tata kelola pemerintahan** dengan membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. **(4) Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah** dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, serta keamanan daerah **(5) Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi** dengan memperluas ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan iklim, dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. **(6) Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan**

diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing masing wilayah. **(7) Mewujudkan penyediaan infrastruktur melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan** yang menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi **(8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antar periode** yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan. Pada misi 8 ini keberlanjutan pembangunan daerah perlu diterjemahkan dalam dokumen perencanaan baik yang bersifat lintas sektor, lintas daerah, serta lintas periode. Hal ini guna menjamin keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor, di seluruh Kabupaten/Kota, dan di tiap periode pembangunan. Selain keberlanjutan secara substansi penerjemahan kebutuhan anggaran dan skema pembiayaan pembangunan perlu didorong untuk menggunakan berbagai skema kreatif, efisien, dan efektif untuk mencapai sasaran pokok pembangunan.

### **Telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029**

Berdasarkan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045, pembangunan di Kalimantan Tengah ditunjukkan untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah yang Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan digambarkan melalui lima sasaran utama yaitu: Peningkatan Pendapatan Per Kapita, Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang, Kepemimpinan Berintegritas, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, dan Penurunan Emisi GRK Menuju *Net Zero Emission*. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029, sebagai berikut: ***“Mengangkat Harkat dan Martabat Masyarakat Dayak Khususnya dan Masyarakat Kalimantan Tengah Umumnya (Mangkatang Utus), Dengan Spirit Kearifan Lokal dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat Untuk Menyambut Indonesia Emas 2045”***. Dalam upaya mengoperasionalkan visi tersebut, maka dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Provinsi Kalimantan Tengah pada masa yang akan datang maka dirumuskan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal;
- 2) Pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui Pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadatn sumber daya alam lokal;
- 3) Membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan;

- 4) Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial;
- 5) Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan social masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan dan program untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

Untuk melaksanakan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, telah disusun Program Prioritas dari Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yaitu Program Prioritas HUMA BETANG yang terdiri dari : 1) Kalteng Bermartabat; 2) Betang Maju; 3) Betang Makmur; 4) Betang Cerdas; 5) Betang Sehat; dan 6) Betang Harmoni. Penjabarannya antara lain:

1) Kalteng Bermartabat

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk menembus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir;
- Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit Belom Bahadat dalam berkompetisi di berbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang berdaya saing.

2) Betang Maju

- Pembangunan 1.000 km jalan desa;
- Revitalisasi infrastruktur lintas kabupaten dan kota;
- Pembangunan Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif;
- Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa;
- Peningkatan Akses Listrik Desa, 100% Bersinar;
- Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman.

3) Betang Makmur

- Rp 2 juta per Kartu Keluarga Bantuan Pangan;
- Operasi Pasar Murah;
- 250 Miliarder Muda Baru;
- Milenial Job Center;
- Inkubasi UMKM;
- Asuransi Petani dan Nelayan;
- Bantuan Perahu dan Alat Tangkap.

4) Betang Cerdas

- Sekolah/Kuliah Gratis;
- Satu Keluarga Harus Ada Sarjana;
- 1.000 Rumah Guru;
- Insentif Guru Agama;
- Kalteng Mengaji.

5) Betang Sehat

- Berobat Gratis Berbasis KTP;

- Insentif Tenaga Kesehatan Desa;
  - Revitalisasi Puskesmas Desa;
  - Pendampingan Ibu Hamil dan Pasca hamil;
  - 1 Desa 1 Ambulans.
- 6) Betang Sehat
- Berdayakan 100 Dewi (Desa Wisata);
  - Rp 150 Miliar Bantuan Provinsi untuk Kabupaten/Kota;
  - Rp 250 Juta Stimulus Desa;
  - Insentif Kepala Desa, BPD, Damang, Mantir, dan RT/RW se-Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga.

### **Telaah RTRW Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2035**

Penataan ruang wilayah provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- 1) Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- 2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- 3) Perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;
- 4) Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan;
- 5) Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi;
- 6) Pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;
- 7) Pengembangan potensi perekonomian melalui penetapan kawasan strategis Provinsi; dan
- 8) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dalam rangka pengembangan wilayah Kalimantan Tengah, Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas:

- 1) **Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan**, yaitu:
  - a) **Pusat Kegiatan Nasional (PKN)**, Palangka Raya di Kota Palangka Raya;
  - b) **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)**, meliputi Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kuala Kapuas di Kabupaten

Kapuas, Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara, Buntok di Kabupaten Barito Selatan; dan

- c) **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**, meliputi Tamiyang Layang di Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau, Kasongan di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Puruk Cahu di Kabupaten Murung, Raya Sukamara di Kabupaten Sukamara, Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau, dan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan.

2) **Sistem Jaringan Prasarana Utama**, yaitu:

a) **Sistem Jaringan Transportasi Darat**

**Rencana Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan:**

- **Rencana Pengembangan Jalan Arteri Primer**, meliputi: Basarang - Batanjung sepanjang 51,8 Km, Simpang Bangkal - Bangka - Telaga Pulang - Kuala Pembuang - Teluk Sigintung sepanjang 110 Km; Pangkalan Bun - Sebuai sepanjang 45 Km, dan Jalan Lingkar Luar Kota Palangka Raya sepanjang 18,5 Km;
- **Rencana Pengembangan Jalan Kolektor Primer K1 (JKP-1)**, meliputi: Tumbang Samba - Tumbang Hiran - Tumbang Sanamang - Tumbang Kaburai - Batas Provinsi Kalbar sepanjang 172 Km;
- **Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer K3 (JKP-3)**, meliputi: (1) Jl. Tjilik Riwut Km 31 - Lingkar Luar - Petak Bahandang (Kab. Katingan), sepanjang 33 Km; (2) Bawan - Lahei - Batekong sepanjang 261,18 Km; (3) Lanjutan Jl. Yos Sudarso (Palangka Raya) -Sebanguau sepanjang 15 Km; (4) Lanjutan Jl. G. Obos - Bukit Kaki - Pagatan sepanjang 125 Km; (5) Kereng Bangkirai - Sp. Jl. Cilik Riwut sepanjang 25 Km; (6) Pelabuhan Bukit Pinang - Kalampangan sepanjang 6,4 Km; (7) Simpang Sepaku (Nanga Bulik) - Parigi - Pangkut - Rantau Pulut – Kuala Kuayan - Simpang Sei Babi - Tangar - Parenggean - Kalanaman - Buntut Bali - Takaras - Bawan; (8) Tewah - Tumbang Miri - Tumbang Anoi sepanjang 83 Km; (9) Simpang Batapah - Tumpang Laung - Muara Teweh; (10) Kuala Kurun - Linau - Tumbang Jutuh sepanjang 45 Km; (11) Simpang Trinsing (Muara Teweh) - Trinsing sepanjang 16 Km; (12) Tampa - Pinang Tunggal - Jihi sepanjang 40 Km; (13) Rikut Jawu (Buntok) - Tabak Kanilan – Simpang Patas sepanjang 41,5 Km; dan (14) Simpang Penopa - Tapin Bini sepanjang 28 Km.

b) **Rencana Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan**

**Jaringan Angkutan Sungai dan Danau:**

- **Jaringan Angkutan Sungai dan Danau**, meliputi: (1) Sungai Jelai: Balai Riam - Sukamara - Kuala Jelai; (2) Sungai Bantu: Kecamatan Pantai Lunci/Kabupaten Sukamara - Sungai Arut Kabupaten Kotawaringin Barat; (3) Sungai Arut: Raja/Pangkalan Bun - Mendawai Seberang - Tanjung Putri; (4) Sungai Kumai:

Pangkalan Banteng - Kumai; (5) Sungai Belantikan: Bayat - N. Belantikan; (6) Sungai Lamandau: Tapin Bini - N. Belantikan - N. Bulik - Kotawaringin Lama - Mendawai Seberang; (7) Sungai Seruyan: Mojang Baru - Rantau Pulut - Asam Baru - Pembuang Hulu - Telaga Pulang - Kuala Pembuang; (8) Sungai Tualan: Kota Baru (Padas)- Parenggean - Hanjalipan; (9) Sungai Mentaya: Tb. Sangai - Kuala Kuayan - Hanjalipan - Kotabesi - Sampit - Bagendang - Samuda; (10) Sungai Cempaga: Pantai Harapan - Cempaka Mulia - Kota Besi; (11) Sungai Katingan: Bukit Raya - Kec. Sanaman Mantikei dan Kecamatan Petak Malai - Tb. Senamang - Tumbang Hiran - Tb. Samba - Pendahara - Kasongan - Baun Bango - Mendawai - Pagatan; (12) Sungai Sebangau: Kereng Bangkirai/Palangkaraya - Bantanan - Muara Sebangau; (13) Sungai Kahayan: Tb. Miri - Tewah - Kuala Kurun - Sepang Simin - Bukit Liti -Palangka Raya - Pulang Pisau - Maliku - Pangkoh - Bahaur; (14) Sungai Rungan: Tb. Jutuh - Takaras - Tangkiling - Palangka Raya; (15) Sungai Kapuas: Sei Hanyu - Pujon - Timpah - Mantangai - Mandomai - Kuala Kapuas - Lupak Dalam; (16) Sungai Barito: Puruk Cahu - Muara Teweh -Montalat - Buntok - Bangkuang - Mengkatip - Telang Baru - Jenamas -Banjarmasin; (17) Anjir Serapat: Banjarmasin - Kapuas; (18) Anjir Kelampayan: Pulang Pisau - Mandomai; (19) Anjir Basarang: Kuala Kapuas - Basarang - Mintin; (20) Terusan Raya: Kuala Kapuas - Bahaur; dan (21) Terusan Hantipan: Pulau Hanaut - Pagatan.

- **Jaringan Angkutan Penyeberangan:** (1) Kumai - Kendal di Jawa Tengah (Lintas Penghubung Sabuk); (2) Bahaur - Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk); (3) Kumai - Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk); dan (4) Bahaur - Kendal (Lintas Penghubung Sabuk).

c) **Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian**

- **Sistem Jaringan Jalur Kereta Api Utama Provinsi,** meliputi: Jalur kereta api Puruk Cahu - Bangkuang - Batanjung; Jalur kereta api Puruk Cahu - Kuala Kurun - Rabambang - Palangka Raya - Pulang Pisau - Kuala Kapuas; - Jalur kereta api Rabambang - Tumbang Samba - Sampit - Kuala Pembuang - Teluk Segintung; - Jalur kereta api Tumbang Samba - Rantau Pulut - Nanga Bulik - Pangkalan Bun - Kumai; dan Jalur kereta api Kudangan - Nanga Bulik - Kumai.
- **Sistem Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota Berdasarkan Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan,** meliputi: Jalur Kereta api dengan: - Prioritas tinggi, ruas jalan kereta api Palangka Raya - Banjarmasin; - Prioritas sedang, ruas jalan kereta api Muara Teweh - Buntok - Tanjung; dan - Prioritas rendah, ruas jalan kereta api Buntok - Palangka Raya, Palangka Raya - Sampit - Pangkalan Bun, Pangkalan Bun - Sanggau.
- **Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Barang di Kalimantan Tengah,** meliputi: Stasiun Kota Palangka Raya, perkotaan Pangkalan Bun, Kumai (Kabupaten

Kotawaringin Barat), Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur), Buntok (Kabupaten Barito Selatan), Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara), Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya), Pulang Pisau, Bahaur (Kabupaten Pulang Pisau), Kuala Kurun, Rabambang (Kabupaten Gunung Mas), Nanga Bulik (Kabupaten Lamandau), Kuala Pembuang/Teluk Segintung, Rantau Pulut (Kabupaten Seruyan), dan Tumbang Samba (Kabupaten Katingan).

d) **Sistem Jaringan Transportasi Laut:**

- **Rencana Pengembangan Pelabuhan Baru** adalah: (1) Pelabuhan Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat; (2) Pelabuhan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur; (3) Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan; (4) Pelabuhan Tanjung Perawan di Kabupaten Pulang Pisau.

e) **Sistem Jaringan Transportasi Udara:**

**Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**, terdiri atas:

- **Rencana Sistem Jaringan Energi**, meliputi: (1) Pembangkit Tenaga Listrik; Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kapuas; (2) Pembangunan Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG) di Kabupaten Barito Utara; Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau Kalimantan Tengah; (3) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Katingan, Murung Raya, Barito Utara, dan Lamandau; (4) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Mikrohidro (PLTMH) di Kabupaten Murung Raya, Katingan, Gunung Mas, Lamandau, Kapuas, Seruyan, dan Barito Utara; (5) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) di Kabupaten Sukamara, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas; (6) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah khususnya di desa-desa terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN dan tidak ada potensi energi lain seperti angin dan mikrohidro di daerah tersebut.
- **Sistem Interkoneksi dan Jaringan Transmisi serta Jaringan Distribusi Listrik**, meliputi: (1) Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Palangka Raya - Kasongan - Sampit; Sampit - Pangkalan Bun; (2) Pangkalan Bun - Kumai; Pangkalan Bun - Nanga Bulik; (3) Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dari Bangkanai - Muara Teweh - Buntok - Palangka Raya; (4) Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Muara Teweh - Puruk Cahu - Kuala Kurun - Kasongan dan

Puruk Cahu - Muara Juloi; (5) Pembangunan Kabel listrik bawah laut dari Kabupaten Sukamara ke Jepara (Provinsi Jawa Tengah); (6) Perluasan pembangunan jaringan distribusi Tegangan Menengah dari Gardu Induk menuju pusat-pusat beban di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah; (7) Perluasan jaringan tegangan rendah dari jaringan distribusi Tegangan Menengah ke wilayah pemukiman di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

- **Gardu Induk (GI)**, terdiri atas; pembangunan Gardu Induk (GI) di Palangka Raya, Kapuas, Seruyan, Kuala Kurun, Kasongan, Sampit, Pangkalan Bun, Nanga Bulik, Buntok, Muara Teweh dan Puruk Cahu.
- **Depo Bahan Bakar Minyak (BBM)**, mencakup: Depo BBM di Pulang Pisau, Sampit, Muara Teweh, Sukamara, Kapuas, Tamiang Layang, Murung Raya, Pangkalan Bun, Murung Raya, Katingan dan Buntok.
- **Jaringan Pipa Transmisi Minyak dan Gas Bumi**, berupa Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi yang menghubungkan antara Pontianak - Palangka Raya - Banjarmasin.

**Rencana Jaringan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan**, terdiri dari:

- **Sistem Jaringan Backbone**  
Jaringan backbone dalam bentuk kabel SKSO (Sistem Komunikasi Serat Optik) melalui jalur darat dengan system proteksi (sistem ring) dan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) melalui Jalur Laut.
- **Remote Metro Junction (RMJ)**  
Jaringan RMJ dalam bentuk kabel SKSO dan Radio.
- **Sistem Jaringan Akses**  
Jaringan Akses dalam bentuk kabel SKSO, kabel tembaga, Radio Akses dan VSAT (Verry Small Aperture Terminal).

**Rencana Sistem Sumberdaya Air**, terdiri dari:

- **Wilayah Sungai (WS)**, meliputi:
  - (1) Wilayah Sungai Lintas Provinsi, meliputi: Wilayah Sungai (WS) Jelai-Kendawangan, terdiri dari: DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai, DAS Jelai; Wilayah Sungai (WS) Barito, terdiri dari DAS Barito dan DAS Kapuas; (2) Wilayah Sungai Strategis Nasional, yang meliputi: Wilayah Sungai (WS) Mentaya-Katingan yang terdiri dari DAS Mentaya dan DAS Katingan; (3) Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota meliputi: Wilayah Sungai (WS) Seruyan, yaitu DAS Seruyan dan DAS Segintung; dan Wilayah Sungai (WS) Kahayan, yaitu DAS Sebangau dan DAS Kahayan.
- **Bendung, Bendungan, Embung, Danau dan Situ**, meliputi:
  - (1) Bendung Sekata Juri, Sekata Tewah, Gohong Rawai di Kabupaten Gunung Mas; Bendung Tampa, Talohen, Natampin, Baruh Rintis, Bendung Karau di

Kabupaten Barito Timur; Bendung Tandrahean, Trinsing, Bawang, Jamut di Kabupaten Barito Utara; Bendung Kumai Kondang di Kabupaten Kotawaringin Barat; Bendung Bayat di Kabupaten Lamandau, Bendung Tanjung Harapan di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Bendung Uwang di Kabupaten Barito Selatan; (2) Bendungan Muara Joloi di Kabupaten Murung Raya, Bendungan Riam Jerawi di Kabupaten Katingan, dan Bendungan Satongah di Kabupaten Lamandau; (3) Embung Sirau di Kabupaten Barito Timur, Embung Sababilah di Kabupaten Barito Selatan, Embung Tumbang Atei di Kabupaten Katingan, Embung PLTMH Ulung Siron di Kabupaten Murung Raya, Embung PLTMH Taja Urap di Kabupaten Gunung Mas, dan Embung Situ Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau; (4) Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan, Danau Malawen, Danau Medara, Danau Masura, Danau Limamuda, Danau Lelek, Danau Buang, Danau Bambunan, Danau Mutar, Danau Pupundak, Danau Raya, Danau Sadar, Danau Tarmasi di Kabupaten Barito Selatan, Danau Kamipang, Danau Telaga dan Danau Bulan di Kabupaten Katingan, Danau Sarai, Danau Burung, Danau Canjang, Danau Limus, Danau Liput, Danau Nampala, Danau Pamalasan, Danau Pianan, Danau Pulak Batu di Kabupaten Kotawaringin Timur, Danau Butong di Kabupaten Barito Utara, dan Danau Asem, Danau Gatel, Danau Gihitam, Danau Jalapangin, dan Danau Kandang di Kabupaten Kotawaringin Barat; (5) Situ Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau.

- **Daerah Irigasi (DI), Daerah Rawa (DR) dan Daerah Rawa Tambak**, terdiri dari: Daerah Irigasi (DI).
- **Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Pusat**, yaitu: (1) DI Karau di Kabupaten Barito Timur dengan luas pelayanan 4.294 Ha (integrasi dari DI Karau, DI Talohen, DI Netampin, dan DI Takwam); (2) DI Tumbang Samba di Kabupaten Katingan dengan luas pelayanan 5.000 Ha, dan (3) DI Tewang Menyangen di Kabupaten Katingan dengan luas pelayanan 5.000 Ha.
- **Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Provinsi**, meliputi: (1) Kabupaten Barito Timur, yaitu: DI Tampa (Luas Pelayanan 2.000 Ha); dan DI Kalamus (Luas Pelayanan 1.000 Ha); (2) Kabupaten Barito Utara, yaitu DI. Lahei (Luas Pelayanan 3.000 Ha); Kabupaten Katingan, yaitu: DI Tumbang Kuai (Luas Pelayanan 1.500 Ha); dan (3) DI Tumbang Manggu (Luas Pelayanan 300 Ha).
- **Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Kabupaten**, meliputi: (1) Kabupaten Kotawaringin Barat, mencakup 5 lokasi dengan luas pelayanan 1.519 Ha; (2) Kabupaten Lamandau, 1 lokasi dengan luas pelayanan 25 Ha; (3) Kabupaten Kotawaringin Timur, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 1.000 Ha; (4) Kabupaten Pulang Pisau, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 400 Ha; (5) Kabupaten Barito Selatan, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 750

Ha; (6) Kabupaten Barito Timur, mencakup 3 lokasi dengan luas pelayanan 631 Ha; (7) Kabupaten Barito Utara, mencakup 11 lokasi dengan luas pelayanan 3.750 Ha; (8) Kabupaten Gunung Mas, mencakup 5 lokasi dengan luas pelayanan 2.220 Ha; (9) Kabupaten Katingan, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 1.800 Ha.

▪ **Daerah Rawa (DR)**

**Daerah Rawa Kewenangan Pusat**, meliputi:

(1) DR di Kabupaten Seruyan (Luas Pelayanan 3.500 Ha/11lokasi); (2) DR di Kabupaten Kotawaringin Timur (Luas Pelayanan 48.582 Ha/ 12 lokasi Kecamatan); (3) DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 9.200 Ha/2lokasi); (4) DR di Kabupaten Pulang Pisau (Luas Pelayanan 49.170 Ha/11 lokasi); (5) DR di Kabupaten Kapuas (Luas Pelayanan 194.602 Ha/18 lokasi); (6) DR di Kabupaten Barito Selatan (Luas Pelayanan 10.000 Ha/lokasi Eks PLG).

**Daerah Rawa Kewenangan Provinsi**, meliputi:

(1) DR di Kota Palangka Raya (Luas Pelayanan 2.164 Ha/2 lokasi); (2) DR di Kabupaten Kotawaringin Barat (Luas Pelayanan 5.000 Ha/ 5 lokasi); (3) DR di Kabupaten Sukamara (Luas Pelayanan 5.870 Ha/4lokasi); (4) DR di Kabupaten Seruyan (Luas Pelayanan 15.515 Ha/8 lokasi); (5) DR di Kabupaten Kotawaringin Timur (Luas Pelayanan 69.526,25 Ha/ 36 lokasi); (6) DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 11.875 Ha/8 lokasi); (7) DR di Kabupaten Pulang Pisau (Luas Pelayanan 21.925 Ha/13 lokasi); (8) DR di Kabupaten Kapuas (Luas Pelayanan 13.675 Ha/7 Lokasi), (9) Daerah Rawa Tambak, di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

- **Pengamanan Pantai**, terdiri atas: kegiatan pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai yang berada di sepanjang 751 Km, meliputi: (1) Pantai di Kabupaten Sukamara (Pantai Sei Cabang Barat, Kecamatan Lunci, Pantai Sei Damar, Pantai Sei Tabuk, Pantai Jelai, Pantai Sei Baru); (2) Pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat (Pantai Desa Kubu, Pantai Sei Bakau, Pantai Desa Keraya, Pantai Desa Sebuai, dan Pantai Teluk Bogam); (3) Pantai di Kabupaten Seruyan (Pantai Sungai Bakau); (4) Pantai di Kabupaten Kotawaringin Timur (Pantai Ujung Pandaran); (5) Pantai di Kabupaten Pulang Pisau (Pantai Cemantan); dan (6) Pantai di Kabupaten Kapuas (Pantai Palampai, Pantai Cemara Labat, Pantai Batanjung dan Pantai Desa Pematang).

- **Instalasi Pengolahan Air Minum**, mencakup: Penyediaan dan pengelolaan air baku meliputi air permukaan dan air tanah yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pertanian, meliputi: (1) Air permukaan meliputi: sungai Arut, sungai Lamandau, sungai Kumai, sungai Jelai, sungai Seruyan, sungai Mentaya, sungai Katingan, sungai Kahayan, sungai Sebangau, sungai Barito dan sungai Kapuas beserta anak sungai; (2) Air tanah tersebar di beberapa cekungan air

tanah yang potensial di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan lokasi yang sudah terbangun sebanyak 10 Kabupaten/Kota.

- **Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai**, meliputi: kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta Operasional dan Pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir, yang meliputi Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai yang terjadi pada wilayah sungai strategis nasional.

Adapun **Rencana Pola Ruang Provinsi Pada Kawasan Budidaya**, terdiri atas:

- **Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**, meliputi: (1) Hutan produksi terbatas (HPT) seluas ±3.335.571 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah; (2) Hutan produksi tetap (HP) seluas ±3.896.706 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan (3) Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan luas ±2.258.274 Ha telah di berikan untuk lahan kelola masyarakat seluas ±624.101.04 Ha yang tersebar pada 377 desa/kelurahan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- **Non Kawasan Hutan**, seluas ±2.629.779 Ha dengan peruntukan sebagai berikut: (1) Kawasan peruntukan pertanian meliputi: (1) Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) dengan luas +187.814,65 Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; (2) Kawasan Pencadangan lahan tanaman pangan dengan luas 178.572,86 Ha dimana didalamnya terdapat lahan pencadangan tanaman pangan seluas ± 64,001,81 Ha, tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; (3) Kawasan Lahan untuk Pengembangan Hortikultura seluas ± 37,385 Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota; (4) Kawasan Tanah Adat tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dengan luas 900.000 Ha; (5) Kawasan sepanjang jalan dengan jarak 2.500 meter (2,5 Km) sebelah kanan dan 2.500 meter (2,5 Km) sebelah kiri jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang sesuai dengan fungsi peruntukannya, merupakan ruang kelola masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur; (6) Kawasan sepanjang jalur sungai dan danau yang ada tempat permukiman desa dan/atau kelurahan dengan jarak 3.000 meter dari kiri dan kanan sungai merupakan hak kelola Masyarakat Adat Kalimantan Tengah.
- **Kawasan Peternakan**, yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- **Kawasan Peruntukan Perkebunan**, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- **Kawasan Peruntukan Perikanan Laut**, seluas (751 Km x 12 mil) yang berada di perairan laut dan seluas 134.810 Ha di perairan darat (sungai, danau dan rawa) di Provinsi Kalimantan Tengah.

- **Kawasan Peruntukan Industri**, terdiri atas: (1) Kawasan sentra industri kecil dan kawasan industri menengah (Sentra IKM) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan (2) Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Industri tersebar di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara.
- **Kawasan Peruntukan Pariwisata**, disesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah (RIPPARPROV) 2013-2028 terdiri dari 3 wilayah (Barat, Tengah dan Timur) yang meliputi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan manusia.
- **Kawasan Peruntukan Permukiman**, terdiri atas: (1) Kawasan permukiman perkotaan berada pada kawasan APL yang tersebar di seluruh ibukota Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; (2) Kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman masyarakat adat seluas 300.000 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.
- **Kawasan Peruntukan Transmigrasi**, yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- **Kawasan Peruntukan Technopark** perkebunan, pertambangan, perikanan, kehutanan, pertanian, peternakan dan sebagainya yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- **Kawasan Peruntukan Lainnya**, yaitu: (1) Kawasan tempat beribadah, kawasan penelitian dan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; (2) Kawasan peruntukan pertahanan keamanan hutan khusus untuk latihan militer (HKT-M) bagi kepentingan pemeliharaan, pertahanan dan keamanan Negara berdasarkan geostrategic nasional terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat; (3) Hutan Monumental Nyaru Menteng seluas ±65 Ha di Kota Palangka Raya; dan (4) Hutan Monumental seluas ±600 Ha di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selanjutnya **Wilayah Pertambangan dan Energi**, terdiri atas:

- **Kawasan Peruntukan Pertambangan**, yang disebut wilayah pertambangan menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral logam dan non logam, mineral radioaktif, batuan dan batubara yang dikelompokkan menjadi wilayah usaha pertambangan (WUP) dengan luas kurang lebih 13.418.843 Ha, wilayah pencandangan nasional (WPN) di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas kurang lebih 1.393.000 Ha dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas kurang lebih 150.000 Ha serta kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

- **Kawasan Peruntukan Pengembangan Sumber Daya Energi** di 14 Kabupaten/Kota.

### **Telaah RPJPD Kabupaten Barito Timur 2025-2045**

Visi Pembangunan Kabupaten Barito Timur yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2045 yaitu **“Barito Timur menuju Kabupaten yang bertumbuh, adil, mandiri dan berkelanjutan” “BARTIM BERAMAL”**. Pernyataan visi pembangunan Kabupaten Barito Timur memiliki dimensi turunan yang diwujudkan dalam periodisasi 5 (lima) tahunan pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2045.

**Tabel 2.94. Periodisasi Target Pembangunan RPJPD**

| <b>Periode I</b> | <b>Periode II</b> | <b>Periode III</b> | <b>Periode IV</b> |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2025-2029        | 2030-2034         | 2035-2039          | 2040-2045         |
| Bertumbuh        | Adil              | Mandiri            | Berkelanjutan     |

- Bertumbuh** : Sebuah kondisi dalam memperkuat pondasi untuk bertumbuh pada transformasi dan kekuatan pilar di segala bidang.
- Adil** : Suatu kondisi dimana Barito Timur berada pada Transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyokong pembangunan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan pembangunan dijalankan atas dasar pemerataan di segala bidang untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara adil.
- Mandiri** : Suatu kondisi Barito Timur yang maju dan mandiri di segala bidang, termasuk di dalamnya pengembangan daya saing mengatasi era dan jaman teknologi. Dalam berbagai aspek adalah pengutamaan daya saing sumberdaya manusia, ekonomi dan smart city.
- Berkelanjutan** : Suatu kondisi dimana Barito Timur telah menjadi daya dukung Indonesia Maju 2045, dengan melakukan transformasi daya saing, tata kelola kolaboratif pada aspek pemerintahan, pembangunan, disertai dengan ketahanan daya dukung lingkungan.

Penjabaran dan perwujudan visi pembangunan tersebut dilakukan melalui 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Barito Timur meliputi:

#### **Misi 1: Meningkatkan Kualitas SDM yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing**

Dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan religius diindikasikan dari aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli, yang merupakan tiga indikator dalam IPM. Namun dalam kaitan dengan misi Kabupaten Barito Timur bukan sekedar peningkatan IPM saja, tetapi juga menciptakan SDM handal dan unggul yang dicerminkan dari perilaku bermoral, beretika, berbudaya dan berperilaku baik yang harus menjadi karakter dan identitas mayoritas masyarakat Kabupaten Barito Timur. Hal ini, diharapkan menjadi pedoman dalam seluruh aktivitas kehidupan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama. Dengan adanya perilaku

baik maka SDM yang handal tersebut akan memberikan manfaat bagi dirinya, orang lain, (keluarga dan masyarakat) serta kehidupan sosial melalui berbagai kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap upaya pembangunan daerah.

### **Misi 2: Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing**

Kabupaten Barito Timur memiliki potensi di bidang pertanian, pertambangan, dan pariwisata, dan bila seluruh potensi sumber daya yang ada dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan serta menumbuhkembangkan perekonomian yang memiliki daya saing dengan berbasis sumber daya lokal melalui lembaga ekonomi produktif (Koperasi, Bank Desa, dan BUMDES), pemanfaatan potensi lokal wilayah perdesaan, dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Misi keempat ini merupakan penjabaran dari visi mandiri yang memfokuskan pada pengembangan agribisnis, pariwisata, jasa, perdagangan, investasi daerah, pengurangan pengangguran penduduk, pengurangan kemiskinan dan penyediaan infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah. Dari fokus tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah yang berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan kompetitif dan komparatif dengan berbasis pada potensi local.

### **Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan adaptif**

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang bersifat konstruktif antara tiga domain utama yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang memiliki karakteristik efisien, efektif, partisipatif berlandaskan hukum, adil demokratis, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan, akuntabel dan memiliki visi strategik. Misi kelima didasarkan atas kondisi objektif bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah kepada masyarakat belum optimal sehingga menyebabkan kurangnya peranserta masyarakat dalam pembangunan daerah. Dalam konteks saat ini, organisasi pemerintahan diharapkan beradaptasi dalam waktu singkat untuk menghadapi perubahan yang mungkin mengganggu jika tidak ditangani secara memadai. Namun banyak organisasi tidak mampu beradaptasi secara efektif dan cepat karena pengaturan kelembagaan dan pola pengambilan keputusan dan tata kelola yang sudah mapan. Tata kelola yang adaptif harus meningkatkan kapasitas organisasi untuk menghadapi dan beradaptasi terhadap perubahan, sekaligus melindungi organisasi dari ancaman stabilitas. Strategi tata kelola adaptif mencakup pemanfaatan kemampuan internal dan eksternal, desentralisasi kekuasaan pengambilan keputusan, dan upaya memberikan masukan bagi pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi dari bawah ke atas. Pada saat yang sama, strategi adaptif mungkin menantang stabilitas dan akuntabilitas, yang tetap penting bagi pemerintah.

#### **Misi 4: Mewujudkan Pembangunan yang terbuka, tertib dan humanis**

Untuk pelaksanaan pembangunan yang terarah dan dapat mencapai tujuan diperlukan suatu kondisi dan situasi yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan serta dapat dirasakan hasil pembangunan. Kondisi keterbukaan dan humanis akan mendorong kondusifitas masyarakat yang terjaga (tidak terjadi kerusuhan) adalah situasi dan kondisi yang diperlukan untuk dilaksanakannya pembangunan tersebut. Kondisi yang aman, tertib dan tenteram akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen dari seluruh stakeholders pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Dengan demikian, pembangunan diarahkan untuk memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat antara lain dengan mencegah tindak kejahatan, kerusuhan, mengurangi tindak kriminalitas, serta menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat. Nilai budaya lokal menjadi perekat dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat Kabupaten Barito Timur. Salah satu ciri masyarakat Indonesia adalah mempunyai rasa kegotong-royongan dan toleransi yang tinggi, sifat yang telah tertanam di masyarakat Indonesia sejak dahulu kala dan masih tertanam sampai sekarang. Sifat ini telah banyak memberikan nilai positif bagi pelaksanaan pembangunan.

Tetapi akibat dari tingginya arus globalisasi yang membawa dampak negatif antara lain sifat individualistik sehingga mengakibatkan menurunnya sifat kesetiakawanan dan kegotong-royongan yang telah ada serta tertanam di masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Barito Timur. Untuk itu salah satu tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Timur diarahkan pada upaya untuk memelihara dan mengembangkan kesetiakawanan sosial dan kegotongroyongan masyarakat. Budaya tertib dan disiplin merupakan persyaratan yang penting untuk dapat mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Masih banyaknya pelanggaran hukum dan peraturan kemasyarakatan adalah indikasi bahwa masih rendahnya rasa disiplin dan ketertiban di masyarakat. Keteladanan dari aparaturnya dan tokoh masyarakat adalah sesuatu yang perlu dikembangkan dalam penegakkan hukum dan aturan yang berlaku. Untuk waktu jangka panjang diharapkan rasa tertib dan budaya disiplin dapat melekat dan selalu dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Barito Timur. Selain itu, factor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang aman, tertib, tentram dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh stakeholders pembangunan. Hukum merupakan aturan yang mengatur segala aspek kemasyarakatan agar kehidupan manusia berjalan dengan baik dan tidak saling mengganggu hak individu, kelompok tertentu dan institusi. Misi ini diarahkan melalui penguatan instansi dan badan penegak hukum. Seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, dan serta instansi pengawasan pemerintah harus lebih difungsikan.

#### **Misi 5: Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan**

Lingkungan merupakan tempat di mana kegiatan pembangunan dilaksanakan sehingga lingkungan memerlukan perhatian terutama untuk pembangunan jangka panjang dimana dampak

dan akibat pembangunan terakumulasi. Konsekuensi logis dari dilaksanakannya pembangunan adalah penggunaan segala sumber daya termasuk sumber daya alam dan adanya dampak negatif dari pelaksanaan pembangunan. Tetapi pelaksanaan pembangunan tidak harus mengesampingkan dan mengorbankan kondisi lingkungan. Sehingga diharapkan dalam jangka panjang akan tetap terjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan keberlangsungan pembangunan dan masih dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menjaga dan memulihkan kondisi lingkungan yang bersih, bebas dari segala polusi, sampah dan limbah yang menurunkan kondisi, kualitas dan daya dukung lingkungan, melakukan mitigasi bencana alam yang mungkin terjadi, menjaga kondisi dan keasrian sumber daya alam yang sangat penting bagi masyarakat luas.

#### **Misi 6: Menciptakan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan**

Pembangunan wilayah merupakan pembangunan yang bersifat holistic (menyeluruh). Ada tiga aspek utama terkait pembangunan wilayah yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendorong tumbuh kembangnya perekonomian wilayah secara menyeluruh tetapi bukan merupakan satu-satunya keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pembangunan kesejahteraan sosial akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang semu, artinya ada kesenjangan di tengah masyarakat.

Misi pertama merupakan penjabaran dari visi adil yang memfokuskan pada pertumbuhan wilayah di mana masyarakat mempunyai kesamaan terhadap semua aksesibilitas yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan tidak hanya diprioritaskan pada wilayah yang secara geografis diuntungkan oleh kedekatannya dengan pusat pertumbuhan nasional (Kota Tamiang Layang) tetapi juga pada wilayah-wilayah tertinggal, kawasan-kawasan pembangunan yang strategis, pengembangan wilayah pinggiran.

Kesemuanya itu terungkap dalam motto daerah **“Gumi Jari Janang Kalalawah”** yang artinya: **“Daerah Yang Subur Makmur Dan Sejahtera Untuk Selama-lamanya”**.

#### **Telaah RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Timur sebagai suatu rencana penataan ruang wilayah yang dimaksudkan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan pembangunan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha serta swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program-program sektoral dan daerah. Untuk mencapai pola dan struktur ruang Kabupaten Barito Timur 2014-2034 diperlukan perwujudan RTRW Kabupaten Barito Timur yang diuraikan program pembangunan wilayah dalam RTRW Kabupaten Barito Timur.

**Tabel 2.95. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034**

| No.      | Program/ Sektor / Sub Sektor  | Sub Program / Kegiatan  | Lokasi  | Tahap II  |
|----------|---|---|---|-----------|
|          |   |   |   | 2017-2021 |
| <b>I</b> | <b>Pemantapan Rencana Pusat-Pusat Permukiman</b>  |   |   |           |
| 1        | Peningkatan Fungsi PKL Tamiang Layang   | Peningkatan kapasitas PDAM  | Tamiang Layang  |           |
|          |   | Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPA yang ramah lingkungan | Tamiang Layang  |           |
|          |   | Peningkatan jaringan drainase   | Tamiang Layang  |           |
|          |   | Pembangunan Perguruan Tinggi  | Tamiang Layang  |           |
|          |   | Pengadaan lahan untuk Kasiba dan Lisiba                                 | Tamiang Layang  |           |
|          |   | Pembangunan fasilitas sosial dan umum                                   | Tamiang Layang  |           |
|          |   | Pembangunan kawasan taman kota  | Tamiang Layang  |           |
| 2        | Peningkatan Fungsi PKLp Ampah   | Peningkatan pusat perdagangan dan jasa                                  | Ampah   |           |
|          |   | Peningkatan daerah irigasi  | Ampah   |           |
|          |   | Pengembangan Puskesmas Rawap Inap                                       | Ampah   |           |
|          |   | Pembangunan sarana transportasi   | Ampah   |           |
|          |   | Peningkatan jaringan jalan lokal  | Ampah   |           |
|          |   | Pembangunan jalan produksi pertanian                                    | Ampah   |           |
| 3        | Peningkatan Fungsi PPK Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu | Penyusunan RDTR   | Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, bersih, limbah, sampah, dan lain-lain). |           |
|          |   | Penyusunan peraturan zonasi   | Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, bersih, limbah, sampah, dan lain-lain). |           |
|          |   | Peningkatan pusat perdagangan dan jasa                                  | Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, bersih, limbah, sampah, dan lain-lain). |           |
|          |   | Peningkatan jaringan jalan lokal  | Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, bersih, limbah, sampah, dan lain-lain). |           |
|          |   | Pengembangan tata batas hutan   | Bambulung   |           |
|          |   | Pengembangan fasilitas penunjang  | Bambulung   |           |

| No.  | Program/ Sektor / Sub Sektor                    | Sub Program / Kegiatan  | Lokasi  | Tahap II  |
|--|---|---|---|-----------|
|  |   |   |   | 2017-2021 |
|  |   | pertanian   |   |           |
|  |   | Pembangunan gudang pengumpul pertanian  | Bambulung   |           |
|  |   | Pembangunan jalan produksi pertanian  | Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, bersih, limbah, sampah, dan lain-lain). |           |
|  |   | Pembangunan infrastruktur wilayah (jaringan jalan dan jembatan, air bersih, limbah, sampah, dan lain-lain). | Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, bersih, limbah, sampah, dan lain-lain). |           |
|  |   | Pengembangan Puskesmas  | Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, bersih, limbah, sampah, dan lain-lain). |           |
|  |   | Pengembangan sarana dan prasarana wisata  |   |           |
| <b>II Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi</b>   |   |   |   |           |
| 1  | Peningkatan Jalan                               | Peingkatan kualitas ruas jalan Strategis Nasional   | Seluruh Kecamatan   |           |
| 2  | Pembangunan Jalan                               | Pembangunan jalan lokal   | Seluruh Kecamatan   |           |
|  |   | Pembangunan jalan lainnya   | Seluruh Kecamatan   |           |
| 3  | Perbaikan Jalan                                 | Perbaikan jalan lokal   | Seluruh Kecamatan   |           |
|  |   | Pembangunan jalan lainnya   | Seluruh Kecamatan   |           |
|  |   | Pembangunan Terminal Tipe C   | Taniran, Bentot, Hayaping, Bambulung  |           |
| 4  | Pembangunan Pelabuhan dan Dermaga serta Bandara | Pembangunan Pelabuhan khusus  | Telang Baru   |           |
|  |   | Dermaga Wisata Danau Undan  | Benua Lima  |           |
| <b>III Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air</b> |   |   |   |           |
| 1  | Kawasan Resapan Air                             | Rehabilitasi Hulu Sungai, Anak Sungai dan Danau   | Kabupaten Barito Timur  |           |
|  |   | Pengamanan hulu Sungai, anak sungai, Danau  | Kabupaten Barito Timur  |           |
| 2  | Irigasi   | Perbaikan irigasi teknis yang rusak   | Kabupaten Barito Timur  |           |
|  |   | Pemeliharaan saluran irigasi teknis   | Kabupaten Barito Timur  |           |
| 3  | Air Bersih                                      | Peningkatan areal layanan PDAM  | Seluruh Kecamatan   |           |

| No.   | Program/ Sektor / Sub Sektor    | Sub Program / Kegiatan   | Lokasi   | Tahap II  |
|---|---------------------------------|--|--|-----------|
|   |                                 |  |  | 2017-2021 |
|   |                                 | Pembangunan bak penampung air  | Seluruh Kecamatan                              |           |
| 4   | Penanganan longsor/banjir       | Pembangunan Turap/Siring/ Bronjong   | Kecamatan Pematang Karau                       |           |
|   |                                 | Sosialisasi  | Kecamatan Paku, Raren Batuah, dan Dusun Tengah |           |
| <b>IV Sistem Jaringan Prasarana Energi</b>        |                                 |  |  |           |
| 1   | Peningkatan Energi              | Optimalisasi pemanfaatan PLTD berbasis masyarakat  | Seluruh Kecamatan                              |           |
|   |                                 | Perluasan layanan listrik  | Kabupaten Barito Timur                         |           |
| <b>V Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi</b> |                                 |  |  |           |
| 1   | Pembangunan                     | Penataan dan efisiensi penempatan BTS  | Kabupaten Barito Timur                         |           |
| 2   | Penyusunan <i>data base</i>     | Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk | Kabupaten Barito Timur                         |           |
| <b>VI Sistem Jaringan Prasarana Permukiman</b>    |                                 |  |  |           |
| 1   | Peningkatan perbaikan pemukiman | Perbaikan perumahan semi permanen/tidak permanen   | Seluruh pusat pelayanan kawasan/ lingkungan    |           |
| 2   | Pembangunan prasarana pemukiman | Perumahan PNS  | Tamiang Layang                                 |           |
|   |                                 | Pembangunan perumahan perkotaan  | Tamiang Layang dan Ampah                       |           |
|   |                                 | Pembangunan IPAL   | Tamiang Layang dan Ampah                       |           |
|   |                                 | Pembangunan drainase   | Kabupaten Barito Timur                         |           |
|   |                                 | Pembangunan jalan lokal/lingkungan   | Seluruh PPK dan Desa                           |           |

Sumber: Diolah dari RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034, 2025.

**Tabel 2.96. Rencana Pola Ruang Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034**

| No.                                 | Program/ Sektor / Sub Sektor                           | Sub Program / Kegiatan  | Lokasi                     | Tahap II  |
|-------------------------------------|--|---|----------------------------|-----------|
|                                     |  |   |                            | 2017-2021 |
| <b>I Perwujudan Kawasan Lindung</b> |  |   |                            |           |
| 1                                   | Perwujudan Kawasan Lindung terhadap kawasan bawahannya | <i>Mengendalikan kegiatan hutan agar tetap terpelihara:</i>           | Seluruh Kecamatan Mangaris |           |
|                                     |  | Identifikasi dan inventarisasi data kawasan lindung                   | Seluruh Kecamatan Mangaris |           |
|                                     |  | Mengembalikan dan menjaga kawasan lindung lainnya (kawasan arboretum) | Seluruh Kecamatan Mangaris |           |
|                                     |  | Rehabilitasi dan konversi kawasan lindung                             | Seluruh Kecamatan Mangaris |           |
|                                     |  | <i>Meningkatkan serta</i>   | Seluruh                    |           |

| No. | Program/ Sektor / Sub Sektor       | Sub Program / Kegiatan   | Lokasi                     | Tahap II  |
|-----|------------------------------------|--|----------------------------|-----------|
|     |                                    |  |                            | 2017-2021 |
|     |                                    | <i>mempertahankan luasan dan fungsi kawasan lindung:</i>   | Kecamatan Mangaris         |           |
|     |                                    | Pemantauan dan pembatasan kegiatan hutan   | Seluruh Kecamatan Mangaris |           |
|     |                                    | Pemindahan kegiatan yang mengganggu fungsi hutan   | Seluruh Kecamatan Mangaris |           |
|     |                                    | Meningkatkan dan mengembangkan cakupan kawasan program HKm pada kawasan hutan lindung yang sudah rusak/alih fungsi non hutan                           | Seluruh Kecamatan Mangaris |           |
|     |                                    | Melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah dan masyarakat setempat | Seluruh Kecamatan Mangaris |           |
|     |                                    | <i>Langkah-langkah pengelolaan kawasan lindung:</i>  | Kabupaten Barito Timur     |           |
|     |                                    | Penegakan hukum bagi kegiatan ilegal logging dengan penanganan (represif, persuasif dan preventif) secara kontinu                                      | Kabupaten Barito Timur     |           |
|     |                                    | Kegiatan Rehabilitasi, Redeliniasi kawasan lindung   | Kabupaten Barito Timur     |           |
|     |                                    | Lahan dengan tingkatan sangat kritis segera direhabilitasi dengan program masif dan partisipatif   | Kabupaten Barito Timur     |           |
| 2   | Kawasan Konservasi dan resapan air | <i>Mengendalikan kegiatan kawasan agar tetap terpelihara:</i>  | Seluruh Kecamatan          |           |
|     |                                    | Identifikasi dan inventarisasi data kawasan konservasi   | Seluruh Kecamatan          |           |
|     |                                    | Rehabilitasi dan konversi kawasan konservasi   | Seluruh Kecamatan          |           |
|     |                                    | <i>Mempertahankan luasan dan fungsi kawasan:</i>   | Seluruh Kecamatan          |           |
|     |                                    | Pemantauan dan pembatasan kegiatan kawasan   | Seluruh Kecamatan          |           |
|     |                                    | Pemindahan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan konservasi dan resapan air  | Seluruh Kecamatan          |           |
| 3   | Kawasan Lindung Setempat Sempadan  | Pembangunan tanggul sungai   | Seluruh Kecamatan          |           |

| No. | Program/ Sektor / Sub Sektor               | Sub Program / Kegiatan   | Lokasi   | Tahap II  |
|-----|--|--|--|-----------|
|     |  |  |  | 2017-2021 |
|     | Sungai                                     | Pemeliharaan tanggul sungai  | Seluruh Kecamatan  |           |
|     |  | Pemeliharaan tebing sungai   | Seluruh Kecamatan  |           |
|     |  | Pemindahan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan sungai                                 | Seluruh Kecamatan  |           |
|     |  | Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang di tepi sungai                                 | Seluruh Kecamatan  |           |
| 4   | Sempadan Danau/ Waduk                      | Penataan dan pemanfaatan kawasan danau/waduk   | Seluruh Kecamatan  |           |
|     |  | Rehabilitasi dan konservasi kawasan danau/waduk  | Seluruh Kecamatan  |           |
|     |  | Pemindahan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan danau/waduk                            | Seluruh Kecamatan  |           |
|     |  | Pengembangan kegiatan ekonomi/wisata   | Seluruh Kecamatan  |           |
| 5   | Kawasan Mata Air                           | Pemeliharaan kawasan mata air  | Seluruh Kecamatan  |           |
| 6   | Kawasan Pelestarian Alam Taman Wisata Alam | <i>Mengendalikan kegiatan kawasan Taman Wisata Alam:</i>                                   | Seluruh Kecamatan  |           |
|     |  | Identifikasi dan inventarisasi data Taman Wisata Alam                                      | Seluruh Kecamatan  |           |
|     |  | Rehabilitasi dan konversi Taman Wisata Alam  | Seluruh Kecamatan  |           |
|     |  | Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang  | Seluruh Kecamatan  |           |
| 7   | Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan  | <i>Mengendalikan kegiatan kawasan cagar budaya:</i>  | Seluruh Kecamatan  |           |
|     |  | Penyusunan peraturan zonasi  | Seluruh Kecamatan  |           |
|     |  | Rehabilitasi cagar budaya yang mengalami kerusakan   | Seluruh Kecamatan  |           |
|     |  | Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang  | Seluruh Kecamatan  |           |
| 8   | Rawan Bencana Alam                         | <i>Mitigasi bencana banjir &amp; longsor adalah:</i>                                       | Kecamatan Pematang Karau, Petangkep Tutui, Karuseng Janang, Paku, Raren Batuah, dan Dusun Tengah |           |
|     |  | Penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi jalan raya                                |  |           |
|     |  | Penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi tebing sungai yang dekat dengan pemukiman |  |           |
|     |  | Pembangunan jalur evakuasi bencana alam  |  |           |
|     |  | Rehabilitasi dan reboisasi daerah-daerah penyangga   |  |           |

| No.       | Program/ Sektor / Sub Sektor       | Sub Program / Kegiatan  | Lokasi  | Tahap II  |
|-----------|------------------------------------|---|---|-----------|
|           |                                    |   |   | 2017-2021 |
|           |                                    | dan resapan air   |   |           |
|           |                                    | Pengendalian penebangan dan pemanfaatan lahan di daerah penyangga dan resapan air   |   |           |
|           |                                    | Pengendalian penambangan pada daerah-daerah penyangga dan resapan air               |   |           |
|           |                                    | Pengendalian pemukiman di daerah penyangga, resapan air dan daerah rawan longsor    |   |           |
|           |                                    | Inventarisasi dan pengawasan ketat daerah-daerah rawan longsor                      |   |           |
|           |                                    | Pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor                             |   |           |
|           |                                    | Penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana tanah longsor             |   |           |
| <b>II</b> | <b>Perwujudan Kawasan Budidaya</b> |   |   |           |
| 1         | Perwujudan HP                      | Pemetaan tata batas kawasan hutan produksi  | Kabupaten Barito Timur  |           |
|           |                                    | Identifikasi jenis dan kawasan hutan produksi                                       | Kabupaten Barito Timur  |           |
|           |                                    | Program pemulihan dan pengembangan hutan produksi                                   | Kabupaten Barito Timur  |           |
|           |                                    | Pembangunan kerjasama pengelolaan kawasan hutan produksi                            | Kabupaten Barito Timur  |           |
|           |                                    | Fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan                                       | Kabupaten Barito Timur  |           |
| 2         | Perwujudan Kawasan Pertanian       | Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi | Kecamatan Paju Epat, Dusun Tengah, Raren Batuah, Pematang Karau, Dusun Timur, Petangkep Tutui |           |
|           |                                    | Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan produksi               |   |           |
|           |                                    | pengolahan hasil panen, pemadaran hasil pertanian (terminal agribisnis)             |   |           |
|           |                                    | Peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan                    |   |           |
|           |                                    | Pengembangan padi organik bersertifikat yang bernilai ekonomi tinggi                |   |           |
|           |                                    | Pemberian insentif kepada petani/pengusaha bidang pertanian                         |   |           |
|           |                                    | Penguatan lembaga petani, pengadaan sarana produksi, panen dan                      |   |           |
|           |                                    |   |   |           |

| No. | Program/ Sektor / Sub Sektor      | Sub Program / Kegiatan   | Lokasi   | Tahap II  |
|-----|-----------------------------------|--|--|-----------|
|     |                                   |  |  | 2017-2021 |
|     |                                   | pengolahan pasca panen termasuk pemasaran  |  |           |
| 3   | Perwujudan Pertanian Lahan Kering | Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering  | Kecamatan Raren Batuah, Dusun Tengah, Karusen Janang, Dusun Timur, Petangkep Tutui, Awang, Paju Epat |           |
|     |                                   | Penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan                                    |  |           |
|     |                                   | Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan                                       |  |           |
|     |                                   | Pembangunan prasarana dan sarana pertanian   |  |           |
|     |                                   | Penguatan kelembagaan petani serta pemodalan   |  |           |
|     |                                   | Penguatan hak kepemilikan lahan (Sertifikasi Lahan Pertanian)                                    |  |           |
| 4   | Perwujudan Pertanian Lahan Basah  | Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan                                       | Kecamatan Pematang Karau, Raren Batuah, Dusun Tengah, Karusen Janang, Petangkep Tutui                |           |
|     |                                   | Pembangunan prasarana dan sarana pertanian   |  |           |
|     |                                   | Penguatan kelembagaan dan pemasaran serta pemodalan  |  |           |
|     |                                   | Penguatan hak kepemilikan lahan (Sertifikasi Lahan Pertanian)                                    |  |           |
| 5   | Perwujudan Kawasan Perkebunan     | Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan konservasi | Seluruh Kecamatan  |           |
|     |                                   | <i>Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan yang terdiri dari sub sistem:</i>               | Seluruh Kecamatan  |           |
|     |                                   | Subsistem Hulu: sarana produksi pertanian (industri pembibitan, agrokimia, agrootomotif)         | Seluruh Kecamatan  |           |
|     |                                   | Subsistem Usaha Tani (On Farm) produksi pertanian primer   | Seluruh Kecamatan  |           |
|     |                                   | Subsistem Hilir ( <i>Down Stream</i> ) pengolahan hasil pertanian dan perdagangan                | Seluruh Kecamatan  |           |
|     |                                   | Subsistem Kelembagaan ( <i>Supporting Institution</i> ) perbankan, transportasi                  | Seluruh Kecamatan  |           |
|     |                                   | Penguatan hak kepemilikan lahan (Sertifikasi Lahan Kebun)  | Seluruh Kecamatan  |           |
|     |                                   |  |  |           |
| 6   | Perwujudan Kawasan Perikanan      | Pengembangan budidaya perikanan  | Kecamatan Pematang   |           |

| No. | Program/ Sektor / Sub Sektor                    | Sub Program / Kegiatan  | Lokasi   | Tahap II  |
|-----|---|---|--|-----------|
|     |   |   |  | 2017-2021 |
|     |   | Peningkatan produksi perikanan  | Karau, Dusun Tengah, Paju Epat, Raren Batuah, dan Paku |           |
|     |   | Pembangunan prasarana dan sarana pendukung peternakan   |  |           |
|     |   | Pengadaan bibit dan peralatan   |  |           |
|     |   | Penyuluhan  |  |           |
| 7   | Perwujudan Pengembangan Pertambangan dan Energi | Peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi           | Seluruh Kecamatan                                      |           |
|     |   | Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan yang berpotensi untuk dieksploitas | Seluruh Kecamatan                                      |           |
|     |   | Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan mineral                               | Seluruh Kecamatan                                      |           |
|     |   | Melakukan kajian sumberdaya energi alternatif yang meliputi panas bumi dan tenaga air, listrik perdesaan          | Seluruh Kecamatan                                      |           |
|     |   | Pengembangan dan Penataan Wilayah bidang pertambangan dan energi  | Seluruh Kecamatan                                      |           |
|     |   | Pengembangan energi alternatif  | Seluruh Kecamatan                                      |           |
|     |   | Melakukan kajian pengembangan energi alternatif   | Seluruh Kecamatan                                      |           |
|     |   | Melaksanakan perencanaan pemanfaatan tenaga listrik energi alternatif   | Seluruh Kecamatan                                      |           |
|     |   | Mencari sumber pembiayaan dan investor untuk pelaksanaan  | Seluruh Kecamatan                                      |           |
|     |   | Pengembangan pembangkit tenaga listrik energi alternatif  | Seluruh Kecamatan                                      |           |
| 8   | Perwujudan Kawasan Pariwisata                   | Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu   | Seluruh Wilayah Pariwisata                             |           |
|     |   | Melengkapi Kawasan Wisata Terpadu dengan fasilitas penunjang wisata   | Seluruh Wilayah Pariwisata                             |           |
|     |   | Melakukan promosi Kawasan Wisata Terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai event promosi          | Seluruh Wilayah Pariwisata                             |           |
|     |   | Melakukan kerjasama dengan berbagai biro  | Seluruh  |           |

| No. | Program/ Sektor / Sub Sektor  | Sub Program / Kegiatan  | Lokasi                     | Tahap II  |
|-----|-------------------------------|---|----------------------------|-----------|
|     |                               |   |                            | 2017-2021 |
|     |                               | perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif   | Wilayah Pariwisata         |           |
|     |                               | Pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu manajemen promosi pariwisata daerah | Seluruh Wilayah Pariwisata |           |
|     |                               | Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan  | Seluruh Wilayah Pariwisata |           |
|     |                               | Pembinaan Sumber Daya Insan Pariwisata (Sanggar dan Pesanggrahan)   | Seluruh Wilayah Pariwisata |           |
| 9   | Perwujudan Kawasan Permukiman | <i>Permukiman Perkotaan</i>   |                            |           |
|     |                               | Pembangunan perumahan pegawai   | Tamiang Layang             |           |
|     |                               | Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa   | Ampah                      |           |
|     |                               | Identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas serta utilitas   | Seluruh Kecamatan          |           |
|     |                               | Pembangunan jalan lingkungan  | Seluruh Kecamatan          |           |
|     |                               | Pembangunan sistem jaringan prasarana air minum   | Seluruh Kecamatan          |           |
|     |                               | Pengembangan sistem jaringan prasarana listrik  | Seluruh Kecamatan          |           |
|     |                               | Pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi   | Seluruh Kecamatan          |           |
|     |                               | Pengembangan sistem drainase dan pengelolaan limbah   | Seluruh Kecamatan          |           |
|     |                               | Identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana alam   | Seluruh Kecamatan          |           |
|     |                               | Pengadaan perumahan melalui subsidi KPR-Rumah Sangat Sederhana  | Seluruh Kecamatan          |           |
|     |                               | <i>Permukiman Perdesaan</i>   | Seluruh Kecamatan          |           |
|     |                               | Identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan   | Seluruh Kecamatan          |           |
|     |                               | Identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada kawasan lindung dan budidaya  | Seluruh Kecamatan          |           |
|     |                               | Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana alam  | Seluruh Kecamatan          |           |
|     |                               | Klasifikasi kelompok  | Seluruh                    |           |

| No.        | Program/ Sektor / Sub Sektor   | Sub Program / Kegiatan  | Lokasi                 | Tahap II  |
|------------|--|---|------------------------|-----------|
|            |  |   |                        | 2017-2021 |
|            |  | permukiman yang berada pada kawasan budidaya yang mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah | Kecamatan              |           |
|            |  | Identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman                                    | Seluruh Kecamatan      |           |
| 10         | Sektor Pengairan   | <i>Pengendalian banjir dan konservasi sumber-sumber air melalui:</i>                        | Kabupaten Barito Timur |           |
|            |  | Pembuatan Tabat   | Kabupaten Barito Timur |           |
|            |  | Pengembangan jaringan Irigasi   | Kabupaten Barito Timur |           |
|            |  | Peningkatan dan perbaikan jaringan irigasi  | Kabupaten Barito Timur |           |
| 11         | Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Koperasi | Fasilitiasi Kredit Usaha Rakyat   | Seluruh Kecamatan      |           |
|            |  | Fasilitasi kesehatan usaha dan permodalan   | Seluruh Kecamatan      |           |
|            |  | Fasilitasi jaminan keamanan investasi rakyat  | Seluruh Kecamatan      |           |
| <b>III</b> | <b>Sub Sektor Tata Ruang</b>   |   |                        |           |
| 1          | Sektor Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga                           | Pengendalian Pemanfaatan Ruang  | Kabupaten Barito Timur |           |
| 2          | Sub Sektor Pendidikan  | Pembangunan Perguruan Tinggi  | Kabupaten Barito Timur |           |
|            |  | Pembangunan SMU Standar Nasional/ Internasional   | Kabupaten Barito Timur |           |
|            |  | Pembangunan SMK Standar Nasional/ Internasional   | Kabupaten Barito Timur |           |
|            |  | Pembangunan SMP/ sederajat  | Kabupaten Barito Timur |           |
|            |  | Pembangunan SD/ sederajat   | Kabupaten Barito Timur |           |
|            |  | Pembangunan TK  | Kabupaten Barito Timur |           |
|            |  | Rehabilitasi bangunan sekolah   | Kabupaten Barito Timur |           |
|            |  | Pemeliharaan gedung sekolah   | Kabupaten Barito Timur |           |
|            |  | Pembangunan ruang kela  | Kabupaten Barito Timur |           |
| 3          | Sub Sektor Kebudayaan  | <i>Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan</i>  | Kabupaten Barito Timur |           |
|            |  | Inventarisasi Keanekaragaman Kebudayaan   | Kabupaten Barito Timur |           |
|            |  | Penggalian Seni Budaya Khas Daerah  | Kabupaten Barito Timur |           |
| 4          | Sub Sektor Olahraga  | Pengembangan Stadion Olah Raga Standar Nasional   | Tamiang Layang         |           |

Sumber: Diolah dari RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034, 2025.

**Tabel 2.97. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034**

| No. | Program/ Sektor / Sub Sektor   | Sub Program / Kegiatan  | Lokasi              | Tahap II  |
|-----|--------------------------------|---|---------------------|-----------|
|     |                                |   |                     | 2017-2021 |
| 1   | Perwujudan Kawasan Agropolitan | Penyusunan program rehabilitasi kawasan pendukung yang merupakan kawasan irigasi teknis   | Ampah dan Bantulung |           |
|     |                                | Pembangunan sarana dan prasarana penunjang agropolitan  | Ampah dan Bantulung |           |
|     |                                | Mengembangkan infrastruktur pendukung, seperti transportasi   | Ampah dan Bantulung |           |
|     |                                | Komunikasi, air bersih dan energi bagi pengembangan kawasan agropolitan   | Ampah dan Bantulung |           |
|     |                                | Pengelolaan agrikultura dan agroindustri yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat petani                  | Ampah dan Bantulung |           |
|     |                                | Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis dan peningkatan kualitas pengusaha (petani dan aparatur)                                      | Ampah dan Bantulung |           |
|     |                                | Meningkatkan agribisnis komoditi unggulan yang saling mendukung dan menguatkan termasuk pengolahan hasil, jasa pemasaran dan agrowisata | Ampah dan Bantulung |           |
|     |                                | Menjalin tersedianya sarana produksi dan permodalan pertanian   | Ampah dan Bantulung |           |
|     |                                | Pengembangan kelembagaan petani sebagai sentra pembelajaran dan pengembangan agribisnis   | Ampah dan Bantulung |           |
|     |                                | Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian menjadi balai penyuluhan pengembangan terpadu   | Ampah dan Bantulung |           |
|     |                                | Peningkatan perdagangan / pemasaran termasuk pengembangan terminal agribisnis dan pusat lelang/show room hasil pertanian                | Ampah dan Bantulung |           |
|     |                                | Pengembangan pendidikan pertanian   | Ampah dan Bantulung |           |

| No. | Program/ Sektor / Sub Sektor  | Sub Program / Kegiatan   | Lokasi   | Tahap II  |
|-----|---|--|--|-----------|
|     |   |  |  | 2017-2021 |
|     |   | untuk generasi muda  |  |           |
|     |   | Pengembangan percobaan / pengkajian teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan        | Ampah dan Bambulung  |           |
| 2   | Perwujudan Kawasan pertanian berkelanjutan dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis | Penetapan batas kawasan pengembangan irigasi teknis  | Kabupaten Barito Timur   |           |
|     |   | Penyusunan masterplan kawasan pertanian irigasi teknis yang padat karya dan berorientasi ekspor          | Kabupaten Barito Timur   |           |
|     |   | Penyusunan rencana zonasi sub kawasan penunjang dan sub kawasan penunjang                                | Kabupaten Barito Timur   |           |
|     |   | Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengembangan pertanian  | Kabupaten Barito Timur   |           |
|     |   | Peningkatan dan penyiapan kualitas sumberdaya manusia (masyarakat)                                       | Kabupaten Barito Timur   |           |
| 3   | Perwujudan Kawasan Pengembangan Peternakan  | <i>Pembangunan sarana dan prasarana inti kawasan peternakan</i>  | Kecamatan Tengah, Paju Epat, Raren Batuah, dan Pematang Karau, Dusun Dusun Timur |           |
|     |   | Peningkatan sarana prasarana transportasi kawasan  |  |           |
|     |   | Peningkatan pelayanan prasarana (sanitasi, air bersih, drainase)   |  |           |
|     |   | Pemasaran hasil produksi peternakan  |  |           |
|     |   | Peningkatan sumberdaya manusia   |  |           |
|     |   | Penyuluhan   |  |           |
|     |   | Sosialisasi dan penyiapan masyarakat   |  |           |
| 4   | Perwujudan Kawasan Pengembangan Sumberdaya Energi & Teknologi Tinggi                          | Melakukan kajian sumberdaya energi alternatif yang meliputi panas bumi dan tenaga air, listrik perdesaan | Kabupaten Barito Timur   |           |
|     |   | Pengembangan dan penataan wilayah bidang energi  | Kabupaten Barito Timur   |           |
|     |   | Pengembangan energi alternatif   | Kabupaten Barito Timur   |           |
|     |   | Melakukan kajian pengembangan energi alternatif  | Kabupaten Barito Timur   |           |
|     |   | Melaksanakan perencanaan pemanfaatan tenaga  | Kabupaten Barito Timur   |           |

| No. | Program/ Sektor / Sub Sektor   | Sub Program / Kegiatan  | Lokasi                         | Tahap II  |
|-----|--|---|--------------------------------|-----------|
|     |  |   |                                | 2017-2021 |
|     |  | listrik energi alternatif   |                                |           |
|     |  | Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan                | Kabupaten Barito Timur         |           |
| 5   | Perwujudan Kawasan Sosial Budaya                                     | Penyusunan masterplan kawasan Situs bersejarah Brohong            | Kecamatan Dusun Tengah         |           |
|     |  | Penyusunan peraturan zonasi                                       | Kecamatan Dusun Tengah         |           |
|     |  | Penyusunan DED  | Kecamatan Dusun Tengah         |           |
|     |  | Pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan Situs              | Kecamatan Dusun Tengah         |           |
|     |  | Pemeliharaan kawasan  | Kecamatan Dusun Tengah         |           |
| 6   | Perwujudan Kawasan Perkotaan   | Peningkatan peran dan pelayanan pasar menjadi pasar regional      | Ampah                          |           |
|     |  | Pembangunan perguruan tinggi                                      | Tamiang Layang                 |           |
|     |  | Peningkatan sekolah menengah umum menjadi bertaraf internasional  | Tamiang Layang                 |           |
|     |  | Peningkatan pelayanan sanitasi kebersihan perkotaan               | Tamiang Layang dan Ampah       |           |
|     |  | Pembangunan gedung olah raga & kesenian                           | Tamiang Layang                 |           |
|     |  | Pembangunan pusat pertokoan                                       | Tamiang Layang dan Ampah       |           |
|     |  | Peningkatan RSUD  | Tamiang Layang                 |           |
|     |  | Pembangunan perumahan karyawan                                    | Tamiang Layang                 |           |
| 7   | Perwujudan Kawasan Tambak  | Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perikanan | Kecamatan Paju Epat            |           |
|     |  | Pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan                    | Kecamatan Paju Epat            |           |
|     |  | Bantuan bibit dan peralatan                                       | Kecamatan Paju Epat            |           |
|     |  | Penyuluhan  | Kecamatan Paju Epat            |           |
| 8   | Perwujudan Kawasan Pengembangan Sumberdaya Energi & Teknologi Tinggi | <i>Penyusunan peraturan zonasi kawasan</i>                        | Kecamatan Dusun Tengah         |           |
|     |  | Penyediaan peralatan energi listrik dan sumberdaya manusia        |                                |           |
|     |  | Pembangunan sarana Prasarana pengembangan kawasan                 |                                |           |
| 9   | Perwujudan kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup           | <i>Penyusunan peraturan zonasi kawasan</i>                        | Desa Siong Kecamatan Paju Epat |           |
|     |  | Pembangunan gedung pusat penelitian                               |                                |           |
|     |  | Pengembangbiakan jenis anggrek                                    |                                |           |

| No. | Program/ Sektor / Sub Sektor | Sub Program / Kegiatan                             | Lokasi | Tahap II  |
|-----|------------------------------|--|--------|-----------|
|     |                              |  |        | 2017-2021 |
|     |                              | Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan |        |           |

Sumber: Diolah dari RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034, 2025.

### Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Barito Timur

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 merupakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029. Dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 juga memberikan penawaran visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang dapat diakomodir dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029.

Rekomendasi visi dan misi untuk RPJMD Kabupaten Barito Timur disusun dengan mempertimbangkan beberapa analisis yang sebelumnya dilakukan serta mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2045. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rekomendasi visi untuk RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 disajikan dalam bentuk kata kunci, sebagaimana pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2.28. Kata Kunci Rekomendasi Visi Kabupaten Barito Timur**



Sumber: Diolah dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), 2025.

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan misi sebagai langkah yang perlu dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rekomendasi misi disusun dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang kemudian akan mendasari perumusan arah kebijakan.

**Tabel 2.98. Misi, Fokus, dan Arah Kebijakan**

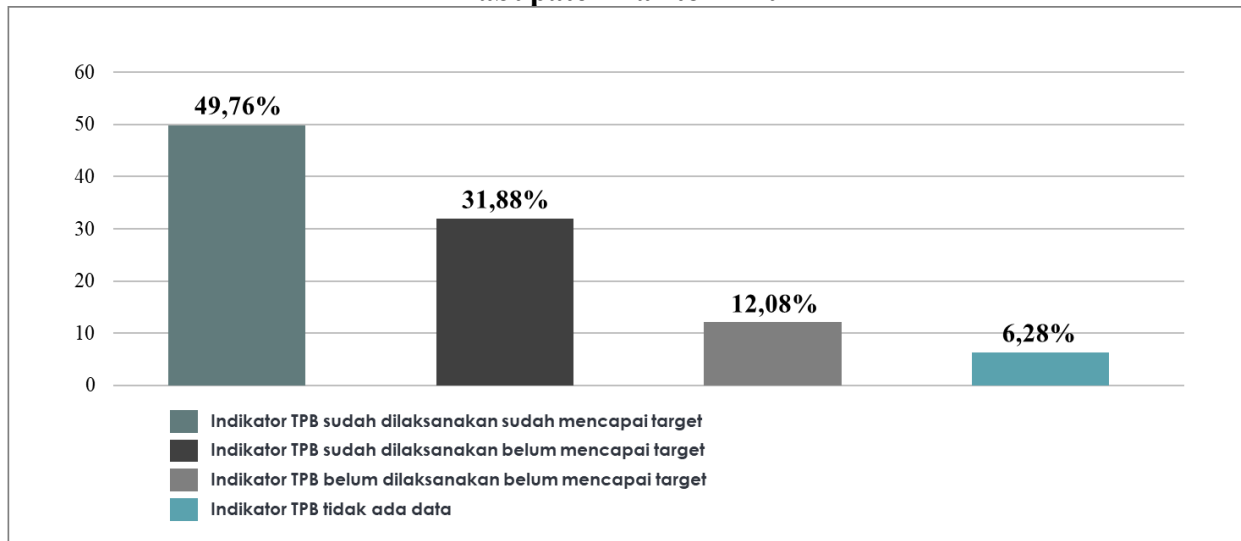
| Misi  | Fokus                    | Arah Kebijakan   |
|---|--------------------------|--|
| Mengentaskan kemiskinan melalui kemandirian ekonomi dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan | Peningkatan pendapatan   | Peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat  |
|   | Pemerataan infrastruktur | Peningkatan akses bagi masyarakat terhadap pendidikan                                |
|   |                          | Peningkatan akses pelayanan kesehatan termasuk pelayanan khusus bagi penduduk miskin |
|   |                          | Terbangunnya fasilitas pengelolaan sampah terpadu                                    |

| Misi   | Fokus  | Arah Kebijakan  |
|--|--|---|
|  |  | Terpenuhinya pembangunan infrastruktur daerah lainnya   |
| Mewujudkan daerah yang tangguh dan gigih dengan meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan   | Ketahanan pangan   | Pemenuhan penyediaan kebutuhan pangan pokok   |
|  | Peningkatan keamanan                                       | Optimalisasi sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang sudah terintegrasi   |
|  | Pengendalian dan pelestarian lingkungan                    | Penetapan regulasi untuk mengurangi dampak lingkungan   |
|  | Pengendalian penataan ruang                                | Pembentukan sistem pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang  |
| Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing melalui pemanfaatan dan pengelolaan sektor unggulan  | Pengembangan sektor unggulan                               | Peningkatan produksi dan distribusi pertanian   |
|  |  | Pengembangan IKM dan UKM sebagai salah satu bentuk kegiatan perekonomian lokal  |
| Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan adaptif melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjaga sinergi interaksi tiap komponen | Reformasi birokrasi  | Peningkatan kapasitas kualitas kinerja aparatur yang handal dalam menggunakan TIK   |
|  | Pelayanan publik   | Perbaikan sistem pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan memiliki kepastian waktu dan biaya                                 |
| Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul, dan berdaya saing  | Kualitas pendidikan  | Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan formal dan non formal  |
|  | Pelayanan kesehatan  | Pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan bagi masyarakat miskin   |
|  |  | Peningkatan kualitas kesehatan yang berfokus pada gizi masyarakat   |
|  | Kualitas tenaga kerja                                      | Peningkatan kualitas tenaga kerja yang ditandai dengan meningkatnya tenaga kerja dengan minimal lulusan pendidikan menengah pertama |
| Keamanan publik  | Melindungi penduduk dari segala macam gangguan dan ancaman |   |

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029, dapat disimpulkan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029, antara lain sebagai berikut:

1. Indikator TPB yang termasuk dalam kewenangan Kabupaten Barito Timur sebanyak 207 indikator atau sebesar 94,09% dari 220 indikator TPB Kewenangan Kabupaten. Sedangkan indikator TPB yang bukan kewenangan Kabupaten sebanyak 13 indikator atau sebesar 5,91% dari 220 indikator TPB kewenangan Kabupaten;
2. Kabupaten Barito Timur telah melaksanakan 81,64% indikator TPB kewenangan tingkat kabupaten, namun perlu evaluasi lebih lanjut terhadap capaiannya. Berdasarkan hasil perhitungan capaian tujuan berkelanjutan didapatkan 4 kategori ketercapaian yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2.29. Proporsi Ketercapaian Indikator TPB Kewenangan Kabupaten Barito Timur**



Sumber: Diolah dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), 2025.

3. Melalui serangkaian analisis, ditentukan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kabupaten Barito Timur sebanyak tujuh isu, meliputi:
  - Penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah;
  - Ketahanan pangan dan air;
  - Lingkungan berkualitas dan pelestarian kehati;
  - Peningkatan adaptasi-mitigasi bencana dan perubahan iklim;
  - Peningkatan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan;
  - Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal;
  - Peningkatan kualitas dan daya saing SDM.
4. Berdasarkan analisa terkait penentuan isu pembangunan berkelanjutan strategis Kabupaten Barito Timur, terdapat tujuh isu utama untuk diselesaikan melalui rekomendasi kebijakan yang sekaligus menjadi upaya tambahan untuk menyelesaikan ketercapaian dari indikator TPB Kabupaten Barito Timur yang belum mencapai target nasional. Setelah dilaksanakan analisis terhadap 6 muatan KLHS, capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), analisis keterkaitan antar TPB, kemudian disusun visi, misi, arah kebijakan serta sasaran yang didasarkan untuk menjawab isu-isu pembangunan berkelanjutan paling strategis yang ada. Arah kebijakan Kabupaten Barito Timur merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari isu pembangunan 5 tahun mendatang. Arah kebijakan tersebut berfokus pada bertumbuh, yakni penguatan pondasi untuk bertumbuh pada transformasi dan kekuatan pilar di segala bidang. Arah kebijakan yang disusun berdasarkan isu pembangunan strategis nantinya diharapkan dapat menyelesaikan indikator TPB Prioritas Kabupaten Barito Timur. Setiap rekomendasi yang diberikan juga mempertimbangkan RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2045.
  - Rekomendasi visi RPJMD Kabupaten Barito Timur disajikan dalam bentuk kata kunci yang meliputi: a) sejahtera; b) amanah; c) mandiri; d) berkelanjutan; e) gigih;

- Rekomendasi misi RPJMD Kabupaten Barito Timur meliputi: a) Mengentaskan kemiskinan melalui kemandirian ekonomi, pemerataan pembangunan yang berkeadilan, serta integrasi dan koordinasi antar wilayah; b) Mewujudkan daerah yang tangguh dengan meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan; c) Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing melalui pemanfaatan dan pengelolaan sektor unggulan; d) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan adaptif melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjaga sinergi interaksi tiap komponen; e) Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul, dan berdaya saing;
- Alternatif dan rekomendasi daya dukung pangan Kabupaten Barito Timur didasarkan pada aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Sedangkan alternatif dan rekomendasi daya dukung air Kabupaten Barito Timur didasarkan pada *Water Security Index*, yaitu ketersediaan, ekosistem air, dan ketahanan terhadap bencana;
- Alternatif skenario tanpa upaya tambahan merupakan alternatif skenario yang diterapkan bagi indikator-indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Dari total 207 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Timur, terdapat 109 indikator yang tidak memerlukan upaya tambahan. Alternatif skenario dan rekomendasi Kabupaten Barito Timur untuk indikator tanpa upaya tambahan adalah mempertahankan program dan kegiatan untuk pelaksanaan seluruh TPB yang sudah mencapai target nasional (Business as Usual);
- Alternatif skenario dan rekomendasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Upaya Tambahan disusun untuk 60 indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum memenuhi target. 44 indikator di antaranya adalah indikator TPB bukan prioritas dan 16 indikator lainnya adalah indikator TPB prioritas. Terdapat tiga skenario yang digunakan sebagai skenario TPB dengan Upaya Tambahan;
- Rekomendasi pada KLHS RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 terdiri dari program dan kegiatan yang disesuaikan dengan indikator TPB Kabupaten Barito Timur. Program dan kegiatan tersebut berdasarkan pada Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Alternatif skenario dan rekomendasi Kabupaten Barito Timur untuk indikator tidak ada data adalah menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten Barito Timur yang mendukung tercapainya target nasional untuk indikator sesuai kemampuan daerah.

## Isu-Isu Strategis Kabupaten/Kota Sekitar

Dalam hal administratif dapat diketahui bahwa Kabupaten Barito Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil tentu perlu mempertimbangkan kebijakan-kebijakan strategis pada Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Barito Timur. Berikut ini adalah telaah isu strategis Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### Kabupaten Barito Selatan

Berdasarkan hasil telaah terhadap isu strategis Kabupaten Barito Selatan, maka dapat diketahui bahwa isu strategis Kabupaten Barito Selatan pada periode pembangunan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.99. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029**

| No. | Isu Strategis   |
|-----|---|
| 1   | Percepatan pemerataan akses fasilitas dan tenaga kesehatan                              |
| 2   | Penguatan kapabilitas SDM yang terampil dan terdidik                                    |
| 3   | Pengentasan kesenjangan sosial  |
| 4   | Pengoptimalan IPTEK dan inovasi dalam memperkuat daya saing ekonomi                     |
| 5   | Percepatan transformasi digital untuk menuju ekonomi berbasis potensi lokal yang unggul |
| 6   | Percepatan kesejahteraan melalui integrasi ekonomi daerah                               |
| 7   | Penguatan integrasi perkotaan dan pedesaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional |
| 8   | Peningkatan upaya reformasi hukum yang komprehensif                                     |
| 9   | Percepatan digitalisasi dan integrasi sistem pemerintahan                               |
| 10  | Peningkatan responsivitas dan kualitas fasilitas pelayanan publik                       |
| 11  | Penguatan pengendalian, pengawasan, dan pencegahan korupsi                              |
| 12  | Peningkatan efektivitas evaluasi SPIP   |
| 13  | Peningkatan sistem keamanan dan jaminan penyelesaian tindak kriminal                    |
| 14  | Penguatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik                                 |
| 15  | Penguatan sistem manajerial dan evaluasi kinerja administratif                          |
| 16  | Peningkatan ketahanan ekonomi daerah melalui stabilitas makroekonomi                    |
| 17  | Peningkatan pengelolaan dan pelestarian nilai sejarah, warisan budaya dan cagar budaya  |
| 18  | Penanganan kesenjangan gender   |
| 19  | Optimalisasi kinerja sarana prasarana sanitasi aman                                     |
| 20  | Peningkatan produksi pangan lokal   |
| 21  | Percepatan pemerataan infrastruktur air minum layak                                     |
| 22  | Peningkatan deteksi dini kebencanaan  |
| 23  | Penguatan pondasi infrastruktur dasar hingga daerah terpencil                           |
| 24  | Peningkatan kebutuhan irigasi dalam kondisi baik  |
| 25  | Peningkatan drainase dalam kondisi baik   |
| 26  | Menciptakan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan                                  |
| 27  | Penyelarasan perencanaan pembangunan  |

Sumber: Diolah dari Tim Penyusun, 2025.

### Kabupaten Tabalong

Berdasarkan hasil telaah terhadap isu strategis Kabupaten Tabalong, maka dapat diketahui bahwa isu strategis Kabupaten Tabalong pada periode pembangunan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.100. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029**

| No. | Isu Strategis  |
|-----|--|
| 1   | Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera      |
| 2   | Pengembangan Ekonomi yang Inklusif dan Berorientasi Kerakyatan |

| No. | Isu Strategis  |
|-----|--|
| 3   | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan                                   |
| 4   | Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari dan Berkelanjutan          |
| 5   | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang Menyeluruh                  |
| 6   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Mendukung Perekonomian |

Sumber: Diolah dari Tim Penyusun, 2025.

### Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan hasil telaah terhadap isu strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dapat diketahui bahwa isu strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode pembangunan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.101. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029**

| No. | Isu Strategis   |
|-----|---|
| 1   | Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan                                   |
| 2   | Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan                                  |
| 3   | Penanggulangan Pengangguran   |
| 4   | Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Merata  |
| 5   | Peninngkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia   |
| 6   | Penguatan Sosial dan Budaya Masyarakat  |
| 7   | Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Perdesaan                    |
| 8   | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> )               |
| 9   | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang Lestari, Berkelanjutan, Reselience Bencana |
| 10  | Pengelolaan SDA Unggulan Secara Berkelanjutan   |

Sumber: Diolah dari Tim Penyusun, 2025

### Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Barito Timur

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu kebijakan nasional dan regional, isu dan kebijakan daerah, maka isu strategis Kabupaten Barito Timur pada periode pembangunan 2025-2029 sebagai berikut:

**Tabel 2.102. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029**

| No. | Isu Strategis  |
|-----|--|
| 1   | Rendahnya Daya Saing Ekonomi Daerah                                |
| 2   | Belum Optimalnya Sarana Prasarana Infrastruktur                    |
| 3   | Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia Unggul dan Mandiri        |
| 4   | Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Menuju Kemiskinan Nol Persen |
| 5   | Belum Optimalnya Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup     |
| 6   | Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik          |

Sumber: Diolah dari Tim Penyusun, 2025.

#### 1) Rendahnya Daya Saing Ekonomi Daerah

Sektor pertanian merupakan salah satu variabel penting bagi perkembangan Kabupaten Barito Timur. Kabupaten Barito Timur merupakan Kabupaten dengan perekonomian yang berbasis pada sumberdaya alam, khususnya sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perkebunan. Hal ini dikarenakan peranan sektor ini dalam pembentukan PDRB cukup besar.

#### 2) Belum Optimalnya Sarana Prasarana Infrastruktur

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan

pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang.

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan agar sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat berfungsi. Dengan aset Infrastruktur yang baik, akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Barito Timur merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga lebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

### **3) Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia Unggul dan Mandiri**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam melaksanakan reformasi global pembangunan daerah. Pemerintah memberikan perhatian khusus dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global sehingga mampu meningkatkan kapabilitas pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat baik bidang sosial maupun ekonomi. Memiliki SDM yang berdaya saing tinggi akan menjadikan Kabupaten Barito Timur siap menghadapi segala tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan segala peluang yang ada. Dengan peningkatan SDM berdaya saing hingga level nasional akan menempatkan kualitas SDM Kabupaten Barito Timur setara dengan kota-kota di Indonesia. Hal tersebut menjadikan SDM mampu bersaing pada kancah nasional maupun Internasional. Efek lain dari peningkatan kualitas SDM adalah pengembangan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Timur menjadi lebih maksimal dan optimal dalam menyerap tenaga kerja lokal sehingga penyerapan tenaga kerja yang berasal dari luar Kabupaten Barito Timur dapat diminimalisir. Kualitas sumber daya manusia yang menjadi tenaga kerja baik berusaha sendiri, berusaha ibantu pekerja, maupun buruh/karyawan/ pegawai terindikasi masih memiliki daya saing yang perlu ditingkatkan.

### **4) Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Menuju Kemiskinan Nol Persen**

Salah satu langkah untuk menekan kemiskinan adalah dengan memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan kesadaran akan berwirausaha dan pemberdayaan terutama pada masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang, penanggulangan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata, tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan nilai-nilai budaya negatif, seperti malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan politis serta peningkatan kemampuan produktivitas diri masyarakat.

### **5) Belum Optimalnya Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup**

Sumber daya alam ada batasan dan sifat bawaan, jika alam dieksploitasi tanpa aturan akan menimbulkan bencana bagi seluruh lingkungan hidup. Permasalahan yang timbul akibat tidak seimbangnya peningkatan aktivitas perekonomian dengan kualitas lingkungan hidup akan memicu beberapa persoalan seperti bencana alam berupa kebakaran hutan/lahan, banjir, hingga perubahan iklim yang saat ini menjadi salah satu isu internasional. Masyarakat harus mendapatkan jaminan lingkungan sehat, oleh karena itu perlu adanya upaya pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan salah satunya tambang. Serta menjaga keseimbangan lingkungan untuk menjadi tempat hidup bagi manusia, fauna dan flora serta ekosistem lainnya. Pada hakikatnya memanfaatkan hasil sumber daya alam ini harus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya begitu saja. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap hasil alam yang telah diambil. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai dimasa yang akan datang.

#### **6) Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**

Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. *Good governance* didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Dalam *good governance* mengandung pengertian terkait nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Tabel 2.103. Kesimpulan Isu Strategis Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029

| Potensi Daerah   | Permasalahan  | Isu KLHS   | Isu Lingkungan Dinamis  |   |  | Isu Strategis Daerah   |
|--|---|--|---|---|--|--|
|  |   |  | Global  | Nasional  | Regional   |  |
| (1)  | (2)   | (3)  | (4)   | (5)   | (6)  | (7)  |
| <p>Potensi Pertambangan; Potensi Pariwisata; Potensi Hutan; Potensi Pertanian; Potensi Perkebunan Potensi Peternakan; dan Potensi Perikanan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perekonomian Daerah: Belum optimalnya Daya Saing Sektor Ekonomi Unggulan;</li> <li>- Infrastruktur Wilayah: Belum optimalnya infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi;</li> <li>- Sumber Daya Manusia: Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia;</li> <li>- Sumber Daya Alam: Belum optimalnya pengendalian dan pelestarian lingkungan;</li> <li>- Birokrasi dan Pelayanan Publik: Belum optimalnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik;</li> <li>- Kesehatan: Belum optimalnya akses pelayanan kesehatan serta masih kurangnya tenaga kesehatan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angka kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah;</li> <li>- Ketahanan pangan dan air;</li> <li>- Lingkungan berkualitas dan pelestarian kehati;</li> <li>- Adaptasi-mitigasi bencana dan perubahan iklim;</li> <li>- Perekonomian daerah berbasis sektor unggulan;</li> <li>- Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal;</li> <li>- Kualitas dan daya saing SDM.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's);</li> <li>- <i>ASEAN Free Trade Area</i> (AFTA);</li> <li>- Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA);</li> <li>- Transformasi Digital/ Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);</li> <li>- Pertahanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada;</li> <li>- Pengembangan infrastruktur, lapangan kerja berkualitas, pengembangan kewirausahaan, industri kreatif, agro-maritim industri;</li> <li>- Pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda;</li> <li>- Hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam;</li> <li>- Pembangunan desa untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;</li> <li>- Reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.</li> <li>- Kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif;</li> <li>- Pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan dan berdaya saing global;</li> <li>- Transformasi tata kelola Pemerintahan;</li> <li>- Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah;</li> <li>- Pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan;</li> <li>- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan;</li> <li>- Kestinambungan pembangunan daerah antar periode.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daya Saing Ekonomi Daerah;</li> <li>- Sarana Prasarana Infrastruktur;</li> <li>- Daya Saing Sumber Daya Manusia Unggul dan Mandiri;</li> <li>- Kualitas Pembangunan Menuju Kemiskinan Nol Persen;</li> <li>- Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup;</li> <li>- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.</li> </ul> |

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2025.

### **BAB III**

## **VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam RPJMD Kabupaten Barito Timur tahun 2025-2029 salah satu hal yang penting adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan kebijakan pembangunan didasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, permasalahan, serta isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. Impact pembangunan menjadi satu komponen penting dalam arsitektur kinerja, hal ini dikarenakan impact merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang. Berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, permasalahan, serta isu strategis pembangunan daerah, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Barito Timur tahun 2025-2029 sebagaimana diuraikan berikut ini.

### **3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Barito Timur baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan pada kondisi daerah, potensi, dan tantangan daerah, serta bagaimana kebutuhan masyarakat Kabupaten Barito Timur saat ini dan kedepan, dan serta mengacu pada Visi RPJPN Tahun 2025-2045 “*Indonesia Emas 2045*” yaitu Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Visi Presiden dan Wakil Presiden di dalam RPJMN 2025-2029 yaitu “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*”, mengacu 8 (delapan) Misi yang dituangkan dalam Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045, “*Kalimantan Tengah Tangguh 2045: Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan*”, serta selaras dengan RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2045, yaitu “*Barito Timur menuju Kabupaten yang bertumbuh, adil, mandiri dan berkelanjutan*” **BARTIM BERAMAL**.

Maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2025-2029, yaitu: “***Mewujudkan Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah***” (**BARTIM SEGAH**).

Penjelasan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2025-2029, **BARTIM**  
**SEGAH:**

1. Sejahtera dalam Kehidupan

Mengupayakan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan yang inklusif.

2. Elegan dalam Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, dengan pelayanan publik yang responsif dan efisien, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.

3. Gigih dalam Pembangunan

Melaksanakan pembangunan infrastruktur dan ekonomi dengan semangat dan dedikasi tinggi, berfokus pada inovasi dan keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

4. Amanah dalam Kepemimpinan:

Memperkuat kepemimpinan yang jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab yang berkomitmen untuk melayani kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi kepercayaan publik.

5. Harmonis dalam Kehidupan Sosial:

Menciptakan masyarakat yang hidup dalam kerukunan, toleransi, dan solidaritas dengan memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati dalam keberagaman.

Visi tersebut menggambarkan suatu semangat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Barito Timur menjadi masyarakat yang sejahtera dari segi ekonomi melalui pembangunan, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa dan Kecamatan yang lebih mandiri.

“**SEGAH**” merupakan akronim dari “*Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis*” bermakna tentang sesuatu kebaikan hanya mereka yang berhati baik, berhati mulia yang mampu memberikan kebaikan bagi masyarakat, mereka tidak tinggal diam atas penderitaan rakyatnya, mereka selalu tergugah untuk mewujudkan kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat dan berkeinginan untuk mewujudkan cita-cita agung Kabupaten Barito Timur yaitu Gumi Jari Janang Kalalawah yang berarti sangat Mulia yaitu menjadi bumi yang jaya selama-lamanya. Arti kata Segah dalam bahasa Maanyan adalah Gagah (Cakap untuk Pria dan Cantik untuk Wanita). Sesuatu kebaikan dan kecantikan hati akan mampu menyelami kebutuhan rakyatnya sehingga program yang akan dilaksanakan diupayakan untuk kemakmuran warga Kabupaten Barito Timur.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan

sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Dalam upaya mengoperasionalkan visi "*Mewujudkan Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah*" (*BARTIM SEGAH*), dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kabupaten Barito Timur pada masa yang akan datang maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Barito Timur, sebagai berikut:

1. Mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), berintegritas serta layanan publik yang berkualitas dan *responsive* terhadap kebutuhan masyarakat;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan;
4. Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Membangun transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat.

#### **1. Mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal**

Untuk mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, maka perlu adanya peningkatan kontribusi sektor-sektor ekonomi unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM serta pelaku ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung kemandirian ekonomi daerah. Mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah dan kelompok masyarakat dengan memperluas akses terhadap sumber daya, peluang usaha, dan pasar bagi seluruh masyarakat. Mendorong diversifikasi produk lokal dengan meningkatkan kualitas dan inovasi produk. Mengembangkan klaster ekonomi berbasis sumber daya lokal, seperti klaster pertanian organik, perikanan terpadu, dan pariwisata berbasis budaya local.

Selanjutnya meningkatkan kapasitas Usaha Mikro melalui pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap teknologi. Memperluas akses Usaha Mikro terhadap permodalan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan. Memperluas jaringan pemasaran produk lokal melalui promosi, pameran, dan kerja sama dengan platform *e-commerce*. Revitalisasi Pasar Tradisional melalui renovasi pasar tradisional menjadi modern dan terorganisir untuk mendukung kegiatan perdagangan yang lebih efisien dan menarik lebih banyak pengunjung. Membangun dan meningkatkan infrastruktur pendukung, seperti pasar, pusat logistik, akses

transportasi, dan fasilitas penyimpanan untuk mendukung aktivitas ekonomi lokal. Meningkatkan akses digital dan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran dan operasional usaha lokal. Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan dan masyarakat di daerah terpencil. Memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil melalui kebijakan afirmatif dan pemberian akses yang setara terhadap sumber daya.

## **2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), berintegritas serta layanan publik yang berkualitas dan *responsive* terhadap kebutuhan masyarakat**

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), berintegritas serta layanan publik yang berkualitas dan *responsive* terhadap kebutuhan masyarakat, maka perlunya membangun tata kelola yang akuntabel dan transparan dengan memperkuat sistem pengawasan, pelaporan, dan akuntabilitas publik serta memastikan pengawasan internal dan eksternal yang efektif serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan untuk perbaikan layanan dan kebijakan. Meningkatkan integritas dan profesionalisme ASN melalui penguatan budaya kerja, etika pelayanan, dan penegakan disiplin. Meningkatkan kualitas layanan publik yang responsif, serta menyediakan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi & komunikasi.

## **3. Mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal**

Untuk mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, maka perlu adanya peningkatan kontribusi sektor-sektor ekonomi unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM serta pelaku ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung kemandirian ekonomi daerah. Mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah dan kelompok masyarakat dengan memperluas akses terhadap sumber daya, peluang usaha, dan pasar bagi seluruh masyarakat. Mendorong diversifikasi produk lokal dengan meningkatkan kualitas dan inovasi produk. Mengembangkan klaster ekonomi berbasis sumber daya lokal, seperti klaster pertanian organik, perikanan terpadu, dan pariwisata berbasis budaya local.

Selanjutnya meningkatkan kapasitas Usaha Mikro melalui pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap teknologi. Memperluas akses Usaha Mikro terhadap permodalan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan. Memperluas jaringan pemasaran produk lokal melalui promosi, pameran, dan kerja sama dengan platform *e-commerce*. Revitalisasi Pasar Tradisional melalui renovasi pasar tradisional menjadi modern dan terorganisir untuk mendukung kegiatan perdagangan yang lebih efisien dan menarik lebih banyak pengunjung. Membangun dan meningkatkan infrastruktur pendukung, seperti pasar, pusat logistik, akses

transportasi, dan fasilitas penyimpanan untuk mendukung aktivitas ekonomi lokal. Meningkatkan akses digital dan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran dan operasional usaha lokal. Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan dan masyarakat di daerah terpencil. Memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil melalui kebijakan afirmatif dan pemberian akses yang setara terhadap sumber daya.

#### **4. Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**

Dalam optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka perlu Memaksimalkan penggunaan SDA dan buatan dengan pendekatan yang ramah lingkungan untuk keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mengembangkan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal secara mandiri dan berkelanjutan, dan serta melaksanakan pembangunan yang mempertimbangkan aspek konservasi, perlindungan lingkungan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

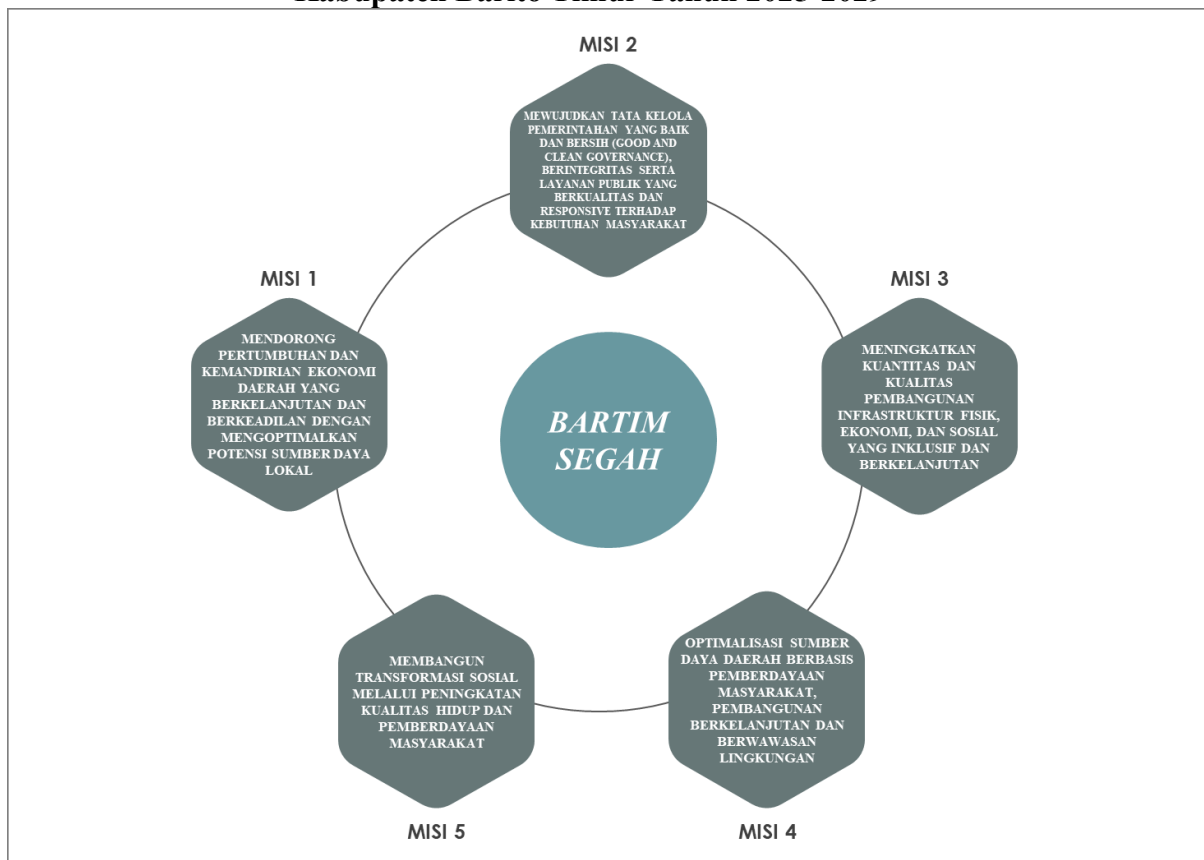
#### **5. Membangun transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat.**

Untuk membangun transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat, maka perlunya memastikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mendorong kemandirian ekonomi dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pengembangan usaha lokal. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan pembangunan serta mempromosikan inklusifitas dan kebersamaan. Menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan meningkatkan akses terhadap pekerjaan, layanan dasar, dan program perlindungan sosial.

Dengan demikian visi "*Mewujudkan Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah*" (*BARTIM SEGAH*), dengan melaksanakan misi pembangunan Kabupaten Barito Timur, (Misi 1) Mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal; (Misi 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), berintegritas serta layanan publik yang berkualitas dan *responsive* terhadap kebutuhan masyarakat; (Misi 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan; (Misi 4) Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan; (Misi 5) Membangun transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat.

**Gambar 3.1. Keterkaitan Antara Visi Dengan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029**



Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2025.

Sebagai bentuk sinkronisasi setiap kebijakan pembangunan daerah, maka perlu adanya kesesuaian dan konsistensi antara kebijakan pembangunan Kabupaten dengan Provinsi selaku perpanjangan tangan dari Pemerintahan Pusat, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Barito Timur dengan Tahap I RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045**

| No. | Misi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029  | Tahap I RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045   |
|-----|--|--|
| 1   | <b>Misi 1:</b> Mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.  | <b>Tahap 1: Penguatan Pondasi</b><br>Transformasi Ekonomi: Mewujudkan transformasi ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan dan berdaya saing global  |
| 2   | <b>Misi 2:</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>good and clean governance</i> ), berintegritas serta layanan publik yang berkualitas dan <i>responsive</i> terhadap kebutuhan masyarakat. | <b>Tahap 1: Penguatan Pondasi</b><br>Transformasi Tata Kelola: Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan.   |
| 3   | <b>Misi 3:</b> Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.   | <b>Tahap 1: Penguatan Pondasi</b><br>Pembangunan kewilayahan yang merata dan Berkeadilan: Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan<br>Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan: Mewujudkan penyediaan infrastruktur melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan. |

| No. | Misi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029   | Tahap I RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045  |
|-----|---|---|
| 4   | <b>Misi 4:</b> Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. | <b>Tahap 1: Penguatan Pondasi</b><br>Transformasi Sosial: Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif.<br>Ketahanan sosial budaya dan ekologi: Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. |
| 5   | <b>Misi 5:</b> Membangun transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat.                          | <b>Tahap 1: Penguatan Pondasi</b><br>Transformasi Sosial: Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif.<br>Ketahanan sosial budaya dan ekologi: Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. |

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2025.

**Tabel 3.2. Keterkaitan antara Misi RPJMD Kabupaten Barito Timur dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029**

| No. | Misi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029  | Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029   |
|-----|--|---|
| 1   | <b>Misi 1:</b> Mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.  | <b>Misi 1:</b> Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal.   |
| 2   | <b>Misi 2:</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>good and clean governance</i> ), berintegritas serta layanan publik yang berkualitas dan <i>responsive</i> terhadap kebutuhan masyarakat. | <b>Misi 4:</b> Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial.<br><br><b>Misi 5:</b> Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan dan program untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.                  |
| 3   | <b>Misi 3:</b> Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.   | <b>Misi 3:</b> Membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan;   |
| 4   | <b>Misi 4:</b> Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.  | <b>Misi 2:</b> Pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui Pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadatn sumber daya alam lokal.<br><br><b>Misi 5:</b> Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan dan program untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. |
| 5   | <b>Misi 5:</b> Membangun transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat.   | <b>Misi 2:</b> Pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui Pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadatn sumber daya alam lokal.<br><br><b>Misi 5:</b> Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan dan program untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. |

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2025.

**Tabel 3.3. Keterkaitan antara RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, dan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029**

| No. | RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029   | RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029   | RPJMN Tahun 2025-2029   |
|-----|--|--|---|
| 1   | <b>Misi 1:</b> Mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.  | <b>Misi 1:</b> Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal.  | <b>Misi 2:</b> Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.<br><br><b>Misi 5:</b> Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.<br><br><b>Misi 6:</b> Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. |
| 2   | <b>Misi 2:</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>good and clean governance</i> ), berintegritas serta layanan publik yang berkualitas dan <i>responsive</i> terhadap kebutuhan masyarakat. | <b>Misi 4:</b> Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial.<br><br><b>Misi 5:</b> Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan dan program untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. | <b>Misi 7:</b> Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.   |
| 3   | <b>Misi 3:</b> Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.   | <b>Misi 3:</b> Membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan;  | <b>Misi 3:</b> Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.  |
| 4   | <b>Misi 4:</b> Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.  | <b>Misi 2:</b> Pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui Pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadartn sumber daya alam lokal.<br><br><b>Misi 5:</b> Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan dan program untuk                    | <b>Misi 2:</b> Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.  |

| No. | RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029   | RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029  | RPJMN Tahun 2025-2029   |
|-----|--|---|---|
|     |  | mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.  |   |
| 5   | <b>Misi 5:</b> Membangun transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat. | <p><b>Misi 2:</b> Pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui Pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadartn sumber daya alam lokal.</p> <p><b>Misi 5:</b> Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan dan program untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.</p> | <p><b>Misi 1:</b> Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).</p> <p><b>Misi 4:</b> Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.</p> <p><b>Misi 8:</b> Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</p> |

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2025.

Selanjutnya tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan capaian hasil akhir dalam jangka waktu tertentu. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Timur. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Barito Timur dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Timur, diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 3.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029**

| Visi/Misi   | Tujuan   | Sasaran  | Indikator  | Target Tahun                             |       |        |        |        |       | Ket.  |  |
|---|--|--|--|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--|
|   |  |  |  | 2025                                     | 2026  | 2027   | 2028   | 2029   | 2030  |       |  |
| (1)   | (2)  | (3)  | (4)  | (5)                                      | (6)   | (7)    | (8)    | (9)    | (10)  | (11)  |  |
| <p><b>Visi:</b><br/>"Mewujudkan Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah" (BARTIM SEGAH)</p> <p><b>Misi:</b><br/>1. Mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.<br/>2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>), berintegritas serta layanan publik yang berkualitas</p> | Meningkatkan Pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal  |  | <b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)</b>  | 5,45                                     | 4,50  | 4,75   | 5,00   | 5,25   | 5,56  |       |  |
|   |  | Meningkatnya kontribusi sektor unggulan, produktivitas dan nilai tambah produk lokal | PDRB per Kapita  | 92,96                                    | 97,76 | 100,08 | 130,57 | 150,62 | 170   |       |  |
|   |  |  | Kontribusi PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan/Penggalian) | 1.00                                     | 1.20  | 1.50   | 2.00   | 2.00   | 3.00  |       |  |
|   |  |  | Indeks Kapabilitas Inovasi   | 3.63                                     | 3.78  | 3.93   | 4,08   | 4.23   | 4.38  |       |  |
|   |  |  |  | <b>Indeks Kemandirian Ekonomi Daerah</b> | 65.00 | 67.00  | 70.00  | 73.00  | 75.00 | 75.00 |  |
|   |  | Meningkatnya jumlah dan skala Usaha Mikro yang mandiri dan berdaya saing             | Persentase Jumlah Usaha Kecil dan Menengah   | 15.20                                    | 15.45 | 15.70  | 15.95  | 16.20  | 16.45 |       |  |
|   |  |  | Persentase Jumlah Industri Kecil dan Menengah  | 2.00                                     | 2.15  | 2.30   | 2.45   | 2.60   | 2.75  |       |  |
|   |  | Meningkatnya jumlah lapangan kerja dari sektor-sektor ekonomi lokal                  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)   | 3.04                                     | 2.82  | 2.60   | 2.38   | 2.16   | 1.94  |       |  |
|   |  |  | Rasio Kewirausahaan  | 3.50                                     | 4.00  | 4.50   | 5.00   | 5.50   | 6.00  |       |  |
|   |  | Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan dan Inklusif                       |  | <b>Indeks Pembangunan Daerah</b>         | 0.705 | 0.715  | 0.725  | 0.735  | 0.745 | 0.755 |  |
|   | Meningkatnya akses kelompok rentan (perempuan, pemuda, difabel) terhadap peluang ekonomi |  | Persentase Perempuan, Pemuda, dan Difabel yang Bekerja                                     | 55.00                                    | 60.00 | 65.00  | 70.00  | 75.00  | 80.00 |       |  |
|   | Menurunnya kesenjangan pendapatan antar wilayah dan kelompok masyarakat                  |  | Indeks Gini  | 0.31                                     | 0.309 | 0.307  | 0.305  | 0.299  | 0.297 |       |  |

| Visi/Misi  | Tujuan  | Sasaran   | Indikator   | Target Tahun       |           |           |           |           |           | Ket. |
|--|---|---|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|  |   |   |   | 2025               | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |      |
| 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. |   | Meningkatnya kesejahteraan dan daya beli masyarakat di seluruh lapisan                            | Pengeluaran Per Kapita  | 1.558.000          | 1.600.000 | 1.655.000 | 1.700.000 | 1.755.000 | 1.800.000 |      |
|  | Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan dan Memperkuat Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan |   | <b>Rata-Rata Wilayah Monitoring Center for Prevention (MCP)</b>   | 72,56              | 72,95     | 73,55     | 74,15     | 74,74     | 75,05     |      |
| 4. Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.    |   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah             | Nilai Maturitas SPIP  | 3,2                | 3,31      | 3,38      | 3,42      | 3,50      | 3,58      |      |
|  |   |   | Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | B                  | B         | B         | B         | A         | A         |      |
|  |   |   | Indeks Reformasi Birokrasi  | 65                 | 67,00     | 68,00     | 69,00     | 70,25     | 70,25     |      |
|  |   |   | Persentase Percepatan Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi        | 75,00              | 80,00     | 85,00     | 90,00     | 93,00     | 95,00     |      |
|  |   |   | <b>Indeks Pelayanan Publik</b>                                    | 78,00              | 80,00     | 82,00     | 84,00     | 86,00     | 88,00     |      |
| 5. Membangun transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat.                             | Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Responsif dan Inklusif  | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang terotomatisasi dan berbasis digital | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                  | 82,45              | 82,75     | 83,05     | 83,35     | 83,70     | 83,90     |      |
|  |   |   | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                    | 2,65               | 2,70      | 2,75      | 2,78      | 2,81      | 2,85      |      |
|  |   |   | <b>Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur</b>                      | 60,00              | 60,10     | 60,20     | 60,30     | 60,40     | 60,50     |      |
|  | Meningkatnya Ketersediaan dan Aksesibilitas Infrastruktur Fisik yang Memadai  | Meningkatnya konektivitas Wilayah (aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil)                      | Tingkat Kemantapan Jalan  | 67,23              | 67,73     | 68,23     | 68,73     | 69,23     | 70,00     |      |
|  |   |   | Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air | Kapasitas Air Baku | 2,00      | 2,15      | 2,30      | 2,35      | 2,50      | 2,65 |
|  |   | Meningkatnya akses listrik dan internet di  | Rasio Elektrifikasi (Rumah Tangga Pengguna Listrik)               | 99,03              | 99,15     | 99,50     | 99,75     | 99,80     | 100       |      |

| Visi/Misi | Tujuan  | Sasaran  | Indikator   | Target Tahun                                    |            |            |            |            |            | Ket. |
|-----------|---|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|
|           |   |  |   | 2025  | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |      |
|           |   | daerah terpencil dan tertinggal  | Persentase Layanan Internet   | 60.00   | 65.00      | 70.00      | 75.00      | 80.00      | 85.00      |      |
|           | Mewujudkan kualitas kesehatan yang inklusif, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah |  | <b>Usia Harapan Hidup (UHH)</b>   | 72,04   | 72,80      | 73,92      | 74,00      | 74,42      | 74,50      |      |
|           |   | Meningkatnya jumlah dan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan   | Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna  | 50.00   | 50.00      | 60.00      | 65.00      | 70.00      | 75.00      |      |
|           |   |  | Rasio Tenaga Kesehatan (Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan Per 1.000 Penduduk) | 6.85  | 7.05       | 7.25       | 7.45       | 7,65       | 7.85       |      |
|           |   | Meningkatnya perluasan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui penguatan sistem rujukan dan optimalisasi teknologi kesehatan | Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)   | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
|           |   |  | Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH)  | 12  | 10         | 8          | 6          | 4          | 2          |      |
|           |   |  | Prevalensi Stunting   | 21.70   | 18.00      | 16.00      | 14.00      | 12.00      | 10.00      |      |
|           |   | Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Daerah Secara Berkelanjutan   |   | <b>Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)</b> | 1.3        | 1.4        | 1.5        | 1.6        | 1.7        | 1.8  |
|           | Meningkatnya efisiensi penggunaan SDA dengan teknologi ramah lingkungan                                       |  | Indeks Ekonomi Hijau  | 40.00   | 45.00      | 50.00      | 55.00      | 60.00      | 65.00      |      |
|           |   |  | Penurunan Intensitas Emisi GRK  | 582.148,47                                      | 751.736,59 | 751.736,59 | 858.694,20 | 962.234,73 | 962.234,73 |      |
|           | Meningkatkan Pembangunan Berbasis Kelestarian Lingkungan  |  | <b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>  | 76,34   | 76,42      | 76,51      | 76,58      | 76,63      | 76,80      |      |
|           |   | Pembangunan Berwawasan Lingkungan  | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati  | 0.60  | 0.61       | 0.62       | 0.63       | 0.64       | 0.65       |      |
|           |   |  | Indeks Risiko Bencana   | 106,50  | 100,53     | 99,26      | 98,83      | 97,98      | 92,04      |      |
|           | Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui pendidikan  |  | <b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>   | 74,11   | 74,45      | 75,05      | 75,69      | 76,08      | 76,58      |      |
|           |   |  | Rata-Rata Lama Sekolah  | 9,21  | 9,21       | 9,22       | 9,22       | 9,23       | 9,25       |      |
|           |   |  | Harapan Lama Sekolah  | 12,77   | 12,90      | 13,07      | 13,21      | 13,37      | 13,40      |      |

| Visi/Misi | Tujuan   | Sasaran  | Indikator                                       | Target Tahun |       |       |       |       |       | Ket. |
|-----------|--|--|---|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|           |  |  |   | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
|           | berkualitas, inklusif, dan berkarakter                                     | Meningkatnya angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan   | Indeks Literasi Digital                         | 60           | 62    | 64    | 66    | 70    | 72    |      |
|           |  |  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat          | 74,27        | 75,62 | 77,92 | 79,66 | 80,97 | 81,72 |      |
|           | Terbangunnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah | Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat | <b>Indeks Harmoni Indonesia</b>                 | 0,00         | 5,25  | 5,50  | 5,75  | 6,00  | 6,00  |      |
|           |  |  | Persentase Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan | 13.00        | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 22.00 |      |
|           |  |  | Indeks Pembangunan Pemuda                       | 51.00        | 52.00 | 53.00 | 54.00 | 55.00 | 56.00 |      |
|           |  |  | Indek Pembangunan Gender (IPG)                  | 89.04        | 89.51 | 90.53 | 90.78 | 91,00 | 91.61 |      |
|           | Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial                               |  | <b>Tingkat Kemiskinan</b>                       | 5,08         | 4,92  | 4,81  | 4,68  | 4,59  | 4,5   |      |
|           |  |  | Jumlah Angka Kemiskinan                         | 8.740        | 8.590 | 8.380 | 8.130 | 7.800 | 7.360 |      |
|           |  | Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat                            | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)       | 74,79        | 75,56 | 75,82 | 75,96 | 76,00 | 76,47 |      |
|           |  |  | Kepesertaan JKN (Jumlah UHC)                    | Persen       | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |      |
|           |  |  | Aset Perbankan Syariah/PDRB (%)                 | Persen       | 1,18  | 1,28  | 1,35  | 1,4   | 1,42  |      |

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2025.

### 3.4 Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas Daerah

Untuk mendukung visi "*Mewujudkan Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah*" (*BARTIM SEGAH*), maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Barito Timur melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun. Selain itu strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan kebijakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan, untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### Strategi

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi dan misi pembangunan. Selain itu strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk tercapainya visi dan misi pembangunan. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap pencapaian sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu.

Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai prioritas Pembangunan jangka Menengah. Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Timur antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;

3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi;
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Timur tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.5. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029**

| Visi/Misi  | Tujuan  | Sasaran  | Strategi   |
|--|---|--|--|
| <b>"Mewujudkan Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah" (BARTIM SEGAH)</b> |   |  |  |
| <b>1</b>   | <b>Mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.</b> | Meningkatnya kontribusi sektor unggulan, produktivitas dan nilai tambah produk lokal | Mendorong peningkatan produksi dan kontribusi PDRB sektor unggulan   |
|  |   |  | Mendorong diversifikasi produk lokal dengan meningkatkan kualitas dan inovasi produk   |
|  |   |  | Mengembangkan infrastruktur ekonomi yang terintegrasi dengan pusat-pusat produksi dan distribusi untuk mempermudah akses pasar bagi produk lokal |
|  |   |  | Mendorong kapanilitas inovasi daerah   |
|  |   | Meningkatnya jumlah dan skala Usaha Mikro yang mandiri dan berdaya saing             | Memperluas akses usaha kecil dan menengah terhadap permodalan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan   |
|  |   |  | Meningkatkan kapasitas usaha kecil dan menengah melalui pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap teknologi                                    |
|  |   | Meningkatnya jumlah lapangan kerja dari sektor-sektor ekonomi lokal                  | Memberikan pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan akses terhadap modal bagi kelompok masyarakat sektor ekonomi lokal                    |
|  |   |  | Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat   |

| Visi/Misi | Tujuan   | Sasaran  | Strategi  |
|-----------|--|--|---|
|           |  |  | melalui pelatihan wirausaha, akses permodalan mikro   |
|           | Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan dan Inklusif   | Meningkatnya akses kelompok rentan (perempuan, pemuda, difabel) terhadap peluang ekonomi | Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan dan masyarakat di daerah terpencil  |
|           |  | Menurunnya kesenjangan pendapatan antar wilayah dan kelompok masyarakat                  | Mendorong pemerataan distribusi manfaat ekonomi yang adil melalui kebijakan afirmatif dan pemberian akses yang setara terhadap sumber daya  |
|           |  |  | Mengembangkan infrastruktur ekonomi yang terintegrasi dengan pusat-pusat produksi dan distribusi untuk mempermudah akses pasar bagi produk lokal  |
|           |  |  | Membangun dan meningkatkan infrastruktur pendukung, seperti pasar, pusat logistik, akses transportasi, dan fasilitas penyimpanan untuk mendukung aktivitas ekonomi lokal                      |
|           |  |  | Revitalisasi Pasar Tradisional melalui renovasi pasar tradisional menjadi modern dan terorganisir untuk mendukung kegiatan perdagangan yang lebih efisien dan menarik lebih banyak pengunjung |
|           |  | Meningkatnya kesejahteraan dan daya beli masyarakat di seluruh lapisan                   | Menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan peluang merata bagi setiap individu  |
|           |  |  | Meningkatkan peluang lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat   |
|           |  |  | Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan wirausaha, akses permodalan mikro, dan pendampingan bisnis   |
| <b>2</b>  | <b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>), berintegritas serta layanan publik yang berkualitas dan <i>responsive</i> terhadap kebutuhan masyarakat.</b> |  |   |
|           | Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan dan Memperkuat Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah    | Membangun budaya kerja yang berintegritas dan anti-korupsi di seluruh unit kerja pemerintah   |
|           |  |  | Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal melalui peningkatan kapasitas lembaga pengawas  |
|           |  |  | Mengembangkan mekanisme pelaporan dan pengaduan publik yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat   |

| Visi/Misi | Tujuan  | Sasaran   | Strategi   |
|-----------|---|---|--|
|           |   |   | <p>Meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan program pengembangan kompetensi khusus</p> <p>Mengimplementasikan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas dan tegas untuk mendorong perilaku positif dan menindak pelanggaran</p> <p>Memperkuat sistem penegakan hukum terhadap kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan.</p>   |
|           | Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Responsif dan Inklusif  | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang terotomatisasi dan berbasis digital | <p>Mempercepat digitalisasi layanan publik dengan mengembangkan platform layanan digital yang terpadu dan mudah diakses</p> <p>Menerapkan prinsip-prinsip desain layanan yang responsif terhadap kebutuhan pengguna, termasuk pelayanan untuk kelompok rentan</p> <p>Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah</p> <p>Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik untuk memastikan akses masyarakat terhadap data dan informasi pemerintahan</p> |
| <b>3</b>  | <b>Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan</b> |   |  |
|           | Meningkatkan Ketersediaan dan Aksesibilitas Infrastruktur Fisik yang Memadai  | Meningkatnya konektivitas Wilayah (aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil)                      | Membangun infrastruktur fisik yang strategis untuk mendukung mobilitas dan konektivitas antarwilayah termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi  |
|           |   | Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air                                 | Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air melalui sistem monitoring yang efektif   |
|           |   | Meningkatnya akses listrik dan internet di daerah terpencil dan tertinggal                        | Mendorong digitalisasi dengan membangun infrastruktur listrik dan telekomunikasi jaringan internet di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan tertinggal  |
|           | Mewujudkan kualitas kesehatan yang inklusif, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah                   | Meningkatnya jumlah dan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan              | <p>Meningkatkan jumlah dan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>Mendorong keterpenuhan rasio tenaga kesehatan</p>  |
|           |   | Meningkatnya perluasan  | Memperluas akses masyarakat terhadap infrastruktur sosial yang berkualitas, seperti  |

| Visi/Misi | Tujuan   | Sasaran   | Strategi  |
|-----------|--|---|---|
|           |  | layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui penguatan sistem rujukan dan optimalisasi teknologi kesehatan | puskesmas, dan rumah sakit dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan<br>Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan di seluruh wilayah termasuk daerah terpencil<br>Mendorong penguatan digitalisasi layanan kesehatan   |
| <b>4</b>  | <b>Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</b> |   |   |
|           | Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Daerah Secara Berkelanjutan   | Meningkatnya efisiensi penggunaan SDA dengan teknologi ramah lingkungan   | Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur termasuk penggunaan material ramah lingkungan dan efisiensi energi<br>Memanfaatkan teknologi hijau dan inovasi dalam pengelolaan infrastruktur untuk mengurangi dampak lingkungan<br>Mendorong adopsi teknologi inovatif yang mendukung pengelolaan sumber daya yang efisien dan ramah lingkungan termasuk teknologi energi terbarukan, pertanian presisi, dan pengelolaan sampah digital<br>Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas program dan kebijakan, dengan indikator kinerja yang jelas terkait keberlanjutan dan dampak lingkungan |
|           | Meningkatkan Pembangunan Berbasis Kelestarian Lingkungan   | Pembangunan Berwawasan Lingkungan   | Membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan komunitas lokal, untuk mendukung program pemberdayaan dan konservasi<br>Mengembangkan model kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk pengelolaan sumber daya lokal yang berkelanjutan<br>Mengembangkan kebijakan tata ruang yang mempertimbangkan keberlanjutan dan keseimbangan ekologi<br>Menyelenggarakan program peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya berkelanjutan<br>Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye   |

| Visi/Misi | Tujuan  | Sasaran  | Strategi  |
|-----------|---|--|---|
|           |   |  | publik, pendidikan lingkungan, dan pemberian penghargaan kepada inisiatif hijau yang inovatif<br>Melibatkan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas   |
| <b>5</b>  | <b>Membangun transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat</b>         |  |   |
|           | Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkarakter | Meningkatnya angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan   | Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan di seluruh wilayah termasuk daerah terpencil<br>Mengembangkan program-program inovatif seperti pendidikan jarak jauh dan layanan pendidikan berbasis komunitas   |
|           | Terbangunnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah                                  | Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat | Mendorong partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah<br>Mendorong partisipasi dan kontribusi pemuda dalam pembangunan daerah<br>Meningkatkan kesadaran dan aksi masyarakat terhadap isu-isu lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial<br>Meningkatkan program pemberdayaan gender |
|           | Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial  | Menurunnya angka kemiskinan di seluruh wilayah   | Membangun dan memperbaiki infrastruktur sosial seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan pusat layanan masyarakat<br>Menerapkan prinsip-prinsip inklusi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur sosial untuk memastikan akses yang merata   |
|           |   | Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat                            | Mengembangkan program-program perlindungan sosial yang komprehensif untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap guncangan ekonomi<br>Memperkuat jaring pengaman sosial<br>Memperluas cakupan dan kualitas program bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai, beasiswa, dan asuransi kesehatan              |

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2025.

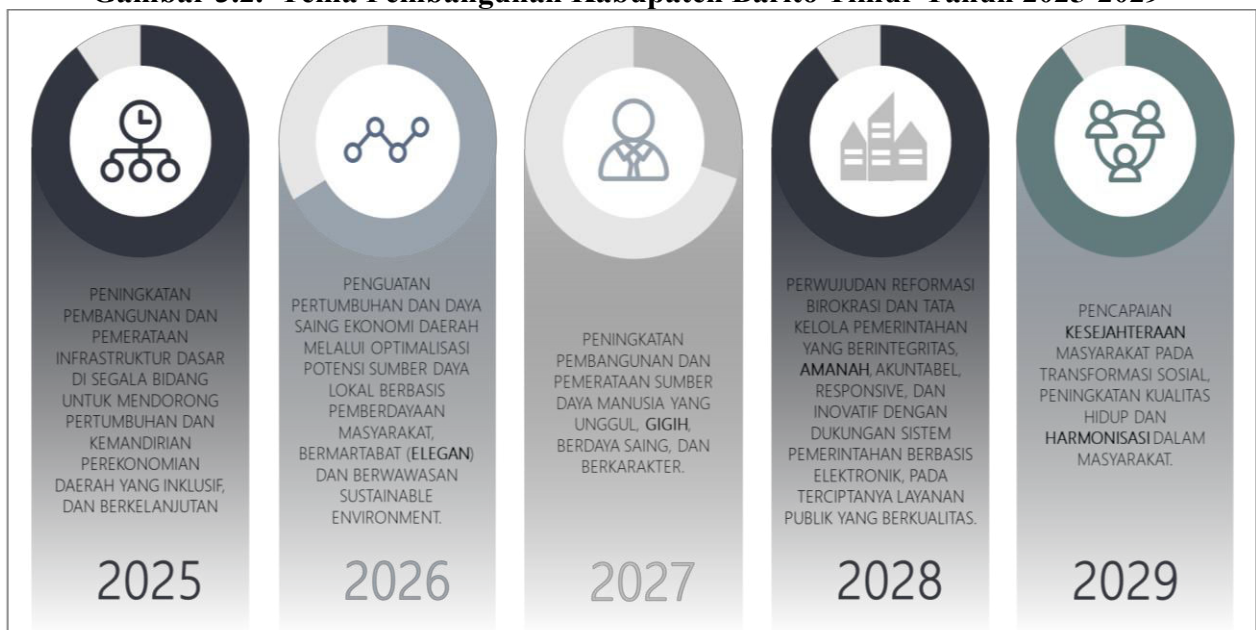
## Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Dalam rangka pencapaian visi-misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur tahun 2025-2029 perlu disusun rumusan arahan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari strategi pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD. Disamping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh OPD yang terlibat di dalamnya.

Rumusan arah kebijakan ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan pada fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi-misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 3.2. Tema Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029**



Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2025.

Tahapan dan prioritas pada penekanan fokus atau tema pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam dalam rangka mencapai visi-misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun. Arah kebijakan ini merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun.

**Tahun 2025:**

*“Peningkatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar di segala bidang untuk mendorong pertumbuhan dan kemandirian perekonomian daerah yang inklusif, dan berkelanjutan”.*

Tema pembangunan pada tahun 2025 menjadi pondasi awal bagi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2025-2029. Dalam melaksanakan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2025, maka peningkatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar di segala bidang menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan dan kemandirian perekonomian daerah yang inklusif, dan berkelanjutan. Dalam mencapai kebijakan tema pembangunan tahun 2025, maka perlunya membangun dan memperbaiki infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, fasilitas air bersih, listrik, dan transportasi umum, untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Membangun infrastruktur ekonomi, termasuk pasar, kawasan industri, pusat logistik, dan fasilitas pendukung usaha, serta meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur sosial, guna mendorong pertumbuhan dan kemandirian perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Tema pembangunan pada tahun 2025 menjadi pondasi awal dalam mendukung tema pembangunan pada tahun selanjutnya.

**Tahun 2026:**

*“Penguatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sumber daya lokal berbasis pemberdayaan masyarakat, bermartabat (**elegan**) dan berwawasan *sustainable environment*”.*

Tema pembangunan pada tahun 2026 merupakan tahap lanjutan dari pelaksanaan tema pembangunan di tahun sebelumnya. Penguatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah sangat penting dilakukan terutama melalui optimalisasi potensi sumber daya lokal berbasis pemberdayaan masyarakat, yang bermartabat (**elegan**) dan berwawasan *sustainable environment*. Dalam mencapai kebijakan tema pembangunan tahun 2026, maka perlu adanya penguatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM serta pelaku ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung kemandirian ekonomi daerah. Memperluas akses terhadap sumber daya, peluang usaha, dan pasar bagi seluruh masyarakat. Mendorong diversifikasi produk lokal dengan meningkatkan kualitas dan inovasi produk. Mengembangkan klaster ekonomi berbasis sumber

daya lokal, seperti klaster pertanian organik, perikanan terpadu, dan pariwisata berbasis budaya lokal.

Pentingnya meningkatkan kapasitas usaha mikro melalui pemberdayaan/pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap teknologi. Memperluas akses usaha mikro terhadap permodalan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan. Meningkatkan akses digital dan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran dan operasional usaha lokal, serta mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan dan masyarakat di daerah terpencil, dan memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil melalui kebijakan afirmatif dan pemberian akses yang setara terhadap sumber daya. Memaksimalkan penggunaan SDA dan buatan dengan pendekatan yang ramah lingkungan untuk keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mengembangkan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal secara mandiri dan berkelanjutan, dan serta melaksanakan pembangunan yang mempertimbangkan aspek konservasi, perlindungan lingkungan, dan adaptasi terhadap perubahan.

**Tahun 2027:**

*“Peningkatan pembangunan dan pemerataan sumber daya manusia yang unggul, **gigih**, berdaya saing, dan berkarakter”.*

Tema pembangunan pada tahun 2027 merupakan tahap lanjutan dari pelaksanaan tema pembangunan dalam 2 (dua) tahun sebelumnya. Meningkatkan pembangunan dan pemerataan sumber daya manusia sangat penting dilakukan, guna menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, gigih, berdaya saing, dan berkarakter. Dimana ini menjadi modal utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah dan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai kebijakan tema pembangunan tahun 2027, maka perlu adanya peningkatan akses dan kualitas layanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya, untuk menciptakan masyarakat yang unggul, gigih, berdaya saing, dan berkarakter.

**Tahun 2028:**

*“Perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, **amanah**, akuntabel, responsive, dan inovatif dengan dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pada terciptanya layanan publik yang berkualitas”.*

Tema pembangunan pada tahun 2028 merupakan tahap dimana pentingnya menciptakan layanan publik yang berkualitas sebagai perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, setelah pemenuhan peningkatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar, penguatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah, dan peningkatan pembangunan dan pemerataan sumber daya manusia telah dilakukan. Dalam mencapai kebijakan tema pembangunan tahun 2028, maka perlunya membangun tata kelola yang akuntabel dan transparan dengan memperkuat sistem pengawasan, pelaporan, dan akuntabilitas publik serta memastikan pengawasan internal dan eksternal yang efektif serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan untuk perbaikan layanan dan kebijakan. Meningkatkan integritas dan

profesionalisme ASN melalui penguatan budaya kerja, etika pelayanan, dan penegakan disiplin. Meningkatkan kualitas layanan publik yang responsive dan inovatif, dan serta menyediakan layanan dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

**Tahun 2029:**

*“Pencapaian **kesejahteraan** masyarakat pada transformasi sosial, peningkatan kualitas hidup dan **harmonisasi** dalam masyarakat”.*

Tema pembangunan pada tahun 2029 menjadi tahapan akhir bagi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2025-2029. Dalam melaksanakan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2029, maka perlu adanya akses yang lebih baik bagi masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (akses pendidikan, kesehatan, penurunan angka stunting dan peningkatan status gizi masyarakat, peningkatan angka harapan hidup dan penurunan angka kematian ibu & anak, peningkatan angka melek huruf dan partisipasi sekolah pada semua jenjang Pendidikan, dst.). Mendorong kemandirian ekonomi dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pengembangan usaha lokal. Menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan meningkatkan akses terhadap pekerjaan, layanan dasar, dan program perlindungan sosial.

**Tabel 3.6. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029**

| Arah Kebijakan Pembangunan   |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
| 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| <b>Arah Kebijakan Pembangunan</b>  |      |      |      |      |
| <i>Peningkatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar di segala bidang untuk mendorong pertumbuhan dan kemandirian perekonomian daerah yang inklusif, dan berkelanjutan</i>  |      |      |      |      |
| <b>Kebijakan Umum</b>  |      |      |      |      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung antar Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan kawasan pemukiman, yang inklusif dan berkelanjutan;</li> <li>2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan infrastruktur dasar, yang mendukung akselerasi pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah;</li> <li>3. Percepatan penyediaan infrastruktur untuk menunjang pengembangan jaringan kelistrikan dan energi lainnya;</li> <li>4. Percepatan perluasan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah;</li> <li>5. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang menunjang pelayanan pendidikan dan kesehatan;</li> <li>6. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pariwisata lokal yang berkelanjutan;</li> <li>7. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur tata kota, pasar, dan ruang terbuka hijau yang inklusif dan berkelanjutan.</li> </ol> |      |      |      |      |
| <b>Arah Kebijakan Pembangunan</b>  |      |      |      |      |
| <i>Penguatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sumber daya lokal berbasis pemberdayaan masyarakat, bermartabat (<b>elegan</b>) dan berwawasan sustainable environment</i>   |      |      |      |      |
| <b>Kebijakan Umum</b>  |      |      |      |      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui penguatan usaha perdagangan, koperasi, dan UMKM, serta industri yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal;</li> <li>2. Meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan daya saing komoditas pertanian yang berkelanjutan;</li> <li>3. Meningkatkan daya saing komoditas perikanan yang berkelanjutan;</li> <li>4. Meningkatkan daya saing komoditas perkebunan yang berkelanjutan;</li> <li>5. Meningkatkan investasi dan kemudahan iklim berusaha yang berkeadilan yang dapat memberikan kesempatan kerja masyarakat lokal;</li> </ol>  |      |      |      |      |

| <b>Arah Kebijakan Pembangunan</b>   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2025</b>   | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
| 6. Mengembangkan pelatihan kerja melalui lembaga/balai latihan kerja/produktivitas, baik milik pemerintah maupun swasta;  |             |             |             |             |
| 7. Meningkatkan partisipasi angka kerja pada perusahaan swasta maupun BUMD.   |             |             |             |             |
| <b>Arah Kebijakan Pembangunan</b>   |             |             |             |             |
| <i>Peningkatan pembangunan dan pemerataan sumber daya manusia yang unggul, <b>gigih</b>, berdaya saing, dan berkarakter</i>   |             |             |             |             |
| <b>Kebijakan Umum</b>   |             |             |             |             |
| 1. Meningkatkan pembangunan dan pemerataan sumber daya manusia;   |             |             |             |             |
| 2. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olahraga;   |             |             |             |             |
| 3. Meningkatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, untuk menciptakan masyarakat yang unggul, <b>gigih</b> , berdaya saing, dan berkarakter.   |             |             |             |             |
| <b>Arah Kebijakan Pembangunan</b>   |             |             |             |             |
| <i>Perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, <b>amanah</b>, akuntabel, responsive, dan inovatif dengan dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pada terciptanya layanan publik yang berkualitas</i> |             |             |             |             |
| <b>Kebijakan Umum</b>   |             |             |             |             |
| 1. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsive, dan inovatif;  |             |             |             |             |
| 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;   |             |             |             |             |
| 3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur sampai pada tingkat paling bawah, guna memperkuat profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas sumber daya aparatur pemerintah;   |             |             |             |             |
| 4. Meningkatkan pelayanan perijinan terpadu yang mudah, cepat dan terukur, guna menghadirkan kemudahan iklim berusaha yang baik;  |             |             |             |             |
| 5. Memperkuat reformasi birokrasi, sistem tata kelola keuangan dan aset daerah;   |             |             |             |             |
| 6. Memperkuat kebijakan efisiensi dan optimalisasi pencegahan korupsi;  |             |             |             |             |
| 7. Meningkatkan tambahan penghasilan/tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara.  |             |             |             |             |
| <b>Arah Kebijakan Pembangunan</b>   |             |             |             |             |
| <i>Pencapaian <b>kesejahteraan</b> masyarakat pada transformasi sosial, peningkatan kualitas hidup dan <b>harmonisasi</b> dalam masyarakat</i>  |             |             |             |             |
| <b>Kebijakan Umum</b>   |             |             |             |             |
| 1. Meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar;   |             |             |             |             |
| 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;   |             |             |             |             |
| 3. Memperkuat dukungan pada sektor kewirausahaan, dan pengembangan ekonomi kreatif melalui bantuan modal dan <i>equipment</i> secara langsung;  |             |             |             |             |
| 4. Memperkuat program dan kegiatan <i>impactful</i> terhadap kesejahteraan masyarakat, yang berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan;   |             |             |             |             |
| 5. Memperkuat penyelarasan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.  |             |             |             |             |
| 6. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olahraga.   |             |             |             |             |

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2025

### **Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis**

Pengembangan wilayah pada kawasan strategis ini merupakan salah satu bagian pembangunan yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menegaskan perencanaan pembangunan selaras dengan arahan perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah. Wilayah Kabupaten Barito Timur berada pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Maka dari itu, perlu menyelaraskan arahan perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Barito Timur dengan perencanaan pembangunan wilayah Kawasan strategis Provinsi Kalimantan Tengah yang dijabarkan sebagai berikut.

## Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Tengah

Pembangunan kewilayahan menjadi fokus pembangunan/prioritas dengan mengembangkan potensi daerah berdasarkan komoditi ataupun keunggulan daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Pembangunan kewilayahan ini ditinjau berdasarkan dokumen perencanaan pada level Nasional, Provinsi, maupun Kota/Kabupaten, tinjauan-tinjauan dan data pendukung lainnya sebagai bagian dari proses pembangunan. Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (spasial) diperlukan untuk menentukan daerah potensial untuk dikembangkan lebih lanjut.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua, dengan luas wilayah mencapai 153.564 km<sup>2</sup>. Pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah menjadi 14 Kabupaten/Kota. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu Provinsi dengan beragam potensi sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan. Potensi utama dari Provinsi Kalimantan Tengah adalah sekitar 80% dari luas lahan yang tertutup hutan hujan tropis (124.118, 49 km<sup>2</sup>). Dengan berbagai macam vegetasi tropis dan kondisi geografis yang strategis, merupakan potensi bagi daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, komoditi pertanian dan pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah masih cukup stabil, sehingga dapat dikembangkan menjadi industri hulu.

## Arah Kebijakan Pengembangan Potensi Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah

Pengembangan potensi di Kalimantan Tengah dilakukan melalui pembagian wilayah atau zonasi. Pembagian zonasi kawasan ini disusun dalam rumusan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibagi menjadi: Zona 1 (Barat), Zona 2 (Tengah), dan Zona 3 (Timur), dengan rincian potensi dan pengembangannya sebagai berikut:

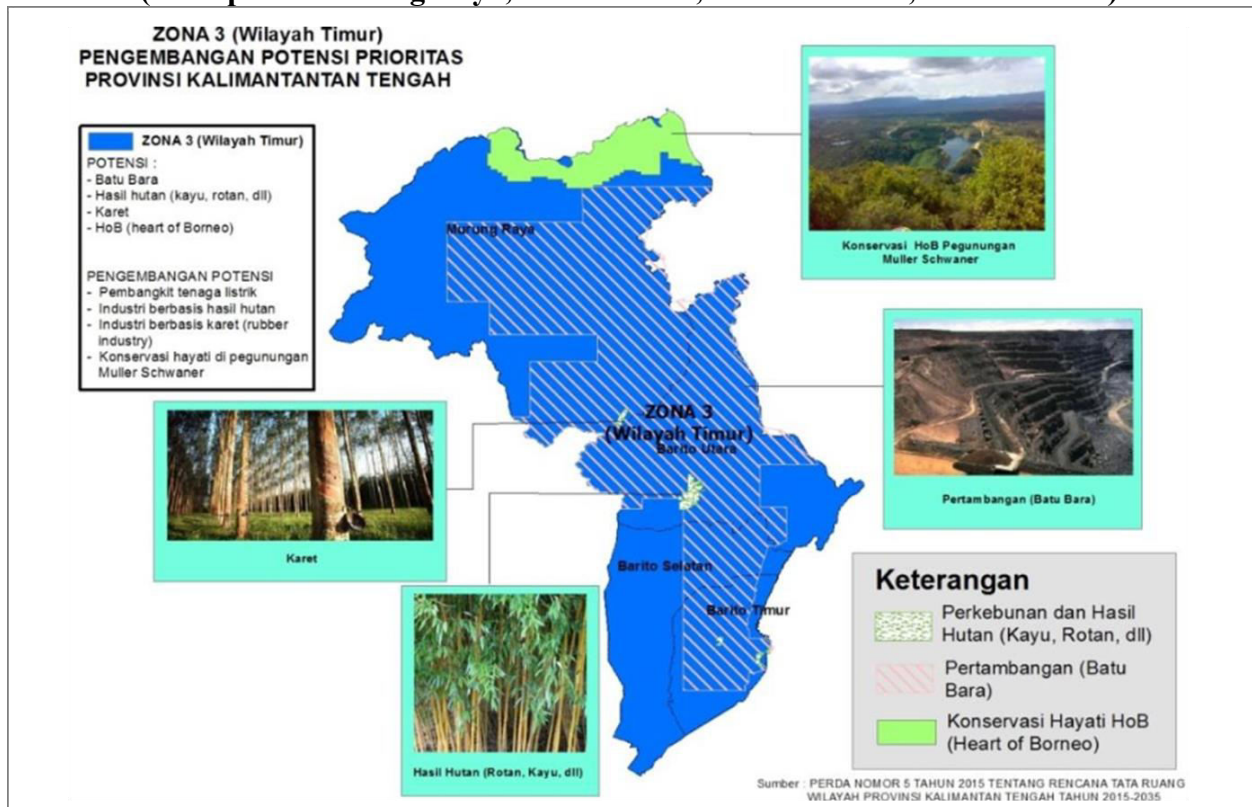
**Tabel 3.7. Pembagian 3 (Tiga) Zona Kawasan Strategis di Provinsi Kalimantan Tengah**

| No. | Zona            | Kabupaten/Kota  | Potensi   | Pengembangan Potensi  |
|-----|-----------------|---|---|---|
| 1   | Zona 1 (Barat)  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sukamara</li><li>• Lamandau</li><li>• Kotawaringin Barat</li><li>• Seruyan</li><li>• Kotawaringin Timur</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kelapa Sawit (CPO)</li><li>• Pertambangan (baja, nikel, lumina, dll)</li><li>• Perikanan tangkap</li><li>• Pariwisata</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Industri berbasis sawit</li><li>• Industri berbasis Metal</li><li>• Industri berbasis perikanan tangkap</li><li>• Taman Nasional Tanjung Puting</li></ul> |
| 2   | Zona 2 (Tengah) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Katingan</li><li>• Gunung Mas</li><li>• Palangka Raya</li><li>• Pulang Pisau</li><li>• Kapuas</li></ul>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pertanian (tanaman pangan)</li><li>• Perikanan darat</li><li>• Pariwisata</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan kawasan argo industri Batanjung di Kapuas)</li><li>• Budidaya perikanan sungai</li><li>• Taman Nasional Sebangau</li></ul>                   |
| 3   | Zona 3 (Timur)  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Murung Raya</li><li>• Barito Utara</li><li>• Barito Selatan</li><li>• Barito Timur</li></ul>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Batubara</li><li>• Hasil hutan (kayu, rotan, dll)</li><li>• Karet</li><li>• HOB (<i>Heart of Borneo</i>)</li></ul>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangkit tenaga listrik</li><li>• Industri berbasis hasil hutan</li><li>• Industri berbasis karet (rubber industry)</li></ul>                           |

| No. | Zona | Kabupaten/Kota | Potensi | Pengembangan Potensi   |
|-----|------|----------------|---------|--|
|     |      |                |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Konservasi Hayati di pegunungan Muller Schwane</li> </ul> |

Sumber: Diolah dari Data RTRW Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2035, 2025.

**Gambar 3.3. Pengembangan Potensi pada Zona 3 (Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur)**



Sumber: Diolah dari Data RTRW Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2035, 2025.

Secara spasial, pengembangan potensi prioritas dan pengembangan potensi masing-masing zona di Provinsi Kalimantan Tengah melalui pembagian wilayah atau zonasi. Adapun Pengembangan Potensi pada Zona 3 (Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur) dapat dilihat sebagaimana pada gambar diatas.

**Tabel 3.8. Indikator Pembangunan Makro Klaster Buntok – Kabupaten Barito Timur**

| No. | Indikator Pembangunan Makro               | Baseline 2025 | Target 2029 |
|-----|---|---------------|-------------|
| 1   | PDRB per Kapita (Juta Rp)                 | 78,83         | 113,93      |
| 2   | Kemiskinan (%)                            | 5,08          | 3,88        |
| 3   | Rasio Gini (Indeks)                       | 0.31          | 0.3         |
| 4   | Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)       | 74.11         | 76,08       |
| 5   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) | 76,34         | 77,25       |
| 6   | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)              | 1,89          | 6.35        |

### Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Strategis Kabupaten Barito Timur

Kabupaten Barito Timur memiliki potensi daerah yaitu sector pertanian tanaman pangan, hortukultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan, perdagangan, transportasi dan pariwisata. Kabupaten Barito Timur memiliki beberapa potensi sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan wilayahnya. Sumberdaya tambang Barito Timur sangat melimpah. Jenis pertambangan di Kabupaten Barito

Timur salah satunya adalah pertambangan batubara. Batubara merupakan sumberdaya alam yang sifatnya tak terbaharukan. Selain barang tambang, Kabupaten Barito Timur memiliki banyak objek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi ecowisata yang berbasis budaya. Berbagai potensi tersebut Sektor perdagangan menjadi unggulan Kabupaten Barito Timur dengan komoditi utama perdagangan karet. Hampir 70 persen masyarakat menyandarkan hidupnya pada karet. Ketertarikan masyarakat terhadap karet tidak lepas dari besarnya peluang pemasaran karet. Berapapun karet yang dihasilkan pasti habis terjual karena permintaanya yang sangat tinggi. pemasaran hingga keluar daerah terbuka lebar. Bahan baku juga selalu tersedia, produksi karet cukup melimpah di Barito Timur.

**Tabel 3.9. Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Perdagangan Karet di Kabupaten Barito Timur**

| Peluang   | Tantangan  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasaran sangat terbuka karena permintaan karet tinggi;</li> <li>• Mendapat dukungan pemerintah daerah;</li> <li>• Pengiriman keluar daerah sangat terbuka;</li> <li>• Mayoritas penduduk memiliki usaha perkebunan karet.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan pasar internasional lebih untuk jenis karet sintetis bukan karet alami;</li> <li>• Sering terjadi kecurangan timbangan dari pihak pembeli karet yang merugikan masyarakat penjual karet;</li> <li>• Belum adanya asosiasi pedagang karet.</li> <li>• Harga karet terkadang terjadi penurunan signifikan;</li> <li>• Belum adanya pabrik karet lokal.</li> </ul> |
| Titik Kekuatan  | Titik Kelemahan  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasaran mudah dan lancer;</li> <li>• Bahan baku mudah diperoleh dan banyak tersedia;</li> <li>• Produksinya cukup melimpah.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas karet masih belum standar ekspor.</li> </ul>   |

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2025.

### **Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Barito Timur**

Berdasarkan kebijakan yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, bahwa kawasan strategis provinsi di Kabupaten Barito Timur terdiri atas:

- Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

### **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Barito Timur, yaitu sebagai berikut:

- Kawasan Agropolitan di Ampah Kecamatan Dusun Tengah; dan
- Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis, yaitu di Tampa Kecamatan Paku dengan luas kurang lebih 350 Ha dan Kecamatan Dusun Tengah di Desa Batu Puti dengan luas kurang lebih 150 Ha, dan Desa Talohen dengan luas kurang lebih 75 Ha;

- Kawasan Pengembangan Peternakan berupa kawasan peternakan kerbau rawa di Desa Pulau Patai, peternakan sapi di Desa Sumur (Ranch Mini Bangi) Kecamatan Dusun Timur dan di Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang.

### **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yang menjadi ciri sebagai bukti peninggalan sejarah dan/atau budaya masyarakat Kabupaten Barito Timur adalah Kawasan Adat Masyarakat Umat Hindu Kaharingan yang berupa Situs Brohong di Kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Tengah.

### **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di Kabupaten Barito Timur adalah kawasan strategis untuk pengembangan sumber daya energi PLTU (PT. Rimau Energi Mining) di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur. Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Barito Timur maka arah pengembangan wilayah strategis dijabarkan sebagai berikut.

### **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi**

Kawasan yang berpotensi strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang perlu didorong dan dikembangkan adalah:

#### **Kawasan Agropolitan Bambulung**

Penetapan kawasan Agropolitan di Bambulung Kecamatan Pematang Karau dikarenakan kawasan ini merupakan pemasok utama tanaman padi di Kabupaten Barito Timur. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Daerah adalah dimulai dari penyusunan Rencana Kawasan Strategis Agropolitan, penyusunan DED prasarana kawasan yang dikembangkan secara terpadu kawasan agropolitan hingga pelaksanaan pembangunan dan pengawasannya.

#### **Kawasan Perkotaan Tamiang Layang dan Perkotaan Ampah**

Tamiang Layang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Ampah sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) perlu ditetapkan sebagai kawasan strategis perkotaan sebagai upaya untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai prioritas pengembangan kedepan. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Daerah adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan dan RTBL dan sub kawasan yang bernilai strategis serta penyusunan masterplan perkotaan.

## Kawasan Minapolitan

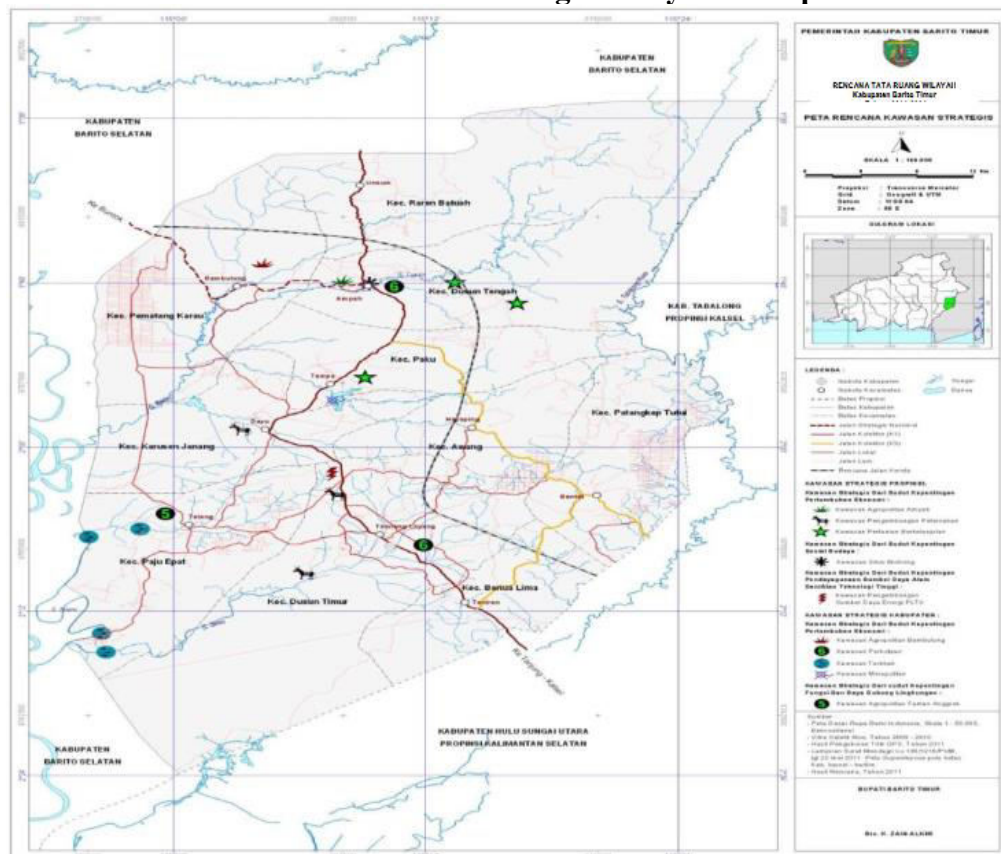
Kawasan minapolitan ini merupakan kawasan pengembangan budidaya perikanan yang sudah ditetapkan melalui SK Bupati Tahun 2010 yang berada di Desa Tampa Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur.

## Kawasan Tambak

Kawasan perikanan milik masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Barito Timur perlu didorong pengembangannya untuk mendukung dan menunjang sektor unggulan kawasan.

## Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Gambar 3.4. Peta Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Barito Timur



Sumber: Diolah dari Data RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034, 2025.

## Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- 1) Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- 2) Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- 3) Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- 4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- 5) kawasan yang menuntut prioritas tinggi dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup;

- 6) Kawasan rawan bencana alam; dan
- 7) Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan yang berpotensi strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang perlu dikembangkan dan dilestarikan adalah Kawasan Konservasi Taman Angrek di Desa Siong Kecamatan Paju Epat.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi ini adalah kawasan strategis untuk pengembangan sumber daya energi berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sungai Karau di desa Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di Desa Tampulangit, Juru Banu, Telang, Balawa, Telang Baru, dan Kali Napu Kecamatan Paju Epat; Desa Harara, Matarah, Gumpa Kecamatan Dusun Timur; Desa Wuran, Ipu Mea Kecamatan Karusen Janang; Desa Apar Batu, Janah Jari, Gunung Karasik Kecamatan Awang; Desa Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah; Desa Tarinsing Kecamatan Paku; Desa Gudang Seng Kecamatan Benua Lima. Pembangkit Listrik Tenaga Lainnya (*stock pile* Batu Bara) terdapat di Desa Lalap. Pengembangan kawasan strategis ini dilakukan dalam upaya meningkatkan dan memenuhi kebutuhan energi listrik yang diperlukan, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun untuk kepentingan lainnya. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Daerah adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis serta pengawasannya, penyusunan masterplan prasarana kawasan, serta pengelolaannya.

### **Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029**

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan berupa program prioritas yang memuat satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2025-2029. Program-program pembangunan Kabupaten Barito Timur untuk tahun 2025-2029 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing arah kebijakan. Berikut rumusan program prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan langsung dari visi dan misi Kepala Daerah.

**Tabel 3.10. Program Prioritas RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029**

| Visi/Misi<br>(1)  | Tujuan<br>(2)   | Sasaran<br>(3)   | Outcome<br>(4)   | Indikator<br>(5)  | Program Prioritas<br>(6)  | Ket.<br>(7)   |                       |  |
|---|---|--|--|---|---|---|-----------------------|--|
| <b>Visi:</b><br>"Mewujudkan Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah" (BARTIM SEGAH)<br><br><b>Misi:</b><br>1. Mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.<br>2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>good and clean governance</i> ), berintegritas serta layanan publik yang berkualitas dan <i>responsive</i> terhadap kebutuhan masyarakat.<br>3. Meningkatkan kuantitas dan | Meningkatkan Pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal | Meningkatnya kontribusi sektor unggulan, produktivitas dan nilai tambah produk lokal | Meningkatnya persentase kontribusi sektor unggulan   | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)  | 1. Peningkatan produktivitas lahan pertanian dan daya saing komoditas pertanian yang berkelanjutan<br>2. Peningkatan daya saing komoditas perikanan yang berkelanjutan<br>3. 10 Kecamatan Melayani Perijinan & Non Perijinan Publik | Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan; Perikanan; Penanaman Modal; Kecamatan  |                       |  |
|   |   |  |  | PDRB per Kapita   |   |   |                       |  |
|   |   |  | Kontribusi PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan/Penggalian) |   |   |   |                       |  |
|   |   |  | Meningkatnya persentase produktivitas dan nilai tambah produk lokal                        | Indeks Kapabilitas Inovasi  |   |   |                       |  |
|   |   |  |  |   |   | Indeks Kemandirian Ekonomi Daerah   |                       |  |
|   |   | Meningkatnya jumlah dan skala Usaha Mikro yang mandiri dan berdaya saing             | Meningkatnya persentase jumlah dan skala Usaha Mikro yang mandiri dan berdaya saing        | Meningkatnya persentase jumlah dan skala Usaha Mikro yang mandiri dan berdaya saing | Persentase Jumlah Usaha Kecil dan Menengah  | 1. Pengembangan Koperasi Sektor Produksi<br>2. 0% Bunga Pinjaman Petani & Usaha Mikro (Program Ngume = Ngihau Mahi Wunge) | Urusan Koperasi, UMKM |  |
|   |   |  |  |   | Persentase Jumlah Industri Kecil dan Menengah   |   |                       |  |
|   |   | Meningkatnya jumlah lapangan kerja dari sektor-sektor ekonomi lokal                  | Meningkatnya persentase jumlah lapangan kerja dari sektor-sektor ekonomi lokal             | Meningkatnya persentase jumlah lapangan kerja dari sektor-sektor ekonomi lokal      | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  | 1. 1000 Tenaga Kerja Terlatih;<br>2. Program Pelatihan Kewirausahaan  | Urusan Tenaga Kerja   |  |
|   |   |  |  |   | Rasio Kewirausahaan   |   |                       |  |
|   |   | Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan dan Inklusif                       | Meningkatnya akses kelompok rentan (perempuan, pemuda, difabel) terhadap peluang ekonomi   | Meningkatnya persentase kelompok rentan dalam peluang ekonomi                       |   | Indeks Pembangunan Daerah   |                       |  |
|   | Persentase Perempuan, Pemuda, dan Difabel yang Bekerja                                  |  |  |   | 1. Pemberdayaan Kelompok Rentan<br>2. Pengembangan Kapasitas Kepemudaan<br>3. 1000 Beasiswa Anak Tak Mampu Berprestasi<br>4. 10 Sekolah Ramah Inklusi<br>5. 10 Desa Wisata Tematik & Agro Eko Teknologi                             | Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Sosial; Kebudayaan  |                       |  |

| Visi/Misi  | Tujuan   | Sasaran   | Outcome  | Indikator              | Program Prioritas  | Ket.   |
|--|--|---|--|------------------------|--|--|
| <p>kualitas pembangunan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.</p> <p>4. Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</p> <p>5. Membangun transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat.</p> |  |   |  |                        |  | Pariwisata Pemuda dan Olahraga; Pendidikan; Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman  |
|  |  | Menurunnya kesenjangan pendapatan antar wilayah dan kelompok masyarakat | Menurunnya persentase kesenjangan pendapatan antar wilayah dan kelompok masyarakat | Indeks Gini            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100% Pegawai Non ASN Menerima Peningkatan Insentif</li> <li>2. 100% Penyuluh Agama Non ASN/ Penjaga Rumah Ibadah Menerima Peningkatan Insentif</li> <li>3. 100% Ketua RT, Kepala Desa, Damang Kepala Adat &amp; Mantir Menerima Peningkatan Insentif</li> <li>4. 100% Makan Bergizi Sehat (Program Makan Siang Gratis)</li> <li>5. 100 Bedah Rumah Tidak Layak Huni</li> <li>6. 2 Modernisasi Pasar Tradisional</li> </ol> | Urusan Sekretariat Daerah; Kepegawaian dan SDM; Pengelola Keuangan dan Aset; Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Sosial, Inspektorat; Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
|  |  | Meningkatnya kesejahteraan dan daya beli masyarakat di seluruh lapisan  | Meningkatnya persentase kesejahteraan masyarakat                                   | Pengeluaran Per Kapita |  |  |
|  |  |   | Meningkatnya persentase daya beli masyarakat di seluruh lapisan                    |                        |  |  |
|  | Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan dan |   |  |                        | Rata-Rata Wilayah Monitoring Center for Prevention (MCP)   |  |
|  |  |   |  | Nilai Maturitas SPIP   |  |  |

| Visi/Misi | Tujuan   | Sasaran   | Outcome   | Indikator   | Program Prioritas   | Ket.   |
|-----------|--|---|---|---|---|--|
|           | Memperkuat Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan               | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah           | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah          | Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan budaya kerja yang berintegritas dan anti-korupsi di seluruh unit kerja pemerintah</li> <li>2. Peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan program pengembangan kompetensi khusus</li> <li>3. 100% ASN Menerima Peningkatan TPP</li> <li>4. Peningkatan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas dan tegas untuk mendorong perilaku positif dan menindak pelanggaran</li> <li>5. Pengembangan mekanisme pelaporan dan pengaduan publik yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat</li> <li>6. Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal melalui peningkatan kapasitas lembaga pengawas</li> </ol> | Urusan Kepegawaian dan SDM; Pengelola Keuangan dan Aset; Inspektorat |
|           |  |   | Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah                   | Indeks Reformasi Birokrasi  |   |  |
|           |  |   |   | Persentase Percepatan Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi        |   |  |
|           | Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Responsif dan Inklusif             | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang terotomatisasi dan berbasis digital | Meningkatnya persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan publik             | Indeks Pelayanan Publik   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan layanan publik yang terotomatisasi dan berbasis digital</li> <li>2. 1 Desa 1 Wifi 1 Perpustakaan Digital</li> <li>3. 10 Kecamatan Melayani Perijinan &amp; Non Perijinan Publik</li> </ol>  | Urusan Komunikasi dan Informatika; Kecamatan                         |
|           |  |   | Meningkatnya persentase layanan publik yang terotomatisasi dan berbasis digital | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                    |   |  |
|           | Meningkatkan Ketersediaan dan Aksesibilitas Infrastruktur Fisik yang Memadai | Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah (aksesibilitas ke   |   | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung antar Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan kawasan pemukiman, yang inklusif dan berkelanjutan</li> </ol>  | Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,                               |
|           |  |   | Meningkatnya persentase Konektivitas antar Wilayah                              | Tingkat Kemantapan Jalan  |   |  |

| Visi/Misi | Tujuan  | Sasaran  | Outcome   | Indikator  | Program Prioritas   | Ket.   |
|-----------|---|--|---|--|---|--|
|           |   | daerah-daerah terpencil)   |   |  | 2. 100% Jalan Layak Fungsi<br>3. 1 Islamic Center & Christian Center  | Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Urusan Perhubungan                    |
|           |   | Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air                    | Meningkatnya persentase kapasitas infrastruktur sumber daya air<br>Meningkatnya persentase kualitas infrastruktur sumber daya air | Kapasitas Air Baku   | 100% Air Bersih Pedesaan  | Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
|           |   | Meningkatnya akses listrik dan internet di daerah terpencil dan tertinggal           | Meningkatnya persentase akses listrik di daerah terpencil dan tertinggal  | Rasio Elektrifikasi (Rumah Tangga Pengguna Listrik)                    | Peningkatan akses listrik di daerah terpencil dan tertinggal  | Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
|           |   |  | Meningkatnya persentase akses internet di daerah terpencil dan tertinggal   | Persentase Layanan Internet  | 1 Desa 1 Wifi 1 Perpustakaan Digital  | Urusan Komunikasi dan Informatika; Kecamatan                           |
|           | Mewujudkan kualitas kesehatan yang inklusif, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah |  |   | Usia Harapan Hidup (UHH)   |   |  |
|           |   | Meningkatnya jumlah dan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan | Meningkatnya persentase jumlah fasilitas dan kapasitas pelayanan kesehatan<br>Meningkatnya rasio tenaga kesehatan                 | Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna<br>Rasio Tenaga Kesehatan | 1. 1 RSUD Type B<br>2. 100 Desa Home Visit Check up Lansia<br>3. 100% Desa Bebas Stunting<br>4. 100% Makan Bergizi Sehat (Program Makan Siang Gratis)<br>5. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan | Urusan Kesehatan; Pemberdayaan Masyarakat, Desa                        |

| Visi/Misi | Tujuan  | Sasaran  | Outcome   | Indikator  | Program Prioritas   | Ket.                    |
|-----------|---|--|---|--|---|-------------------------|
|           |   |  |   | (Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan Per 1.000 Penduduk)                                   |   |                         |
|           |   | Meningkatnya perluasan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui penguatan sistem rujukan dan optimalisasi teknologi kesehatan | Meningkatnya persentase perluasan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui penguatan sistem rujukan dan optimalisasi teknologi kesehatan | Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)<br>Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH)<br>Prevalensi Stunting |   |                         |
|           | Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Daerah Secara Berkelanjutan        |  |   | Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)   | 1. Peningkatan efektivitas kajian lingkungan untuk efisiensi penggunaan SDA<br>2. Peningkatan kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan | Urusan Lingkungan Hidup |
|           | Meningkatnya efisiensi penggunaan SDA dengan teknologi ramah lingkungan | Meningkatnya persentase efisiensi penggunaan SDA dengan teknologi ramah lingkungan   | Indeks Ekonomi Hijau (Angka)<br>Penurunan Intensitas Emisi GRK  |  |   |                         |
|           | Meningkatkan Pembangunan Berbasis Kelestarian Lingkungan                |  |   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)  |   |                         |
|           |   | Pembangunan Berwawasan Lingkungan  | Meningkatnya persentase pembangunan berwawasan lingkungan   | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati<br>Indeks Risiko Bencana                                | 1. Menekan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup<br>2. Peningkatan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati  | Urusan Lingkungan Hidup |
|           | Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui pendidikan    |  | Meningkatnya persentase angka melek huruf   | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)   |   |                         |
|           |   | Meningkatnya partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan   | Meningkatnya persentase partisipasi sekolah   | Rata-Rata Lama Sekolah<br>Harapan Lama Sekolah<br>Indeks Literasi Digital                        | 1. Peningkatan partisipasi anak usia sekolah<br>2. 1000 Beasiswa Anak Tak Mampu Berprestasi   | Urusan Pendidikan       |

| Visi/Misi  | Tujuan   | Sasaran | Outcome  | Indikator  | Program Prioritas   | Ket.  |
|--|--|---------|--|--|---|---|
|  | berkualitas, inklusif, dan berkarakter                                     |         | pada semua jenjang pendidikan  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat   |   |   |
|  | Terbangunnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah |         | Meningkatnya persentase keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat | Indeks Demokrasi   | 1. Pemberdayaan Kelompok Rentan<br>2. Pengembangan Kapasitas Kepemudaan   | Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Sosial; Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga |
| Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat |  |         |  | Persentase Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan  |   |   |
|  |  |         |  | Indeks Pembangunan Pemuda<br>Indek Pemberdayaan Gender (IDG)   |   |   |
|  | Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial                               |         |  | Tingkat Kemiskinan   | 1. Peningkatan kegiatan yang <i>impactful</i> terhadap kesejahteraan masyarakat<br>2. 1000 Beasiswa Anak Tak Mampu Berprestasi<br>3. 1000 Tenaga Kerja Terlatih<br>4. Pelatihan Kewirausahaan |   |
| Menurunnya angka kemiskinan di seluruh wilayah   |  |         | Menurunnya persentase angka kemiskinan di seluruh wilayah  | Jumlah Angka Kemiskinan  |   |   |
| Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat                            |  |         | Terwujudnya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)<br>Kepesertaan JKN (Jumlah UHC)<br>Aset Perbankan Syariah/PDRB (%) |   |   |

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2025.

**Tabel 3.11. Daftar Kegiatan Prioritas Utama di Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2030**

| <b>Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b>   | <b>Program Nomenklatur</b>  | <b>Program Prioritas</b>  | <b>Urusan</b>   |
|---|--|---|---|---|
| <b>(1)</b>  | <b>(2)</b>   | <b>(3)</b>  | <b>(5)</b>  | <b>(7)</b>  |
| Meningkatkan pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing                    | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam                                      | 0% Bunga Pinjaman Petani & Usaha Mikro (Program Ngume = Ngihau Mahi Wunge)                      | Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah               |
|   |  | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                                  | Pengembangan Koperasi Sektor Produksi   | Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah               |
|   |  | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Peningkatan produktivitas lahan pertanian dan daya saing komoditas pertanian yang berkelanjutan | Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan                   |
|   |  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                            | 0% Bunga Pinjaman Petani & Usaha Mikro (Program Ngume = Ngihau Mahi Wunge)                      | Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan                   |
|   |  | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                | Peningkatan daya saing komoditas perikanan yang berkelanjutan                                   | Urusan Perikanan  |
|   |  | Program Perencanaan Tenaga Kerja  | 1000 Tenaga Kerja Terlatih  | Urusan Tenaga Kerja                                     |
|   |  | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja                          | Pelatihan Kewirausahaan   | Urusan Tenaga Kerja                                     |
|   |  | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                      | 10 Kecamatan Melayani Perijinan & Non Perijinan Publik  | Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif                          | Terwujudnya kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                       | Pemberdayaan Kelompok Rentan  | Urusan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak    |
|   |  | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                            | Pengembangan Kapasitas Kepemudaan   | Urusan Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga        |
|   |  | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                             | 10 Desa Wisata Tematik & Agro Eko Teknologi   | Urusan Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga        |
|   |  | Program Pengelolaan Pendidikan  | 1000 Beasiswa Anak Tak Mampu Berprestasi  | Urusan Pendidikan                                       |
|   |  | Program Pengelolaan Pendidikan  | 10 Sekolah Ramah Inklusi  | Urusan Pendidikan                                       |
|   |  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial   | 1. 100% Pegawai Non ASN Menerima Peningkatan Insentif   | Urusan Sekretariat Daerah; Pengelola Keuangan           |

| Tujuan<br>(1)   | Sasaran<br>(2)  | Program Nomenklatur<br>(3)                                | Program Prioritas<br>(5)   | Urusan<br>(7)  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2. 100% Penyuluh Agama Non ASN/ Penjaga Rumah Ibadah Menerima Peningkatan Insentif</li> <li>3. 100% Ketua RT, Kepala Desa, Damang Kepala Adat &amp; Mantir Menerima Peningkatan Insentif</li> <li>4. 100% Makan Bergizi Sehat (Program Makan Siang Gratis)</li> <li>5. 2 Modernisasi Pasar Tradisional</li> </ul>   | dan Aset; Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Sosial, dan Sosial, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
|   |   | Program Pengembangan Permukiman                           | 100 Bedah Rumah Tidak Layak Huni   | Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman   |
| Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan dan Memperkuat Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan dan Memperkuat Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan budaya kerja yang berintegritas dan anti-korupsi di seluruh unit kerja pemerintah</li> <li>2. Peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan program pengembangan kompetensi khusus</li> <li>3. 100% ASN Menerima Peningkatan TPP</li> </ul>  | Urusan Kepegawaian dan SDM; Pengelola Keuangan dan Aset  |
|   |   | Program Kepegawaian Daerah                                | Peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan program pengembangan kompetensi khusus   | Urusan Kepegawaian dan SDM   |
|   |   | Program Penyelenggaraan Pengawasan                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas dan tegas untuk mendorong perilaku positif dan menindak pelanggaran</li> <li>2. Pengembangan mekanisme pelaporan dan pengaduan publik yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat</li> <li>3. Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal melalui peningkatan kapasitas lembaga pengawas</li> </ul> | Urusan Inspektorat; Pengelola Keuangan dan Aset  |

| Tujuan<br>(1)   | Sasaran<br>(2)   | Program Nomenklatur<br>(3)  | Program Prioritas<br>(5)   | Urusan<br>(7)  |
|---|--|---|--|--|
| Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Responsif dan Inklusif  | Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Responsif dan Inklusif   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan layanan publik yang terotomatisasi dan berbasis digital</li> <li>2. 1 Desa 1 Wifi 1 Perpustakaan Digital</li> <li>3. 10 Kecamatan Melayani Perijinan &amp; Non Perijinan Publik</li> </ol>     | Urusan Komunikasi dan Informatika; Kecamatan   |
| Meningkatkan Ketersediaan dan Aksesibilitas Infrastruktur Fisik yang Memadai                                  | Meningkatnya Ketersediaan dan Aksesibilitas Infrastruktur Fisik yang Memadai                                   | Program Penyelenggaraan Jalan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung antar Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan kawasan pemukiman, yang inklusif dan berkelanjutan</li> <li>2. 100% Jalan Layak Fungsi</li> </ol> | Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Urusan Perhubungan |
|   |  | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)   | 100% Air Bersih Pedesaan   | Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman                     |
|   |  | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)   | Peningkatan akses listrik di daerah terpencil dan tertinggal   | Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman                     |
|   |  | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)   | 1 Islamic Center & Christian Center  | Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman                     |
| Mewujudkan kualitas kesehatan yang inklusif, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah | Terwujudnya kualitas kesehatan yang inklusif, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 RSUD Type B</li> <li>2. 100 Desa Home Visit Check Up Lansia</li> <li>3. 100% Desa Bebas Stunting</li> <li>4. 100% Makan Bergizi Sehat (Program Makan Siang Gratis)</li> </ol>                            | Urusan Kesehatan; Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Sosial                                |
|   |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan   | Peningkatan jumlah tenaga kesehatan  | Urusan Kesehatan   |
| Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Daerah Secara Berkelanjutan  | Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Daerah Secara Berkelanjutan   | Program Perencanaan Lingkungan Hidup  | Peningkatan efektivitas kajian lingkungan untuk efisiensi penggunaan SDA   | Urusan Lingkungan Hidup  |
|   |  | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | Peningkatan kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan  | Urusan Lingkungan Hidup  |

| Tujuan<br>(1)  | Sasaran<br>(2)   | Program Nomenklatur<br>(3)  | Program Prioritas<br>(5)   | Urusan<br>(7)  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)                 | Peningkatan kualitas pengelolaan keaneekaragaman hayati                      | Urusan Lingkungan Hidup                              |
|  |  | Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Menekan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup                       | Urusan Lingkungan Hidup                              |
| Terbangunnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah | Terwujudnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah  | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan           | Pemberdayaan Kelompok Rentan   | Urusan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
|  |  | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                | Pengembangan Kapasitas Kepemudaan  | Urusan Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga     |
| Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial                               | Menurunya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial, serta tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat | Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial                         | Peningkatan kegiatan yang <i>impactful</i> terhadap kesejahteraan masyarakat | Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Sosial     |
|  |  | Program peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar  | 1000 Beasiswa Anak Tak Mampu Berprestasi                                     | Urusan Pendidikan                                    |
|  |  | Program Perencanaan Tenaga Kerja                                    | 1000 Tenaga Kerja Terlatih   | Urusan Tenaga Kerja                                  |
|  |  | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja              | Program Pelatihan Kewirausahaan  | Urusan Tenaga Kerja                                  |

**Tabel 3.12. 20 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur  
Tahun 2025-2029**

| No. | 20 Program Prioritas Pembangunan Daerah   |
|-----|---|
| 1   | 1 RSUD Type B   |
| 2   | 1 Islamic Center & Christian Center   |
| 3   | 1 Desa 1 Wifi 1 Perpustakaan Digital  |
| 4   | 2 Modernisasi Pasar Tradisional   |
| 5   | 10 Sekolah Ramah Inklusi  |
| 6   | 10 Desa Wisata Tematik & Agro Eko Teknologi   |
| 7   | 10 Kecamatan Melayani Perijinan & Non Perijinan Publik                                |
| 8   | 100 Desa Home Visit Check up Lansia   |
| 9   | 100 Bedah Rumah Tidak Layak Huni  |
| 10  | 1000 Tenaga Kerja Terlatih  |
| 11  | 1000 Beasiswa Anak Tak Mampu Berprestasi  |
| 12  | 0% Bunga Pinjaman Petani & Usaha Mikro (Program Ngume = Ngihau Mahi Wunge)            |
| 13  | 100% Makan Bergizi Sehat (Program Makan Siang Gratis)                                 |
| 14  | 100% Air Bersih Pedesaan  |
| 15  | 100% Desa Bebas Stunting  |
| 16  | 100% Jalan Layak Fungsi   |
| 17  | 100% ASN Menerima Peningkatan TPP   |
| 18  | 100% Pegawai Non ASN Menerima Peningkatan Insentif.                                   |
| 19  | 100% Penyuluh Agama Non ASN/ Penjaga Rumah Ibadah Menerima Peningkatan Insentif       |
| 20  | 100% Ketua RT, Kepala Desa, Damang Kepala Adat & Mantir Menerima Peningkatan Insentif |

Sumber: Diolah dari Dokumen Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati, 2025.

**Tabel 3.13. Penetapan Indikator Kinerja 20 Program Prioritas Pembangunan Daerah  
Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2030**

| No. | Nama Program                                | Satuan                  | Target |      |      |      |      | OPD<br>Penanggung Jawab  |
|-----|---|-------------------------|--------|------|------|------|------|--|
|     |   |                         | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |
| 1   | 1 RSUD Type B                               | Persen                  | 5      | 25   | 50   | 80   | 90   | Urusan Kesehatan   |
| 2   | 1 Islamic Center & Christian Center         | Persen                  | 5      | 25   | 50   | 75   | 100  | Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
|     |   | Persen                  | 5      | 25   | 50   | 75   | 100  | Sekretariat Daerah   |
| 3   | 1 Desa 1 Wifi 1 Perpustakaan Digital        | Desa                    | 20     | 40   | 60   | 80   | 100  | Urusan Komunikasi Informatika, Persandian & Statistik                  |
|     |   | Desa                    | 20     | 40   | 60   | 80   | 100  | Urusan Perpustakaan dan Kearsipan                                      |
|     |   | Desa                    | 61     | 79   | 80   | 90   | 100  | Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Sosial                       |
| 4   | 2 Modernisasi Pasar Tradisional             | Persen                  | 10     | 50   | 75   | 100  | 100  | Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
|     |   | Pasar                   | 1      | 1    | 1    | 2    | 2    | Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM                                   |
| 5   | 10 Sekolah Ramah Inklusi                    | Sekolah                 | 4      | 6    | 8    | 10   | 12   | Urusan Pendidikan  |
| 6   | 10 Desa Wisata Tematik & Agro Eko Teknologi | Desa                    | 2      | 2    | 2    | 2    | 2    | Urusan Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga                       |
|     |   | Desa                    | 5      | 7    | 9    | 11   | 13   | Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Sosial                       |
|     |   | Desa Agro Eko Teknologi | 1      | 2    | 5    | 8    | 10   | Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan                                  |
|     |   | Desa Agro Eko Teknologi | 3      | 5    | 7    | 9    | 10   | Urusan Perikanan dan Peternakan  |
| 7   |   | Dokumen                 | 960    | 970  | 980  | 990  | 1000 | Kecamatan  |

| No. | Nama Program   | Satuan                  | Target |      |      |      |      | OPD<br>Penanggung Jawab  |
|-----|--|-------------------------|--------|------|------|------|------|--|
|     |  |                         | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |
|     | 10 Kecamatan Melayani Perijinan & Non Perijinan Publik                           | Dokumen                 | 1555   | 1585 | 1650 | 1700 | 1800 | Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                  |
| 8   | 100 Desa Home Visit Check Up Lansia  | Desa                    | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | Urusan Kesehatan   |
| 9   | 100 Bedah Rumah Tidak Layak Huni   | Rumah                   | 20     | 20   | 20   | 20   | 20   | Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman   |
|     |  | Rumah                   | 20     | 20   | 20   | 20   | 20   | Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Sosial                         |
| 10  | 1000 Tenaga Kerja Terlatih   | Orang                   | 120    | 120  | 120  | 120  | 120  | Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian                     |
|     |  | Orang                   | 15     | 15   | 15   | 15   | 15   | Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan                                    |
|     |  | Orang/<br>Kelompok      | 20     | 20   | 20   | 20   | 20   | Urusan Perikanan dan Peternakan  |
|     |  | Orang                   | 20     | 20   | 20   | 20   | 20   | Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM                                     |
|     |  | Orang                   | 5      | 5    | 5    | 5    | 5    | Urusan Perpustakaan dan Kearsipan  |
|     |  | Orang                   | 20     | 20   | 20   | 20   | 20   | Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Sosial                         |
| 11  | 1000 Beasiswa Anak Tak Mampu Berprestasi   | Orang                   | 134    | 266  | 200  | 200  | 200  | Urusan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                                |
| 12  | Bunga Pinjaman Petani & Usaha Mikro (Program Ngume = Ngihau Mahi Wunge)          | Pelaku Usaha            | 25     | 60   | 100  | 150  | -    | Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM                                     |
|     |  | Kelompok Tani           | 5      | 15   | 35   | 80   | 130  | Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan                                    |
|     |  | Kelompok / Pelaku Usaha | 0      | 5    | 7    | 9    | 11   | Urusan Perikanan dan Peternakan  |
| 13  | Makan Bergizi Sehat (Program Makan Siang Gratis)                                 | Persen                  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | Sekretariat Daerah   |
| 14  | 100% Air Bersih Pedesaan   | Persen                  | 98,8   | 99,1 | 99,4 | 99,7 | 100  | Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman   |
|     |  | Desa                    | 98     | 99   | 99   | 100  | 100  | Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Sosial                         |
|     |  | Desa                    | 98     | 99   | 99   | 100  | 100  | Urusan Kesehatan   |
| 15  | 100% Desa Bebas Stunting   | Persen                  | 70     | 80   | 88   | 95   | 100  | Urusan Kesehatan   |
|     |  | Persen                  | 70     | 80   | 88   | 95   | 100  | Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana |
| 16  | 100% Jalan Laik Fungsi   | Persen                  | 41,9   | 60   | 70   | 80   | 100  | Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman   |
| 17  | 100% ASN Menerima Peningkatan TPP  | Persen                  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | Urusan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                                |
|     |  | Persen                  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | Sekretariat Daerah   |
| 18  | 100% Pegawai Non ASN Menerima Peningkatan Insentif                               | Persen                  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | Sekretariat Daerah   |
| 19  | 100% Penyuluh Agama Non ASN / Penjaga Rumah Ibadah Menerima Peningkatan Insentif | Persen                  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | Sekretariat Daerah   |
| 20  | Ketua RT, Kepala Desa, Demang Kepala Adat & Mantir menerima Peningkatan Insentif | Persen                  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | Sekretariat Daerah   |

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2025.

**BAB IV**  
**PROGRAM PERANGKAT DAERAH**  
**DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

**4.1 Program Perangkat Daerah**

Program perangkat daerah merupakan serangkaian program dan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan merupakan implementasi dari perencanaan pembangunan daerah dan merupakan pedoman operasional bagi setiap perangkat daerah. Program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan dua aspek penting. Program perangkat daerah adalah penjabaran teknis dari rencana pembangunan yang mencakup bidang urusan/program, indikator outcome, target dan pagu indikatif, perangkat daerah penanggung jawab. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), menunjukkan hasil kerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang telah ditentukan.

Program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berkaitan erat. Program perangkat daerah adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintahan daerah, sedangkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah mengukur seberapa baik program tersebut dijalankan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode selanjutnya.

**Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2030**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                     | INDIKATOR OUTCOME  | BASELINE 2024 | 2025        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |             |                    |             |                    |             |                    |        |                    | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB        |
|---|--|---------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------|--------------------|--|
|   |  |               |             | 2026                            |                    | 2027        |                    | 2028        |                    | 2029        |                    | 2030   |                    |  |
|   |  |               |             | TARGET                          | PAGU               | TARGET      | PAGU               | TARGET      | PAGU               | TARGET      | PAGU               | TARGET | PAGU               |  |
| (01)  | (02)   | (03)          | (04)        | (05)                            | (06)               | (07)        | (08)               | (09)        | (10)               | (11)        | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                     |
| 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                          |  |               |             |                                 | 293.293.498.285,00 |             | 307.930.441.993,00 |             | 323.326.964.093,00 |             | 339.493.312.297,00 |        | 356.467.977.950,00 |  |
| 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |               |             |                                 | 247.488.965.113,00 |             | 259.863.413.368,00 |             | 272.856.584.037,00 |             | 286.499.413.239,00 |        | 300.824.383.900,00 |  |
| Nilai SAKIP Pemerintah Daerah   | Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Predikat)   | 74.10-74.10   | 74.10-74.10 | 75.80-75.80                     | 247.488.965.113,00 | 77.70-77.70 | 259.863.413.368,00 | 79.89-79.89 | 272.856.584.037,00 | 81.90-81.90 | 286.499.413.239,00 | 83-83  | 300.824.383.900,00 | 1.01.0.00.0.00.01.000 - DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |  |               |             |                                 | 45.759.554.742,00  |             | 48.019.801.273,00  |             | 50.420.791.337,00  |             | 52.941.830.903,00  |        | 55.588.922.488,00  |  |
| Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah                            | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)   | 87,50         | 87,50       | 90,47                           | 45.759.554.742,00  | 93,02       | 48.019.801.273,00  | 95,57       | 50.420.791.337,00  | 98,12       | 52.941.830.903,00  | 100    | 55.588.922.488,00  | 1.01.0.00.0.00.01.000 - DINAS PENDIDIKAN |
|   | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Persentase)   | 99,03         | 99,27       | 99,50                           |                    | 99,71       |                    | 99,76       |                    | 99,76       |                    | 99,76  |                    | 1.01.0.00.0.00.01.000 - DINAS PENDIDIKAN |
|   | Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (Persentase)  | 95,96         | 96,94       | 97,93                           |                    | 98,77       |                    | 99,02       |                    | 99,02       |                    | 99,02  |                    | 1.01.0.00.0.00.01.000 - DINAS PENDIDIKAN |
|   | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Persentase) | 22,64         | 26,74       | 30,84                           |                    | 34,94       |                    | 39,04       |                    | 43,14       |                    | 47,24  |                    | 1.01.0.00.0.00.01.000 - DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                    |  |               |             |                                 | 36.750.000,00      |             | 38.587.500,00      |             | 40.516.875,00      |             | 42.542.719,00      |        | 44.669.854,00      |  |
| Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan     | Indeks Pemerataan Guru (Rasio)   | 0,44          | 0,44        | 0,47                            | 36.750.000,00      | 0,50        | 38.587.500,00      | 0,55        | 40.516.875,00      | 0,60        | 42.542.719,00      | 0,65   | 44.669.854,00      | 1.01.0.00.0.00.01.000 - DINAS PENDIDIKAN |
|   | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)   | 49,55         | 49,55       | 51,22                           |                    | 53,20       |                    | 55,30       |                    | 57,60       |                    | 59,90  |                    | 1.01.0.00.0.00.01.000 - DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                   |  |               |             |                                 | 8.228.430,00       |             | 8.639.852,00       |             | 9.071.844,00       |             | 9.525.436,00       |        | 10.001.708,00      |  |
| Meningkatnya kualitas dan distribusi insititusi pendidikan            | Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)   | 96,00         | 96,00       | 96,40                           | 8.228.430,00       | 96,60       | 8.639.852,00       | 97,05       | 9.071.844,00       | 97,80       | 9.525.436,00       | 98,55  | 10.001.708,00      | 1.01.0.00.0.00.01.000 - DINAS PENDIDIKAN |
| 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                           |  |               |             |                                 | 256.106.882.007,00 |             | 284.538.956.096,00 |             | 324.844.573.996,00 |             | 193.882.208.865,00 |        | 196.994.612.055,00 |  |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |               |             |                                 | 81.167.787.404,00  |             | 82.385.304.208,00  |             | 83.621.083.771,00  |             | 84.875.400.027,00  |        | 86.148.531.033,00  |  |
| Nilai LAKIP perangkat daerah  | Nilai LAKIP Perangkat Daerah (Poin)  | 67,36         | 68          | 69                              | 81.167.787.404,00  | 70          | 82.385.304.208,00  | 72          | 83.621.083.771,00  | 75          | 84.875.400.027,00  | 77     | 86.148.531.033,00  | 1.02.0.00.0.00.02.000 - DINAS KESEHATAN  |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN                |  |               |             |                                 | 173.404.194.173,00 |             | 200.595.727.952,00 |             | 239.642.197.430,00 |             | 107.401.796.649,00 |        | 109.241.068.833,00 |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME   | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024 | 2025        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|---|---|---------------|-------------|---------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---|
|   |   |               |             | 2026                            |                      | 2027        |                      | 2028        |                      | 2029        |                      | 2030        |                      |   |
|   |   |               |             | TARGET                          | PAGU                 | TARGET      | PAGU                 | TARGET      | PAGU                 | TARGET      | PAGU                 | TARGET      | PAGU                 |   |
| DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  |   |               |             |                                 |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |   |
| Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat                                 | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))                            | 182 /100.000  | 183/100.000 | 182/100.000                     | 173.404.194.173,00   | 181/100.000 | 200.595.727.952,00   | 180/100.000 | 239.642.197.430,00   | 179/100.000 | 107.401.796.649,00   | 178/100.000 | 109.241.068.833,00   | 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN  |
|   | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))                    | 21:21         | 18:18       | 16:16                           |                      | 14:14       |                      | 12:12       |                      | 10:10       |                      | 8:8         |                      | 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN  |
|   | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))                            | 183           | 183         | 182                             |                      | 181         |                      | 180         |                      | 179         |                      | 178         |                      | 1.02.0.00.0.00.02.0001 - BLUD   |
|   | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))                    | 21:21         | 18:18       | 16:16                           |                      | 14:14       |                      | 12:12       |                      | 10:10       |                      | 8:8         |                      | 1.02.0.00.0.00.02.0001 - BLUD   |
|   | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan ((%))  | 100           | 100         | 100                             |                      | 100         |                      | 100         |                      | 100         |                      | 100         |                      | 1.02.0.00.0.00.02.0001 - BLUD   |
|   | Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna ((%))                                | 100           | 100         | 100                             |                      | 100         |                      | 100         |                      | 100         |                      | 100         |                      | 1.02.0.00.0.00.02.0001 - BLUD   |
| 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                     |   |               |             |                                 | 464.851.998,00       |             | 471.824.777,00       |             | 478.902.150,00       |             | 486.085.683,00       |             | 486.085.683,00       |   |
| Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan   | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)                 | 97            | 100         | 100                             | 464.851.998,00       | 100         | 471.824.777,00       | 100         | 478.902.150,00       | 100         | 486.085.683,00       | 100         | 486.085.683,00       | 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN  |
| 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                     |   |               |             |                                 | 443.971.857,00       |             | 450.631.435,00       |             | 457.390.906,00       |             | 464.251.770,00       |             | 464.251.770,00       |   |
| Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase) | 100           | 100         | 100                             | 443.971.857,00       | 100         | 450.631.435,00       | 100         | 457.390.906,00       | 100         | 464.251.770,00       | 100         | 464.251.770,00       | 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN  |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                |   |               |             |                                 | 626.076.575,00       |             | 635.467.724,00       |             | 644.999.739,00       |             | 654.674.736,00       |             | 654.674.736,00       |   |
| Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan                            | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)               | 100           | 100         | 100                             | 626.076.575,00       | 100         | 635.467.724,00       | 100         | 644.999.739,00       | 100         | 654.674.736,00       | 100         | 654.674.736,00       | 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN  |
| 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                       |   |               |             |                                 | 2.909.871.487.610,00 |             | 2.943.413.987.882,00 |             | 3.242.824.385.750,00 |             | 3.470.351.649.732,42 |             | 3.853.939.176.498,00 |   |
| 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                     |   |               |             |                                 | 2.486.780.835.000,00 |             | 2.088.402.171.240,00 |             | 2.192.822.279.970,00 |             | 2.302.463.394.000,00 |             | 2.532.709.733.400,00 |   |
| Nilai LAKIP perangkat daerah  |   |               |             |                                 | 118.418.135.000,00   |             | 99.447.722.440,00    |             | 104.420.108.570,00   |             | 109.641.114.000,00   |             | 120.605.225.400,00   | 1.03.1.04.2.10.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Nilai Lakip perangkat Daerah  |   |               |             |                                 | 1.184.181.350.000,00 |             | 994.477.224.400,00   |             | 1.044.201.085.700,00 |             | 1.096.411.140.000,00 |             | 1.206.052.254.000,00 | 1.03.1.04.2.10.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME   | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                      |        |                    |        |                      |        |                      |        |                      | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|---|---|---------------|-------|---------------------------------|----------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--|
|   |   |               |       | 2026                            |                      | 2027   |                    | 2028   |                      | 2029   |                      | 2030   |                      |  |
|   |   |               |       | TARGET                          | PAGU                 | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 |  |
| Nilai Lakip Perangkat Daerah  | Nilai Lakip Perangkat Daerah (Poin)   | 67.80         | 70.75 | 73.70                           | 1.184.181.350.000,00 | 76.64  | 994.477.224.400,00 | 77.59  | 1.044.201.085.700,00 | 78.54  | 1.096.411.140.000,00 | 80.00  | 1.206.052.254.000,00 | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)   |   |               |       |                                 | 36.149.765.130,00    |        | 39.090.000.000,00  |        | 41.420.495.430,00    |        | 44.550.000.000,00    |        | 47.700.000.000,00    |  |
| Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi                       |   |               |       |                                 | 12.049.921.710,00    |        | 13.030.000.000,00  |        | 13.806.831.810,00    |        | 14.850.000.000,00    |        | 15.900.000.000,00    | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)  | 45,13         | 47,09 | 49,05                           | 12.049.921.710,00    | 51,02  | 13.030.000.000,00  | 52,98  | 13.806.831.810,00    | 54,94  | 14.850.000.000,00    | 56,90  | 15.900.000.000,00    | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten |   |               |       |                                 | 12.049.921.710,00    |        | 13.030.000.000,00  |        | 13.806.831.810,00    |        | 14.850.000.000,00    |        | 15.900.000.000,00    | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  |   |               |       |                                 | 2.906.000.000,00     |        | 6.500.000.000,00   |        | 8.000.000.000,00     |        | 9.500.000.000,00     |        | 10.750.000.000,00    |  |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum  |   |               |       |                                 | 453.000.000,00       |        | 2.000.000.000,00   |        | 2.500.000.000,00     |        | 3.000.000.000,00     |        | 3.500.000.000,00     | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan                             | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%) | 86,60         | 88,86 | 91,12                           | 453.000.000,00       | 93,37  | 2.000.000.000,00   | 95,63  | 2.500.000.000,00     | 97,89  | 3.000.000.000,00     | 100    | 3.500.000.000,00     | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan                             |   |               |       |                                 | 2.000.000.000,00     |        | 2.500.000.000,00   |        | 3.000.000.000,00     |        | 3.500.000.000,00     |        | 3.750.000.000,00     | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME   | INDIKATOR OUTCOME  | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                   |  |
|---|--|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
|   |  |               |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   |                                   | 2030              |  |
|   |  |               |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                   | TARGET            | PAGU   |
| 1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL        |  |               |       |                                 | 1.409.600.200,00  |        | 1.956.816.642,00  |        | 2.286.610.350,00  |        | 2.513.255.732,42  |                                   | 2.731.000.000,00  |  |
| Meningkatnya layanan persampahan regional   |  |               |       |                                 | 400.000.000,00    |        | 609.600.200,00    |        | 737.616.242,00    |        | 811.377.866,00    |                                   | 890.500.000,00    | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Meningkatnya Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan   | Tingkat penyediaan Sarana Persampahan (Persentase)   | 68,29         | 71,26 | 74,23                           | 400.000.000,00    | 77,20  | 609.600.200,00    | 80,17  | 737.616.242,00    | 83,14  | 811.377.866,42    | 86,10                             | 890.500.000,00    | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Persentase dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan |  |               |       |                                 | 609.600.200,00    |        | 737.616.242,00    |        | 811.377.866,00    |        | 890.500.000,00    |                                   | 950.000.000,00    | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                  |  |               |       |                                 | 39.905.287.280,00 |        | 40.750.000.000,00 |        | 41.500.000.000,00 |        | 42.500.000.000,00 |                                   | 44.000.000.000,00 |  |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah              |  |               |       |                                 | 13.202.643.640,00 |        | 13.500.000.000,00 |        | 13.750.000.000,00 |        | 14.000.000.000,00 |                                   | 14.500.000.000,00 | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Jumlah Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD      |  |               |       |                                 | 13.500.000.000,00 |        | 13.750.000.000,00 |        | 14.000.000.000,00 |        | 14.500.000.000,00 |                                   | 15.000.000.000,00 | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat           | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Persentase) | 85,68         | 87,00 | 88,32                           | 13.202.643.640,00 | 89,64  | 13.500.000.000,00 | 90,96  | 13.750.000.000,00 | 92,28  | 14.000.000.000,00 | 93,60                             | 14.500.000.000,00 | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                    |  |               |       |                                 | 18.000.000.000,00 |        | 22.000.000.000,00 |        | 24.000.000.000,00 |        | 27.000.000.000,00 |                                   | 30.000.000.000,00 |  |
| Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan                                   |  |               |       |                                 | 4.000.000.000,00  |        | 5.500.000.000,00  |        | 6.000.000.000,00  |        | 7.000.000.000,00  |                                   | 8.000.000.000,00  | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN   |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME  | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|--|---|---------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|-----------------------------------|--|
|  |   |               |       | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                   |  |
|  |   |               |       | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                   |  |
|  |   |               |       |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |                                   | RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  |
| Persentase Drainase dalam kondisi baik /pembuangan aliran air tidak tersumbat  |   |               |       |                                 | 4.000.000.000,00   |        | 5.500.000.000,00   |        | 6.000.000.000,00   |        | 7.000.000.000,00   |        | 8.000.000.000,00   |                                   | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan  | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (Persentase) | 59,75         | 62,35 | 64,95                           | 10.000.000.000,00  | 67,54  | 11.000.000.000,00  | 70,14  | 12.000.000.000,00  | 72,74  | 13.000.000.000,00  | 75,34  | 14.000.000.000,00  |                                   | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN  |   |               |       |                                 | 2.110.000.000,00   |        | 235.000.000,00     |        | 235.000.000,00     |        | 235.000.000,00     |        | 728.443.098,00     |                                   |  |
| Rasio Permukiman Layak Huni  |   |               |       |                                 | 2.110.000.000,00   |        | 235.000.000,00     |        | 235.000.000,00     |        | 235.000.000,00     |        | 728.443.098,00     |                                   |  |
| 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG   |   |               |       |                                 | 460.000.000,00     |        | 490.000.000,00     |        | 510.000.000,00     |        | 530.000.000,00     |        | 550.000.000,00     |                                   |  |
| Meningkatnya kualitas bangunan gedung  |   |               |       |                                 | 150.000.000,00     |        | 160.000.000,00     |        | 165.000.000,00     |        | 170.000.000,00     |        | 175.000.000,00     |                                   | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kab/kota yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (%) (%)                  | 65            | 70    | 75                              | 150.000.000,00     | 80     | 160.000.000,00     | 85     | 165.000.000,00     | 90     | 170.000.000,00     | 100    | 175.000.000,00     |                                   | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |   |               |       |                                 | 160.000.000,00     |        | 170.000.000,00     |        | 180.000.000,00     |        | 190.000.000,00     |        | 200.000.000,00     |                                   | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA  |   |               |       |                                 | 112.200.000.000,00 |        | 186.000.000.000,00 |        | 269.000.000.000,00 |        | 309.000.000.000,00 |        | 306.000.000.000,00 |                                   |  |
| Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata  |   |               |       |                                 | 37.400.000.000,00  |        | 62.000.000.000,00  |        | 83.000.000.000,00  |        | 103.000.000.000,00 |        | 103.000.000.000,00 |                                   | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME   | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|---|---|---------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--|
|   |   |               |       | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |  |
|   |   |               |       | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |  |
| Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata                                | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)                          | 85,27         | 86,34 | 87,41                           | 37.400.000.000,00  | 88,48  | 62.000.000.000,00  | 89,55  | 83.000.000.000,00  | 90,62  | 103.000.000.000,00 | 91,69  | 100.000.000.000,00 | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata                                |   |               |       |                                 | 37.400.000.000,00  |        | 62.000.000.000,00  |        | 103.000.000.000,00 |        | 103.000.000.000,00 |        | 103.000.000.000,00 | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN   |   |               |       |                                 | 203.250.000.000,00 |        | 552.000.000.000,00 |        | 657.000.000.000,00 |        | 726.000.000.000,00 |        | 871.200.000.000,00 |  |
| Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman  |   |               |       |                                 | 67.750.000.000,00  |        | 184.000.000.000,00 |        | 219.000.000.000,00 |        | 242.000.000.000,00 |        | 290.400.000.000,00 | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Persentase panjang jalan kondisi baik   | Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)                                  | 41.85         | 44.06 | 60                              | 67.750.000.000,00  | 70     | 184.000.000.000,00 | 80     | 219.000.000.000,00 | 90     | 242.000.000.000,00 | 100    | 290.400.000.000,00 | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Terkelolanya jalan Kabupaten/Kota dalam kondisi baik  |   |               |       |                                 | 67.750.000.000,00  |        | 184.000.000.000,00 |        | 219.000.000.000,00 |        | 242.000.000.000,00 |        | 290.400.000.000,00 | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  |   |               |       |                                 | 400.000.000,00     |        | 440.000.000,00     |        | 500.000.000,00     |        | 510.000.000,00     |        | 520.000.000,00     |  |
| Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman agar dapat menghadapi tantangan dan perkembangan yang ada. |   |               |       |                                 | 200.000.000,00     |        | 220.000.000,00     |        | 250.000.000,00     |        | 260.000.000,00     |        | 270.000.000,00     | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi  | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)  | 100           | 100   | 100                             | 200.000.000,00     | 100    | 220.000.000,00     | 100    | 250.000.000,00     | 100    | 250.000.000,00     | 100    | 250.000.000,00     | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|   | Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi (Orang) | 10            | 15    | 25                              |                    | 25     |                    | 25     |                    | 25     |                    | 25     |                    | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME  | INDIKATOR OUTCOME                               | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|--|---|---------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--|
|  |   |               |      | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |  |
|  |   |               |      | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |  |
|  |   |               |      |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN   |
| 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG   |   |               |      |                                 | 6.300.000.000,00   |        | 5.550.000.000,00   |        | 5.550.000.000,00   |        | 5.550.000.000,00   |        | 7.050.000.000,00   |  |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang   |   |               |      |                                 | 2.100.000.000,00   |        | 1.850.000.000,00   |        | 1.850.000.000,00   |        | 1.850.000.000,00   |        | 2.350.000.000,00   | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Persentase kesesuaian Ruang dengan RTRW dan RDTR   | Penyelesaian Materi Teknis RTRW (Materi Teknis) | 1             | 1    | 0                               | 2.100.000.000,00   | 0      | 1.850.000.000,00   | 0      | 1.850.000.000,00   | 0      | 1.850.000.000,00   | 0      | 2.350.000.000,00   | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|  | Penetapan RTRW (Perda/Perkada)                  | 0             | 0    | 1                               |                    | 0      |                    | 0      |                    | 0      |                    | 0      |                    | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|  | Penyelesaian Materi Teknis RDTR (Materi Teknis) | 1             | 1    | 1                               |                    | 1      |                    | 1      |                    | 1      |                    | 1      |                    | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|  | Penetapan RDTR (Perda/Perkada)                  | 0             | 0    | 1                               |                    | 1      |                    | 1      |                    | 1      |                    | 1      |                    | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota                                |   |               |      |                                 | 2.100.000.000,00   |        | 1.850.000.000,00   |        | 1.850.000.000,00   |        | 1.850.000.000,00   |        | 2.350.000.000,00   |  |
| 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN   |   |               |      |                                 | 492.535.270.435,00 |        | 206.300.189.519,00 |        | 217.140.208.471,00 |        | 222.764.229.318,00 |        | 225.364.229.318,00 |  |
| 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN   |   |               |      |                                 | 14.643.700.000,00  |        | 15.808.070.000,00  |        | 17.068.877.000,00  |        | 18.435.764.700,00  |        | 18.835.764.700,00  |  |
| Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah |   |               |      |                                 | 9.643.700.000,00   |        | 10.608.070.000,00  |        | 11.668.877.000,00  |        | 12.835.764.700,00  |        | 12.835.764.700,00  | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN                    |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME   | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|---|---|---------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
|   |   |               |       | 2026                            |                    | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |  |
|   |   |               |       | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |  |
|   |   |               |       |                                 |                    |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | KAWASAN PERMUKIMAN   |
| Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%) | 10            | 15    | 20                              | 2.500.000.000,00   | 23     | 2.600.000.000,00  | 25     | 2.700.000.000,00  | 27     | 2.800.000.000,00  | 30     | 3.000.000.000,00  | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota  |   |               |       |                                 | 2.500.000.000,00   |        | 2.600.000.000,00  |        | 2.700.000.000,00  |        | 2.800.000.000,00  |        | 3.000.000.000,00  | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN  |   |               |       |                                 | 155.688.619.600,00 |        | 53.200.000.000,00 |        | 59.000.000.000,00 |        | 60.000.000.000,00 |        | 62.000.000.000,00 |  |
| Meningkatnya kualitas kawasan permukiman  | Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)         | 62,50         | 65,22 | 67,93                           | 72.844.309.800,00  | 70,65  | 21.100.000.000,00 | 73,37  | 23.500.000.000,00 | 76,09  | 23.500.000.000,00 | 78,80  | 23.500.000.000,00 | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|   | Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)                          | 9,03          | 8,64  | 8,24                            |                    | 7,85   |                   | 7,46   |                   | 7,07   |                   | 6,67   |                   | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Menyediakan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, dan persampahan.  |   |               |       |                                 | 10.000.000.000,00  |        | 11.000.000.000,00 |        | 12.000.000.000,00 |        | 13.000.000.000,00 |        | 15.000.000.000,00 | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Rasio Permukiman Layak Huni   | Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)         | 62,50         | 65,22 | 67,93                           | 72.844.309.800,00  | 70,65  | 21.100.000.000,00 | 73,37  | 23.500.000.000,00 | 76,09  | 23.500.000.000,00 | 78,80  | 23.500.000.000,00 | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|   | Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)                          | 9,03          | 8,64  | 8,24                            |                    | 7,85   |                   | 7,46   |                   | 7,07   |                   | 6,67   |                   | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH  |   |               |       |                                 | 231.000.000.000,00 |        | 43.500.000.000,00 |        | 43.500.000.000,00 |        | 43.500.000.000,00 |        | 43.500.000.000,00 |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME  | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|--|---|---------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
|  |   |               |       | 2026                            |                    | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |  |
|  |   |               |       | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |  |
| Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Terlaksananya pendataan dan verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh   |   |               |       |                                 | 211.000.000.000,00 |        | 23.500.000.000,00 |        | 23.500.000.000,00 |        | 23.500.000.000,00 |        | 23.500.000.000,00 | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh Ha | Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)  | 9,03          | 8,64  | 8,24                            | 20.000.000.000,00  | 7,85   | 20.000.000.000,00 | 7,46   | 20.000.000.000,00 | 7,07   | 20.000.000.000,00 | 6,67   | 20.000.000.000,00 | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)  |   |               |       |                                 | 71.202.950.835,00  |        | 73.792.119.519,00 |        | 77.571.331.471,00 |        | 80.828.464.618,00 |        | 81.028.464.618,00 |  |
| Meningkatnya penyediaan PSU permukiman   |   |               |       |                                 | 25.265.563.199,00  |        | 27.792.119.519,00 |        | 30.571.331.471,00 |        | 33.628.464.618,00 |        | 33.628.464.618,00 | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian  |   |               |       |                                 | 22.968.693.818,00  |        | 23.000.000.000,00 |        | 23.500.000.000,00 |        | 23.600.000.000,00 |        | 23.700.000.000,00 | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Peningkatan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian  | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)  | 55,56         | 61,13 | 66,67                           | 22.968.693.818,00  | 72,22  | 23.000.000.000,00 | 77,78  | 23.500.000.000,00 | 83,33  | 23.600.000.000,00 | 88,89  | 23.700.000.000,00 | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  |   |               |       |                                 | 20.000.000.000,00  |        | 20.000.000.000,00 |        | 20.000.000.000,00 |        | 20.000.000.000,00 |        | 20.000.000.000,00 |  |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil  | Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana ( ) | 40            | 50    | 60                              | 10.000.000.000,00  | 70     | 10.000.000.000,00 | 80     | 10.000.000.000,00 | 90     | 10.000.000.000,00 | 100    | 10.000.000.000,00 | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil  |   |               |       |                                 | 10.000.000.000,00  |        | 10.000.000.000,00 |        | 10.000.000.000,00 |        | 10.000.000.000,00 |        | 10.000.000.000,00 | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,                                  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME  | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|--|---|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
|  |   |               |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |  |
|  |   |               |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |  |
|  |   |               |       |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN   |
| 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |   |               |       |                                 | 22.491.039.446,00 |        | 25.732.120.837,00 |        | 29.220.976.626,00 |        | 32.154.489.567,00 |        | 35.393.079.821,00 |  |
| 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            |   |               |       |                                 | 19.090.797.196,00 |        | 21.706.894.712,00 |        | 24.349.878.558,00 |        | 26.087.555.450,00 |        | 29.108.110.615,00 |  |
| Nilai LAKIP Perangkat Daerah   | Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian (poin)              | 90.00         | 90.10 | 80.20                           | 10.301.688.346,00 | 80.30  | 12.427.488.345,00 | 80.40  | 14.564.988.345,00 | 80.50  | 15.732.988.345,00 | 81.00  | 18.174.604.533,00 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                |
| Nilai LAKIP Perangkat Daerah   |   |               |       |                                 | 8.789.108.850,00  |        | 9.279.406.367,00  |        | 9.784.890.213,00  |        | 10.354.567.105,00 |        | 10.933.506.082,00 | 1.05.0.00.0.00.05.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                   |   |               |       |                                 | 1.142.264.550,00  |        | 1.224.000.000,00  |        | 1.327.000.000,00  |        | 1.444.201.297,00  |        | 1.514.399.000,00  |  |
| Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum                                | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%) | 81.00         | 81.65 | 81.74                           | 1.042.264.550,00  | 81.76  | 1.054.000.000,00  | 81.85  | 1.087.000.000,00  | 81.90  | 1.139.201.297,00  | 82.00  | 1.139.399.000,00  | 1.05.0.00.0.00.04.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                |
| Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada                                     |   |               |       |                                 | 100.000.000,00    |        | 170.000.000,00    |        | 240.000.000,00    |        | 305.000.000,00    |        | 375.000.000,00    | 1.05.0.00.0.00.04.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                |
| 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA   |   |               |       |                                 | 1.179.102.700,00  |        | 1.566.726.125,00  |        | 1.896.848.068,00  |        | 2.231.857.820,00  |        | 2.314.695.206,00  |  |
| Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                      |   |               |       |                                 | 567.050.000,00    |        | 823.385.000,00    |        | 919.903.500,00    |        | 1.016.573.850,00  |        | 1.099.411.236,00  | 1.05.0.00.0.00.05.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat  |   |               |       |                                 | 367.247.500,00    |        | 437.334.625,00    |        | 517.934.818,00    |        | 641.521.782,00    |        | 641.521.782,00    | 1.05.0.00.0.00.05.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana  |   |               |       |                                 | 244.805.200,00    |        | 306.006.500,00    |        | 459.009.750,00    |        | 573.762.188,00    |        | 573.762.188,00    | 1.05.0.00.0.00.05.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN                             |   |               |       |                                 | 1.078.875.000,00  |        | 1.234.500.000,00  |        | 1.647.250.000,00  |        | 2.390.875.000,00  |        | 2.455.875.000,00  |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                   | INDIKATOR OUTCOME                                 | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|---|---|---------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---|
|   |   |               |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |   |
|   |   |               |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |   |
| DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                      |   |               |      |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |   |
| Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran                           |   |               |      |                                 | 720.000.000,00   |        | 843.000.000,00   |        | 1.060.000.000,00 |        | 1.510.000.000,00 |        | 1.575.000.000,00 | 1.05.0.00.0.00.05.000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran   |   |               |      |                                 | 358.875.000,00   |        | 391.500.000,00   |        | 587.250.000,00   |        | 880.875.000,00   |        | 880.875.000,00   | 1.05.0.00.0.00.05.000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                            |   |               |      |                                 | 3.927.000.000,00 |        | 4.114.000.000,00 |        | 4.301.000.000,00 |        | 4.483.000.000,00 |        | 4.665.000.000,00 |   |
| 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                               |   |               |      |                                 | 1.232.000.000,00 |        | 1.253.000.000,00 |        | 1.274.000.000,00 |        | 1.295.000.000,00 |        | 1.316.000.000,00 |   |
| Meningkatnya pemberdayaan sosial                                    |   |               |      |                                 | 1.232.000.000,00 |        | 1.253.000.000,00 |        | 1.274.000.000,00 |        | 1.295.000.000,00 |        | 1.316.000.000,00 | 2.13.1.06.0.00.05.000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL         |
| 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                               |   |               |      |                                 | 1.435.000.000,00 |        | 1.486.000.000,00 |        | 1.537.000.000,00 |        | 1.588.000.000,00 |        | 1.639.000.000,00 |   |
| Meningkatnya rehabilitasi sosial                                    |   |               |      |                                 | 1.435.000.000,00 |        | 1.486.000.000,00 |        | 1.537.000.000,00 |        | 1.588.000.000,00 |        | 1.639.000.000,00 | 2.13.1.06.0.00.05.000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL         |
| 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                   |   |               |      |                                 | 450.000.000,00   |        | 490.000.000,00   |        | 530.000.000,00   |        | 570.000.000,00   |        | 610.000.000,00   |   |
| Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial                        |   |               |      |                                 | 450.000.000,00   |        | 490.000.000,00   |        | 530.000.000,00   |        | 570.000.000,00   |        | 610.000.000,00   | 2.13.1.06.0.00.05.000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL         |
| 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                |   |               |      |                                 | 685.000.000,00   |        | 745.000.000,00   |        | 805.000.000,00   |        | 865.000.000,00   |        | 925.000.000,00   |   |
| Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana                     |   |               |      |                                 | 685.000.000,00   |        | 745.000.000,00   |        | 805.000.000,00   |        | 865.000.000,00   |        | 925.000.000,00   | 2.13.1.06.0.00.05.000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL         |
| 1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                  |   |               |      |                                 | 125.000.000,00   |        | 140.000.000,00   |        | 155.000.000,00   |        | 165.000.000,00   |        | 175.000.000,00   |   |
| Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik | Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase) | -             | -    | 14.29                           | 125.000.000,00   | 35.71  | 140.000.000,00   | 57.14  | 155.000.000,00   | 78.57  | 165.000.000,00   | 100.00 | 175.000.000,00   | 2.13.1.06.0.00.05.000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL         |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                     | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|---|---|---------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
|   |   |               |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |  |
|   |   |               |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |  |
| 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                        |   |               |      |                                 | 8.325.465.927,00 |        | 9.158.012.519,00 |        | 10.073.813.770,00 |        | 11.081.195.046,00 |        | 11.091.541.222,00 |  |
| 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |   |               |      |                                 | 6.842.288.704,00 |        | 7.526.517.575,00 |        | 8.279.169.333,00  |        | 9.107.086.264,00  |        | 9.117.432.440,00  |  |
| Nilai Lakip Perangkat Daerah  | Nilai Lakip Perangkat Daerah (Poin)   | 70            | 70   | 70                              | 6.842.288.704,00 | 75     | 7.526.517.575,00 | 75     | 8.279.169.333,00  | 80     | 9.107.086.264,00  | 80     | 9.117.432.440,00  | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| 2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                            |   |               |      |                                 | 51.806.700,00    |        | 56.987.370,00    |        | 62.686.107,00     |        | 68.954.618,00     |        | 68.954.618,00     |  |
| Terkelolanya informasi tenaga kerja                                   | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)  | 7             | 7    | 8                               | 51.806.700,00    | 8      | 56.987.370,00    | 8      | 62.686.107,00     | 8      | 68.954.618,00     | 10     | 68.954.618,00     | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA      |   |               |      |                                 | 1.160.535.266,00 |        | 1.276.588.792,00 |        | 1.404.247.671,00  |        | 1.544.672.439,00  |        | 1.544.672.439,00  |  |
| Meningkatnya produktivitas tenaga kerja                               | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)  | 7             | 7    | 8                               | 1.160.535.266,00 | 9      | 1.276.588.792,00 | 10     | 1.404.247.671,00  | 11     | 1.544.672.439,00  | 12     | 1.544.672.439,00  | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
|   | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Orang)   | 36            | 120  | 120                             |                  |        |                  |        |                   |        |                   |        |                   | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
|   | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (Orang)   | 100           | 100  | 100                             |                  |        |                  |        |                   |        |                   |        |                   | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
|   | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (Orang)   | 30            | 45   | 50                              |                  |        |                  |        |                   |        |                   |        |                   | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                             |   |               |      |                                 | 32.398.960,00    |        | 35.638.856,00    |        | 39.202.741,00     |        | 43.123.015,00     |        | 43.123.015,00     |  |
| Meningkatnya penempatan tenaga kerja                                  | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%) | 11            | 12   | 13                              | 32.398.960,00    | 14     | 35.638.856,00    | 15     | 39.202.741,00     | 16     | 43.123.015,00     | 17     | 43.123.015,00     | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
|   | Jumlah pencari kerja yang mengikuti Pengelolaan Pelayanan Antar Kerja (Orang)   | 1250          | 1300 | 1350                            |                  |        |                  |        |                   |        |                   |        |                   | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI                   |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME  | INDIKATOR OUTCOME  | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |  |                  |       |                  |  |
|--|--|---------------|------|---------------------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|--|--|------------------|-------|------------------|--|
|  |  |               |      | 2026                            |      | 2027              |      | 2028              |      | 2029              |      | 2030              |      |  |  |                  |       |                  |  |
|  |  |               |      | TARGET                          | PAGU | TARGET            | PAGU | TARGET            | PAGU | TARGET            | PAGU | TARGET            | PAGU |  |  |                  |       |                  |  |
|  |  |               |      |                                 |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      | DAN PERINDUSTRIAN  |  |                  |       |                  |  |
|  | Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (%)  | 84            | 85   | 86.50                           |      | 86.80             |      | 87.10             |      | 87.40             |      | 88                |      | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |  |                  |       |                  |  |
|  | Persentase penerapan Sistem Layanan IPK, RTKD dan BKOL yang telah dilaksanakan (%)   | 84            | 85   | 86                              |      | 87                |      | 88                |      | 89                |      | 90                |      | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |  |                  |       |                  |  |
|  | Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (Orang)  | 220           | 230  | 240                             |      | 250               |      | 260               |      | 270               |      | 280               |      | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |  |                  |       |                  |  |
|  | Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (Orang)   | 27            | 28   | 29                              |      | 29                |      | 30                |      | 30                |      | 31                |      | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |  |                  |       |                  |  |
| 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  |  |               |      |                                 |      | 238.436.297,00    |      | 262.279.926,00    |      | 288.507.918,00    |      | 317.358.710,00    |      | 317.358.710,00   |  |                  |       |                  |  |
| Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi                                | Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan (Persentase)   | 70            | 76   | 77                              |      | 238.436.297,00    |      | 262.279.926,00    |      | 288.507.918,00    |      | 317.358.710,00    |      | 317.358.710,00   | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |                  |       |                  |  |
|  | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%) | 23            | 25   | 27                              |      | 29                |      | 32                |      | 34                |      | 36                |      | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |  |                  |       |                  |  |
|  | Jumlah perusahaan yang telah melakukan pembentukan serikat pekerja/ serikat buruh (Perusahaan)   | 4             | 4    | 4                               |      | 5                 |      | 5                 |      | 6                 |      | 6                 |      | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |  |                  |       |                  |  |
|  | Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek (Orang)  | 4430          | 4440 | 4450                            |      | 4460              |      | 4470              |      | 4480              |      | 4490              |      | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |  |                  |       |                  |  |
| 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |               |      |                                 |      | 11.912.676.058,00 |      | 14.938.576.112,00 |      | 16.195.664.462,00 |      | 18.209.026.891,00 |      | 18.209.026.891,00  |  |                  |       |                  |  |
| 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA          |  |               |      |                                 |      | 6.535.898.500,00  |      | 7.606.258.500,00  |      | 7.606.258.500,00  |      | 8.139.258.500,00  |      | 8.139.258.500,00   |  |                  |       |                  |  |
| Nilai LAKIP perangkat daerah   | Nilai Lakip Perangkat Daerah (Poin)  | 70            | 70   | 70                              |      | 6.535.898.500,00  |      | 68.10             |      | 7.606.258.500,00  |      | 68.30             |      | 7.606.258.500,00   | 68.50  | 8.139.258.500,00 | 68.60 | 8.139.258.500,00 | 2.08.2.14.0.00.02.000 - DINAS PEMBERDAYAAN |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME  | INDIKATOR OUTCOME  | BASELINE 2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|--|--|---------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--|
|  |  |               |        | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |  |
|  |  |               |        | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |  |
|  |  |               |        |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  |
| 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  |  |               |        |                                 | 1.989.980.852,00 |        | 2.334.976.684,00 |        | 2.801.972.021,00 |        | 3.362.366.425,00 |        | 3.362.366.425,00 |  |
| Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan                        | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)                                  | 12            | 13     | 14                              | 1.989.980.852,00 | 1.5    | 2.334.976.684,00 | 1.5    | 2.801.972.021,00 | 1.5    | 3.362.366.425,00 | 1.5    | 3.362.366.425,00 | 2.08.2.14.0.00.02.000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)   | 57.2          | 57.2   | 57.30                           |                  | 57.40  |                  | 57.50  |                  | 57.60  |                  | 57.60  |                  | 2.08.2.14.0.00.02.000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN   |  |               |        |                                 | 564.558.842,00   |        | 1.221.014.726,00 |        | 1.404.166.935,00 |        | 1.614.791.975,00 |        | 1.614.791.975,00 |  |
| Menurunnya kekerasan terhadap perempuan  | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | 0.0005        | 90     | 90                              | 564.558.842,00   | 90     | 1.221.014.726,00 | 90     | 1.404.166.935,00 | 90     | 1.614.791.975,00 | 90     | 1.614.791.975,00 | 2.08.2.14.0.00.02.000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA  |  |               |        |                                 | 1.048.452.767,00 |        | 1.258.143.320,00 |        | 1.509.771.984,00 |        | 1.811.726.381,00 |        | 1.811.726.381,00 |  |
| Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)   | 86.86         | 100    | 100                             | 1.048.452.767,00 | 100    | 1.258.143.320,00 | 100    | 1.509.771.984,00 | 100    | 1.811.726.381,00 | 100    | 1.811.726.381,00 | 2.08.2.14.0.00.02.000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK  |  |               |        |                                 | 170.192.760,00   |        | 204.231.312,00   |        | 245.077.574,00   |        | 294.093.089,00   |        | 294.093.089,00   |  |
| Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak  | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan (Persentase)                  | 100           | 100    | 100                             | 170.192.760,00   | 100    | 204.231.312,00   | 100    | 245.077.574,00   | 100    | 294.093.089,00   | 100    | 294.093.089,00   | 2.08.2.14.0.00.02.000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)   |  |               |        |                                 | 593.215.600,00   |        | 652.537.160,00   |        | 717.790.876,00   |        | 789.569.964,00   |        | 789.569.964,00   |  |
| Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif   | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)  | 53.820        | 53.840 | 53.850                          | 593.215.600,00   | 53.860 | 652.537.160,00   | 53.870 | 717.790.876,00   | 53.880 | 789.569.964,00   | 53.890 | 789.569.964,00   | 2.08.2.14.0.00.02.000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME  | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024   | 2025            | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|--|---|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--|
|  |   |                 |                 | 2026                            |                  | 2027            |                  | 2028            |                  | 2029            |                  | 2030            |                  |  |
|  |   |                 |                 | TARGET                          | PAGU             | TARGET          | PAGU             | TARGET          | PAGU             | TARGET          | PAGU             | TARGET          | PAGU             |  |
|  |   |                 |                 |                                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  | PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA   |
| 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK   |   |                 |                 |                                 | 1.010.376.737,00 |                 | 1.661.414.410,00 |                 | 1.910.626.572,00 |                 | 2.197.220.557,00 |                 | 2.197.220.557,00 |  |
| Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase) | 90              | 90              | 90                              | 1.010.376.737,00 | 90              | 1.661.414.410,00 | 90              | 1.910.626.572,00 | 90              | 2.197.220.557,00 | 90              | 2.197.220.557,00 | 2.08.2.14.0.00.02.000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|  | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)   | 72.10           | 72.10           | 72.20                           |                  | 72.30           |                  | 72.40           |                  | 72.50           |                  | 72.50           |                  | 2.08.2.14.0.00.02.000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN   |   |                 |                 |                                 | 3.633.500.025,00 |                 | 3.939.000.000,00 |                 | 4.362.000.000,00 |                 | 4.887.500.000,00 |                 | 5.000.000.000,00 |  |
| 2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN  |   |                 |                 |                                 | 559.000.000,00   |                 | 600.000.000,00   |                 | 800.000.000,00   |                 | 950.000.000,00   |                 | 1.000.000.000,00 |  |
| Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan   | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)  | 50,000,00 0.00  | 23,901,330.00   | 259,000,00 0.00                 | 559.000.000,00   | 300,000,000 .00 | 600.000.000,00   | 450,000,000 .00 | 800.000.000,00   | 600,000,000 .00 | 950.000.000,00   | 600,000,000 .00 | 1.000.000.000,00 | 3.27.2.09.0.00.02.000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                   |
|  | Persentase cadangan pangan (%)  | 50,000,00 0.00  | 23,901,330.00   | 259,000,00 0.00                 |                  | 300,000,000 .00 |                  | 450,000,000 .00 |                  | 600,000,000 .00 |                  | 600,000,000 .00 |                  | 3.27.2.09.0.00.02.000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                   |
| 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT  |   |                 |                 |                                 | 2.332.500.000,00 |                 | 2.507.000.000,00 |                 | 2.705.000.000,00 |                 | 3.078.000.000,00 |                 | 3.128.000.000,00 |  |
| Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat   | Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)  | 133,272,6 40.00 | 115,424,26 5.00 | 250,000,00 0.00                 | 2.332.500.000,00 | 300,000,000 .00 | 2.507.000.000,00 | 300,000,000 .00 | 2.705.000.000,00 | 300,000,000 .00 | 3.078.000.000,00 | 300,000,000 .00 | 3.128.000.000,00 | 3.27.2.09.0.00.02.000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                   |
| 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN  |   |                 |                 |                                 | 527.000.000,00   |                 | 527.000.000,00   |                 | 527.000.000,00   |                 | 524.500.000,00   |                 | 527.000.000,00   |  |
| Meningkatnya penanganan kerawanan pangan   | Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)  | 70              | 80              | 85                              | 527.000.000,00   | 90              | 527.000.000,00   | 95              | 527.000.000,00   | 100             | 524.500.000,00   | 100             | 527.000.000,00   | 3.27.2.09.0.00.02.000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                   |
| 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN   |   |                 |                 |                                 | 215.000.025,00   |                 | 305.000.000,00   |                 | 330.000.000,00   |                 | 335.000.000,00   |                 | 345.000.000,00   |  |
| Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan   | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan   | 70              | 80              | 85                              | 215.000.025,00   | 90              | 305.000.000,00   | 95              | 330.000.000,00   | 100             | 335.000.000,00   | 100             | 345.000.000,00   | 3.27.2.09.0.00.02.000 - DINAS  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME   | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|---|---|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------|--|
|   |   |               |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                   |  |
|   |   |               |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                   |  |
|   | dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)   |               |       |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                   | PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN   |
| 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN  |   |               |       |                                 | 25.000.000,00     |        | 25.500.000,00     |        | 26.000.000,00     |        | 26.500.000,00     |        | 27.000.000,00     |                                   |  |
| 2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE  |   |               |       |                                 | 25.000.000,00     |        | 25.500.000,00     |        | 26.000.000,00     |        | 26.500.000,00     |        | 27.000.000,00     |                                   |  |
| Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah   | Persentase Informasi Petanahan yang Dimanfaatkan (Persentase)   | 45            | 50    | 55                              | 25.000.000,00     | 60     | 25.500.000,00     | 65     | 26.000.000,00     | 70     | 26.500.000,00     | 75     | 27.000.000,00     |                                   | 1.03.1.04.2.10.03.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP  |   |               |       |                                 | 68.746.491.991,00 |        | 70.228.395.716,00 |        | 67.589.975.719,00 |        | 63.022.012.439,00 |        | 63.452.830.439,00 |                                   |  |
| 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |   |               |       |                                 | 15.882.964.900,00 |        | 16.481.340.720,00 |        | 16.694.890.720,00 |        | 17.362.072.820,00 |        | 17.639.890.820,00 |                                   |  |
| Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, pengelolaan keuangan yang tertib serta kompetensi dan kinerja aparatur pemerintah daerah | Nilai Lakip Perangkat Daerah (Poin)   | 60            | 69    | 70                              | 15.882.964.900,00 | 70.2   | 16.481.340.720,00 | 70.5   | 16.694.890.720,00 | 71     | 17.362.072.820,00 | 71.5   | 17.639.890.820,00 |                                   | 2.11.1.04.0.00.03.000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP   |
| 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP  |   |               |       |                                 | 3.600.000.000,00  |        | 3.660.000.000,00  |        | 600.000.000,00    |        | 1.200.000.000,00  |        | 1.200.000.000,00  |                                   |  |
| Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP  | indikator program perencanaan lingkungan hidup: persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%) | 100           | 100   | 100                             | 3.600.000.000,00  | 100    | 3.660.000.000,00  | 100    | 600.000.000,00    | 100    | 1.200.000.000,00  | 100    | 1.200.000.000,00  |                                   | 2.11.1.04.0.00.03.000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP   |
| 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP   |   |               |       |                                 | 1.155.589.280,00  |        | 1.650.000.000,00  |        | 1.565.000.000,00  |        | 1.627.000.000,00  |        | 1.690.000.000,00  |                                   |  |
| Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup   | Indeks Kualitas Air (Indeks)  | 54.71         | 76.04 | 76.24                           | 1.155.589.280,00  | 76.44  | 1.650.000.000,00  | 76.64  | 1.565.000.000,00  | 76.84  | 1.627.000.000,00  | 77.04  | 1.690.000.000,00  |                                   | 2.11.1.04.0.00.03.000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP   |
|   | Indeks Kualitas Udara (Indeks)  | 91.02         | 79.57 | 79.87                           |                   | 80.17  |                   | 80.47  |                   | 80.77  |                   | 81.07  |                   |                                   | 2.11.1.04.0.00.03.000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP   |
| 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)  |   |               |       |                                 | 591.181.845,00    |        | 650.300.030,00    |        | 715.330.033,00    |        | 786.863.036,00    |        | 786.863.036,00    |                                   |  |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati   | Persentase RTH (Persentase)   | 50            | 51    | 52                              | 591.181.845,00    | 53     | 650.300.030,00    | 54     | 715.330.033,00    | 55     | 786.863.036,00    | 56     | 786.863.036,00    |                                   | 2.11.1.04.0.00.03.000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP   |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME   | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB              |
|---|---|---------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
|   |   |               |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |  |
|   |   |               |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |  |
| 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                |   |               |      |                                 | 300.000.000,00    |        | 330.000.000,00    |        | 363.000.000,00    |        | 399.300.000,00    |        | 399.300.000,00    |  |
| Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                           | Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)  | 75            | 85   | 86                              | 300.000.000,00    | 87     | 330.000.000,00    | 88     | 363.000.000,00    | 89     | 399.300.000,00    | 90     | 399.300.000,00    | 2.11.1.04.0.00.03.000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |   |               |      |                                 | 250.000.000,00    |        | 275.000.000,00    |        | 300.000.000,00    |        | 300.000.000,00    |        | 325.000.000,00    |  |
| Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan                                  | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%) | 75            | 75   | 80                              | 250.000.000,00    | 85     | 275.000.000,00    | 85     | 300.000.000,00    | 90     | 300.000.000,00    | 90     | 325.000.000,00    | 2.11.1.04.0.00.03.000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH           |   |               |      |                                 | 500.000.000,00    |        | 600.000.000,00    |        | 650.000.000,00    |        | 650.000.000,00    |        | 700.000.000,00    |  |
| Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH                       | Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)  | 0             | 100  | 100                             | 500.000.000,00    | 100    | 600.000.000,00    | 100    | 650.000.000,00    | 100    | 650.000.000,00    | 100    | 700.000.000,00    | 2.11.1.04.0.00.03.000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              |   |               |      |                                 | 50.000.000,00     |        | 55.000.000,00     |        | 60.000.000,00     |        | 60.000.000,00     |        | 65.000.000,00     |  |
| Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup  | Persentase masyarakat/kelompok masyarakat yang mendapatkan pendidikan lingkungan hidup /ditingkatkan kompetensinya (%)                                | 6.699.000     | 80   | 80                              | 50.000.000,00     | 90     | 55.000.000,00     | 90     | 60.000.000,00     | 90     | 60.000.000,00     | 100    | 65.000.000,00     | 2.11.1.04.0.00.03.000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT   |   |               |      |                                 | 1.000.000.000,00  |        | 1.100.000.000,00  |        | 1.210.000.000,00  |        | 1.331.000.000,00  |        | 1.331.000.000,00  |  |
| Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup                                     | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)  | 0             | 100  | 100                             | 1.000.000.000,00  | 100    | 1.100.000.000,00  | 100    | 1.210.000.000,00  | 100    | 1.331.000.000,00  | 100    | 1.331.000.000,00  | 2.11.1.04.0.00.03.000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP   |   |               |      |                                 | 150.000.000,00    |        | 160.000.000,00    |        | 165.000.000,00    |        | 165.500.000,00    |        | 175.500.000,00    |  |
| Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup  | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)  | 75            | 75   | 76                              | 150.000.000,00    | 77     | 160.000.000,00    | 78     | 165.000.000,00    | 79     | 165.500.000,00    | 80     | 175.500.000,00    | 2.11.1.04.0.00.03.000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   |   |               |      |                                 | 45.266.755.966,00 |        | 45.266.754.966,00 |        | 45.266.754.966,00 |        | 39.140.276.583,00 |        | 39.140.276.583,00 |  |
| Meningkatnya tata kelola persampahan  | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)   | 41            | 41   | 41.5                            | 45.266.755.966,00 | 42     | 45.266.754.966,00 | 42.5   | 45.266.754.966,00 | 43     | 39.140.276.583,00 | 43.5   | 39.140.276.583,00 | 2.11.1.04.0.00.03.000 - DINAS                  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME  | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                               |
|--|-------------------|---------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|
|  |                   |               |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |   |
|  |                   |               |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |   |
|  |                   |               |      |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | LINGKUNGAN HIDUP  |
| 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                   |               |      |                                 | 14.448.780.178,00 |        | 14.967.590.396,00 |        | 15.540.590.996,00 |        | 15.624.090.394,00 |        | 15.654.090.394,00 |   |
| 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA            |                   |               |      |                                 | 12.906.554.578,00 |        | 13.162.554.396,00 |        | 13.639.554.996,00 |        | 13.654.554.394,00 |        | 13.684.554.394,00 |   |
| Nilai LAKIP Perangkat Daerah   |                   |               |      |                                 | 6.453.277.289,00  |        | 6.581.277.198,00  |        | 6.819.777.798,00  |        | 6.827.277.196,00  |        | 6.827.277.196,00  |   |
| Nilai LAKIP Perangkat Daerah   |                   |               |      |                                 | 6.453.277.289,00  |        | 6.581.277.198,00  |        | 6.819.777.198,00  |        | 6.827.277.198,00  |        | 6.857.277.198,00  | 2.12.0.00.0.00.04.000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK   |                   |               |      |                                 | 391.500.000,00    |        | 500.000.000,00    |        | 530.000.000,00    |        | 530.000.000,00    |        | 530.000.000,00    |   |
| Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk                               |                   |               |      |                                 | 195.750.000,00    |        | 250.000.000,00    |        | 265.000.000,00    |        | 265.000.000,00    |        | 265.000.000,00    |   |
| Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk                               |                   |               |      |                                 | 195.750.000,00    |        | 250.000.000,00    |        | 265.000.000,00    |        | 265.000.000,00    |        | 265.000.000,00    | 2.12.0.00.0.00.04.000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL   |                   |               |      |                                 | 367.189.600,00    |        | 511.500.000,00    |        | 571.500.000,00    |        | 571.500.000,00    |        | 571.500.000,00    |   |
| Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil                                   |                   |               |      |                                 | 183.594.800,00    |        | 255.750.000,00    |        | 285.750.000,00    |        | 285.750.000,00    |        | 285.750.000,00    |   |
| Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil                                   |                   |               |      |                                 | 183.594.800,00    |        | 255.750.000,00    |        | 285.750.000,00    |        | 285.750.000,00    |        | 285.750.000,00    | 2.12.0.00.0.00.04.000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                |                   |               |      |                                 | 751.556.000,00    |        | 757.556.000,00    |        | 761.556.000,00    |        | 828.056.000,00    |        | 828.056.000,00    |   |
| Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan                                  |                   |               |      |                                 | 375.778.000,00    |        | 378.778.000,00    |        | 380.778.000,00    |        | 414.028.000,00    |        | 414.028.000,00    |   |
| Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan                                  |                   |               |      |                                 | 375.778.000,00    |        | 378.778.000,00    |        | 380.778.000,00    |        | 414.028.000,00    |        | 414.028.000,00    | 2.12.0.00.0.00.04.000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                |                   |               |      |                                 | 31.980.000,00     |        | 35.980.000,00     |        | 37.980.000,00     |        | 39.980.000,00     |        | 39.980.000,00     |   |
| Meningkatnya kualitas profil kependudukan  |                   |               |      |                                 | 15.990.000,00     |        | 17.990.000,00     |        | 18.990.000,00     |        | 19.990.000,00     |        | 19.990.000,00     |   |
| Meningkatnya kualitas profil kependudukan  |                   |               |      |                                 | 15.990.000,00     |        | 17.990.000,00     |        | 18.990.000,00     |        | 19.990.000,00     |        | 19.990.000,00     | 2.12.0.00.0.00.04.000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG  |                   |               |      |                                 | 9.097.000.000,00  |        | 10.091.000.000,00 |        | 10.121.000.000,00 |        | 10.538.000.000,00 |        | 11.810.360.000,00 |   |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME   | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|---|---|---------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--|
|   |   |               |        | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |  |
|   |   |               |        | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |  |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |   |               |        |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |  |
| 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                   |   |               |        |                                 | 6.915.000.000,00 |        | 7.627.000.000,00 |        | 7.380.000.000,00 |        | 7.520.000.000,00 |        | 8.535.360.000,00 |  |
| Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan  |   |               |        |                                 | 6.915.000.000,00 |        | 7.627.000.000,00 |        | 7.380.000.000,00 |        | 7.520.000.000,00 |        | 8.535.360.000,00 | 2.13.1.06.0.00.05.000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL                      |
| 2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA   |   |               |        |                                 | 100.000.000,00   |        | 125.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |        | 175.000.000,00   |        | 200.000.000,00   |  |
| Meningkatnya kualitas penataan desa   |   |               |        |                                 | 100.000.000,00   |        | 125.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |        | 175.000.000,00   |        | 200.000.000,00   | 2.13.1.06.0.00.05.000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL                      |
| 2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA   |   |               |        |                                 | 100.000.000,00   |        | 125.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |        | 175.000.000,00   |        | 200.000.000,00   |  |
| Meningkatnya efektivitas kerja sama desa  |   |               |        |                                 | 100.000.000,00   |        | 125.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |        | 175.000.000,00   |        | 200.000.000,00   | 2.13.1.06.0.00.05.000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL                      |
| 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  |   |               |        |                                 | 757.000.000,00   |        | 814.000.000,00   |        | 866.000.000,00   |        | 918.000.000,00   |        | 970.000.000,00   |  |
| Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa  |   |               |        |                                 | 757.000.000,00   |        | 814.000.000,00   |        | 866.000.000,00   |        | 918.000.000,00   |        | 970.000.000,00   | 2.13.1.06.0.00.05.000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL                      |
| 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT           |   |               |        |                                 | 1.225.000.000,00 |        | 1.400.000.000,00 |        | 1.575.000.000,00 |        | 1.750.000.000,00 |        | 1.905.000.000,00 |  |
| Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan |   |               |        |                                 | 1.225.000.000,00 |        | 1.400.000.000,00 |        | 1.575.000.000,00 |        | 1.750.000.000,00 |        | 1.905.000.000,00 | 2.13.1.06.0.00.05.000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL                      |
| 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                          |   |               |        |                                 | 4.350.752.090,00 |        | 4.682.739.985,00 |        | 4.990.579.259,00 |        | 5.282.102.883,00 |        | 5.282.102.883,00 |  |
| 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK   |   |               |        |                                 | 958.390.675,00   |        | 1.120.760.500,00 |        | 1.250.500.800,00 |        | 1.355.080.500,00 |        | 1.355.080.500,00 |  |
| Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk   | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) | 2.19-         | 2.14 - | 2.10-                           | 958.390.675,00   | 2.10-  | 1.120.760.500,00 | 2.10-  | 1.250.500.800,00 | 2.10-  | 1.355.080.500,00 | 2.10-  | 1.355.080.500,00 | 2.08.2.14.0.00.02.000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME   | INDIKATOR OUTCOME  | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|---|--|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
|   |  |               |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |  |
|   |  |               |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |  |
| 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)   |  |               |       |                                 | 1.942.573.050,00  |        | 2.039.701.702,00  |        | 2.141.686.787,00  |        | 2.248.711.127,00  |        | 2.248.711.127,00  |  |
| Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)  | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR (%))                          | 10.20         | 10.20 | 10                              | 1.942.573.050,00  | 9.80   | 2.039.701.702,00  | 9.50   | 2.141.686.787,00  | 8      | 2.248.711.127,00  | 8      | 2.248.711.127,00  | 2.08.2.14.0.00.02.000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|   | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)  | 78            | 78    | 80                              |                   | 80.15  |                   | 80.30  |                   | 80.45  |                   | 80.45  |                   | 2.08.2.14.0.00.02.000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                        |  |               |       |                                 | 1.449.788.365,00  |        | 1.522.277.783,00  |        | 1.598.391.672,00  |        | 1.678.311.256,00  |        | 1.678.311.256,00  |  |
| Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Presentase)                             | 44            | 44    | 45                              | 1.449.788.365,00  | 75     | 1.522.277.783,00  | 80     | 1.598.391.672,00  | 85     | 1.678.311.256,00  | 90     | 1.678.311.256,00  | 2.08.2.14.0.00.02.000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN   |  |               |       |                                 | 15.017.461.721,00 |        | 11.392.242.309,00 |        | 11.837.946.158,00 |        | 13.236.776.012,00 |        | 15.127.037.724,00 |  |
| 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                         |  |               |       |                                 | 7.188.218.772,00  |        | 8.596.451.588,00  |        | 9.869.419.325,00  |        | 11.331.682.226,00 |        | 13.031.434.559,00 |  |
| Nilai LAKIP Perangkat Daerah  |  |               |       |                                 | 7.188.218.772,00  |        | 8.596.451.588,00  |        | 9.869.419.325,00  |        | 11.331.682.226,00 |        | 13.031.434.559,00 | 2.15.0.00.0.00.06.000 - DINAS PERHUBUNGAN  |
| 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                       |  |               |       |                                 | 6.531.435.724,00  |        | 1.040.812.412,00  |        | 1.155.301.778,00  |        | 1.282.384.973,00  |        | 1.410.623.471,00  |  |
| Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat  | Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota (Rasio)  | 0:0           | 0:0   | 7:21                            | 6.531.435.724,00  | 10:21  | 1.040.812.412,00  | 13:21  | 1.155.301.778,00  | 17:21  | 1.282.384.973,00  | 21:21  | 1.410.623.471,00  | 2.15.0.00.0.00.06.000 - DINAS PERHUBUNGAN  |
|   | Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Presentase) | 0             | 0     | 30                              |                   | 35     |                   | 40     |                   | 50     |                   | 50     |                   | 2.15.0.00.0.00.06.000 - DINAS PERHUBUNGAN  |
|   | Persentase fasilitas perhubungan yang berfungsi dengan baik (%)  | 20            | 20    | 25                              |                   | 30     |                   | 35     |                   | 40     |                   | 45     |                   | 2.15.0.00.0.00.06.000 - DINAS PERHUBUNGAN  |
|   | Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan (%)   | 0             | 30    | 55                              |                   | 65     |                   | 70     |                   | 75     |                   | 85     |                   | 2.15.0.00.0.00.06.000 - DINAS PERHUBUNGAN  |
|   | Persentase Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas (%)  | 0             | 0     | 73.33                           |                   | 80     |                   | 83.33  |                   | 85     |                   | 90     |                   | 2.15.0.00.0.00.06.000 - DINAS PERHUBUNGAN  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                       | INDIKATOR OUTCOME  | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                   |   |
|---|--|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---|
|   |  |               |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   |                                   | 2030              |   |
|   |  |               |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                   | TARGET            | PAGU  |
|   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kendaraan Bermotor yang dipelihara (Unit)  | 9             | 9     | 9                               |                   | 9      |                   | 9      |                   | 9      |                   | 9                                 |                   | 2.15.0.00.0.00.06.000 - DINAS PERHUBUNGAN                                       |
|   | Persentase Kendaraan Bermotor Angkutan Umum/Barang Yang Laik Jalan (%)   | 0             | 35.15 | 40.18                           |                   | 55.36  |                   | 62.50  |                   | 70.54  |                   | 82.14                             |                   | 2.15.0.00.0.00.06.000 - DINAS PERHUBUNGAN                                       |
|   | Jumlah Penyelenggaraan Angkutan Umum yang di Normalisasi (Unit)  | 0             | 0     | 35                              |                   | 35     |                   | 40     |                   | 45     |                   | 60                                |                   | 2.15.0.00.0.00.06.000 - DINAS PERHUBUNGAN                                       |
| 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                 |  |               |       |                                 | 1.297.807.225,00  |        | 1.754.978.309,00  |        | 813.225.055,00    |        | 622.708.813,00    |                                   | 684.979.694,00    |   |
| Meningkatnya kualitas layanan transportasi sungai                       | jumlah dermaga aktif (Unit)  | 0             | 0     | 1                               | 1.297.807.225,00  | 1      | 1.754.978.309,00  | 1      | 813.225.055,00    | 1      | 622.708.813,00    | 1                                 | 684.979.694,00    | 2.15.0.00.0.00.06.000 - DINAS PERHUBUNGAN                                       |
|   | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)   | 0             | 3     | 1                               |                   | 1      |                   | 1      |                   | 1      |                   | 1                                 |                   | 2.15.0.00.0.00.06.000 - DINAS PERHUBUNGAN                                       |
|   | Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi dan terpelihara (Unit)   | 0             | 0     | 1                               |                   | 1      |                   | 1      |                   | 1      |                   | 1                                 |                   | 2.15.0.00.0.00.06.000 - DINAS PERHUBUNGAN                                       |
| 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA            |  |               |       |                                 | 12.328.255.088,00 |        | 20.140.211.639,00 |        | 18.378.443.325,00 |        | 20.874.880.187,00 |                                   | 20.889.680.188,00 |   |
| 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |  |               |       |                                 | 5.806.950.165,00  |        | 11.107.633.700,00 |        | 6.984.468.257,00  |        | 7.509.185.303,00  |                                   | 7.523.985.303,00  |   |
| Meningkatkan capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)          | Persentase laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu (%)   | 0             | 75    | 80                              | 5.806.950.165,00  | 85     | 11.107.633.700,00 | 90     | 6.984.468.257,00  | 95     | 7.509.185.303,00  | 100                               | 7.523.985.303,00  | 2.16.2.21.2.20.07.000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK           |  |               |       |                                 | 2.774.407.700,00  |        | 4.161.611.550,00  |        | 5.548.815.400,00  |        | 6.936.019.250,00  |                                   | 6.936.019.250,00  |   |
| Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas (%) | 50            | 50    | 55                              | 2.774.407.700,00  | 60     | 4.161.611.550,00  | 65     | 5.548.815.400,00  | 70     | 6.936.019.250,00  | 70                                | 6.936.019.250,00  | 2.16.2.21.2.20.07.000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                      |  |               |       |                                 | 3.746.897.223,00  |        | 4.870.966.389,00  |        | 5.845.159.668,00  |        | 6.429.675.634,00  |                                   | 6.429.675.635,00  |   |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika                  | Nilai tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Kabupaten (Nilai)   | 2             | 2     | 3                               | 3.746.897.223,00  | 3      | 4.870.966.389,00  | 3      | 5.845.159.668,00  | 4      | 6.429.675.634,00  | 4                                 | 6.429.675.635,00  | 2.16.2.21.2.20.07.000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH   |  |               |       |                                 | 1.964.164.000,00  |        | 2.168.648.800,00  |        | 2.356.143.900,00  |        | 2.533.530.000,00  |                                   | 2.533.530.000,00  |   |
| 2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                    |  |               |       |                                 | 45.000.000,00     |        | 47.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |        | 55.000.000,00     |                                   | 55.000.000,00     |   |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME  | INDIKATOR OUTCOME  | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|--|--|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
|  |  |               |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |  |
|  |  |               |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |  |
| Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam                             | Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)      | 15,17         | 15,68 | 16,55                           | 45.000.000,00     | 17,24  | 47.000.000,00     | 17,93  | 50.000.000,00     | 18,62  | 55.000.000,00     | 19,31  | 55.000.000,00     | 3.30.2.17.0.00.03.000 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              |  |               |       |                                 | 235.200.000,00    |        | 279.960.000,00    |        | 322.368.000,00    |        | 349.000.000,00    |        | 349.000.000,00    |  |
| Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi                                     | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)                  | 71,72         | 72,41 | 73,10                           | 235.200.000,00    | 73,79  | 279.960.000,00    | 74,48  | 322.368.000,00    | 75,17  | 349.000.000,00    | 75,86  | 349.000.000,00    | 3.30.2.17.0.00.03.000 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                             |  |               |       |                                 | 83.200.000,00     |        | 87.654.900,00     |        | 100.920.400,00    |        | 106.900.000,00    |        | 106.900.000,00    |  |
| Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi  | Persentase Koperasi aktif (Persentase)                                       | 45,52         | 48,73 | 51,49                           | 83.200.000,00     | 54,43  | 87.654.900,00     | 59,21  | 100.920.400,00    | 63,52  | 106.900.000,00    | 67,21  | 106.900.000,00    | 3.30.2.17.0.00.03.000 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             |  |               |       |                                 | 230.000.000,00    |        | 280.000.000,00    |        | 285.000.000,00    |        | 290.000.000,00    |        | 290.000.000,00    |  |
| Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian  | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase) | 15,17         | 15,68 | 16,55                           | 230.000.000,00    | 17,24  | 280.000.000,00    | 17,93  | 285.000.000,00    | 18,62  | 290.000.000,00    | 19,31  | 290.000.000,00    | 3.30.2.17.0.00.03.000 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           |  |               |       |                                 | 260.500.000,00    |        | 276.593.500,00    |        | 280.655.500,00    |        | 283.700.000,00    |        | 283.700.000,00    |  |
| Meningkatnya produktivitas koperasi  | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)               | 21,21         | 22,30 | 22,85                           | 260.500.000,00    | 23,50  | 276.593.500,00    | 24,15  | 280.655.500,00    | 24,60  | 283.700.000,00    | 25,00  | 283.700.000,00    | 3.30.2.17.0.00.03.000 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |  |               |       |                                 | 900.500.000,00    |        | 966.700.000,00    |        | 1.063.300.000,00  |        | 1.169.730.000,00  |        | 1.169.730.000,00  |  |
| Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri                               | Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)   | 9,30          | 10,00 | 12,00                           | 900.500.000,00    | 14,30  | 966.700.000,00    | 16,50  | 1.063.300.000,00  | 18,00  | 1.169.730.000,00  | 20,00  | 1.169.730.000,00  | 3.30.2.17.0.00.03.000 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM  |  |               |       |                                 | 209.764.000,00    |        | 230.740.400,00    |        | 253.900.000,00    |        | 279.200.000,00    |        | 279.200.000,00    |  |
| Meningkatnya daya saing UMKM   | Proporsi UKM Menjalni Kemitraan dan Ekspor (Persentase)                      | 6,70          | 7,10  | 7,80                            | 209.764.000,00    | 8,30   | 230.740.400,00    | 9,10   | 253.900.000,00    | 10,2   | 279.200.000,00    | 12,00  | 279.200.000,00    | 3.30.2.17.0.00.03.000 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                  |  |               |       |                                 | 13.495.307.518,00 |        | 13.279.903.310,00 |        | 13.732.600.892,00 |        | 14.144.265.914,00 |        | 14.144.265.914,00 |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME  | INDIKATOR OUTCOME  | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|--|--|---------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
|  |  |               |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |  |
|  |  |               |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |  |
| 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |  |               |      |                                 | 12.590.307.518,00 |        | 12.339.903.310,00 |        | 12.752.600.892,00 |        | 13.129.265.914,00 |        | 13.129.265.914,00 |  |
| Nilai LAKIP perangkat daerah   |  |               |      |                                 | 6.295.153.759,00  |        | 6.169.951.655,00  |        | 6.376.300.446,00  |        | 6.564.632.957,00  |        | 6.564.632.957,00  |  |
| Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dan penyediaan sarana prasarana kantor dalam mendukung pelayanan publik. | Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dan penyediaan sarana prasarana kantor dalam mendukung pelayanan publik (%) | 100           | 100  | 100                             | 6.295.153.759,00  | 100    | 6.169.951.655,00  | 100    | 6.376.300.446,00  | 100    | 6.564.632.957,00  | 100    | 6.564.632.957,00  | 2.18.0.00.0.00.08.000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL   |  |               |      |                                 | 75.000.000,00     |        | 75.000.000,00     |        | 80.000.000,00     |        | 80.000.000,00     |        | 80.000.000,00     |  |
| Meningkatnya kemudahan berinvestasi  | Realisasi Total terhadap target investas (triliun rupiah)  | 1,3           | 1,3  | 1,4                             | 75.000.000,00     | 1,5    | 75.000.000,00     | 1,6    | 80.000.000,00     | 1,7    | 80.000.000,00     | 1,8    | 80.000.000,00     | 2.18.0.00.0.00.08.000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL  |  |               |      |                                 | 50.000.000,00     |        | 60.000.000,00     |        | 70.000.000,00     |        | 80.000.000,00     |        | 80.000.000,00     |  |
| Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal   | Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi (%)  | 100           | 100  | 100                             | 50.000.000,00     | 100    | 60.000.000,00     | 100    | 70.000.000,00     | 100    | 80.000.000,00     | 100    | 80.000.000,00     | 2.18.0.00.0.00.08.000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL  |  |               |      |                                 | 355.000.000,00    |        | 365.000.000,00    |        | 375.000.000,00    |        | 375.000.000,00    |        | 375.000.000,00    |  |
| Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko  | Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (%)  | 100           | 100  | 100                             | 355.000.000,00    | 100    | 365.000.000,00    | 100    | 375.000.000,00    | 100    | 375.000.000,00    | 100    | 375.000.000,00    | 2.18.0.00.0.00.08.000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL   |  |               |      |                                 | 345.000.000,00    |        | 355.000.000,00    |        | 365.000.000,00    |        | 385.000.000,00    |        | 385.000.000,00    |  |
| Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal  | Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha (%)                                   | 100           | 100  | 100                             | 345.000.000,00    | 100    | 355.000.000,00    | 100    | 365.000.000,00    | 100    | 385.000.000,00    | 100    | 385.000.000,00    | 2.18.0.00.0.00.08.000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL  |  |               |      |                                 | 80.000.000,00     |        | 85.000.000,00     |        | 90.000.000,00     |        | 95.000.000,00     |        | 95.000.000,00     |  |
| Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal   | Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal (%)  | 100           | 100  | 100                             | 80.000.000,00     | 100    | 85.000.000,00     | 100    | 90.000.000,00     | 100    | 95.000.000,00     | 100    | 95.000.000,00     | 2.18.0.00.0.00.08.000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                     | INDIKATOR OUTCOME  | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|---|--|---------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|
|   |  |               |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |   |
|   |  |               |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |   |
| 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA             |  |               |      |                                 | 23.164.180.000,00 |        | 45.836.357.000,00 |        | 35.063.505.000,00 |        | 36.419.033.000,00 |        | 36.419.033.000,00 |   |
| 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |               |      |                                 | 12.589.180.000,00 |        | 31.466.357.000,00 |        | 14.238.505.000,00 |        | 15.044.033.000,00 |        | 15.044.033.000,00 |   |
| Persentase pemenuhan administrasi perencanaan dan laporan kinerja     | Persentase Perencanaan ( )   | 100           | 100  | 100                             | 120.000.000,00    | 100    | 140.000.000,00    | 100    | 160.000.000,00    | 100    | 180.000.000,00    | 100    | 180.000.000,00    | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| Persentase kedisiplinan pegawai                                       | Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD (Persentase) | 85            | 90   | 100                             | 6.767.000.000,00  | 100    | 6.834.670.000,00  | 100    | 6.903.000.000,00  | 100    | 6.972.000.000,00  | 100    | 6.972.000.000,00  | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| Jumlah pemenuhan kebutuhan pakaian dinas ASN                          | Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian (poin)                           | 10            | 12   | 14                              | 165.000.000,00    | 16     | 18.150.000.000,00 | 18     | 199.650.000,00    | 20     | 209.600.000,00    | 22     | 209.600.000,00    | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| Persentase pemenuhan administrasi umum pelaksanaan tugas pelayanan PD | Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah (Orang)           | 100           | 100  | 100                             | 521.400.000,00    | 100    | 573.540.000,00    | 100    | 630.894.000,00    | 100    | 693.983.000,00    | 100    | 693.983.000,00    | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan kinerja          |  |               |      |                                 | 4.839.780.000,00  |        | 5.565.747.000,00  |        | 6.122.321.000,00  |        | 6.743.550.000,00  |        | 6.743.550.000,00  | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik                    | Persentase BMD yang dikelola secara tertib dan akurat (Persentase)     | 85            | 85   | 95                              | 176.000.000,00    | 95     | 202.400.000,00    | 100    | 222.640.000,00    | 100    | 244.900.000,00    | 100    | 244.900.000,00    | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN        |  |               |      |                                 | 500.000.000,00    |        | 570.000.000,00    |        | 375.000.000,00    |        | 700.000.000,00    |        | 700.000.000,00    |   |
| Meningkatnya daya saing kepemudaan                                    | Persentase partisipasi pemuda dalam pembangunan (%)                    | 13            | 13   | 15                              | 500.000.000,00    | 16     | 570.000.000,00    | 17     | 375.000.000,00    | 17.5   | 700.000.000,00    | 18     | 700.000.000,00    | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN      |  |               |      |                                 | 9.750.000.000,00  |        | 13.250.000.000,00 |        | 19.800.000.000,00 |        | 19.900.000.000,00 |        | 19.900.000.000,00 |   |
| Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga                       | Jumlah prestasi olahraga (Medali)                                      | 4             | 4    | 8                               | 9.750.000.000,00  | 10     | 13.250.000.000,00 | 12     | 19.800.000.000,00 | 14     | 19.900.000.000,00 | 15     | 19.900.000.000,00 | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME  | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|--|---|---------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---|
|  |   |               |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |   |
|  |   |               |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |   |
|  | Persentase Atlet Berprestasi (%)                            | 86.5          | 86.5 | 90                              |                  | 90.5   |                  | 90.8   |                  | 91     |                  | 92.5   |                  | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   |
| 2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN   |   |               |      |                                 | 325.000.000,00   |        | 550.000.000,00   |        | 650.000.000,00   |        | 775.000.000,00   |        | 775.000.000,00   |   |
| Meningkatnya kualitas kepramukaan  | Tingkat partisipasi dalam kegiatan kepramukaan (Persentase) | 15            | 20   | 25                              | 325.000.000,00   | 30     | 550.000.000,00   | 35     | 650.000.000,00   | 40     | 775.000.000,00   | 50     | 775.000.000,00   | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   |
| 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK  |   |               |      |                                 | 199.421.311,00   |        | 388.871.556,00   |        | 758.299.535,00   |        | 1.478.684.093,00 |        | 1.478.684.093,00 |   |
| 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL   |   |               |      |                                 | 199.421.311,00   |        | 388.871.556,00   |        | 758.299.535,00   |        | 1.478.684.093,00 |        | 1.478.684.093,00 |   |
| Penyelenggaraan Statistik Sektoral Yang Berkualitas  |   |               |      |                                 | 199.421.311,00   |        | 388.871.556,00   |        | 758.299.535,00   |        | 1.478.684.093,00 |        | 1.478.684.093,00 | 2.16.2.21.2.20.07.000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN   |   |               |      |                                 | 343.813.600,00   |        | 670.436.520,00   |        | 1.307.351.214,00 |        | 2.549.334.867,00 |        | 2.549.334.867,00 |   |
| 2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                        |   |               |      |                                 | 343.813.600,00   |        | 670.436.520,00   |        | 1.307.351.214,00 |        | 2.549.334.867,00 |        | 2.549.334.867,00 |   |
| Meningkatkan keamanan siber pemerintah daerah sesuai dengan kondisi pemenuhan standar nasional |   |               |      |                                 | 343.813.600,00   |        | 670.436.520,00   |        | 1.307.351.214,00 |        | 2.549.334.867,00 |        | 2.549.334.867,00 | 2.16.2.21.2.20.07.000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN   |   |               |      |                                 | 1.109.277.200,00 |        | 1.207.741.060,00 |        | 1.312.128.113,00 |        | 1.437.484.518,00 |        | 1.437.484.518,00 |   |
| 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN  |   |               |      |                                 | 369.277.200,00   |        | 387.741.060,00   |        | 407.128.113,00   |        | 427.484.518,00   |        | 427.484.518,00   |   |
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan                              | Persentase kebudayaan yang dikembangkan (Persentase)        | 30            | 35   | 50                              | 369.277.200,00   | 55     | 387.741.060,00   | 60     | 407.128.113,00   | 65     | 427.484.518,00   | 65     | 427.484.518,00   | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   |
|  | Persentase obyek kebudayaan daerah yang dimanfaatkan (%)    | 35            | 50   | 55                              |                  | 60     |                  | 65     |                  | 70     |                  | 70     |                  | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   |
| 2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL  |   |               |      |                                 | 600.000.000,00   |        | 650.000.000,00   |        | 700.000.000,00   |        | 750.000.000,00   |        | 750.000.000,00   |   |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME   | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|---|---|---------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---|
|   |   |               |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |   |
|   |   |               |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |   |
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan (Persentase)                                    | 10            | 10   | 12                              | 600.000.000,00   | 15     | 650.000.000,00   | 17     | 700.000.000,00   | 18     | 750.000.000,00   | 20     | 750.000.000,00   | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
|   | Jumlah pagelaran dan penyelenggaraan festival budaya daerah (Kegiatan)                            | 5             | 5    | 5                               |                  | 5      |                  | 6      |                  | 6      |                  | 7      |                  | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH   |   |               |      |                                 | 60.000.000,00    |        | 60.000.000,00    |        | 60.000.000,00    |        | 60.000.000,00    |        | 60.000.000,00    |   |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah                    | Persentase sejarah lokal yang dibina (Persentase)   | 0             | 0    | 2                               | 60.000.000,00    | 2      | 60.000.000,00    | 3      | 60.000.000,00    | 4      | 60.000.000,00    | 5      | 60.000.000,00    | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                  |   |               |      |                                 | 50.000.000,00    |        | 75.000.000,00    |        | 100.000.000,00   |        | 125.000.000,00   |        | 125.000.000,00   |   |
| Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan                               | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (Persentase)  | 4             | 5    | 6                               | 50.000.000,00    | 7      | 75.000.000,00    | 8      | 100.000.000,00   | 9      | 125.000.000,00   | 10     | 125.000.000,00   | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
|   | Jumlah benda, situs dan cagar budaya yang dipelihara (Unit)                                       | 237           | 237  | 238                             |                  | 238    |                  | 240    |                  | 245    |                  | 250    |                  | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                   |   |               |      |                                 | 30.000.000,00    |        | 35.000.000,00    |        | 45.000.000,00    |        | 75.000.000,00    |        | 75.000.000,00    |   |
| Meningkatnya tata kelola museum   | Persentase koleksi Museum yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik (Persentase) | 238           | 238  | 250                             | 30.000.000,00    | 250    | 35.000.000,00    | 250    | 45.000.000,00    | 250    | 75.000.000,00    | 250    | 75.000.000,00    | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                              |   |               |      |                                 | 6.414.966.867,00 |        | 7.067.963.553,00 |        | 7.799.759.908,00 |        | 8.591.735.899,00 |        | 8.591.735.899,00 |   |
| 2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       |   |               |      |                                 | 4.273.615.854,00 |        | 4.700.977.439,00 |        | 5.171.075.183,00 |        | 5.688.182.701,00 |        | 5.688.182.701,00 |   |
| Nilai LAKIP Perangkat Daerah  | Nilai Lakip Perangkat Daerah (Poin)   | 56.35         | 57   | 58                              | 4.273.615.854,00 | 58     | 4.700.977.439,00 | 59     | 5.171.075.183,00 | 59     | 5.688.182.701,00 | 60     | 5.688.182.701,00 | 2.23.2.24.0.00.10.000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                      |
| 2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                    |   |               |      |                                 | 2.106.351.013,00 |        | 2.316.986.114,00 |        | 2.548.684.725,00 |        | 2.803.553.198,00 |        | 2.803.553.198,00 |   |
| Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan      | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)  | 62.076        | 65   | 66                              | 2.106.351.013,00 | 67     | 2.316.986.114,00 | 68     | 2.548.684.725,00 | 69     | 2.803.553.198,00 | 70     | 2.803.553.198,00 | 2.23.2.24.0.00.10.000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                     | INDIKATOR OUTCOME  | BASELINE 2024 | 2025    | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |         |                   |         |                   |         |                   |         |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                        |
|---|--|---------------|---------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|--|
|   |  |               |         | 2026                            |                   | 2027    |                   | 2028    |                   | 2029    |                   | 2030    |                   |  |
|   |  |               |         | TARGET                          | PAGU              | TARGET  | PAGU              | TARGET  | PAGU              | TARGET  | PAGU              | TARGET  | PAGU              |  |
| 2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO        |  |               |         |                                 | 35.000.000,00     |         | 50.000.000,00     |         | 80.000.000,00     |         | 100.000.000,00    |         | 100.000.000,00    |  |
| Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno             | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)                         | 0             | 0       | 1                               | 35.000.000,00     | 2       | 50.000.000,00     | 3       | 80.000.000,00     | 4       | 100.000.000,00    | 5       | 100.000.000,00    | 2.23.2.24.0.00.10.000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                           |  |               |         |                                 | 500.003.490,00    |         | 550.003.840,00    |         | 605.004.224,00    |         | 665.504.646,00    |         | 665.504.646,00    |  |
| 2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                   |  |               |         |                                 | 378.175.175,00    |         | 415.992.693,00    |         | 457.591.962,00    |         | 503.351.158,00    |         | 503.351.158,00    |  |
| Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis                     | Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)  | 100           | 100     | 100                             | 378.175.175,00    | 100     | 415.992.693,00    | 100     | 457.591.962,00    | 100     | 503.351.158,00    | 100     | 503.351.158,00    | 2.23.2.24.0.00.10.000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                 |  |               |         |                                 | 121.828.315,00    |         | 134.011.147,00    |         | 147.412.262,00    |         | 162.153.488,00    |         | 162.153.488,00    |  |
| Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK          | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)                            | 50            | 54      | 55                              | 121.828.315,00    | 56      | 134.011.147,00    | 57      | 147.412.262,00    | 58      | 162.153.488,00    | 59      | 162.153.488,00    | 2.23.2.24.0.00.10.000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN              |  |               |         |                                 | 12.640.588.733,00 |         | 14.144.844.279,00 |         | 13.432.436.776,00 |         | 14.143.042.962,00 |         | 14.125.039.309,00 |  |
| 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |               |         |                                 | 9.688.522.265,00  |         | 10.888.522.265,00 |         | 9.879.892.700,00  |         | 10.325.090.564,00 |         | 10.337.090.564,00 |  |
| Nilai SAKIP   | Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Predikat) | 69.21-        | 70.50-  | 70.70-                          | 9.688.522.265,00  | 70.90-  | 10.888.522.265,00 | 71.10-  | 9.879.892.700,00  | 71.30-  | 10.325.090.564,00 | 71.50-  | 10.337.090.564,00 | 3.25.3.27.0.00.01.000 - DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN   |
| 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                       |  |               |         |                                 | 481.227.000,00    |         | 565.898.600,00    |         | 593.078.320,00    |         | 562.540.068,00    |         | 594.540.068,00    |  |
| Meningkatnya produksi perikanan tangkap                               | Produksi Perikanan Tangkap (Ton)   | 784.06        | 937.47  | 956.22                          | 481.227.000,00    | 970.56  | 565.898.600,00    | 984.90  | 593.078.320,00    | 999.24  | 562.540.068,00    | 1013.58 | 594.540.068,00    | 3.25.3.27.0.00.01.000 - DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN   |
| 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                      |  |               |         |                                 | 1.272.099.700,00  |         | 1.371.809.670,00  |         | 1.508.990.637,00  |         | 1.659.889.700,00  |         | 1.631.889.700,00  |  |
| Meningkatnya produksi perikanan budidaya                              | Produksi Perikanan Budidaya (Ton)  | 1537.14       | 1726.51 | 1761.04                         | 1.272.099.700,00  | 1787.46 | 1.371.809.670,00  | 1813.88 | 1.508.990.637,00  | 1840.30 | 1.659.889.700,00  | 1866.72 | 1.631.889.700,00  | 3.25.3.27.0.00.01.000 - DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN   |
| 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN       |  |               |         |                                 | 647.110.406,00    |         | 711.821.446,00    |         | 783.003.591,00    |         | 861.303.950,00    |         | 823.300.359,00    |  |
| Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati               |  |               |         |                                 | 647.110.406,00    |         | 711.821.446,00    |         | 783.003.591,00    |         | 861.303.950,00    |         | 823.300.359,00    | 3.25.3.27.0.00.01.000 - DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN   |
| 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN            |  |               |         |                                 | 551.629.362,00    |         | 606.792.298,00    |         | 667.471.528,00    |         | 734.218.680,00    |         | 738.218.618,00    |  |
| Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat                            | Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)  | 50.32         | 45.00   | 47.00                           | 551.629.362,00    | 47.94   | 606.792.298,00    | 48.88   | 667.471.528,00    | 49.82   | 734.218.680,00    | 50.76   | 738.218.618,00    | 3.25.3.27.0.00.01.000 - DINAS                            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME  | INDIKATOR OUTCOME  | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|--|--|---------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---|
|  |  |               |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |   |
|  |  |               |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |   |
|  |  |               |      |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERIKAMAN DAN PETERNAKAN  |
| 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA   |  |               |      |                                 | 5.700.000.000,00 |        | 7.265.000.000,00 |        | 8.210.000.000,00 |        | 9.250.000.000,00 |        | 9.300.000.000,00 |   |
| 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA  |  |               |      |                                 | 3.650.000.000,00 |        | 4.700.000.000,00 |        | 5.300.000.000,00 |        | 5.975.000.000,00 |        | 5.975.000.000,00 |   |
| Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata   | Persentase peningkatan wisatawan mancanegara (Persentase)  | 3             | 4    | 5                               | 3.650.000.000,00 | 5      | 4.700.000.000,00 | 6      | 5.300.000.000,00 | 7      | 5.975.000.000,00 | 8      | 5.975.000.000,00 | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
|  | Persentase peningkatan wisatawan nusantara (Persentase)  | 3             | 4    | 5                               |                  | 5      |                  | 6      |                  | 7      |                  | 8      |                  | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
|  | Jumlah obyek wisata daerah yang dilakukan penataan dan pengembangan (Unit)                                 | 25            | 35   | 36                              |                  | 36     |                  | 37     |                  | 38     |                  | 38     |                  | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
|  | Persentase peningkatan sarana dan prasarana penunjang obyek wisata daerah (%)                              | 1.3           | 1.3  | 1.4                             |                  | 1.5    |                  | 1.6    |                  | 1.7    |                  | 1.8    |                  | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA   |  |               |      |                                 | 1.450.000.000,00 |        | 1.965.000.000,00 |        | 2.280.000.000,00 |        | 2.600.000.000,00 |        | 2.600.000.000,00 |   |
| Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata  | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)                               | 10            | 10   | 12                              | 1.450.000.000,00 | 14     | 1.965.000.000,00 | 16     | 2.280.000.000,00 | 18     | 2.600.000.000,00 | 20     | 2.600.000.000,00 | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |  |               |      |                                 | 150.000.000,00   |        | 150.000.000,00   |        | 180.000.000,00   |        | 200.000.000,00   |        | 250.000.000,00   |   |
| Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif  | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)                          | 1             | 2    | 2                               | 150.000.000,00   | 3      | 150.000.000,00   | 4      | 180.000.000,00   | 5      | 200.000.000,00   | 5      | 250.000.000,00   | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
|  | Jumlah Produk/Jasa Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya (Produk) | 3             | 4    | 5                               |                  | 6      |                  | 6      |                  | 7      |                  | 8      |                  | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    |  |               |      |                                 | 450.000.000,00   |        | 450.000.000,00   |        | 450.000.000,00   |        | 475.000.000,00   |        | 475.000.000,00   |   |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME   | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|---|---|---------------|--------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|
|   |   |               |        | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |   |
|   |   |               |        | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |   |
| Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif                         | Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata (Orang)  | 100           | 100    | 125                             | 450.000.000,00    | 150    | 450.000.000,00    | 200    | 450.000.000,00    | 250    | 475.000.000,00    | 300    | 475.000.000,00    | 2.22.3.26.2.19.09.000 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                       |   |               |        |                                 | 49.899.902.640,00 |        | 46.535.537.226,00 |        | 45.151.113.209,00 |        | 43.891.952.974,00 |        | 39.157.712.300,00 |   |
| 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             |   |               |        |                                 | 25.488.700.000,00 |        | 25.936.230.000,00 |        | 24.753.230.000,00 |        | 24.931.730.000,00 |        | 24.370.730.000,00 |   |
| Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan kegiatan yang menunjang urusan pemerintah Daerah | Nilai Lakip Perangkat Daerah (Poin)   | 70            | 80     | 85                              | 25.488.700.000,00 | 90     | 25.936.230.000,00 | 95     | 24.753.230.000,00 | 100    | 24.931.730.000,00 | 100    | 24.370.730.000,00 | 3.27.2.09.0.00.02.000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                  |
|   | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)   | 70            | 80     | 85                              |                   | 90     |                   | 95     |                   | 100    |                   | 100    |                   | 3.27.2.09.0.00.02.000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                  |
| 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    |   |               |        |                                 | 2.822.386.950,00  |        | 3.456.981.426,00  |        | 3.465.975.854,00  |        | 3.576.463.781,00  |        | 3.477.482.300,00  |   |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian                             | Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) (Ton) | 652.87        | 664.88 | 681.51                          | 1.037.386.950,00  | 691.73 | 1.249.981.426,00  | 701.95 | 1.369.975.854,00  | 712.17 | 1.749.963.781,00  | 722.39 | 1.815.982.300,00  | 3.25.3.27.0.00.01.000 - DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN                        |
|   | Jumlah Produksi Telur (Ton)   | 851.63        | 528.10 | 541.30                          |                   | 549.42 |                   | 557.54 |                   | 565.66 |                   | 573.78 |                   | 3.25.3.27.0.00.01.000 - DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN                        |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian                             | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)                              | 70            | 80     | 85                              | 1.785.000.000,00  | 90     | 2.207.000.000,00  | 95     | 2.096.000.000,00  | 100    | 1.826.500.000,00  | 100    | 1.661.500.000,00  | 3.27.2.09.0.00.02.000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                  |
| 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 |   |               |        |                                 | 18.584.954.890,00 |        | 13.632.499.800,00 |        | 13.087.124.855,00 |        | 10.984.031.068,00 |        | 6.859.500.000,00  |   |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian                          |   |               |        |                                 | 1.724.954.890,00  |        | 1.592.499.800,00  |        | 215.624.855,00    |        | 244.531.068,00    |        | 230.000.000,00    | 3.25.3.27.0.00.01.000 - DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN                        |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian                          | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)                | 70            | 80     | 85                              | 16.860.000.000,00 | 90     | 12.040.000.000,00 | 95     | 12.871.500.000,00 | 100    | 10.739.500.000,00 | 100    | 6.629.500.000,00  | 3.27.2.09.0.00.02.000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                  |
| 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |   |               |        |                                 | 773.860.800,00    |        | 984.826.000,00    |        | 1.219.782.500,00  |        | 1.674.728.125,00  |        | 1.725.000.000,00  |   |
| Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner      | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)     | 3             | 0      | 0                               | 773.860.800,00    | 0      | 984.826.000,00    | 0      | 1.219.782.500,00  | 0      | 1.674.728.125,00  | 0      | 1.725.000.000,00  | 3.25.3.27.0.00.01.000 - DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN                        |
| 3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN  |   |               |        |                                 | 485.000.000,00    |        | 650.000.000,00    |        | 650.000.000,00    |        | 650.000.000,00    |        | 650.000.000,00    |   |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME  | INDIKATOR OUTCOME  | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|--|--|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
|  |  |               |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |  |
|  |  |               |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |  |
| PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN   |  |               |       |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |  |
| Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian                                       | Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)                                       | 70            | 80    | 85                              | 485.000.000,00    | 90     | 650.000.000,00    | 95     | 650.000.000,00    | 100    | 650.000.000,00    | 100    | 650.000.000,00    | 3.27.2.09.0.00.02.000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                     |
| 3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN  |  |               |       |                                 | 255.000.000,00    |        | 285.000.000,00    |        | 285.000.000,00    |        | 285.000.000,00    |        | 285.000.000,00    |  |
| Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian  | Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)                              | 70            | 80    | 85                              | 255.000.000,00    | 90     | 285.000.000,00    | 95     | 285.000.000,00    | 100    | 285.000.000,00    | 100    | 285.000.000,00    | 3.27.2.09.0.00.02.000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                     |
| 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN   |  |               |       |                                 | 1.490.000.000,00  |        | 1.590.000.000,00  |        | 1.690.000.000,00  |        | 1.790.000.000,00  |        | 1.790.000.000,00  |  |
| Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian   | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)                           | 70            | 80    | 85                              | 1.490.000.000,00  | 90     | 1.590.000.000,00  | 95     | 1.690.000.000,00  | 100    | 1.790.000.000,00  | 100    | 1.790.000.000,00  | 3.27.2.09.0.00.02.000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                     |
| 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  |  |               |       |                                 | 14.243.812.750,00 |        | 16.263.026.000,00 |        | 18.384.189.000,00 |        | 21.083.995.500,00 |        | 21.083.995.500,00 |  |
| 3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                |  |               |       |                                 | 9.445.308.600,00  |        | 10.862.200.000,00 |        | 12.491.530.000,00 |        | 14.365.295.500,00 |        | 14.365.295.500,00 |  |
| Persentase Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)            | 75.00         | 78.00 | 82.00                           | 9.445.308.600,00  | 85.00  | 10.862.200.000,00 | 87.00  | 12.491.530.000,00 | 90.00  | 14.365.295.500,00 | 90.00  | 14.365.295.500,00 | 3.30.2.17.0.00.03.000 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN   |  |               |       |                                 | 229.999.150,00    |        | 232.500.000,00    |        | 235.850.000,00    |        | 240.200.000,00    |        | 240.200.000,00    |  |
| Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha                                     | Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%) | 10.00         | 8.00  | 6.00                            | 229.999.150,00    | 4.00   | 232.500.000,00    | 4.00   | 235.850.000,00    | 2.00   | 240.200.000,00    | 2.00   | 240.200.000,00    | 3.30.2.17.0.00.03.000 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)                 | 70.00         | 80.00 | 85.00                           |                   | 90.00  |                   | 95.00  |                   | 100.00 |                   | 100.00 |                   | 3.30.2.17.0.00.03.000 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN  |  |               |       |                                 | 1.192.500.000,00  |        | 1.467.670.000,00  |        | 1.601.800.000,00  |        | 2.250.000.000,00  |        | 2.250.000.000,00  |  |
| Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)                   | 1.00          | 5.00  | 6.00                            | 1.192.500.000,00  | 7.00   | 1.467.670.000,00  | 8.00   | 1.601.800.000,00  | 9.00   | 2.250.000.000,00  | 9.00   | 2.250.000.000,00  | 3.30.2.17.0.00.03.000 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                        |  |               |       |                                 | 1.410.500.000,00  |        | 1.552.100.000,00  |        | 1.707.309.000,00  |        | 1.820.500.000,00  |        | 1.820.500.000,00  |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME   | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|---|---|---------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--|
|   |   |               |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |  |
|   |   |               |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |  |
| Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)  | 1.49          | 2.50  | 2.50                            | 1.410.500.000,00 | 2.50   | 1.552.100.000,00 | 2.50   | 1.707.309.000,00 | 2.50   | 1.820.500.000,00 | 2.50   | 1.820.500.000,00 | 3.30.2.17.0.00.03.000 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR   |   |               |       |                                 | 992.500.000,00   |        | 1.092.500.000,00 |        | 1.201.600.000,00 |        | 1.250.000.000,00 |        | 1.250.000.000,00 |  |
| Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor  | Pertumbuhan ekspor produk non migas (%)   | 5.00          | 5.00  | 10,00                           | 992.500.000,00   | 20,00  | 1.092.500.000,00 | 20,00  | 1.201.600.000,00 | 25,00  | 1.250.000.000,00 | 25,00  | 1.250.000.000,00 | 3.30.2.17.0.00.03.000 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN   |   |               |       |                                 | 178.206.000,00   |        | 178.206.000,00   |        | 180.300.000,00   |        | 182.500.000,00   |        | 182.500.000,00   |  |
| Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk   | Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Persentase)                                     | 90.76         | 91.00 | 91.50                           | 178.206.000,00   | 92,00  | 178.206.000,00   | 92,50  | 180.300.000,00   | 93,00  | 182.500.000,00   | 93,50  | 182.500.000,00   | 3.30.2.17.0.00.03.000 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                    |   |               |       |                                 | 794.799.000,00   |        | 877.850.000,00   |        | 965.800.000,00   |        | 975.500.000,00   |        | 975.500.000,00   |  |
| Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri   | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)  | 60.00         | 75.00 | 75.00                           | 794.799.000,00   | 75,00  | 877.850.000,00   | 75,00  | 965.800.000,00   | 75,00  | 975.500.000,00   | 75,00  | 975.500.000,00   | 3.30.2.17.0.00.03.000 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN   |   |               |       |                                 | 194.618.260,00   |        | 314.080.086,00   |        | 345.488.093,00   |        | 380.036.902,00   |        | 380.036.902,00   |  |
| 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI  |   |               |       |                                 | 159.119.170,00   |        | 275.031.087,00   |        | 302.534.195,00   |        | 332.787.615,00   |        | 332.787.615,00   |  |
| Meningkatnya realisasi pembangunan industri   | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (%) | 24            | 25    | 25                              | 159.119.170,00   | 26     | 275.031.087,00   | 27     | 302.534.195,00   | 28     | 332.787.615,00   | 29     | 332.787.615,00   | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN       |
|   | Jumlah Sarana-Prasarana Industri RPIK (Unit)  | 1             | 1     | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN       |
|   | Jumlah IKM yang terbina (Pelaku Usaha)  | 15            | 20    | 25                              |                  | 30     |                  | 35     |                  | 40     |                  | 45     |                  | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN       |
| 3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI  |   |               |       |                                 | 2.800.930,00     |        | 3.081.023,00     |        | 3.389.125,00     |        | 3.728.037,00     |        | 3.728.037,00     |  |
| Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian                                     | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha  | 86            | 87    | 90                              | 2.800.930,00     | 91     | 3.081.023,00     | 91     | 3.389.125,00     | 92     | 3.728.037,00     | 92     | 3.728.037,00     | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA,                                      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME   | INDIKATOR OUTCOME  | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|---|--|---------------|------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|
|   |  |               |      | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |  |
|   |  |               |      | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |  |
|   | Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (Persentase)                                 |               |      |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               | TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN   |
|   | Jumlah ijin IKM (Pelaku Usaha)   | 4             | 4    | 4                               |               | 5      |               | 5      |               | 5      |               | 6      |               | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                            |  |               |      |                                 | 32.698.160,00 |        | 35.967.976,00 |        | 39.564.773,00 |        | 43.521.250,00 |        | 43.521.250,00 |  |
| Meningkatnya pemanfaatan informasi industri   | Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nasional (Persentase) | 0.15          | 0.15 | 0.15                            | 32.698.160,00 | 0.15   | 35.967.976,00 | 0.16   | 39.564.773,00 | 0.16   | 43.521.250,00 | 0.17   | 43.521.250,00 | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
|   | Jumlah IKM yang terdata di kabupaten (Pelaku Usaha)  | 640           | 640  | 650                             |               | 700    |               | 750    |               | 850    |               | 950    |               | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
|   | Jumlah IKM mendapat akses untuk promosi produk (Pelaku Usaha)  | 5             | 6    | 7                               |               | 8      |               | 9      |               | 10     |               | 11     |               | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI  |  |               |      |                                 | 26.300.780,00 |        | 28.930.858,00 |        | 31.823.943,00 |        | 35.006.335,00 |        | 36.257.642,00 |  |
| 3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI  |  |               |      |                                 | 6.294.640,00  |        | 6.924.104,00  |        | 7.616.514,00  |        | 8.378.166,00  |        | 9.215.982,00  |  |
| Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi   | Tingkat penanganan permasalahan pertanahan transmigrasi (Persentase)   | 33            | 33   | 34                              | 6.294.640,00  | 34     | 6.924.104,00  | 35     | 7.616.514,00  | 35     | 8.378.166,00  | 36     | 9.215.982,00  | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI  |  |               |      |                                 | 3.106.620,00  |        | 3.417.282,00  |        | 3.759.010,00  |        | 4.134.911,00  |        | 4.548.402,00  |  |
| Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                      | Persentase wilayah transmigrasi yang didata (Persentase)   | 100           | 100  | 100                             | 3.106.620,00  | 100    | 3.417.282,00  | 100    | 3.759.010,00  | 100    | 4.134.911,00  | 100    | 4.548.402,00  | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI   |  |               |      |                                 | 16.899.520,00 |        | 18.589.472,00 |        | 20.448.419,00 |        | 22.493.258,00 |        | 22.493.258,00 |  |
| Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi | Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang dilakukan Pembinaan Ekonomi, Sosial Budaya Mental dan Spiritual (Lokasi)                    | 2             | 2    | 2                               | 16.899.520,00 | 3      | 18.589.472,00 | 3      | 20.448.419,00 | 4      | 22.493.258,00 | 5      | 22.493.258,00 | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME   | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|---|---|---------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--|
|   |   |               |      | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |  |
|   |   |               |      | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |  |
|   | Persentase satuan pemukiman yang dibina (Persentase)  | 40            | 40   | 40                              |                    | 45     |                    | 45     |                    | 50     |                    | 50     |                    | 2.07.3.32.3.31.01.000 - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH   |   |               |      |                                 | 196.912.171.118,20 |        | 210.079.724.987,02 |        | 218.314.626.024,02 |        | 231.927.664.047,32 |        | 231.741.852.410,32 |  |
| 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                   |   |               |      |                                 | 66.438.906.242,00  |        | 73.082.796.867,00  |        | 74.467.851.498,00  |        | 80.888.550.795,00  |        | 80.702.739.158,00  |  |
| Nilai LAKIP perangkat daerah  | Persentase Bahan Kebijakan terkait organisasi pemerintah daerah yang ditindaklanjuti (Persentase) | 90            | 91   | 91                              | 66.438.906.242,00  | 91     | 73.082.796.867,00  | 95     | 74.467.851.498,00  | 95     | 80.888.550.795,00  | 95     | 80.702.739.158,00  | 4.01.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DAERAH                                 |
| 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                 |   |               |      |                                 | 127.743.748.308,75 |        | 134.130.935.724,19 |        | 140.837.482.510,40 |        | 147.879.356.635,92 |        | 147.879.356.635,92 |  |
| Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat                                    | Persentase Bahan Kebijakan Lingkup kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti (Persentase)         | 90            | 91   | 91                              | 26.073.088.308,75  | 95     | 27.376.742.724,19  | 95     | 28.745.579.860,40  | 95     | 30.182.858.853,42  | 95     | 30.182.858.853,42  | 4.01.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DAERAH                                 |
| Tersedianya Makanan Bergizi Gratis (MBG)  | Persentase Bahan Kebijakan Lingkup kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti (Persentase)         | 91            | 91   | 91                              | 101.670.660.000,00 | 95     | 106.754.193.000,00 | 95     | 112.091.902.650,00 | 95     | 117.696.497.782,50 | 95     | 117.696.497.782,50 | 4.01.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DAERAH                                 |
| 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  |   |               |      |                                 | 2.729.516.567,45   |        | 2.865.992.395,83   |        | 3.009.292.015,62   |        | 3.159.756.616,40   |        | 3.159.756.616,40   |  |
| Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan                | Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pembangunan yang ditindaklanjuti (Persentase)                  | 90            | 90   | 92                              | 2.729.516.567,45   | 92     | 2.865.992.395,83   | 92     | 3.009.292.015,62   | 95     | 3.159.756.616,40   | 95     | 3.159.756.616,40   | 4.01.0.00.0.00.01.000 - SEKRETARIAT DAERAH                                 |
| 4.02 - SEKRETARIAT DPRD   |   |               |      |                                 | 51.397.662.301,00  |        | 53.904.612.663,00  |        | 56.685.754.235,00  |        | 60.103.972.289,00  |        | 60.103.972.289,00  |  |
| 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                   |   |               |      |                                 | 34.067.455.966,00  |        | 34.408.130.526,00  |        | 34.752.211.831,00  |        | 35.099.733.949,00  |        | 35.099.733.949,00  |  |
| Nilai LAKIP Perangkat Daerah  | Nilai Lakip Perangkat Daerah (Poin)   | 75            | 75   | 75                              | 34.067.455.966,00  | 76     | 34.408.130.526,00  | 76     | 34.752.211.831,00  | 77     | 35.099.733.949,00  | 78     | 35.099.733.949,00  | 4.02.0.00.0.00.02.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH         |
| 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                            |   |               |      |                                 | 17.330.206.335,00  |        | 19.496.482.137,00  |        | 21.933.542.404,00  |        | 25.004.238.340,00  |        | 25.004.238.340,00  |  |
| Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Pelayanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Nilai survey kepuasan pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (%)                    | 72            | 73   | 75                              | 17.330.206.335,00  | 76     | 19.496.482.137,00  | 76     | 21.933.542.404,00  | 77     | 25.004.238.340,00  | 78     | 25.004.238.340,00  | 4.02.0.00.0.00.02.000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH         |
| 5.01 - PERENCANAAN  |   |               |      |                                 | 7.903.030.056,00   |        | 8.298.181.559,00   |        | 8.713.090.637,00   |        | 9.148.745.169,00   |        | 9.606.182.428,00   |  |
| 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                   |   |               |      |                                 | 5.802.099.394,00   |        | 6.092.204.364,00   |        | 6.396.814.582,00   |        | 6.716.655.311,00   |        | 7.052.488.077,00   |  |
| Persentase laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu                        | Persentase laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu (%)                              | -             | -    | 88                              | 5.802.099.394,00   | 89     | 6.092.204.364,00   | 90     | 6.396.814.582,00   | 91     | 6.716.655.311,00   | 92     | 7.052.488.077,00   | 5.01.5.05.0.00.01.000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN                      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME   | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|---|---|---------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--|
|   |   |               |      | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |  |
|   |   |               |      | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |  |
|   |   |               |      |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | DAN LITBANG DAERAH   |
| 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH               |   |               |      |                                 | 1.304.009.978,00   |        | 1.369.210.477,00   |        | 1.437.671.001,00   |        | 1.509.554.551,00   |        | 1.585.032.279,00   |  |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah                                      | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd (Persentase)   | 93            | 93   | 94                              | 1.304.009.978,00   | 95     | 1.369.210.477,00   | 96     | 1.437.671.001,00   | 97     | 1.509.554.551,00   | 98     | 1.585.032.279,00   | 5.01.5.05.0.00.01.000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
|   | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)   | 96            | 96   | 97                              |                    | 97     |                    | 98     |                    | 99     |                    | 99     |                    | 5.01.5.05.0.00.01.000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH              |   |               |      |                                 | 796.920.684,00     |        | 836.766.718,00     |        | 878.605.054,00     |        | 922.535.307,00     |        | 968.662.072,00     |  |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase) | 95            | 95   | 96                              | 302.594.072,00     | 97     | 317.723.775,00     | 97     | 333.609.964,00     | 98     | 350.290.462,00     | 98     | 367.804.985,00     | 5.01.5.05.0.00.01.000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA                 | Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)                 | 95            | 95   | 96                              | 152.586.315,00     | 97     | 160.215.631,00     | 97     | 168.226.412,00     | 98     | 176.637.733,00     | 98     | 185.469.620,00     | 5.01.5.05.0.00.01.000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan        | Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)        | 95            | 95   | 96                              | 341.740.297,00     | 97     | 358.827.312,00     | 97     | 376.768.678,00     | 98     | 395.607.112,00     | 98     | 415.387.467,00     | 5.01.5.05.0.00.01.000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| 5.02 - KEUANGAN   |   |               |      |                                 | 297.158.484.176,00 |        | 348.183.430.804,00 |        | 306.619.757.383,00 |        | 311.831.493.353,00 |        | 315.076.738.284,00 |  |
| 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                     |   |               |      |                                 | 88.064.011.988,00  |        | 89.601.711.232,00  |        | 91.068.632.944,00  |        | 92.970.392.108,00  |        | 92.970.392.108,00  |  |
| Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah                                 | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)  | 88            | 89   | 90                              | 6.990.969.745,00   | 91     | 7.312.573.355,00   | 92     | 7.545.158.000,00   | 93     | 8.194.065.040,00   | 94     | 8.194.065.040,00   | 5.02.0.00.0.00.03.000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH                          |
| Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah                                 |   |               |      |                                 | 81.073.042.243,00  |        | 82.289.137.877,00  |        | 83.523.474.944,00  |        | 84.776.327.068,00  |        | 84.776.327.068,00  | 5.02.4.01.2.13.02.000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH   |   |               |      |                                 | 202.417.721.298,00 |        | 205.453.987.118,00 |        | 208.535.796.925,00 |        | 211.663.833.879,00 |        | 214.838.791.387,00 |  |
| Persentase Belanja Pegawai Di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD           |   |               |      |                                 | 202.417.721.298,00 |        | 205.453.987.118,00 |        | 208.535.796.925,00 |        | 211.663.833.879,00 |        | 214.838.791.387,00 | 5.02.4.01.2.13.02.000 - BADAN PENGELOLAAN                                |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                     | INDIKATOR OUTCOME  | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|---|--|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
|   |  |               |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |  |
|   |  |               |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |  |
|   |  |               |       |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
| 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     |  |               |       |                                 | 5.064.937.090,00  |        | 51.409.111.467,00 |        | 5.218.024.814,00  |        | 5.296.295.186,00  |        | 5.366.582.609,00  |  |
| Persentase Penambahan Nilai Aset                                      |  |               |       |                                 | 5.064.937.090,00  |        | 51.409.111.467,00 |        | 5.218.024.814,00  |        | 5.296.295.186,00  |        | 5.366.582.609,00  | 5.02.4.01.2.13.02.000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             |
| 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                       |  |               |       |                                 | 1.611.813.800,00  |        | 1.718.620.987,00  |        | 1.797.302.700,00  |        | 1.900.972.180,00  |        | 1.900.972.180,00  |  |
| Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah                                   | Jumlah Wajib Pajak (WP) baru yang terdaftar (Orang)  | 90            | 110   | 130                             | 1.611.813.800,00  | 150    | 1.718.620.987,00  | 170    | 1.797.302.700,00  | 190    | 1.900.972.180,00  | 210    | 1.900.972.180,00  | 5.02.0.00.0.00.03.000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH                                |
|   | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (poin)  | 80            | 82    | 84                              |                   | 86     |                   | 88     |                   | 90     |                   | 92     |                   | 5.02.0.00.0.00.03.000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH                                |
|   | Jumlah jenis layanan pajak dan retribusi yang dapat diakses secara online (Layanan)            | 1             | 2     | 3                               |                   | 4      |                   | 5      |                   | 6      |                   | 7      |                   | 5.02.0.00.0.00.03.000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH                                |
|   | Jumlah sistem transaksi pembayaran non-tunai (cashless) (Sistem)                               | 1             | 2     | 3                               |                   | 4      |                   | 5      |                   | 6      |                   | 7      |                   | 5.02.0.00.0.00.03.000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH                                |
|   | Persentase realisasi Pajak Daerah (%)  | 75            | 76    | 77                              |                   | 78     |                   | 79     |                   | 80     |                   | 81     |                   | 5.02.0.00.0.00.03.000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH                                |
|   | Persentase Realisasi Retribusi Daerah (%)  | 75            | 76    | 77                              |                   | 78     |                   | 79     |                   | 80     |                   | 81     |                   | 5.02.0.00.0.00.03.000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH                                |
|   | Persentase penurunan tunggakan pajak (%)   | 10            | 9     | 8                               |                   | 7      |                   | 6      |                   | 5      |                   | 4      |                   | 5.02.0.00.0.00.03.000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH                                |
| 5.03 - KEPEGAWAIAN  |  |               |       |                                 | 13.861.406.966,00 |        | 15.247.316.297,00 |        | 16.772.048.320,00 |        | 18.448.253.155,00 |        | 17.679.526.266,00 |  |
| 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |               |       |                                 | 7.368.399.731,00  |        | 8.105.008.339,00  |        | 8.915.509.572,00  |        | 9.807.060.531,00  |        | 9.038.333.642,00  |  |
| Nilai LAKIP perangkat daerah  | Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Predikat) | 65-70         | 70-75 | 70-75                           | 7.368.399.731,00  | 72-76  | 8.105.008.339,00  | 75-80  | 8.915.509.572,00  | 80-85  | 9.807.060.531,00  | 85-90  | 9.038.333.642,00  | 5.03.0.00.0.00.04.000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                  |  |               |       |                                 | 6.493.007.235,00  |        | 7.142.307.958,00  |        | 7.856.538.748,00  |        | 8.641.192.624,00  |        | 8.641.192.624,00  |  |
| Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian                | Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)                       | 80            | 95    | 97                              | 1.270.429.215,00  | 98     | 1.397.472.136,00  | 99     | 1.537.219.348,00  | 100    | 1.689.941.283,00  | 100    | 1.689.941.283,00  | 5.03.0.00.0.00.04.000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME   | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|---|---|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
|   |   |               |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |  |
|   |   |               |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |  |
| Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN  | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)   | 80            | 95    | 97                              | 4.841.546.600,00  | 98     | 5.325.701.260,00  | 99     | 5.858.271.384,00  | 100    | 6.444.098.523,00  | 100    | 6.444.098.523,00  | 5.03.0.00.0.00.04.000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN   | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)  | 85            | 90    | 95                              | 242.086.240,00    | 96     | 266.294.864,00    | 97     | 292.924.349,00    | 98     | 322.216.784,00    | 99     | 322.216.784,00    | 5.03.0.00.0.00.04.000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN   | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)   | 85            | 90    | 95                              | 138.945.180,00    | 97     | 152.839.698,00    | 98     | 168.123.667,00    | 99     | 184.936.034,00    | 100    | 184.936.034,00    | 5.03.0.00.0.00.04.000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  |   |               |       |                                 | 199.252.888,00    |        | 209.215.533,00    |        | 219.676.309,00    |        | 230.660.125,00    |        | 242.193.131,00    |  |
| 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  |   |               |       |                                 | 149.252.888,00    |        | 156.715.533,00    |        | 164.551.309,00    |        | 172.778.875,00    |        | 181.417.819,00    |  |
| Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah | Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah (%) | 70            | 70    | 72                              | 149.252.888,00    | 74     | 156.715.533,00    | 76     | 164.551.309,00    | 78     | 172.778.875,00    | 80     | 181.417.819,00    | 5.01.5.05.0.00.01.000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH       |
| 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH  |   |               |       |                                 | 50.000.000,00     |        | 52.500.000,00     |        | 55.125.000,00     |        | 57.881.250,00     |        | 60.775.312,00     |  |
| Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan   | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)  | 0             | 0     | 40                              | 50.000.000,00     | 42     | 52.500.000,00     | 44     | 55.125.000,00     | 46     | 57.881.250,00     | 48     | 60.775.312,00     | 5.01.5.05.0.00.01.000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH       |
| 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH   |   |               |       |                                 | 17.404.479.334,00 |        | 18.404.471.000,00 |        | 19.178.160.000,00 |        | 20.090.630.000,00 |        | 20.732.630.000,00 |  |
| 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |   |               |       |                                 | 13.013.908.334,00 |        | 13.636.630.000,00 |        | 14.028.630.000,00 |        | 14.469.630.000,00 |        | 15.001.630.000,00 |  |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  |   |               |       |                                 | 13.013.908.334,00 |        | 13.636.630.000,00 |        | 14.028.630.000,00 |        | 14.469.630.000,00 |        | 15.001.630.000,00 | 6.01.0.00.0.00.01.000 - INSPEKTORAT  |
| 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN  |   |               |       |                                 | 3.031.171.000,00  |        | 3.134.841.000,00  |        | 3.192.000.000,00  |        | 3.272.000.000,00  |        | 3.382.000.000,00  |  |
| Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan                        | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terhadap Perangkat Daerah yang Diselesaikan (Persentase)                                  | 82.22         | 85.61 | 87                              | 3.031.171.000,00  | 89     | 3.134.841.000,00  | 91     | 3.192.000.000,00  | 93     | 3.272.000.000,00  | 95     | 3.382.000.000,00  | 6.01.0.00.0.00.01.000 - INSPEKTORAT  |
|   | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang Diselesaikan (Persentase)   | 85.61         | 86.80 | 87                              |                   | 89     |                   | 90     |                   | 92     |                   | 92     |                   | 6.01.0.00.0.00.01.000 - INSPEKTORAT  |
| 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI   |   |               |       |                                 | 1.359.400.000,00  |        | 1.633.000.000,00  |        | 1.957.530.000,00  |        | 2.349.000.000,00  |        | 2.349.000.000,00  |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME   | INDIKATOR OUTCOME  | BASELINE 2024  | 2025        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                 |
|---|--|----------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|---|
|   |  |                |             | 2026                            |                          | 2027       |                          | 2028       |                          | 2029       |                          | 2030       |                          |   |
|   |  |                |             | TARGET                          | PAGU                     | TARGET     | PAGU                     | TARGET     | PAGU                     | TARGET     | PAGU                     | TARGET     | PAGU                     |   |
| Penjaminan kualitas tata kelola pemerintahan                                  | Persentase Percepatan aksi pencegahan korupsi terintegrasi (%)                             | 70             | 77          | 80                              | 1.359.400.000,00         | 85         | 1.633.000.000,00         | 87         | 1.957.530.000,00         | 90         | 2.349.000.000,00         | 95         | 2.349.000.000,00         | 6.01.0.00.0.00.01.000 - INSPEKTORAT               |
|   | Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)                     | 3.006          | 3.15        | 3.20                            |                          | 3.25       |                          | 3.30       |                          | 3.35       |                          | 3.35       |                          | 6.01.0.00.0.00.01.000 - INSPEKTORAT               |
| <b>7.01 - KECAMATAN</b>   |  |                |             |                                 | <b>59.500.769.319,00</b> |            | <b>65.312.159.425,00</b> |            | <b>72.138.236.551,00</b> |            | <b>79.405.068.263,00</b> |            | <b>79.479.568.263,00</b> |   |
| <b>7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  |  |                |             |                                 | <b>53.424.669.459,00</b> |            | <b>58.132.386.588,00</b> |            | <b>63.963.058.852,00</b> |            | <b>70.126.957.793,00</b> |            | <b>70.201.457.793,00</b> |   |
| Persentase Perencanaan ,Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah     | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)            | 95             | 95          | 95                              | 7.000.205.527,00         | 95         | 9.100.267.185,00         | 95         | 11.852.007.341,00        | 95         | 15.410.209.543,00        | 95         | 15.410.209.543,00        | 7.01.0.00.0.00.01.000 - KECAMATAN DUSUN TENGAH    |
| Nilai LAKIP perangkat daerah  | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)            | 80             | 80          | 82                              | 4.860.915.000,00         | 82         | 5.347.000.000,00         | 84         | 5.880.000.000,00         | 84         | 5.990.000.000,00         | 85         | 5.990.000.000,00         | 7.01.0.00.0.00.06.000 - KECAMATAN BENUA LIMA      |
| Nilai LAKIP perangkat daerah  |  |                |             |                                 | 8.961.616.567,00         |            | 9.461.600.000,00         |            | 9.976.566.770,00         |            | 10.421.617.000,00        |            | 10.421.617.000,00        | 7.01.0.00.0.00.04.000 - KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| Nilai LAKIP perangkat daerah  | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan (%)                          | 85             | 90          | 91                              | 5.200.000.000,00         | 92         | 5.447.000.000,00         | 93         | 5.980.000.000,00         | 94         | 5.990.000.000,00         | 95         | 5.990.000.000,00         | 7.01.0.00.0.00.02.000 - KECAMATAN PEMATANG KARAU  |
| Nilai LAKIP perangkat daerah  | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)  | 2.899.879 .321 | 337179647 7 | 650000000 0                     | 6.500.000.000,00         | 6700000000 | 6.700.000.000,00         | 6900000000 | 6.900.000.000,00         | 7100000000 | 7.100.000.000,00         | 7100000000 | 7.100.000.000,00         | 7.01.0.00.0.00.03.000 - KECAMATAN AWANG           |
| Nilai LAKIP perangkat daerah  | Nilai Lakip Perangkat Daerah (Poin)  | 70             | 70          | 70                              | 5.231.750.000,00         | 70         | 5.711.640.044,00         | 70         | 6.191.530.088,00         | 75         | 6.671.420.132,00         | 75         | 6.671.420.132,00         | 7.01.0.00.0.00.05.000 - KECAMATAN DUSUN TIMUR     |
| Persentase Perencanaan ,Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah     | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)            | 90             | 90          | 90                              | 3.653.188.971,00         | 95         | 3.867.588.971,00         | 95         | 4.105.607.800,00         | 95         | 4.805.607.800,00         | 95         | 4.805.607.800,00         | 7.01.0.00.0.00.07.000 - KECAMATAN PAKU            |
| Nilai LAKIP perangkat daerah  | Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Persentase) | 95             | 95          | 95                              | 4.052.325.305,00         | 95         | 4.074.365.834,00         | 95         | 4.196.165.834,00         | 95         | 4.268.665.834,00         | 95         | 4.343.165.834,00         | 7.01.0.00.0.00.08.000 - KECAMATAN PAJU EPAT       |
| Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan                 | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan (%)                          | 80             | 85          | 86                              | 4.114.668.089,00         | 87         | 4.272.924.554,00         | 88         | 4.431.181.019,00         | 89         | 4.589.437.484,00         | 90         | 4.589.437.484,00         | 7.01.0.00.0.00.09.000 - KECAMATAN RAREN BATUAH    |
| Persentase Perencanaan dan non Perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP         | Persentase Perencanaan ,Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)              | 70             | 70          | 70                              | 3.850.000.000,00         | 75         | 4.150.000.000,00         | 75         | 4.450.000.000,00         | 80         | 4.880.000.000,00         | 80         | 4.880.000.000,00         | 7.01.0.00.0.00.10.000 - KECAMATAN KARUSEN JANANG  |
| <b>7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>    |  |                |             |                                 | <b>1.817.792.190,00</b>  |            | <b>2.151.191.625,00</b>  |            | <b>2.361.035.225,00</b>  |            | <b>2.650.403.338,00</b>  |            | <b>2.650.403.338,00</b>  |   |
| Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP     | Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dokumen)        | 96             | 97          | 98                              | 156.562.500,00           | 98         | 333.531.250,00           | 99         | 433.590.625,00           | 100        | 563.667.813,00           | 100        | 563.667.813,00           | 7.01.0.00.0.00.01.000 - KECAMATAN DUSUN TENGAH    |
| Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Layanan)        | 90             | 95          | 96                              | 183.860.000,00           | 96         | 202.200.000,00           | 96         | 222.000.000,00           | 98         | 244.000.000,00           | 98         | 244.000.000,00           | 7.01.0.00.0.00.06.000 - KECAMATAN BENUA LIMA      |
| Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP | Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Persentase) | 85             | 85          | 90                              | 165.750.000,00           | 90         | 202.200.000,00           | 90         | 222.000.000,00           | 90         | 244.000.000,00           | 95         | 244.000.000,00           | 7.01.0.00.0.00.04.000 - KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME  | INDIKATOR OUTCOME  | BASELINE 2024 | 2025        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                  |
|--|--|---------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--|
|  |  |               |             | 2026                            |                  | 2027        |                  | 2028        |                  | 2029        |                  | 2030        |                  |  |
|  |  |               |             | TARGET                          | PAGU             | TARGET      | PAGU             | TARGET      | PAGU             | TARGET      | PAGU             | TARGET      | PAGU             |  |
| Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP              | Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dokumen)            | 85            | 96          | 97                              | 180.000.000,00   | 98          | 200.000.000,00   | 99          | 222.000.000,00   | 100         | 244.000.000,00   | 100         | 244.000.000,00   | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEMATANG KARAU  |
| Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP              | Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dokumen)            | 81.699.450    | 279.040.250 | 310.000.000                     | 310.000.000,00   | 340.000.000 | 340.000.000,00   | 370.000.000 | 370.000.000,00   | 400.000.000 | 400.000.000,00   | 400.000.000 | 400.000.000,00   | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN AWANG           |
| Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP                  | Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dokumen)            | 95            | 96          | 97                              | 345.166.500,00   | 98          | 355.666.500,00   | 99          | 366.166.500,00   | 100         | 376.666.500,00   | 100         | 376.666.500,00   | 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN DUSUN TIMUR     |
| Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP                  | Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dokumen)            | 80            | 80          | 81                              | 298.256.940,00   | 82          | 328.106.700,00   | 83          | 330.500.000,00   | 84          | 375.000.000,00   | 85          | 375.000.000,00   | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PAKU            |
| Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP              | Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dokumen)            | 96            | 97          | 98                              | 72.632.200,00    | 99          | 72.632.200,00    | 100         | 72.632.200,00    | 100         | 72.632.200,00    | 100         | 72.632.200,00    | 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PAJU EPAT       |
| Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP                  | Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dokumen)            | 90            | 96          | 97                              | 85.564.050,00    | 98          | 88.854.975,00    | 99          | 92.145.900,00    | 100         | 95.436.825,00    | 100         | 95.436.825,00    | 7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN RAREN BATUAH    |
| Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP                  | Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dokumen)            | 80            | 85          | 88                              | 20.000.000,00    | 89          | 28.000.000,00    | 90          | 30.000.000,00    | 93          | 35.000.000,00    | 95          | 35.000.000,00    | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN KARUSEN JANANG  |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                               |  |               |             |                                 | 3.051.195.035,00 |             | 3.597.019.286,00 |             | 4.185.563.471,00 |             | 4.865.228.912,00 |             | 4.865.228.912,00 |  |
| Persentase usulan Masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan                 | Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan (Persentase)        | 95            | 95          | 95                              | 632.574.835,00   | 95          | 822.347.286,00   | 95          | 1.069.051.471,00 | 95          | 1.389.766.912,00 | 95          | 1.389.766.912,00 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DUSUN TENGAH    |
| Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan                 | Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan (%)                 | 92            | 95          | 95                              | 731.420.000,00   | 95          | 750.000.000,00   | 95          | 825.000.000,00   | 97          | 875.000.000,00   | 97          | 875.000.000,00   | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BENUA LIMA      |
| Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan                 | Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan (Persentase)        | 85            | 90          | 90                              | 261.632.000,00   | 90          | 369.022.000,00   | 90          | 476.412.000,00   | 90          | 581.412.000,00   | 90          | 581.412.000,00   | 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan                 | Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan (Persentase)        | 80            | 85          | 90                              | 500.000.000,00   | 90          | 650.000.000,00   | 90          | 750.000.000,00   | 90          | 875.000.000,00   | 90          | 875.000.000,00   | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEMATANG KARAU  |
| Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan                 | Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan (Persentase)        | 10.500.000    | 39.075.000  | 70.000.000                      | 70.000.000,00    | 75.000.000  | 75.000.000,00    | 80.000.000  | 80.000.000,00    | 85.000.000  | 85.000.000,00    | 85.000.000  | 85.000.000,00    | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN AWANG           |
| Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan                 | Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan (Persentase)        | 77            | 78          | 79                              | 473.400.000,00   | 80          | 508.400.000,00   | 81          | 543.400.000,00   | 82          | 578.400.000,00   | 82          | 578.400.000,00   | 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN DUSUN TIMUR     |
| Persentase usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | Persentase usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (%) | 80            | 80          | 85                              | 20.368.200,00    | 90          | 22.500.000,00    | 90          | 25.000.000,00    | 95          | 28.000.000,00    | 95          | 28.000.000,00    | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PAKU            |
| Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan                 | Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam   | 100           | 100         | 100                             | 40.600.000,00    | 100         | 40.600.000,00    | 100         | 40.600.000,00    | 100         | 40.600.000,00    | 100         | 40.600.000,00    | 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PAJU EPAT       |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME  | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |            |                |            |                |            |                |            |                | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                  |
|--|---|---------------|------|---------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|
|  |   |               |      | 2026                            |                | 2027       |                | 2028       |                | 2029       |                | 2030       |                |  |
|  |   |               |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET     | PAGU           | TARGET     | PAGU           | TARGET     | PAGU           | TARGET     | PAGU           |  |
|  | perencanaan pembangunan (Persentase)  |               |      |                                 |                |            |                |            |                |            |                |            |                |  |
| Persentase pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat di desa                                     | Persentase pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat di desa (%)  | 75            | 77   | 80                              | 167.700.000,00 | 80         | 174.150.000,00 | 80         | 180.600.000,00 | 80         | 187.050.000,00 | 80         | 187.050.000,00 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN RAREN BATUAH    |
| Persentase usulan Masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan                         | Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan (%)                                  | 80            | 85   | 88                              | 153.500.000,00 | 89         | 185.000.000,00 | 90         | 195.500.000,00 | 93         | 225.000.000,00 | 95         | 225.000.000,00 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN KARUSEN JANANG  |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                       |   |               |      |                                 | 209.559.405,00 |            | 257.205.427,00 |            | 301.939.054,00 |            | 349.158.771,00 |            | 349.158.771,00 |  |
| Persentase Pengaduan masyarakat terkait Trantibum yang ditindaklanjuti                             | Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti (Persentase)                             | 90            | 90   | 95                              | 7.573.405,00   | 95         | 9.845.427,00   | 95         | 12.799.054,00  | 95         | 16.638.771,00  | 95         | 16.638.771,00  | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DUSUN TENGAH    |
| Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti                             | Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti (%)                                      | 90            | 95   | 95                              | 17.750.000,00  | 95         | 19.000.000,00  | 95         | 21.900.000,00  | 95         | 24.000.000,00  | 97         | 24.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BENUA LIMA      |
| Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti                             | Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti (Persentase)                             | 90            | 90   | 95                              | 18.756.000,00  | 95         | 19.700.000,00  | 95         | 22.900.000,00  | 95         | 25.000.000,00  | 95         | 25.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti                             | Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti (Persentase)                             | 85            | 90   | 95                              | 20.000.000,00  | 95         | 22.000.000,00  | 95         | 24.000.000,00  | 95         | 26.000.000,00  | 95         | 26.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEMATANG KARAU  |
| Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti                             | Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti (Persentase)                             | 0             | 0    | 23.000.000                      | 23.000.000,00  | 28.000.000 | 28.000.000,00  | 33.000.000 | 33.000.000,00  | 38.000.000 | 38.000.000,00  | 43.000.000 | 38.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN AWANG           |
| Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti                             | Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti (Persentase)                             | 78            | 80   | 82                              | 59.800.000,00  | 84         | 84.800.000,00  | 86         | 109.800.000,00 | 88         | 134.800.000,00 | 88         | 134.800.000,00 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN DUSUN TIMUR     |
| Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti                             | Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti (%)                                      | 80            | 80   | 81                              | 15.000.000,00  | 82         | 17.500.000,00  | 83         | 18.500.000,00  | 84         | 20.000.000,00  | 85         | 20.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PAKU            |
| Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti                             | Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti (Persentase)                             | 100           | 100  | 100                             | 10.000.000,00  | 100        | 10.000.000,00  | 100        | 10.000.000,00  | 100        | 10.000.000,00  | 100        | 10.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PAJU EPAT       |
| Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti                             | Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti (Persentase)                             | 80            | 85   | 86                              | 17.680.000,00  | 86         | 18.360.000,00  | 86         | 19.040.000,00  | 86         | 19.720.000,00  | 86         | 19.720.000,00  | 7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN RAREN BATUAH    |
| Persentase Pengaduan masyarakat terkait Trantibum yang ditindaklanjuti                             | Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti (Persentase)                             | 80            | 85   | 88                              | 20.000.000,00  | 88         | 28.000.000,00  | 88         | 30.000.000,00  | 90         | 35.000.000,00  | 90         | 35.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN KARUSEN JANANG  |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |   |               |      |                                 | 406.479.000,00 |            | 477.295.000,00 |            | 537.595.000,00 |            | 587.804.500,00 |            | 587.804.500,00 |  |
| Persentase Lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Lingkup Tugas Urusan Pemerintah Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah (%)            | 90            | 90   | 90                              | 3.500.000,00   | 95         | 4.550.000,00   | 95         | 5.915.000,00   | 95         | 7.689.500,00   | 95         | 7.689.500,00   | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DUSUN TENGAH    |
| Persentase lingkup tugas urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah | Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persentase) | 90            | 95   | 95                              | 72.000.000,00  | 95         | 78.000.000,00  | 95         | 85.000.000,00  | 97         | 90.000.000,00  | 97         | 90.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BENUA LIMA      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME  | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |            |                |            |                |            |                |            |                | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                  |
|--|---|---------------|------|---------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|
|  |   |               |      | 2026                            |                | 2027       |                | 2028       |                | 2029       |                | 2030       |                |  |
|  |   |               |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET     | PAGU           | TARGET     | PAGU           | TARGET     | PAGU           | TARGET     | PAGU           |  |
| Persentase lingkup tugas urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah | Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persentase) | 90            | 95   | 95                              | 42.529.000,00  | 95         | 58.000.000,00  | 95         | 75.000.000,00  | 95         | 85.000.000,00  | 95         | 85.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| Persentase lingkup tugas urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah | Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persentase) | 85            | 90   | 95                              | 70.000.000,00  | 95         | 75.000.000,00  | 95         | 85.000.000,00  | 95         | 90.000.000,00  | 95         | 90.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEMATANG KARAU  |
| Persentase lingkup tugas urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah | Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persentase) | 0             | 0    | 65.750.000                      | 65.750.000,00  | 70.000.000 | 70.000.000,00  | 75.000.000 | 75.000.000,00  | 80.000.000 | 80.000.000,00  | 85.000.000 | 80.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN AWANG           |
| Persentase lingkup tugas urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah | Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persentase) | 79            | 80   | 81                              | 54.000.000,00  | 82         | 69.000.000,00  | 83         | 84.000.000,00  | 84         | 99.000.000,00  | 84         | 99.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN DUSUN TIMUR     |
| Persentase Lingkup Tugas Urusan Pemerintah Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah   | Persentase Lingkup Tugas Urusan Pemerintah Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah (%)            | 80            | 80   | 85                              | 15.000.000,00  | 90         | 17.500.000,00  | 90         | 18.500.000,00  | 95         | 20.000.000,00  | 95         | 20.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PAKU            |
| Persentase lingkup tugas urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah | Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persentase) | 100           | 100  | 100                             | 25.000.000,00  | 100        | 25.000.000,00  | 100        | 25.000.000,00  | 100        | 25.000.000,00  | 100        | 25.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PAJU EPAT       |
| Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persentase) | 70            | 77   | 80                              | 38.700.000,00  | 80         | 52.245.000,00  | 80         | 54.180.000,00  | 80         | 56.115.000,00  | 80         | 56.115.000,00  | 7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN RAREN BATUAH    |
| Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik                                 | Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (%)  | 80            | 80   | 80                              | 20.000.000,00  | 85         | 28.000.000,00  | 90         | 30.000.000,00  | 93         | 35.000.000,00  | 95         | 35.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN KARUSEN JANANG  |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                       |   |               |      |                                 | 591.074.230,00 |            | 697.061.499,00 |            | 789.044.949,00 |            | 825.514.949,00 |            | 825.514.949,00 |  |
| Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa                        | Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase)                        | 95            | 95   | 95                              | 109.624.230,00 | 95         | 142.511.499,00 | 95         | 185.264.949,00 | 95         | 185.264.949,00 | 95         | 185.264.949,00 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DUSUN TENGAH    |
| Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                        | Persentase Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kecamatan (%)                              | 90            | 95   | 96                              | 35.000.000,00  | 96         | 38.500.000,00  | 96         | 42.000.000,00  | 98         | 46.000.000,00  | 98         | 46.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BENUA LIMA      |
| Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                        | Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase)                        | 85            | 85   | 90                              | 35.700.000,00  | 90         | 38.500.000,00  | 90         | 42.000.000,00  | 90         | 46.000.000,00  | 95         | 46.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                        | Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase)                        | 80            | 85   | 90                              | 150.000.000,00 | 90         | 170.000.000,00 | 90         | 190.000.000,00 | 90         | 200.000.000,00 | 95         | 200.000.000,00 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEMATANG KARAU  |
| Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                        | Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase)                        | 0             | 0    | 31.750.000                      | 31.750.000,00  | 35.000.000 | 35.000.000,00  | 40.000.000 | 40.000.000,00  | 45.000.000 | 45.000.000,00  | 50.000.000 | 45.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN AWANG           |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME  | INDIKATOR OUTCOME  | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                          |
|--|--|---------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|
|  |  |               |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |  |
|  |  |               |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |  |
| Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  | Persentase Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kecamatan (%)       | 80            | 82   | 84                              | 28.000.000,00     | 86     | 31.500.000,00     | 88     | 35.000.000,00     | 90     | 38.500.000,00     | 90     | 38.500.000,00     | 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN DUSUN TIMUR             |
| Persentase Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kecamatan   | Persentase Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kecamatan (%)       | 95            | 95   | 95                              | 26.000.000,00     | 96     | 28.000.000,00     | 98     | 30.000.000,00     | 99     | 32.000.000,00     | 100    | 32.000.000,00     | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PAKU                    |
| Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  | Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase) | 100           | 100  | 100                             | 30.000.000,00     | 100    | 30.000.000,00     | 100    | 30.000.000,00     | 100    | 30.000.000,00     | 100    | 30.000.000,00     | 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PAJU EPAT               |
| Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa  | Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase) | 90            | 90   | 90                              | 35.000.000,00     | 90     | 47.250.000,00     | 90     | 49.000.000,00     | 90     | 50.750.000,00     | 90     | 50.750.000,00     | 7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN RAREN BATUAH            |
| Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa  | Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase) | 80            | 88   | 90                              | 110.000.000,00    | 91     | 135.800.000,00    | 92     | 145.780.000,00    | 93     | 152.000.000,00    | 95     | 152.000.000,00    | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN KARUSEN JANANG          |
| 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |  |               |      |                                 | 12.766.752.201,00 |        | 14.341.600.669,00 |        | 15.825.852.069,00 |        | 65.318.106.841,00 |        | 17.318.106.841,00 |  |
| 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |  |               |      |                                 | 8.351.827.421,00  |        | 9.462.943.731,00  |        | 10.577.675.112,00 |        | 11.655.852.642,00 |        | 11.655.852.642,00 |  |
| Nilai Lakip Perangkat Daerah   | Nilai Lakip Perangkat Daerah (Poin)  | 69            | 70   | 71                              | 8.351.827.421,00  | 72     | 9.462.943.731,00  | 73     | 10.577.675.112,00 | 74     | 11.655.852.642,00 | 75     | 11.655.852.642,00 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.02 - PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   |  |               |      |                                 | 850.142.052,00    |        | 900.175.845,00    |        | 955.345.725,00    |        | 1.003.825.737,00  |        | 1.003.825.737,00  |  |
| Memperkokoh Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa   | Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)  | 0.00          | 0.00 | 5.25                            | 850.142.052,00    | 5.50   | 900.175.845,00    | 5.75   | 955.345.725,00    | 6.00   | 1.003.825.737,00  | 6.00   | 1.003.825.737,00  | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.03 - PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik |  |               |      |                                 | 2.232.236.775,00  |        | 2.477.783.635,00  |        | 2.635.245.746,00  |        | 50.845.367.639,00 |        | 2.845.367.639,00  |  |
| jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik  | Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik (Orang)                              | 230           | 240  | 250                             | 2.232.236.775,00  | 260    | 2.477.783.635,00  | 270    | 2.635.245.746,00  | 280    | 50.845.367.639,00 | 290    | 2.845.367.639,00  | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.04 - PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  |  |               |      |                                 | 158.233.968,00    |        | 201.453.766,00    |        | 255.543.786,00    |        | 306.988.554,00    |        | 306.988.554,00    |  |
| meningkatnya pemberdayaan dan kinerja organisasi kemasyarakatan  | Indeks Kinerja Ormas (Nilai)   | 0.00          | 0.00 | 60.00                           | 158.233.968,00    | 61.00  | 201.453.766,00    | 62.00  | 255.543.786,00    | 63.00  | 306.988.554,00    | 64.00  | 306.988.554,00    | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME  | INDIKATOR OUTCOME                   | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                             |        |                             |        |                             |        |                             |        |                             | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                         |
|--|-------------------------------------|---------------|------|---------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|---|
|  |                                     |               |      | 2026                            |                             | 2027   |                             | 2028   |                             | 2029   |                             | 2030   |                             |   |
|  |                                     |               |      | TARGET                          | PAGU                        | TARGET | PAGU                        | TARGET | PAGU                        | TARGET | PAGU                        | TARGET | PAGU                        |   |
| 8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                   |                                     |               |      |                                 | 423.655.731,00              |        | 495.876.239,00              |        | 545.574.964,00              |        | 605.726.735,00              |        | 605.726.735,00              |   |
| Memperkokoh ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta harmonisasi dalam kehidupan masyarakat                        | Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)   | 0.00          | 0.00 | 5.25                            | 423.655.731,00              | 5.50   | 495.876.239,00              | 5.75   | 545.574.964,00              | 6.00   | 605.726.735,00              | 6.00   | 605.726.735,00              | 8.01.0.00.0.00.01.000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |                                     |               |      |                                 | 750.656.254,00              |        | 803.367.453,00              |        | 856.466.736,00              |        | 900.345.534,00              |        | 900.345.534,00              |   |
| meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaa dini  | Indeks Kewaspadaan Nasional (Nilai) | 0.00          | 0.00 | 65.00                           | 750.656.254,00              | 66.00  | 803.367.453,00              | 67.00  | 856.466.736,00              | 68.00  | 900.345.534,00              | 69.00  | 900.345.534,00              | 8.01.0.00.0.00.01.000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| <b>TOTAL KESELURUHAN</b>   |                                     |               |      |                                 | <b>4.913.110.926.369,20</b> |        | <b>4.821.295.022.028,02</b> |        | <b>5.163.731.167.960,02</b> |        | <b>5.379.019.174.483,74</b> |        | <b>5.743.251.129.885,32</b> |   |

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2025.

## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

### Penetapan Indikator Makro

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, ditetapkan juga beberapa indikator makro yang menjadi tolak ukur penilaian dari Pemerintah Pusat. Indikator Makro penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Barito Timur disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.2. Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2030**

| No | Indikator Kinerja Makro            | Target |       |        |        |        |       | Kondisi Akhir |
|----|------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|---------------|
|    |                                    | 2025   | 2026  | 2027   | 2028   | 2029   | 2030  |               |
| 1  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) | 5,45   | 4,50  | 4,75   | 5,00   | 5,25   | 5,56  | 5,45          |
| 2  | Tingkat Kemiskinan (%)             | 5,08   | 4,92  | 4,81   | 4,68   | 4,59   | 4,5   | 5,08          |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)   | 3,04   | 2,82  | 2,6    | 2,38   | 2,16   | 1,94  | 3,04          |
| 4  | Indeks Pembangunan Manusia (Angka) | 74,11  | 74,45 | 75,05  | 75,69  | 76,08  | 76,58 | 76,58         |
| 5  | PDRB per kapita (juta Rp)          | 92,96  | 97,76 | 100,08 | 130,57 | 150,62 | 170   | 170           |
| 6  | Indeks Gini (Poin)                 | 0,31   | 0,309 | 0,307  | 0,305  | 0,299  | 0,297 | 0,297         |

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2025.

### Penetapan Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan tujuan dan sasaran RPJMD.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Kabupaten Barito Timur di masa kini maupun yang akan datang. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Barito Timur tahun 2024-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKD). IKU diambil dari indikator tujuan RPJMD, sedangkan RPJMD merupakan indikator sasaran dari

RPJMD. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2024-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut dan alat ukur untuk publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tolok ukur adalah diambil dari indikator tujuan yang telah ditetapkan terdahulu sebagaimana pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2030**

| No. | Indikator   | Satuan     | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |           |           |           |           | Ket. |
|-----|---|------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|     |   |            | 2025               | 2026         | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |      |
| 1   | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)  | Persen     | 5,45               | 4,50         | 4,75      | 5,00      | 5,25      | 5,56      |      |
| 2   | PDRB Per Kapita   | Rp Juta    | 92,96              | 97,76        | 100,08    | 130,57    | 150,62    | 170       |      |
| 3   | Kontribusi PDRB Sektor Unggulan   | Persen     | 1.00               | 1.20         | 1.50      | 2.00      | 2.00      | 3.00      |      |
| 4   | Indeks Kapabilitas Inovasi  | Persen     | 3,63               | 3,78         | 3,93      | 4,08      | 4,23      | 4,38      |      |
| 5   | Indeks Kemandirian Ekonomi Daerah   | Poin       | 65.00              | 67.00        | 70.00     | 73.00     | 75.00     | 75.00     |      |
| 6   | Persentase jumlah usaha kecil dan menengah  | Persen     | 15,20              | 15,45        | 15,70     | 15,95     | 16,20     | 16,45     |      |
| 7   | Persentase jumlah industri kecil dan menengah   | Persen     | 2,00               | 2,15         | 2,30      | 2,45      | 2,60      | 2,75      |      |
| 8   | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  | Persen     | 3.04               | 2.82         | 2.60      | 2.38      | 2.16      | 1.94      |      |
| 9   | Rasio Kewirausahaan   | Persen     | 3,5                | 4            | 4,5       | 5         | 5,5       | 6         |      |
| 10  | Indeks Pembangunan Daerah   | Poin       | 0.705              | 0.715        | 0.725     | 0.735     | 0.745     | 0.755     |      |
| 11  | Persentase perempuan, pemuda, dan difabel yang bekerja                                | Persen     | 55,00              | 60,00        | 65,00     | 70,00     | 75,00     | 80,00     |      |
| 12  | Indeks Gini   | Poin       | 0.31               | 0.309        | 0.307     | 0.305     | 0.299     | 0.297     |      |
| 13  | Pengeluaran per Kapita  | Rp         | 1.558.000          | 1.600.000    | 1.655.000 | 1.700.000 | 1.755.000 | 1.800.000 |      |
| 14  | Rata-Rata Wilayah <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP)                       | Poin       | 72,56              | 72.95        | 73.55     | 74,15     | 74,74     | 75.05     |      |
| 15  | Nilai Maturitas SPIP  | Angka      | 3,2                | 3,31         | 3,38      | 3,42      | 3,50      | 3,58      |      |
| 16  | Predikat Sistem SAKIP   | Predikat   | B                  | B            | B         | B         | A         | A         |      |
| 17  | Indeks Reformasi Birokrasi  | Angka      | 65.00              | 67,00        | 68,00     | 69,00     | 70,25     | 70,25     |      |
| 18  | Persentase Percepatan Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi                            | Persen     | 75                 | 80           | 85        | 90        | 93        | 95        |      |
| 19  | Indeks Pelayanan Publik   | Angka      | 78                 | 80           | 82        | 84        | 86        | 88        |      |
| 20  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  | Poin       | 82.45              | 82.75        | 83.05     | 83.35     | 83.70     | 83.90     |      |
| 21  | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  | Angka      | 2,65               | 2,70         | 2,75      | 2,78      | 2,81      | 2,85      |      |
| 22  | Indeks Kualitas Pelayanan Infrastruktur   | Poin       | 60                 | 60,10        | 60,20     | 60,30     | 60,40     | 60,50     |      |
| 23  | Tingkat Kemantapan Jalan  | Persen     | 67,23              | 67,73        | 68,23     | 68,73     | 69,23     | 70,00     |      |
| 24  | Kapasitas Air Baku  | (M3/Detik) | 2.00               | 2.15         | 2.30      | 2.35      | 2.50      | 2.65      |      |
| 25  | Rasio Elektrifikasi (Rumah Tangga Pengguna Listrik)                                   | Persen     | 99.03              | 99.15        | 99.50     | 99.75     | 99.80     | 100       |      |
| 26  | Persentase Layanan Internet   | Persen     | 60                 | 65           | 70        | 75        | 80        | 85        |      |
| 27  | Usia Harapan Hidup (UHH)  | Tahun      | 72,04              | 72,80        | 73,92     | 74,00     | 74,42     | 74,50     |      |
| 28  | Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna  | Persen     | 50.00              | 50.00        | 60.00     | 65.00     | 70.00     | 75.00     |      |
| 29  | Rasio Tenaga Kesehatan (Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan Per 1.000 Penduduk) | Persen     | 6.85               | 7.05         | 7.25      | 7.45      | 7,65      | 7.85      |      |

| No. | Indikator                                       | Satuan           | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |            |            |            |            | Ket. |
|-----|---|------------------|--------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|
|     |   |                  | 2025               | 2026         | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |      |
| 30  | Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)             | (Per 100.000 KH) | 0                  | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
| 31  | Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH)              | (Per 100.000 KH) | 12                 | 10           | 8          | 6          | 4          | 2          |      |
| 32  | Prevalensi Stunting                             | Persen           | 21,70              | 18,00        | 16,00      | 14,00      | 12,00      | 10,00      |      |
| 33  | Nilai Investasi berskala Nasional (PMA&PMDN)    | Triliun          | 1,3                | 1,4          | 1,5        | 1,6        | 1,7        | 1,8        |      |
| 34  | Indeks Ekonomi Hijau                            | Angka            | 40,00              | 45,00        | 50,00      | 55,00      | 60,00      | 65,00      |      |
| 35  | Penurunan Intensitas Emisi GRK                  | Ton CO2 eq       | 582.148,47         | 751.736,59   | 751.736,59 | 858.694,20 | 962.234,73 | 962.234,73 |      |
| 36  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)         | Angka            | 76,34              | 76,42        | 76,51      | 76,58      | 76,63      | 76,80      |      |
| 37  | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati        | Poin             | 0,60               | 0,61         | 0,62       | 0,63       | 0,64       | 0,65       |      |
| 38  | Indeks Risiko Bencana                           | Angka            | 106,50             | 100,53       | 99,26      | 98,83      | 97,98      | 92,04      |      |
| 39  | Indeks Pembangunan Manusia                      | Angka            | 74,11              | 74,45        | 75,05      | 75,69      | 76,08      | 76,58      |      |
| 40  | Rata-Rata Lama Sekolah                          | Tahun            | 9,21               | 9,21         | 9,22       | 9,22       | 9,23       | 9,25       |      |
| 41  | Harapan Lama Sekolah                            | Tahun            | 12,77              | 12,90        | 13,07      | 13,21      | 13,37      | 13,40      |      |
| 42  | Indeks Literasi Digital                         | Persen           | 60                 | 62           | 64         | 66         | 70         | 72         |      |
| 43  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat          | Angka            | 74,27              | 75,62        | 77,92      | 79,66      | 80,97      | 81,72      |      |
| 44  | Indeks Harmoni Indonesia                        | Angka            | 0,00               | 5,25         | 5,50       | 5,75       | 6,00       | 6,00       |      |
| 45  | Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan | Persen           | 13,00              | 15,00        | 17,00      | 19,00      | 20,00      | 22,00      |      |
| 46  | Indeks Pembangunan Pemuda                       | Angka            | 51,00              | 52,00        | 53,00      | 54,00      | 55,00      | 56,00      |      |
| 47  | Indeks Pembangunan Gender                       | Angka            | 89,04              | 89,51        | 90,53      | 90,78      | 91,00      | 91,61      |      |
| 48  | Tingkat Kemiskinan                              | Angka            | 5,08               | 4,92         | 4,81       | 4,68       | 4,59       | 4,5        |      |
| 49  | Jumlah Angka Kemiskinan                         | Angka            | 8,74               | 8,59         | 8,38       | 8,13       | 7,8        | 7,36       |      |
| 50  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)       | Persen           | 74,79              | 75,56        | 75,82      | 75,96      | 76,00      | 76,47      |      |
| 51  | Kepesertaan JKN (Jumlah UHC)                    | Persen           | 100                | 100          | 100        | 100        | 100        | 100        |      |
| 52  | Aset Perbankan Syariah/PDRB (%)                 | Persen           | 1,18               | 1,28         | 1,35       | 1,4        | 1,42       | 1,47       |      |

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2025.

**Tabel 4.4. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2030**

| No.      | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah     | Satuan     | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |            |            |            |            | Kondisi Akhir | Ket.                           |
|----------|--|------------|--------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|
|          |  |            | 2025               | 2026         | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |               |                                |
| <b>I</b> | <b>Aspek Geografi dan Demografi</b>            |            |                    |              |            |            |            |            |               |                                |
| 1        | Indeks Ketahanan Pangan                        | Angka      | 80,41              | 81,43        | 81,85      | 81,96      | 82         | 82,37      | 82,37         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 2        | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan       | Persen     | 10                 | 9            | 8          | 7          | 6          | 5          | 5             | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 3        | Konsumsi Listrik Per Kapita                    | Kwh/kapita | 830                | 894          | 950        | 975        | 1000       | 1200       | 1200          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 4        | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum | Persen     | 86,61              | 88,62        | 90,63      | 92,64      | 94,65      | 96,66      | 96,66         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 5        | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)        | Angka      | 76,34              | 76,42        | 76,51      | 76,58      | 76,63      | 76,80      | 76,34         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 6        | Indeks Kualitas Air                            | Poin       | 76,04              | 76,24        | 76,44      | 76,64      | 76,84      | 77,04      | 77,04         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 7        | Indeks Kualitas Udara                          | Poin       | 79,57              | 79,87        | 80,17      | 80,47      | 80,77      | 81,07      | 81,07         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 8        | Indeks Kualitas Lahan                          | Poin       | 68,34              | 68,41        | 68,48      | 68,55      | 68,62      | 68,62      | 68,62         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 9        | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman        | Persen     | 14,00              | 14,08        | 14,21      | 14,38      | 14,56      | 14,95      | 14,95         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 10       | Penurunan Intensitas Emisi GRK                 | Ton CO2 eq | 582.148,47         | 751.736,59   | 751.736,59 | 858.694,20 | 962.234,73 | 962.234,73 | 962.234,73    | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 11       | Indeks Resiko Bencana                          | Angka      | 106,50             | 100,53       | 99,26      | 98,83      | 97,98      | 92,04      | 106,50        | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 12       | Indeks Ketahanan Daerah                        | Angka      | 0,4                | 0,58         | 0,62       | 0,66       | 0,72       | 0,78       | 0,78          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 13       | Laju Pertumbuhan Penduduk                      | Persen     | 2,38               | 2,35         | 2,39       | 2,41       | 2,45       | 2,48       | 2,48          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 14       | Rasio Penduduk                                 | Persen     | 37,9               | 37,4         | 37         | 37,2       | 37,5       | 37,7       | 37,7          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |

| No.       | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                             | Satuan   | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |        |        |        |       | Kondisi Akhir | Ket.                           |
|-----------|--|----------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|-------|---------------|--------------------------------|
|           |  |          | 2025               | 2026         | 2027   | 2028   | 2029   | 2030  |               |                                |
| 15        | Kepadatan Penduduk   | Jiwa/Km2 | 30,98              | 31           | 31,05  | 31,1   | 31,15  | 31,2  | 31,2          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 16        | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan | Persen   | 100                | 100          | 100    | 100    | 100    | 100   | 100           | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| <b>II</b> | <b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>                                  |          |                    |              |        |        |        |       |               |                                |
| 1         | Laju Pertumbuhan Ekonomi   | Persen   | 5,45               | 4,50         | 4,75   | 5,00   | 5,25   | 5,56  | 5,56          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 2         | Tingkat Kemiskinan   | Persen   | 5,08               | 4,96         | 4,85   | 4,73   | 4,65   | 4,59  | 4,59          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 3         | Jumlah Angka Kemiskinan  | Angka    | 8.74               | 8.59         | 8.38   | 8.13   | 7.8    | 7.36  | 7.36          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 4         | PDRB Per Kapita  | Rp Juta  | 92,96              | 97,76        | 100,08 | 130,57 | 150,62 | 170   | 170           | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 5         | Kontribusi PDRB Sektor Unggulan  | Persen   | 1                  | 1.2          | 1.5    | 2      | 2      | 3     | 3             | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 6         | PDRB Sektor Pariwisata   | Persen   | 1                  | 1.2          | 1.5    | 2      | 2      | 3     | 3             | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 7         | Tingkat Pengangguran Terbuka   | Persen   | 2,95               | 2,66         | 2,62   | 2,58   | 2,54   | 2,45  | 2,45          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 8         | Indeks Gini  | Angka    | 0.31               | 0.309        | 0.307  | 0.305  | 0.299  | 0.297 | 0.297         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 9         | Indeks Pembangunan Manusia   | Angka    | 74,11              | 74,45        | 75,05  | 75,69  | 76,08  | 76,58 | 76,58         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 10        | Usia Harapan Hidup (UHH)   | Tahun    | 72,04              | 72,80        | 73,92  | 74,00  | 74,42  | 74,50 | 72,04         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 11        | Indeks Keluarga Sehat  | Angka    | 0,23               | 0,30         | 0,38   | 0,40   | 0,45   | 0,5   | 0,5           | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 12        | Prevalensi Stunting  | Persen   | 21.7               | 18           | 16     | 14     | 12     | 10    | 10            | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 13        | Rata-Rata Lama Sekolah   | Tahun    | 9,21               | 9,21         | 9,22   | 9,22   | 9,23   | 9,25  | 9,21          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |       |       |       |       | Kondisi Akhir | Ket.                           |
|-----|--|--------|--------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------------------------------|
|     |  |        | 2025               | 2026         | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |               |                                |
| 14  | Harapan Lama Sekolah   | Tahun  | 12,77              | 12,90        | 13,07 | 13,21 | 13,37 | 13,40 | 12,77         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 15  | Skor Kemampuan Literasi SD   | Persen | 60,46              | 62,96        | 65,46 | 67,96 | 70,46 | 72,96 | 72,96         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 16  | Skor Kemampuan Numerasi SD   | Persen | 54,46              | 57,36        | 60,26 | 63,16 | 66,06 | 68,96 | 68,96         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 17  | Skor Kemampuan Literasi SMP  | Persen | 70,26              | 71,36        | 72,46 | 73,56 | 74,66 | 75,76 | 75,76         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 18  | Skor Kemampuan Numerasi SMP  | Persen | 62,83              | 64,33        | 65,83 | 67,33 | 68,83 | 70,33 | 70,33         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 19  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat   | Angka  | 74,27              | 75,62        | 77,92 | 79,66 | 80,97 | 81,72 | 81,72         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 20  | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan  | Angka  | 22                 | 35           | 36    | 37    | 38    | 39    | 39            | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 21  | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  | Persen | 70                 | 75           | 80    | 85    | 90    | 95    | 72            | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 22  | Indeks Perlindungan Anak   | Angka  | 85                 | 85.71        | 86,63 | 86.73 | 87,00 | 87.75 | 87.75         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 23  | Indeks Pembangunan Gender  | Angka  | 89.04              | 89.51        | 90.53 | 90.78 | 91,00 | 91.61 | 91.61         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 24  | Indeks Pembangunan Pemuda  | Angka  | 51,00              | 52,00        | 53,00 | 54,00 | 55,00 | 56,00 | 56,00         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 25  | Indeks Profesionalitas ASN   | Persen | 59,50              | 61,75        | 62,78 | 63,80 | 65,60 | 66,70 | 66,70         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 26  | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan  | Angka  | 22                 | 35           | 36    | 37    | 38    | 39    | 39            | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 27  | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga   | Angka  | 75                 | 76           | 77    | 78    | 78    | 79    | 79            | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 28  | Persentase Penduduk yang Memiliki Sumber Penghasilan sebagai Pelaku/ Pendukung Kegiatan Seni | Persen | 0.49               | 0.51         | 0.53  | 0.55  | 0.57  | 0.59  | 0.59          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |

| No.        | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                     | Satuan | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |       |       |       |       | Kondisi Akhir | Ket.                           |
|------------|--|--------|--------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------------------------------|
|            |  |        | 2025               | 2026         | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |               |                                |
| <b>III</b> | <b>Aspek Daya Saing Daerah</b>                                 |        |                    |              |       |       |       |       |               |                                |
| 1          | Angka Ketergantungan   | Persen | 38,2               | 38           | 37,8  | 37,6  | 37,4  | 37,2  | 37,2          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 2          | Rasio PDRB Industri Pengolahan                                 | Persen | 2,21               | 2,44         | 2,63  | 2,84  | 3,01  | 3,23  | 3,23          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 3          | Rasio PDRB Akomodasi, makan dan minum                          | Persen | 1,55               | 1,63         | 1,69  | 1,72  | 1,75  | 1,82  | 1,82          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 4          | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif                                  | Persen | 1,00               | 1,2          | 1,5   | 2     | 2     | 3     | 3             | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 5          | Rasio Kewirausahaan  | Persen | 3,5                | 4            | 4,5   | 5     | 5,5   | 6     | 6             | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 6          | Persentase Jumlah Usaha Kecil dan Menengah                     | Persen | 15.2               | 15.45        | 15.7  | 15.95 | 16.2  | 16.45 | 16.45         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 7          | Persentase Jumlah Industri Kecil dan Menengah                  | Persen | 2                  | 2.15         | 2.3   | 2.45  | 2.6   | 2.75  | 2.75          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 8          | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)                      | Persen | 74,79              | 75,56        | 75,82 | 75,96 | 76,00 | 76,47 | 76,47         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 9          | Indeks Kapabilitas Inovasi                                     | Angka  | 3,63               | 3,78         | 3,93  | 4,08  | 4,23  | 4,38  | 4,38          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 10         | Persentase Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | Angka  | 60,00              | 60,10        | 60,2  | 60,3  | 60,4  | 60,5  | 60,5          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 11         | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak                         | Persen | 99,51              | 99,59        | 99,67 | 99,74 | 99,82 | 99,9  | 99,9          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 12         | Jumlah Desa Mandiri  | Jumlah | 5                  | 1            | 1     | 1     | 1     | 10    | 10            | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 13         | Indeks Pembangunan Kebudayaan                                  | Persen | 58,53              | 61.36        | 61.83 | 62.29 | 60,00 | 61.23 | 61.23         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 14         | Indeks Daya Saing Daerah                                       | Angka  | 3.13               | 3.28         | 3.35  | 3.47  | 3.54  | 3,58  | 3,58          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 15         | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB                               | Persen | 0,2                | 0,25         | 0,27  | 0,3   | 0,34  | 0,36  | 0,36          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |

| No.       | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |       |       |       |       | Kondisi Akhir | Ket.                           |
|-----------|---|--------|--------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------------------------------|
|           |   |        | 2025               | 2026         | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |               |                                |
| 16        | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) Ribu Orang                       | Orang  | 5.47               | 5.85         | 6.24  | 6.62  | 7     | 7.38  | 7.38          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 17        | Persentase Kebudayaan Daerah yang Dilestarikan  | Persen | 40                 | 60           | 65    | 70    | 75    | 75    | 75            | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| <b>IV</b> | <b>Aspek Pelayanan Umum</b>   |        |                    |              |       |       |       |       |               |                                |
| 1         | Indeks Reformasi Birokrasi  | Angka  | 65                 | 67,00        | 68,00 | 69,00 | 70,25 | 70,25 | 70,25         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 2         | Nilai Maturitas SPIP  | Angka  | 3,2                | 3,31         | 3,38  | 3,42  | 3,50  | 3,58  | 3,58          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 3         | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  | Angka  | 2,65               | 2,70         | 2,75  | 2,78  | 2,81  | 2,85  | 2,85          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 4         | Indeks Pelayanan Publik   | Angka  | 78                 | 80           | 82    | 84    | 86    | 88    | 88            | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 5         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  | Angka  | 82.45              | 82.75        | 83.05 | 83.35 | 83.7  | 83.9  | 83.9          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 6         | Persentase Penegakan Perda  | Persen | 81,68              | 81,74        | 81,76 | 81,85 | 81,90 | 82,00 | 82,00         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 7         | Persentase Capaian Aksi HAM   | Persen | 49,7               | 54,6         | 59,3  | 64,5  | 69,2  | 74,5  | 74,5          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 9         | Indeks Ketentraman dan Ketertiban   | Angka  | 82,76              | 82,30        | 82,50 | 82,60 | 82,75 | 82,95 | 82,95         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 10        | Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna  | Persen | 50                 | 50           | 60    | 65    | 70    | 75    | 75            | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 11        | Rasio tenaga kesehatan (Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan per 1.000 penduduk) | Angka  | 6,85               | 7,05         | 7,25  | 7,45  | 7,65  | 7,85  | 7,85          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 12        | Rasio Elektrifikasi (Rumah Tangga Pengguna Listrik)                                   | Persen | 99.03              | 99.15        | 99.5  | 99.75 | 99.8  | 100   | 100           | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 13        | Indeks Harmoni Indonesia  | Indeks | 0,00               | 5,25         | 5,50  | 5,75  | 6,00  | 6,00  | 6,00          | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 14        | Persentase Desa yang terlayani Internet   | Persen | 59                 | 67,86        | 68    | 69    | 70    | 100   | 100           | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                 | Satuan | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |       |       |       |       | Kondisi Akhir | Ket.                           |
|-----|--|--------|--------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------------------------------|
|     |  |        | 2025               | 2026         | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |               |                                |
| 15  | Tingkat Kemantapan Jalan                                   | Persen | 67.23              | 67.73        | 68.23 | 68.73 | 69.23 | 70    | 70            | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 16  | Akses Sanitasi Layak                                       | Persen | 20,01              | 21,81        | 23,61 | 25,41 | 27,21 | 29,05 | 29,05         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 17  | Akses Air Minum Layak                                      | Persen | 86,61              | 88,62        | 90,63 | 92,64 | 94,65 | 96,66 | 96,66         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 18  | Persentase Pengurangan Sampah                              | Persen | 40                 | 45           | 50    | 55    | 60    | 65    | 65            | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 19  | Persentase Atlet Berprestasi                               | Persen | 80                 | 89.25        | 89,50 | 90    | 91    | 91,25 | 91,25         | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
| 20  | Persentase Percepatan Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi | Persen | 75                 | 80           | 85    | 90    | 93    | 95    | 95            | Indikator Kinerja Daerah RPJMD |
|     | <b>Indikator Kinerja Kunci</b>                             |        |                    |              |       |       |       |       |               |                                |
| 1   | Angka Partisipasi Sekolah (5-6)                            | Persen | 87,50              | 90,47        | 93,02 | 95,57 | 98,12 | 100   | 100           | Pendidikan                     |
| 2   | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12                     | Persen | 99,27              | 99,50        | 99,71 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 99,76         | Pendidikan                     |
| 3   | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15                    | Persen | 96,94              | 97,93        | 98,77 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02         | Pendidikan                     |
| 4   | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan          | Persen | 26,74              | 30,84        | 34,94 | 39,04 | 43,14 | 47,24 | 47,24         | Pendidikan                     |
| 5   | Skor Kemampuan Literasi SD                                 | Persen | 60,46              | 62,96        | 65,46 | 67,96 | 70,46 | 72,96 | 72,96         | Pendidikan                     |
| 6   | Skor Kemampuan Numerasi SD                                 | Persen | 54,46              | 57,36        | 60,26 | 63,16 | 66,06 | 68,96 | 68,96         | Pendidikan                     |
| 7   | Skor Kemampuan Literasi SMP                                | Persen | 70,26              | 71,36        | 72,46 | 73,56 | 74,66 | 75,76 | 75,76         | Pendidikan                     |
| 8   | Skor Kemampuan Numerasi SMP                                | Persen | 62,83              | 64,33        | 65,83 | 67,33 | 68,83 | 70,33 | 70,33         | Pendidikan                     |
| 9   | Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B        | Persen | 68,43              | 77,52        | 89,65 | 100   | 100   | 100   | 100           | Pendidikan                     |
| 10  | Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4                | Persen | 59,35              | 60,10        | 60,85 | 61,60 | 62,35 | 63,10 | 63,10         | Pendidikan                     |
| 11  | Indeks Keamanan SD   | Persen | 79,84              | 80,74        | 81,64 | 82,54 | 83,44 | 84,34 | 84,34         | Pendidikan                     |
| 12  | Indeks Kebinekaan SD                                       | Persen | 73,84              | 74,84        | 75,84 | 76,84 | 77,84 | 78,84 | 78,84         | Pendidikan                     |
| 13  | Indeks Inklusivitas SD                                     | Persen | 63,18              | 65,68        | 68,18 | 70,68 | 73,18 | 75,68 | 75,68         | Pendidikan                     |
| 14  | Indeks Keamanan SMP  | Persen | 73,03              | 74,53        | 76,03 | 77,53 | 79,03 | 80,53 | 80,53         | Pendidikan                     |
| 15  | Indeks Kebinekaan SMP                                      | Persen | 73,63              | 74,63        | 75,63 | 76,63 | 77,63 | 78,63 | 78,63         | Pendidikan                     |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan               | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |             |             |             |             | Kondisi Akhir | Ket.       |
|-----|---|----------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|
|     |   |                      | 2025               | 2026         | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |               |            |
| 16  | Indeks Inklusivitas SMP   | Persen               | 61,21              | 63,61        | 66,01       | 68,41       | 70,81       | 73,21       | 73,21         | Pendidikan |
| 17  | Persentase Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang dihitung, dipetakan, ditata dan didistribusikan di Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Non-Formal /Kesetaraan | Persen               | 82,8               | 83,33        | 84,54       | 85,60       | 86,50       | 87,70       | 87,7          | Pendidikan |
| 18  | Persentase Perpanjangan ijin operasional pendidikan yang diterbitkan  | Persen               | 96                 | 96           | 96,60       | 97,05       | 97,80       | 98,25       | 98,25         | Pendidikan |
| 19  | Prevalensi anemia pada ibu hamil  | Persen               | 12,5               | 11,5         | 10,8        | 9,5         | 9           | 8,8         | 8,8           | Kesehatan  |
| 20  | Angka Kematian Ibu (AKI)  | Per 100.000 KH       | 183/100.000        | 182/100.000  | 181/100.000 | 180/100.000 | 179/100.000 | 178/100.000 | 178/100.000   | Kesehatan  |
| 21  | Angka Kematian Bayi (AKB)   | Per 1000 KH          | 16/1.000           | 12/1.000     | 11/1.000    | 10/1.000    | 9/1.000     | 8/1.000     | 8/1.000       | Kesehatan  |
| 22  | Persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah   | Persen               | 5,3                | 5,2          | 5,1         | 5,0         | 4,9         | 4,8         | 4,8           | Kesehatan  |
| 23  | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif.   | Persen               | 95                 | 97           | 98          | 100         | 100         | 100         | 100           | Kesehatan  |
| 24  | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) balita   | Persen               | 7                  | 6,8          | 6,5         | 6,2         | 6           | 5,8         | 5,8           | Kesehatan  |
| 25  | Persentase bayi gizi kurang   | Persen               | 1,94               | 1,93         | 1,92        | 1,91        | 1,90        | 1,88        | 1,88          | Kesehatan  |
| 26  | Cakupan program PIS-PK  | Persen               | 100                | 100          | 100         | 100         | 100         | 100         | 100           | Kesehatan  |
| 27  | Prevalensi <i>Tuberculosis</i>  | Per 100.000 Penduduk | 16                 | 15           | 14          | 13          | 12          | 11          | 11            | Kesehatan  |
| 28  | Persentase Kasus malaria ( <i>Annual Paracite Index-API</i> )   | Per 1.000 Penduduk   | 1                  | 1            | 1           | 1           | 1           | 1           | 1             | Kesehatan  |
| 29  | Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan  | Persen               | 80                 | 85           | 90          | 95          | 98          | 100         | 100           | Kesehatan  |
| 30  | Persentase desa yang mencapai UCI   | Persen               | 80                 | 85           | 90          | 95          | 98          | 100         | 100           | Kesehatan  |
| 31  | Angka kesakitan DBD   | Per 100.000 Penduduk | 1                  | 1            | 1           | 1           | 1           | 1           | 1             | Kesehatan  |
| 32  | Tingkat Pelayanan kesehatan pada usia lanjut  | Persen               | 95                 | 100          | 100         | 100         | 100         | 100         | 100           | Kesehatan  |
| 33  | Tingkat Pelayanan kesehatan penderita hipertensi  | Persen               | 100                | 100          | 100         | 100         | 100         | 100         | 100           | Kesehatan  |
| 34  | Tingkat Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM)   | Persen               | 100                | 100          | 100         | 100         | 100         | 100         | 100           | Kesehatan  |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |           |           |           |           | Kondisi Akhir | Ket.      |
|-----|--|--------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|     |  |        | 2025               | 2026         | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |               |           |
| 35  | Tingkat Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat                                    | Persen | 100                | 100          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100           | Kesehatan |
| 36  | Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar  | Persen | 100                | 100          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100           | Kesehatan |
| 37  | Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar  | Persen | 99                 | 100          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100           | Kesehatan |
| 38  | Persentase Puskesmas yang memiliki minimal 5 Jenis tenaga kesehatan                                    | Persen | 100                | 100          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100           | Kesehatan |
| 39  | Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang | Persen | 100                | 100          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100           | Kesehatan |
| 40  | Persentase sumber daya manusia kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya                               | Persen | 100                | 100          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100           | Kesehatan |
| 41  | Persentase elemen penilaian akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi                             | Persen | 80                 | 80           | 85        | 88        | 90        | 95        | 10            | Kesehatan |
| 42  | <i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i> / angka penggunaan tempat tidur  | Persen | 60                 | 60           | 65        | 70        | 75        | 80        | 80            | Kesehatan |
| 43  | <i>Average Length of Stay (ALOS)</i> /rata-rata lamanya pasien menginap                                | Persen | 5                  | 5,25         | 5,5       | 5,5       | 6         | 6         | 6             | Kesehatan |
| 44  | <i>Net Death Rate (NDR)</i> /angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar    | Persen | 10                 | 10           | 9         | 9         | 8         | 8         | 8             | Kesehatan |
| 45  | <i>Bed Turn Over (BTO)</i> /angka perputaran tempat tidur  | Persen | 50                 | 53           | 55        | 58        | 60        | 60        | 60            | Kesehatan |
| 46  | <i>Turn Over Internal (TOI)</i> /tenggang perputaran tempat tidur                                      | Persen | 3                  | 3            | 3         | 3         | 3         | 3         | 3             | Kesehatan |
| 47  | <i>Cost Recovery Rate (CRR)</i>  | Persen | 45                 | 50           | 55        | 60        | 65        | 68        | 68            | Kesehatan |
| 48  | Indeks kepuasan masyarakat (konversi) terhadap seluruh pelayanan                                       | Persen | 77                 | 78           | 80        | 82        | 85        | 85        | 85            | Kesehatan |
| 49  | Lulus akreditasi   | Status | Paripurna          | Paripurna    | Paripurna | Paripurna | Paripurna | Paripurna | Paripurna     | Kesehatan |
| 50  | Jumlah remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS)   | Jumlah | 55                 | 50           | 40        | 40        | 38        | 35        | 35            | Kesehatan |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |        |        |        |        | Kondisi Akhir | Ket.  |
|-----|--|--------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
|     |  |        | 2025               | 2026         | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |               |   |
| 51  | Persentase panjang jalan kondisi baik  | persen | 41,85              | 42,27        | 42,66  | 43,16  | 43,79  | 44,54  | 44,54         | PUPR dan Perkim                                     |
| 52  | Persentase Rumah Tangga yang terakses air bersih   | persen | 98,46              | 98,77        | 99,08  | 99,39  | 99,69  | 100,00 | 100,00        | PUPR dan Perkim                                     |
| 53  | Persentase Luas Kawasan Perumahan Kumuh  | persen | 0,13               | 0,11         | 0,09   | 0,07%  | 0,05   | 0,03   | 0,03          | PUPR dan Perkim                                     |
| 54  | Rasio elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik)  | persen | 99,03              | 99,15        | 99,50  | 99,75% | 99,80  | 100,00 | 100,00        | PUPR dan Perkim                                     |
| 55  | Persentase Jalan yang dibangun dalam wilayah kabupaten   | Persen | 8,18               | 16,36        | 24,54  | 32,72% | 40,90  | 49,08  | 49,08         | PUPR dan Perkim                                     |
| 56  | Persentase Jembatan yang dibangun dalam wilayah kabupaten  | Persen | 1,75               | 3,50         | 5,25   | 7,00%  | 8,75   | 10,50  | 10,50         | PUPR dan Perkim                                     |
| 57  | Persentase Jalan yang dipelihara dalam wilayah kabupaten   | Persen | 1,18               | 2,36         | 3,54   | 4,72%  | 5,90   | 7,08   | 7,08          | PUPR dan Perkim                                     |
| 58  | Terjaga dan Terlestarikannya Daerah Aliran Sungai di Barito Timur maupun terkelolanya kawasan rawa | Persen | 39,24              | 40,95        | 42,65  | 44,36% | 46,06  | 47,77  | 47,77         | PUPR dan Perkim                                     |
| 59  | Jumlah Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD                       | Persen | 85,68              | 87,13        | 89,98  | 92,13% | 94,28  | 96,43  | 96,43         | PUPR dan Perkim                                     |
| 60  | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan  | Persen | 86,60              | 88,35        | 90,10  | 91,85  | 93,60  | 95,35  | 95,35         | PUPR dan Perkim                                     |
| 61  | Persentase kawasan strategis yang tertata  | Persen | 83,33              | 85,68        | 88,03  | 90,38  | 92,72  | 95,08  | 95,08         | PUPR dan Perkim                                     |
| 62  | Tingkat ketersediaan Perda RDTRK Perkotaan dan Rencana RDTRK                                       | Persen | 64,00              | 70,00        | 75,00  | 80,00  | 90,00  | 95,00  | 95,00         | PUPR dan Perkim                                     |
| 63  | Persentase kesesuaian Ruang dengan RTRW dan RDTR   | Persen | 74,00              | 75,00        | 80,00  | 85,00  | 90,00  | 95,00  | 95,00         | PUPR dan Perkim                                     |
| 64  | Jumlah rumah layak huni  | Unit   | 28.002             | 27.982       | 27.962 | 27.942 | 27.922 | 27.902 | 27.902        | PUPR dan Perkim                                     |
| 65  | Persentase Wilayah Siaga Bencana   | Persen | 80                 | 82           | 84     | 86     | 88     | 90     | 90            | Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran |
| 66  | Persentase Dampak Bencana Yang Ditangani Dengan Baik   | Persen | 80                 | 85           | 87     | 89     | 91     | 93     | 93            | Penanggulangan Bencana Daerah dan                   |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |       |       |       |       | Kondisi Akhir | Ket.   |
|-----|---|--------|--------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------------|--|
|     |   |        | 2025               | 2026         | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |               |  |
|     |   |        |                    |              |       |       |       |       |               | Pemadam Kebakaran                            |
| 67  | Persentase Pengentasan Desa Tertinggal  | Persen | 100                | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100           | Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial     |
| 68  | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri  | Persen | 13,04              | 15,21        | 17,39 | 19,56 | 21,73 | 23,91 | 23,91         | Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial     |
| 69  | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | Persen | 5,00               | 5,10         | 5,95  | 6,80  | 7,65  | 8,30  | 8,30          | Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial     |
| 70  | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota             | Persen | 100                | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100           | Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial     |
| 71  | Tingkat penanganan permasalahan pertanahan transmigrasi   | Persen | 33                 | 34           | 34    | 35    | 35    | 36    | 36            | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |
| 72  | Persentase wilayah transmigrasi yang didata   | Persen | 100                | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100           | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |
| 73  | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja  | Persen | 7                  | 8            | 8     | 8     | 8     | 10    | 10            | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |
| 74  | Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan   | Persen | 76                 | 77           | 78    | 79    | 80    | 81    | 81            | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |
| 75  | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota                         | Persen | 12                 | 13           | 14    | 15    | 16    | 17    | 17            | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan       | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |      |      |      |      | Kondisi Akhir | Ket.   |
|-----|--|--------------|--------------------|--------------|------|------|------|------|---------------|--|
|     |  |              | 2025               | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |               |  |
| 76  | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen       | 87                 | 90           | 91   | 91   | 92   | 92   | 92            | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |
| 77  | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK                    | Persen       | 25                 | 25           | 26   | 27   | 28   | 29   | 29            | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |
| 78  | Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang dilakukan Pembinaan Ekonomi, Sosial Budaya Mental dan Spiritual   | Lokasi       | 2                  | 2            | 3    | 3    | 4    | 5    | 5             | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |
| 79  | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi   | Persen       | 7                  | 8            | 9    | 10   | 11   | 12   | 12            | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |
| 80  | Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nasional  | Persen       | 0.15               | 0.15         | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17          | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |
| 81  | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi  | Orang        | 120                | 120          | 120  | 120  | 120  | 120  | 120           | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |
| 82  | Jumlah ijin IKM  | Pelaku Usaha | 4                  | 4            | 5    | 5    | 5    | 6    | 6             | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |
| 83  | Jumlah IKM yang terdata di kabupaten   | Pelaku Usaha | 640                | 650          | 700  | 750  | 850  | 950  | 950           | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |
| 84  | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)   | Persen       | 25                 | 27           | 29   | 32   | 34   | 36   | 36            | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan       | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |      |      |      |      | Kondisi Akhir | Ket.   |
|-----|---|--------------|--------------------|--------------|------|------|------|------|---------------|--|
|     |   |              | 2025               | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |               |  |
| 85  | Jumlah Sarana-Prasarana Industri RPIK   | Unit         | 1                  | 1            | 1    | 1    | 1    | 1    | 1             | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |
| 86  | Jumlah pencari kerja yang mengikuti Pengelolaan Pelayanan Antar Kerja             | Orang        | 1300               | 1350         | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1600          | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |
| 87  | Persentase satuan pemukiman yang dibina   | Persen       | 40                 | 40           | 45   | 45   | 50   | 50   | 50            | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |
| 88  | Jumlah perusahaan yang telah melakukan pembentukan serikat pekerja/ serikat buruh | Perusahaan   | 4                  | 4            | 5    | 5    | 6    | 6    | 6             | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |
| 89  | Jumlah IKM yang terbina   | Pelaku Usaha | 20                 | 25           | 30   | 35   | 40   | 45   | 45            | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |
| 90  | Jumlah IKM mendapat akses untuk promosi produk                                    | Pelaku Usaha | 6                  | 7            | 8    | 9    | 10   | 11   | 11            | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |
| 91  | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat               | Orang        | 100                | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |
| 92  | Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Keatas                     | Persen       | 85                 | 86.5         | 86.8 | 87.1 | 87.4 | 88   | 88            | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |
| 93  | Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek                     | Orang        | 4440               | 4450         | 4460 | 4470 | 4480 | 4490 | 4490          | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |
| 94  | Persentase penerapan Sistem Layanan IPK, RTKD dan BKOL yang telah dilaksanakan    | Persen       | 85                 | 86           | 87   | 88   | 89   | 90   | 90            | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan                                 | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |      |      |      |      | Kondisi Akhir | Ket.   |
|-----|--|--|--------------------|--------------|------|------|------|------|---------------|--|
|     |  |  | 2025               | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |               |  |
| 95  | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan  | Orang                                  | 45                 | 50           | 55   | 60   | 65   | 70   | 70            | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian                     |
| 96  | Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan  | Orang                                  | 230                | 240          | 250  | 260  | 270  | 280  | 280           | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian                     |
| 97  | Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja     | Orang                                  | 28                 | 29           | 29   | 30   | 30   | 31   | 31            | Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian                     |
| 98  | Total Fertility Rate (TFR)   | Jumlah Kelahiran per Wanita Usia Subur | 2.15               | 2.15         | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15          | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 99  | Indek Pembangunan Keluarga (IBangga)   | Skala (0-100)                          | 66.7               | 67.9         | 69   | 70.1 | 71.1 | 71.3 | 71.3          | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 100 | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)  | Skala (0-100)                          | 75.1               | 80.6         | 84.1 | 86.3 | 87.7 | 88.5 | 88.5          | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 101 | Proporsi Kebutuhan KB KB yang terpenuhi menurut Alat/cara KB Modern (Demand Satisfied)                     | persen                                 | 95.7               | 95.8         | 95.9 | 96.1 | 96.2 | 96.5 | 96.5          | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 102 | Angka remaja perempuan melahirkan pada usia 15-19 tahun per 1.000 remaja perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19) | persen                                 | 23.7               | 21.7         | 19.8 | 18.6 | 17.7 | 16.8 | 16.8          | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak                        |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                      | Satuan           | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |       |       |       |       | Kondisi Akhir | Ket.   |
|-----|---|------------------|--------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------------|--|
|     |   |                  | 2025               | 2026         | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |               |  |
|     |   |                  |                    |              |       |       |       |       |               | dan Keluarga Berencana   |
| 103 | Persentase Kehamilan tidak diinginkan (KTD)                                     | persen           | 8.3                | 7.9          | 7.5   | 7.1   | 6.8   | 6.5   | 6.5           | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 104 | Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja                                 | Skala<br>(0-100) | 89.6               | 90.4         | 91.1  | 91.7  | 92.3  | 92.6  | 92.6          | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 105 | Indeks Lansia Berdaya   | Skala<br>(0-100) | 60.8               | 62.4         | 63.9  | 65.3  | 66.6  | 67.3  | 67.3          | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 106 | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri                                 | persen           | 51.1               | 52.5         | 53.8  | 55.1  | 56.3  | 57.1  | 57.1          | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 107 | Median Usia Kawin Pertama (MUKP) wanita   | Tahun            | 20.9               | 20.9         | 20.9  | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95         | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 108 | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) | persen           | 77.3               | 77.5         | 77.85 | 78    | 78.3  | 78.5  | 78.5          | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan    | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |       |       |       |       | Kondisi Akhir | Ket.   |
|-----|---|-----------|--------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------------|--|
|     |   |           | 2025               | 2026         | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |               |  |
| 109 | Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | Persen    | 20                 | 21           | 21.25 | 21.5  | 21.75 | 22    | 22            | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 110 | Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)  | persen    | 10.2               | 10           | 9.8   | 9.5   | 8     | 7.5   | 7.5           | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 111 | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal melakukan pendidikan kependudukan | Kerjasama | 6                  | 7            | 10    | 15    | 20    | 25    | 25            | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 112 | Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga                                       | persen    | 44                 | 45           | 75    | 80    | 85    | 90    | 90            | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 113 | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)  | persen    | 90                 | 90           | 90    | 90    | 90    | 90    | 90            | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 114 | indeks pemenuhan hak anak (IPHA)  | persen    | 53.84              | 53.85        | 53.86 | 53.87 | 53.88 | 53.89 | 53.89         | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |        |        |        |        | Kondisi Akhir | Ket.   |
|-----|--|--------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--|
|     |  |        | 2025               | 2026         | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |               |  |
| 115 | Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan | persen | 100                | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100           | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 116 | Pembelajaran keluarga (puspaga) yang berperspektif gender dan anak sesuai standar                  | persen | 100                | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100           | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 117 | Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah.  | Persen | 53.29              | 53.3         | 53.31  | 53.32  | 53.33  | 53.34  | 53.34         | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 118 | Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR.   | Persen | 30                 | 30           | 30     | 30     | 30     | 30     | 30            | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 119 | Partisipasi Perempuan di lembaga swasta  | Persen | 46.9               | 47           | 40.43  | 40.45  | 40.47  | 40.49  | 40.49         | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 120 | Rasio KDRT   | Rasio  | 0.0112             | 0,0110       | 0.0109 | 0.0108 | 0.0107 | 0.0106 | 0.0106        | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 121 | Tingkat Partisipasi Angkatan kerja(TPAK) perempuan   | Persen | 57.2               | 57,30        | 57.4   | 57.5   | 57.6   | 57.7   | 57.7          | Pemberdayaan Perempuan,  |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |      |      |      |      | Kondisi Akhir | Ket.   |
|-----|--|--------|--------------------|--------------|------|------|------|------|---------------|--|
|     |  |        | 2025               | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |               |  |
|     |  |        |                    |              |      |      |      |      |               | Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana                         |
| 122 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD  | persen | 13                 | 14           | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5           | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 123 | Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan konferhensif                           | persen | 88.1               | 88.2         | 89.5 | 89   | 89.5 | 90   | 90            | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 124 | Persentase Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang dibina | Persen | 100                | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 125 | Persentase Data Gender dan Anak yang dikelola secara uptodate  | Persen | 100                | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 126 | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dibina                                | Persen | 100                | 100          | 80   | 82   | 85   | 90   | 90            | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 127 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani kabupaten  | persen | 100                | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak                        |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |       |       |       |       | Kondisi Akhir | Ket.   |
|-----|---|--------|--------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------------|--|
|     |   |        | 2025               | 2026         | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |               |  |
|     |   |        |                    |              |       |       |       |       |               | dan Keluarga Berencana   |
| 128 | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan konferhensif  | persen | 60                 | 70           | 70.5  | 80    | 85.5  | 90    | 90            | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 129 | Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten Layak Anak  | poin   | 500                | 600          | 630   | 640   | 650   | 700   | 700           | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 130 | Presentase fasilitas perhubungan yang berfungsi dengan baik   | persen | 20                 | 25           | 30    | 35    | 40    | 45    | 45            | Perhubungan  |
| 131 | Presentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan  | persen | 30                 | 55           | 65    | 70    | 75    | 85    | 85            | Perhubungan  |
| 132 | Jumlah Penyelenggaraan Angkutan Umum yang di Normalisasi  | Unit   | -                  | 35           | 35    | 40    | 45    | 60    | 60            | Perhubungan  |
| 133 | Presentase Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas   | Persen | -                  | 73,33        | 80,00 | 83,33 | 85,00 | 90,00 | 90            | Perhubungan  |
| 134 | Presentase Kendaraan Bermotor Angkutan Umum/Barang Yang Laik Jalan  | Persen | 35,15              | 40,18        | 55,36 | 62,50 | 70,54 | 82,14 | 82,14         | Perhubungan  |
| 135 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kendaraan Bermotor yang dipelihara  | Unit   | 9                  | 9            | 9     | 9     | 9     | 9     | 9             | Perhubungan  |
| 136 | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia   | Unit   | 3                  | 1            | 1     | 1     | 1     | 1     | 1             | Perhubungan  |
| 137 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah   | Indeks | 75,78              | 76,00        | 76,21 | 76,42 | 76,63 | 77,80 | 77,80         | Lingkungan Hidup   |
| 138 | Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten | Persen | 52,2               | 75           | 76    | 77    | 78    | 79    | 79            | Lingkungan Hidup   |
| 139 | Persentase sampah yang tertangani   | Persen | 35                 | 30           | 25    | 20    | 15    | 15    | 15            | Lingkungan Hidup   |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan  | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |       |      |      |      | Kondisi Akhir | Ket.  |
|-----|--|---------|--------------------|--------------|-------|------|------|------|---------------|---|
|     |  |         | 2025               | 2026         | 2027  | 2028 | 2029 | 2030 |               |   |
| 140 | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan  | Persen  | 100                | 100          | 100   | 100  | 100  | 100  | 100           | Kependudukan dan Pencatatan Sipil                   |
| 141 | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan   | Persen  | 100                | 100          | 100   | 100  | 100  | 100  | 100           | Kependudukan dan Pencatatan Sipil                   |
| 142 | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan   | Persen  | 100                | 100          | 100   | 100  | 100  | 100  | 100           | Kependudukan dan Pencatatan Sipil                   |
| 143 | Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan  | Persen  | 60                 | 70           | 75    | 80   | 85   | 90   | 90            | Kependudukan dan Pencatatan Sipil                   |
| 144 | Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)  | Persen  | 30                 | 50           | 60    | 70   | 80   | 90   | 90            | Kependudukan dan Pencatatan Sipil                   |
| 145 | Persentase anak usi 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA  | Persen  | 65                 | 70           | 80    | 85   | 90   | 95   | 95            | Kependudukan dan Pencatatan Sipil                   |
| 146 | Jumlah data profil kependudukan yang disusun   | Dokumen | 2                  | 2            | 2     | 2    | 2    | 2    | 2             | Kependudukan dan Pencatatan Sipil                   |
| 147 | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan   | Persen  | 100                | 100          | 100   | 100  | 100  | 100  | 100           | Kependudukan dan Pencatatan Sipil                   |
| 148 | Jumlah Berita Kegiatan Pemda Yang Dipublikasikan Pada Media Massa/Elektronik   | Media   | 55                 | 55           | 55    | 55   | 55   | 55   | 55            | Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik |
| 149 | Jumlah Konte/Berita Pemda yang Di Publikasikan   | Berita  | 7000               | 7100         | 7200  | 7300 | 7400 | 7500 | 7500          | Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik |
| 150 | Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan desiminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah | Persen  | 50                 | 55           | 60    | 65   | 70   | 75   | 75            | Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik |
| 151 | Persentase ASN pengelola SPBE ditingkat pemerintah Kabupate/Kota yang mendapatkan  | Persen  | 75                 | 88,89        | 88,89 | 95   | 95   | 95   | 95            | Komunikasi dan Informatika                          |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                   | Satuan      | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |       |       |       |       | Kondisi Akhir | Ket.   |
|-----|--|-------------|--------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------------|--|
|     |  |             | 2025               | 2026         | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |               |  |
|     | pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas     |             |                    |              |       |       |       |       |               | Persandian dan Statistik                               |
| 152 | Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Seluler                              | Persen      | 62.14              | 63.11        | 64.08 | 65.05 | 66.02 | 66.99 | 66.99         | Komunikasi dan Informatika<br>Persandian dan Statistik |
| 153 | Jumlah lulusan pelatihan teknis bidang keamanan siber dan sandi              | Orang       | 2                  | 3            | 3     | 3     | 3     | 3     | 3             | Komunikasi dan Informatika<br>Persandian dan Statistik |
| 154 | Indeks Pembangunan Statistik (IPS)   | Poin        | 2.2                | 2.3          | 2.4   | 2.5   | 2.6   | 2.7   | 2.7           | Komunikasi dan Informatika<br>Persandian dan Statistik |
| 155 | Indeks Keamanan Informasi  | Indeks      | 19                 | 20           | 21    | 22    | 23    | 24    | 24            | Komunikasi dan Informatika<br>Persandian dan Statistik |
| 156 | Jumlah Berita Kegiatan Pemda Yang Dipublikasikan Pada Media Massa/Elektronik | Media       | 55                 | 55           | 55    | 55    | 55    | 55    | 55            | Komunikasi dan Informatika<br>Persandian dan Statistik |
| 157 | Jumlah Investor PMA & PMDN yang Berinvestasi                                 | Badan Usaha | 52                 | 56           | 62    | 68    | 74    | 80    | 80            | Penanaman Modal dan PTSP                               |
| 158 | Jumlah Perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang terbit      | Dokumen     | 1555               | 1585         | 1650  | 1700  | 1800  | 1900  | 1900          | Penanaman Modal dan PTSP                               |
| 159 | Jumlah Perizinan berusaha berbasis risiko yang diawasi                       | Izin Usaha  | 150                | 154          | 160   | 165   | 170   | 178   | 178           | Penanaman Modal dan PTSP                               |
| 160 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah   | Peringkat   | 90 Point*          | BB           | A     | A     | AA    | AA    | AA            | Kebudayaan, Pariwisata,                                |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                            | Satuan       | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |       |       |       |       | Kondisi Akhir | Ket.   |
|-----|---|--------------|--------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------------|--|
|     |   |              | 2025               | 2026         | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |               |  |
|     |   |              |                    |              |       |       |       |       |               | Kepemudaan, dan Olahraga                         |
| 161 | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**           | Persen       | 9                  | 11           | 13    | 15    | 17    | 20    | 20            | Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga |
| 162 | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kepemudaan**                | Persen       | 6                  | 8            | 8.5   | 9     | 11    | 13    | 13            | Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga |
| 163 | Persentase peningkatan jumlah atlet**                                 | Persen       | 86.5               | 90           | 90.5  | 90.8  | 91    | 92.5  | 92.5          | Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga |
| 164 | Jumlah pagelaran dan penyelenggaraan festival budaya daerah           | Kegiatan     | 8                  | 5            | 5     | 6     | 6     | 7     | 7             | Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga |
| 165 | Jumlah benda, situs dan cagar budaya yang dipelihara                  | Unit         | 237                | 238          | 238   | 240   | 245   | 250   | 250           | Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga |
| 166 | Persentase obyek kebudayaan daerah yang dimanfaatkan**                | Persen       | 35                 | 50           | 55    | 60    | 65    | 70    | 70            | Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga |
| 167 | Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan**                          | Persen       | 4                  | 5            | 5     | 5     | 6     | 6     | 6             | Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga |
| 168 | Jumlah Objek Wisata Daerah yang dilakukan penataan dan pengembangan** | obyek wisata | 2,500              | 3,500        | 3,600 | 3,600 | 3,700 | 3,800 | 3,800         | Kebudayaan, Pariwisata,                          |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan       | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |        |        |        |        | Kondisi Akhir | Ket.   |
|-----|---|--------------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--|
|     |   |              | 2025               | 2026         | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |               |  |
|     |   |              |                    |              |        |        |        |        |               | Kepemudaan, dan Olahraga                         |
| 169 | Jumlah Sarana dan Pasarana penunjang Objek Wisata Daerah persentase pelaku Usaha Pariwisata yang difasilitasi | unit         | 1.3                | 1.4          | 1.5    | 1.6    | 1.7    | 1.8    | 1.8           | Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga |
| 170 | Persentase pelaku usaha pariwisata yang difasilitasi  | persen       | 40                 | 50           | 52     | 53     | 55     | 57     | 57            | Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga |
| 171 | Jumlah Sarana dan Pasarana penunjang Objek Wisata Daerah persentase pelaku Usaha Pariwisata yang difasilitasi | Unit         | 1.3                | 1.4          | 1.5    | 1.6    | 1.7    | 1.8    | 1.8           | Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga |
| 172 | Persentase pelaku usaha pariwisata yang difasilitasi  | persen       | 40                 | 50           | 52     | 53     | 55     | 57     | 57            | Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga |
| 173 | Jumlah Kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara)   | persen       | 25,000             | 27,000       | 28,000 | 28,500 | 29,000 | 30,000 | 30,000        | Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga |
| 174 | Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun   | orang        | 39                 | 40.3         | 41.7   | 43.2   | 44.6   | 46     | 46            | Perpustakaan dan Kearsipan                       |
| 175 | Jumlah Perpustakaan yang ada di daerah  | Perpustakaan | 236                | 237          | 238    | 239    | 240    | 241    | 241           | Perpustakaan dan Kearsipan                       |
| 176 | Jumlah koleksi judul buku   | Judul Buku   | 9.9                | 10           | 10.1   | 10.15  | 10.2   | 10.25  | 10.25         | Perpustakaan dan Kearsipan                       |
| 177 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilaian yang memiliki sertifikat                                       | orang        | 278                | 280          | 282    | 284    | 286    | 288    | 288           | Perpustakaan dan Kearsipan                       |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                           | Satuan       | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |            |            |         |        | Kondisi Akhir | Ket.                           |
|-----|--|--------------|--------------------|--------------|------------|------------|---------|--------|---------------|--------------------------------|
|     |  |              | 2025               | 2026         | 2027       | 2028       | 2029    | 2030   |               |                                |
| 178 | Jumlah perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)       | Perpustakaan | 157                | 158          | 159        | 160        | 161     | 162    | 162           | Perpustakaan dan Kearsipan     |
| 179 | Jumlah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan           | orang        | 205                | 305          | 405        | 505        | 605     | 705    | 705           | Perpustakaan dan Kearsipan     |
| 180 | Jumlah anggota perpustakaan daerah                                   | orang        | 21.5               | 21.55        | 21.6       | 21.65      | 21.7    | 21.75  | 21.75         | Perpustakaan dan Kearsipan     |
| 181 | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)                                | Nilai        | 65,00              | 66,00        | 67,00      | 68,00      | 69,00   | 70,00  | 70            | Perpustakaan dan Kearsipan     |
| 182 | Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip             | Persen       | 100                | 100          | 100        | 100        | 100     | 100    | 100           | Perpustakaan dan Kearsipan     |
| 183 | Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip          | Persen       | 100                | 100          | 100        | 100        | 100     | 100    | 100           | Perpustakaan dan Kearsipan     |
| 184 | Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik | Persen       | 100                | 100          | 100        | 100        | 100     | 100    | 100           | Perpustakaan dan Kearsipan     |
| 185 | Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN      | Persen       | 10                 | 15           | 20         | 25         | 30      | 35     | 35            | Perpustakaan dan Kearsipan     |
| 186 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                       | Point        | 80                 | 80           | 80         | 80         | 80      | 80     | 80            | Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 187 | Penguatan Cadangan Pangan  | Poin         | 90                 | 90           | 92         | 94         | 96      | 98     | 98            | Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 188 | Persentase Daerah Rawan Pangan                                       | Kegiatan     | 1                  | 1            | 1          | 1          | 1       | 1      | 1             | Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 189 | Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita                            | Persen       | 100                | 100          | 100        | 100        | 100     | 100    | 100           | Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 190 | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan                             | Persen       | 122,25             | 122,5        | 125,5      | 130        | 130     | 135    | 135           | Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 191 | Luas sawah   | Ha           | 7129,5             | 7,485,975    | 78,602,738 | 82,532,874 | 8665,95 | 9099,2 | 7129,5        | Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 192 | Luas Ladang  | Ha           | 1430,1             | 1,501,605    | 15,766,853 | 1655,52    | 1738,3  | 1825,2 | 1430,1        | Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah        | Satuan     | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |            |            |            |            | Kondisi Akhir | Ket.                            |
|-----|---|------------|--------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------|
|     |   |            | 2025               | 2026         | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |               |                                 |
| 193 | Produktivitas Padi Sawah                          | Kw/Ha      | 436,308            | 4,493,972    | 46,287,916 | 4,767,655  | 491,068    | 50,58      | 436,308       | Pertanian dan Ketahanan Pangan  |
| 194 | Produktivitas Padi Ladang                         | Kw/Ha      | 307,249            | 3,164,665    | 32,596,046 | 3,357,393  | 345,811    | 35,619     | 307,249       | Pertanian dan Ketahanan Pangan  |
| 195 | Produksi Padi                                     | Ton        | 40.231             | 42.242       | 44.354     | 46.572     | 48.901     | 51.346     | 40.231        | Pertanian dan Ketahanan Pangan  |
| 196 | Luas Lahan Perkebunan Karet Rakyat                | Ha         | 54.474,82          | 54.504,82    | 54.524,82  | 54.544,82  | 54.564,82  | 54.584,82  | 54.474,82     | Pertanian dan Ketahanan Pangan  |
| 197 | Luas Lahan Perkebunan Kopi Rakyat                 | Ha         | 105,94             | 115,94       | 125,94     | 135,94     | 145,94     | 155,94     | 105,94        | Pertanian dan Ketahanan Pangan  |
| 198 | Luas Lahan Perkebunan Kakao Rakyat                | Ha         | 256,01             | 266,01       | 276,01     | 286,01     | 296,01     | 306,01     | 256,01        | Pertanian dan Ketahanan Pangan  |
| 199 | Luas Lahan Perkebunan Sawit Rakyat                | Ha         | 1.746,45           | 1.946,45     | 2.146,45   | 2.346,45   | 2.546,45   | 2.746,45   | 1.746,45      | Pertanian dan Ketahanan Pangan  |
| 200 | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap                 | Ton        | 937,47             | 956,22       | 970,56     | 984,90     | 999,24     | 1.013,58   | 1.013,58      | Perikanan dan Peternakan        |
| 201 | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                | Ton        | 1.726,51           | 1.761,04     | 1.787,46   | 1.813,88   | 1.840,30   | 1.866,72   | 1.866,72      | Perikanan dan Peternakan        |
| 202 | Konsumsi ikan                                     | Kg/Kpt/Thn | 45,00              | 47,00        | 47,94      | 48,88      | 49,82      | 50,76      | 50,76         | Perikanan dan Peternakan        |
| 203 | Jumlah produksi daging dan telur                  |            |                    |              |            |            |            |            |               |                                 |
|     | - Daging  | ton        | 664,88             | 681,51       | 691,73     | 701,95     | 712,17     | 722,39     | 722,39        | Perikanan dan Peternakan        |
|     | - Telur   | kg         | 528.098,75         | 541.301,22   | 549.420,74 | 557.540,26 | 565.659,78 | 573.779,30 | 573.779,30    | Perikanan dan Peternakan        |
| 204 | Jumlah Revitalisasi Pasar Desa dan Kabupaten      | Unit       | 4                  | 5            | 6          | 7          | 8          | 9          | 9             | Perdagangan, Koperasi, dan UMKM |
| 205 | Persentase Perkembangan Harga Komoditas Bapokting | Persen     | 2.5                | 2.5          | 2.5        | 3          | 3          | 3          | 3             | Perdagangan, Koperasi, dan UMKM |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan       | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |      |      |      |      | Kondisi Akhir | Ket.                            |
|-----|--|--------------|--------------------|--------------|------|------|------|------|---------------|---------------------------------|
|     |  |              | 2025               | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |               |                                 |
| 206 | Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen   | Persen       | 3                  | 2.8          | 2.6  | 2.4  | 2.2  | 2    | 2             | Perdagangan, Koperasi, dan UMKM |
| 207 | Persentase Koperasi berkualitas  | Persen       | 23.6               | 25.3         | 27.4 | 29.7 | 32.5 | 35   | 35            | Perdagangan, Koperasi, dan UMKM |
| 208 | Persentase UMKM Naik Kelas   | Persen       | 10                 | 12           | 14.3 | 16.5 | 18   | 20   | 20            | Perdagangan, Koperasi, dan UMKM |
| 209 | Fasilitasi Pelaku Usaha yang mendapatkan Akses Modal   | Pelaku Usaha | 20                 | 40           | 50   | 60   | 80   | 250  | 250           | Perdagangan, Koperasi, dan UMKM |
| 210 | Persentase kualitas Kebijakan Kesejahteraan rakyat   | Persen       | 91                 | 95           | 95   | 95   | 95   | 95   | 95            | Sekretariat Daerah              |
| 211 | Persentase Kinerja Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan  | Persen       | 90                 | 95           | 95   | 95   | 95   | 99   | 99            | Sekretariat Daerah              |
| 212 | Persentase Bahan Kebijakan Lingkup kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti   | Persen       | 91                 | 95           | 95   | 95   | 95   | 95   | 95            | Sekretariat Daerah              |
| 213 | Persentase produk perundang-undangan serta dokumentasi pembinaan dan pengawasan produk hukum yang difasilitasi dan dikoordinasikan | Persen       | 91                 | 95           | 95   | 95   | 95   | 95   | 95            | Sekretariat Daerah              |
| 214 | Persentase Bahan Kebijakan Lingkup perekonomian yang ditindaklanjuti   | Persen       | 99                 | 99           | 95   | 95   | 95   | 95   | 95            | Sekretariat Daerah              |
| 215 | Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pembangunan yang ditindaklanjuti  | Persen       | 90                 | 90           | 95   | 95   | 95   | 95   | 95            | Sekretariat Daerah              |
| 216 | Persentase batas desa yang telah tertata   | Persen       | 90                 | 95           | 95   | 95   | 95   | 95   | 95            | Sekretariat Daerah              |
| 217 | Persentase Penyusunan Pedoman Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah                             | Persen       | 99                 | 99           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           | Sekretariat Daerah              |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan  | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |      |      |      |      | Kondisi Akhir | Ket.                                 |
|-----|---|---------|--------------------|--------------|------|------|------|------|---------------|--------------------------------------|
|     |   |         | 2025               | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |               |                                      |
| 218 | Persentase bahan kebijakan lingkup Pemerintahan yang ditindaklanjuti  | Persen  | 91                 | 95           | 95   | 95   | 95   | 95   | 95            | Sekretariat Daerah                   |
| 219 | Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)   | Indeks  | 80                 | 90           | 93   | 95   | 97   | 99   | 99            | Sekretariat Daerah                   |
| 220 | Nilai Survey Kepuasan pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD  | Persen  | 73                 | 75           | 76   | 76   | 77   | 78   | 78            | Sekretariat DPRD                     |
| 221 | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  | positif | 95                 | 95           | 95   | 96   | 97   | 97   | 97            | Perencanaan Pembangunan Daerah       |
| 222 | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA  | positif | 95                 | 95           | 95   | 96   | 97   | 97   | 97            | Perencanaan Pembangunan Daerah       |
| 223 | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan   | positif | 95                 | 95           | 95   | 96   | 97   | 97   | 97            | Perencanaan Pembangunan Daerah       |
| 224 | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD  | positif | 96                 | 96           | 96   | 97   | 97   | 98   | 98            | Perencanaan Pembangunan Daerah       |
| 225 | Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah | positif | 70                 | 70           | 70   | 72   | 74   | 76   | 76            | Perencanaan Pembangunan Daerah       |
| 226 | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan   | positif | 0                  | 0            | 0    | 40   | 42   | 44   | 44            | Perencanaan Pembangunan Daerah       |
| 227 | Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel   | Persen  | 100                | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           | Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 228 | Persentase Penatausahaan BMD Yang Berkualitas   | Persen  | 100                | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           | Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |      |      |      |      | Kondisi Akhir | Ket.   |
|-----|---|--------|--------------------|--------------|------|------|------|------|---------------|--|
|     |   |        | 2025               | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |               |  |
| 229 | Persentase Terpenuhinya Semua Kegiatan Layanan Kesekretariatan                              | Persen | 100                | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           | Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah             |
| 230 | Persentase penerimaan Pendapatan Daerah.  | persen | 90                 | 90           | 98   | 99   | 100  | 100  | 100           | Pendapatan Daerah                                |
| 231 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal                               | Persen | 75                 | 78           | 80   | 83   | 85   | 90   | 90            | Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 232 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural             | Persen | 80                 | 85           | 80   | 90   | 95   | 100  | 100           | Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 233 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah                                     | Persen | 90                 | 93           | 95   | 97   | 98   | 100  | 100           | Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 234 | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah  | Persen | 90                 | 93           | 95   | 97   | 98   | 100  | 100           | Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 235 | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah                        | Persen | 80                 | 83           | 85   | 90   | 95   | 100  | 100           | Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 236 | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terhadap Perangkat Daerah yang Diselesaikan | persen | 67,59              | 80           | 83   | 86   | 88   | 90   | 90            | Inspektorat                                      |
| 237 | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang Diselesaikan                  | persen | 85,61              | 88           | 90   | 91   | 92   | 93   | 93            | Inspektorat                                      |
| 238 | Nilai Maturitas SPIP  | LEVEL  | 3                  | 3,20         | 3,25 | 3,30 | 3,35 | 3,40 | 3,40          | Inspektorat                                      |
| 239 | Nilai Kapabilitas APIP  | LEVEL  | 3                  | 3,20         | 3,25 | 3,30 | 3,35 | 3,40 | 3,40          | Inspektorat                                      |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan  | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |      |      |      |      | Kondisi Akhir | Ket.                   |
|-----|--|---------|--------------------|--------------|------|------|------|------|---------------|------------------------|
|     |  |         | 2025               | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |               |                        |
| 240 | Indeks Pencegahan Korupsi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur                   | Persen  | 71                 | 80           | 83   | 87   | 90   | 95   | 95            | Inspektorat            |
| 241 | Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP                          | Dokumen | 96                 | 97           | 98   | 99   | 100  | 100  | 100           | Kecamatan Awang        |
| 242 | Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan                         | Persen  | 85                 | 86           | 86   | 87   | 88   | 88   | 88            | Kecamatan Awang        |
| 243 | Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti                             | Persen  | 80                 | 82           | 83   | 84   | 85   | 85   | 85            | Kecamatan Awang        |
| 244 | Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persen  | 80                 | 82           | 83   | 84   | 85   | 85   | 85            | Kecamatan Awang        |
| 245 | Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa                        | Persen  | 80                 | 82           | 83   | 84   | 85   | 85   | 85            | Kecamatan Awang        |
| 246 | Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP                          | Dokumen | 90                 | 90           | 90   | 90   | 90   | 90   | 90            | Kecamatan Dusun Tengah |
| 247 | Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan                         | Persen  | 95                 | 95           | 95   | 95   | 95   | 95   | 95            | Kecamatan Dusun Tengah |
| 248 | Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti                             | Persen  | 90                 | 93           | 93   | 93   | 93   | 93   | 93            | Kecamatan Dusun Tengah |
| 249 | Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persen  | 90                 | 93           | 93   | 93   | 93   | 93   | 93            | Kecamatan Dusun Tengah |
| 250 | Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa                        | Persen  | 95                 | 95           | 95   | 95   | 95   | 95   | 95            | Kecamatan Dusun Tengah |
| 251 | Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP                          | Dokumen | 95                 | 96           | 96   | 96   | 98   | 98   | 98            | Kecamatan Benua Lima   |
| 252 | Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan                         | Persen  | 95                 | 95           | 95   | 95   | 97   | 97   | 97            | Kecamatan Benua Lima   |
| 253 | Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti                             | Persen  | 95                 | 95           | 95   | 95   | 95   | 97   | 97            | Kecamatan Benua Lima   |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan  | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |      |      |      |      | Kondisi Akhir | Ket.                     |
|-----|--|---------|--------------------|--------------|------|------|------|------|---------------|--------------------------|
|     |  |         | 2025               | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |               |                          |
| 254 | Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persen  | 95                 | 95           | 95   | 95   | 97   | 97   | 97            | Kecamatan Benua Lima     |
| 255 | Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa                        | Persen  | 95                 | 96           | 96   | 96   | 98   | 98   | 98            | Kecamatan Benua Lima     |
| 256 | Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP                          | Dokumen | 80                 | 81           | 82   | 83   | 84   | 85   | 85            | Kecamatan Paku           |
| 257 | Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa         | Persen  | 80                 | 85           | 90   | 90   | 95   | 95   | 95            | Kecamatan Paku           |
| 258 | Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti                             | Persen  | 80                 | 81           | 82   | 83   | 84   | 85   | 85            | Kecamatan Paku           |
| 259 | Persentase Lingkup Tugas Urusan Pemerintah Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah   | Persen  | 80                 | 85           | 90   | 90   | 95   | 95   | 95            | Kecamatan Paku           |
| 260 | Persentase Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kecamatan                     | Persen  | 95                 | 95           | 96   | 98   | 99   | 100  | 100           | Kecamatan Paku           |
| 261 | Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP                          | Dokumen | 85                 | 88           | 89   | 90   | 93   | 95   | 95            | Kecamatan Karusen Janang |
| 262 | Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan                         | Persen  | 85                 | 88           | 89   | 90   | 93   | 95   | 95            | Kecamatan Karusen Janang |
| 263 | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                        | Persen  | 88                 | 90           | 91   | 92   | 93   | 95   | 95            | Kecamatan Karusen Janang |
| 264 | Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti                             | Persen  | 85                 | 88           | 89   | 90   | 93   | 95   | 95            | Kecamatan Karusen Janang |
| 265 | Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik                                 | Persen  | 80                 | 80           | 85   | 90   | 93   | 95   | 95            | Kecamatan Karusen Janang |
| 266 | Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Yang Dilaksanakan Sesuai SOP                          | Dokumen | 96                 | 97           | 98   | 99   | 100  | 100  | 100           | Kecamatan Pematang Karau |
| 267 | Persentase Usulan Masyarakat Yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan                         | Persen  | 85                 | 86           | 87   | 88   | 89   | 90   | 90            | Kecamatan Pematang Karau |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan  | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |      |      |      |      | Kondisi Akhir | Ket.                      |
|-----|--|---------|--------------------|--------------|------|------|------|------|---------------|---------------------------|
|     |  |         | 2025               | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |               |                           |
| 268 | Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Trantibum Yang Ditindaklanjuti                             | Persen  | 85                 | 86           | 87   | 88   | 90   | 90   | 90            | Kecamatan Pematang Karau  |
| 269 | Persentase Lingkup Tugas Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persen  | 90                 | 91           | 92   | 93   | 94   | 95   | 95            | Kecamatan Pematang Karau  |
| 270 | Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                        | Persen  | 85                 | 86           | 88   | 89   | 91   | 95   | 95            | Kecamatan Pematang Karau  |
| 271 | Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Yang Dilaksanakan Sesuai SOP                          | Dokumen | 96                 | 97           | 98   | 99   | 100  | 100  | 100           | Kecamatan Dusun Timur     |
| 272 | Persentase Usulan Masyarakat Yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan                         | Persen  | 78                 | 79           | 80   | 81   | 82   | 84   | 84            | Kecamatan Dusun Timur     |
| 273 | Persentase Lingkup Tugas Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persen  | 80                 | 81           | 82   | 83   | 84   | 85   | 85            | Kecamatan Dusun Timur     |
| 274 | Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                        | Persen  | 82                 | 84           | 86   | 88   | 89   | 90   | 90            | Kecamatan Dusun Timur     |
| 275 | Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Trantibum Yang Ditindaklanjuti                             | Persen  | 80                 | 82           | 84   | 86   | 88   | 90   | 90            | Kecamatan Dusun Timur     |
| 276 | Jumlah Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Yang Dilaksanakan Sesuai SOP                          | Dokumen | 96                 | 97           | 98   | 99   | 100  | 100  | 100           | Kecamatan Patangkep Tutui |
| 277 | Persentase Usulan Masyarakat Yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan                         | Persen  | 85                 | 90           | 90   | 90   | 90   | 90   | 90            | Kecamatan Patangkep Tutui |
| 278 | Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Trantibum Yang Ditindaklanjuti                             | Persen  | 90                 | 95           | 95   | 95   | 95   | 95   | 95            | Kecamatan Patangkep Tutui |
| 279 | Persentase Lingkup Tugas Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persen  | 90                 | 95           | 95   | 95   | 95   | 95   | 95            | Kecamatan Patangkep Tutui |
| 280 | Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                        | Persen  | 85                 | 90           | 90   | 90   | 90   | 90   | 90            | Kecamatan Patangkep Tutui |
| 281 | Jumlah Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Yang Dilaksanakan Sesuai SOP                          | Dokumen | 95                 | 95           | 95   | 95   | 95   | 95   | 95            | Kecamatan Paju Epat       |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan  | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |      |      |      |      | Kondisi Akhir | Ket.                                      |
|-----|--|---------|--------------------|--------------|------|------|------|------|---------------|---|
|     |  |         | 2025               | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |               |   |
| 282 | Persentase Usulan Masyarakat Yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan                         | Persen  | 82                 | 83           | 85   | 85   | 85   | 85   | 85            | Kecamatan Paju Epat                       |
| 283 | Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Trantibum Yang Ditindaklanjuti                             | Persen  | 95                 | 95           | 95   | 95   | 95   | 95   | 95            | Kecamatan Paju Epat                       |
| 284 | Persentase Lingkup Tugas Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persen  | 85                 | 85           | 85   | 85   | 85   | 85   | 85            | Kecamatan Paju Epat                       |
| 285 | Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                        | Persen  | 90                 | 90           | 90   | 90   | 90   | 90   | 90            | Kecamatan Paju Epat                       |
| 286 | Persentase Pembinaan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Di Desa                                     | Persen  | 85                 | 86           | 87   | 88   | 89   | 90   | 90            | Kecamatan Raren Batuah                    |
| 287 | Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Yang Dilaksanakan Sesuai SOP                          | Dokumen | 96                 | 97           | 98   | 99   | 100  | 100  | 100           | Kecamatan Raren Batuah                    |
| 288 | Persentase Usulan Masyarakat Yang Diakomodir Dalam Perencanaan Pembangunan                         | Persen  | 77                 | 80           | 80   | 80   | 80   | 80   | 80            | Kecamatan Raren Batuah                    |
| 289 | Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Trantibum Yang Ditindaklanjuti                             | Persen  | 85                 | 86           | 86   | 86   | 86   | 86   | 86            | Kecamatan Raren Batuah                    |
| 290 | Persentase Lingkup Tugas Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persen  | 77                 | 80           | 80   | 80   | 80   | 80   | 80            | Kecamatan Raren Batuah                    |
| 291 | Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                        | Persen  | 90                 | 90           | 90   | 90   | 90   | 90   | 90            | Kecamatan Raren Batuah                    |
| 292 | Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Yang Dilaksanakan Sesuai SOP                      | Persen  | 85                 | 86           | 87   | 88   | 89   | 90   | 90            | Kecamatan Raren Batuah                    |
| 293 | Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politik  | Orang   | 240                | 250          | 260  | 270  | 280  | 290  | 290           | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas |
| 294 | Nilai Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)  | Poin    | 0                  | 5.25         | 5.5  | 5.75 | 6    | 6    | 6             | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas |

| No. | Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                   | Satuan | Kondisi Awal RPJMD | Target Tahun |       |       |       |       | Kondisi Akhir | Ket.                                      |
|-----|--|--------|--------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------------|---|
|     |  |        | 2025               | 2026         | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |               |   |
| 295 | Nilai Indeks Kinerja Ormas (IKO)   | Poin   | 0                  | 60           | 61    | 62    | 63    | 64    | 64            | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas |
| 296 | Indeks Kewaspadaan Nasional  | Poin   | 0                  | 65           | 66    | 67    | 68    | 69    | 69            | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas |
| 297 | Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani | Persen | 82,76              | 82,30        | 82,50 | 82,60 | 82,75 | 82,95 | 82,95         | Satuan Polisi Pamong Praja                |
| 298 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                                 | Persen | 81,68              | 81,68        | 81,76 | 81,85 | 81,90 | 82,00 | 82,00         | Satuan Polisi Pamong Praja                |

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2025.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah, Masyarakat, maupun Dunia Usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Barito Timur secara berkesinambungan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen yang menjabarkan rencana kerja Pemerintah Daerah yang akan dicapai selama masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagai acuan proses pembangunan daerah.

#### **5.1 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Dokumen ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Barito Timur, beserta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya pada tahun 2025-2029 serta masa transisi tahun 2030;
- 2) Dokumen ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3) Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur bertanggung jawab untuk menjamin konsistensi antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029, dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur;
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap capaian kinerja untuk mengukur pencapaian target atau rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 harus dilakukan secara konsisten dan tepat;

- 5) Bagi program prioritas Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun prioritas nasional, dimana terdapat kemungkinan bahwa Pemerintah Daerah tidak mampu mengalokasikan anggaran terhadap program tersebut, maka dalam hal pembiayaannya dapat dilakukan melalui berbagai macam skema, antara lain melalui kerjasama dengan Badan Usaha (Public Private Partnership), Corporate Social Responsibility (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), maupun Kerjasama Kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah, baik dalam negeri maupun lembaga-lembaga internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 5.2 Skema Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaannya tentu proses monitoring dan evaluasi perlu dilakukan dalam rangka pengendalian proses pembangunan daerah serta pemantauan capaian target pembangunan sebagaimana telah dalam dokumen RPJMD ini. Terdapat tiga jenis monitoring dan evaluasi yang harus dilaksanakan, yaitu proses monitoring yang dilakukan setiap tahun yang juga diselaraskan dengan proses pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya, proses peninjauan kembali yang dapat dilakukan ketika terjadi kondisi *force majeure* selama masa pembangunan, dan proses evaluasi yang harus dilakukan sebelum proses perencanaan RPJMD pada periode selanjutnya. Detail proses monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029**

| No. | Jenis              | Tahun |      |      |      |      | Target   |
|-----|--------------------|-------|------|------|------|------|--|
|     |                    | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1   | Monitoring         | ✓     | ✓    | ✓    | ✓    |      | Penyelarasan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD dengan RKPD; beserta monitoring capaian indikator kinerja dalam RPJMD dan RKPD                             |
| 2   | Peninjauan Kembali |       |      | ✓    |      |      | Review terhadap dokumen RPJMD dapat dilakukan jika terjadi kondisi <i>force majeure</i> yang tidak bisa terhindarkan   |
| 3   | Evaluasi           |       |      |      |      | ✓    | Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target arah pembangunan dan pencapaian target indikator pembangunan, sebelum proses perencanaan RPJMD periode selanjutnya dilaksanakan |

Sumber: Diolah dari Tim Penyusun, 2025

Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 nantinya harus dilakukan dengan prinsip demokratis, artinya dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah. Hal ini difungsikan untuk

meningkatkan partisipasi pembangunan oleh berbagai pihak. Beberapa forum dapat dirancang dalam upaya meningkatkan partisipasi pembangunan untuk dapat mengevaluasi ketercapaian pembangunan setiap tahunnya. Beberapa indikasi forum untuk monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2. Forum Monitoring dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Barito Timur 2025-2029**

| No. | Jenis   | Sasaran  | Waktu  |
|-----|---|--|--|
| 1   | Forum Pengendalian Pembangunan Daerah                     | Forum ini disusun untuk memberikan ruang partisipasi pembangunan kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah baik dari sisi eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat, akademisi, serta media, dll | Forum dilaksanakan setiap tahun pasca hasil monitoring kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan |
| 2   | Forum Monitoring dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah | Forum dilakukan pada internal Pemerintah Daerah antar Organisasi Perangkat Daerah  | Dilaksanakan pada setiap tahun dan bertepatan dengan awal tahun anggaran                                       |
| 3   | Publikasi dan Sosialisasi Hasil Pembangunan Daerah        | Dilaksanakan dengan sasaran melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan  | Dilaksanakan setelah dua forum pengendalian pembangunan daerah   |

Sumber: Diolah dari Tim Penyusun, 2025.